RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Realisasi Pendapatan pada Tahun 2023 sebesar Rp6.016.822.709.302,80 atau 110,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.455.797.012.840,00.

Realisasi Belanja pada Tahun 2023 sebesar Rp6.348.088.886.775,55 atau mencapai 78,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.073.595.821.174,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 adalah Rp3.218.313.739.958,40 atau 100,02% dari estimasi penerimaan Rp3.217.798.808.334,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 adalah Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp600.000.000.000,00

SiLPA Tahun 2023 adalah Rp2.887.047.562.485,65 dari anggaran sebesar Rp0,00.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih pada Tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.217.798.808.333,55 ditambah Defisit (Rp331.266.177.472,75) ditambah pembiayaan netto (dengan SILPA awal terpasang seluruhnya) sebesar Rp3.218.313.739.958,40 sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp2.887.047.562.485,65.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.795.343.373.200,55 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3.366.252.008.061,24; Investasi Jangka Panjang senilai Rp561.111.946.265,10; Aset Tetap (netto) sebesar Rp11.293.945.000.957,50; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp1.574.034.417.916,71. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp120.619.754.390,35 dan Rp16.674.723.618.810,20.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan suplus/defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.477.301.243.144,24 sedangkan jumlah beban adalah Rp4.421.948.436.089,90 sehingga terdapat surplus dari kegiatan operasi sebesar Rp2.055.352.807.054,34. Kegiatan non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp6.778.686.918,00) dan (Rp37.318.031.053,00) sehingga entitas mengalami surplus sebesar Rp2.011.256.089.083,34.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu entitas melalui Laporan Arus Kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan serta transitoris selama suatu periode akuntansi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.711.524.226.000,06; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah sebesar (Rp2.042.790.403.472,81); Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah Rp514.931.624,79; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah Rp0,06. Sehingga penurunan kas selama Tahun 2023 adalah Rp330.751.245.847,90.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp14.588.356.971.293,36 ditambah Surplus LO Rp2.011.256.089.083,34 ditambah dampak kumulatif senilai Rp75.110.558.433,50 sehingga Ekuitas akhir pada Tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp16.674.723.618.810,20.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Bojonegoro, 9 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO SEKRETARIAT DAERAH

NURUL AZIZAH

Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd

ADRIYANTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 2
DAFTAR LAMPIRAN 6
BAB I PENDAHULUAN 7
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 7
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 7
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 8
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 9
2.1. EKONOMI MAKRO 9
2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN 11
2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 11
2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 22
2.2.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 32
2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL DAN MONETER 33
2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM ENTITAS PELAPOR 34
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 38
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 38
3.1.1. PENDAPATAN DAERAH 38
3.1.2. BELANJA DAERAH 40
3.1.3. PEMBIAYAAN 43
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN 44
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 45
4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 45
4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 46
4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 47
4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 58
BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN 59
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 59
5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 103
5.3. NERACA 106
5.4. LAPORAN OPERASIONAL 198
5.5. LAPORAN ARUS KAS 219
5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 225
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 226
BAB VII PENUTUP 231

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Indikator Target Kinerja Makro Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 9
Tabel 2. 2. Proyeksi PDRB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 10
Tabel 2. 3. Perbandingan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 33
Tabel 2. 4. Perbandingan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 33
Tabel 2. 5. Perbandingan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 34
Tabel 2. 6. Anggaran Pendapatan pada APBD dan P-APBD Tahun 2023 35
Tabel 2. 7. Anggaran Belanja pada APBD dan P-APBD Tahun 2023 36
Tabel 2. 8. Anggaran Pembiayaan pada APBD dan P-APBD Tahun 2023 37
Tabel 3. 1. Pendapatan Daerah 38
Tabel 3. 2. Pendapatan Asli Daerah 38
Tabel 3. 3. Realisasi Pendapatan menurut Organisasi 39
Tabel 3. 4. Belanja Daerah 40
Tabel 3. 5. Realisasi Belanja Menurut Organisasi 41
Tabel 4. 1. Daftar Nama OPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi 45
Tabel 4. 2. Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi 46
Tabel 5. 1. Pendapatan Asli Daerah 59
Tabel 5. 2. Pendapatan Pajak Daerah 59
Tabel 5. 3. Pendapatan Retribusi Daerah 60
Tabel 5. 4. Rincian Retribusi Jasa Umum 60
Tabel 5. 5. Rincian Retribusi Jasa Usaha 62
Tabel 5. 6. Rincian Perizinan Tertentu 64
Tabel 5. 7. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 65
Tabel 5. 8. Lain-Lain PAD yang Sah 65
Tabel 5. 9. Pendapatan Transfer 66
Tabel 5. 10. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 66
Tabel 5. 11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 68
Tabel 5. 12. Pendapatan Bagi Hasil 69
Tabel 5. 13. Rincian Bantuan Keuangan 69
Tabel 5. 14. Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 70
Tabel 5. 15. Belanja Operasi 71
Tabel 5. 16. Belanja Pegawai 72
Tabel 5. 17. Rincian Belanja Pegawai Per SKPD 72
Tabel 5. 18. Belanja Barang dan Jasa 74
Tabel 5. 19. Belanja Barang dan Jasa Per SKPD 76
Tabel 5. 20. Belanja Hibah 78
Tabel 5. 21. Rincian Belanja Hibah Per OPD 79
Tabel 5. 22. Belanja Bantuan Sosial 88
Tabel 5. 23. Belanja Modal 89
Tabel 5. 24. Belanja Modal Tanah 90
Tabel 5. 25. Belanja Modal Tanah Per SKPD 90
Tabel 5. 26. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91
Tabel 5. 27. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD 92
Tabel 5. 28. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95
Tabel 5. 29. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD 95

Tabel 5. 30. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan....96
Tabel 5. 31. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD....96
Tabel 5. 32. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya....97
Tabel 5. 33. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD....98
Tabel 5. 34. Belanja Transfer....99
Tabel 5. 35. Belanja Bagi Hasil....99
Tabel 5. 36. Belanja Bantuan Keuangan....99
Tabel 5. 37. Penerimaan Pembiayaan....101
Tabel 5. 38. Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat....102
Tabel 5. 39. Pengeluaran Pembiayaan....102
Tabel 5. 40. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)....104
Tabel 5. 41. Kas di Bendahara Penerimaan....107
Tabel 5. 42. Kas di Bendahara BLUD....108
Tabel 5. 43. Kas di Bendahara FKTP....108
Tabel 5. 44 Kas Dana BOP PAUD....110
Tabel 5. 45. Rincian Saldo Kas Dana BOK Kesehatan....110
Tabel 5. 46. Kas Dana BOS....111
Tabel 5. 47. Piutang Pajak....111
Tabel 5. 48. Piutang Retribusi....113
Tabel 5. 49. Bagian Lancar Piutang SKPD....113
Tabel 5. 50. Piutang Lainnya....117
Tabel 5. 51. Piutang Klaim Kesehatan....119
Tabel 5. 52. Penyisihan Piutang Tak Tertagih....121
Tabel 5. 53. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih....123
Tabel 5. 54. Persediaan....133
Tabel 5. 55. Rincian Persediaan Bahan Kimia....134
Tabel 5. 56. Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor....135
Tabel 5. 57. Rincian Persediaan Bahan Cetak....137
Tabel 5. 58. Rincian Persediaan Benda Pos....137
Tabel 5. 59. Rincian Persediaan Alat Listrik....137
Tabel 5. 60. Rincian Persediaan Obat-obatan dan BMHP....138
Tabel 5. 61. Persediaan dari Belanja Hibah....139
Tabel 5. 62. Rincian Persediaan Bahan Lainnya....140
Tabel 5. 63. Investasi Permanen....141
Tabel 5. 64. Penyertaan Modal PD BPR Bojonegoro....142
Tabel 5. 65. Penyertaan Modal PDAM Bojonegoro....145
Tabel 5. 66. Struktur Modal PT ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 22 Juni 2009....148
Tabel 5. 67. Struktur Modal PT ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 31 Januari 2017....148
Tabel 5. 68. Penyertaan Modal PT Asri Dharma Sejahtera....151
Tabel 5. 69. Penyertaan Modal PT Bank Jatim....152
Tabel 5. 70. Penyertaan Modal PT Bojonegoro Bangun Sarana....154
Tabel 5. 71. Penyertaan Modal BPR Jatim....156
Tabel 5. 72. Penyertaan Modal PT Griya Dharma Kusuma....157
Tabel 5. 73. Mutasi Aset Tetap....158

Tabel 5. 74. Penambahan Aset Tetap Tanah 159
Tabel 5. 75. Pengurangan Aset Tetap Tanah 159
Tabel 5. 76. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin 161
Tabel 5. 77. Pengurangan Aset Peralatan Dan Mesin 162
Tabel 5. 78. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan 166
Tabel 5. 79. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan 168
Tabel 5. 80. Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan 170
Tabel 5. 81. Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan 172
Tabel 5. 82. Pengurangan Aset Tetap Lainnya 173
Tabel 5. 83. Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan 174
Tabel 5. 84. Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan 174
Tabel 5. 85. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD 175
Tabel 5. 86. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 176
Tabel 5. 87. Rekapitulasi Aset Tak Berwujud Per OPD 177
Tabel 5. 88. Rincian Aset Tak Berwujud per OPD 178
Tabel 5. 89. Penambahan Aset Lain-Lain 183
Tabel 5. 90. Pengurangan Aset Lain-Lain 184
Tabel 5. 91. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 186
Tabel 5. 92. Rincian Amortisasi 2023 188
Tabel 5. 93. Properti Investasi 190
Tabel 5. 94. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek 191
Tabel 5. 95. Rincian Pendapatan Diterima Di Muka 191
Tabel 5. 96. Rincian Utang Belanja Pegawai 192
Tabel 5. 97. Rincian Utang Usaha 194
Tabel 5. 98. Pendapatan LO 198
Tabel 5. 99. Pendapatan Pajak Daerah - LO 199
Tabel 5. 100. Pendapatan Retribusi Daerah – LO 199
Tabel 5. 101. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 200
Tabel 5. 102. Lain-lain PAD yang Sah - LO 201
Tabel 5. 103. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO 202
Tabel 5. 104. Beban LO 203
Tabel 5. 105. Beban Pegawai - LO 204
Tabel 5. 106. Beban Pemeliharaan - LO 208
Tabel 5. 107. Beban Perjalanan Dinas - LO 211
Tabel 5. 108. Beban Hibah - LO 213
Tabel 5. 109. Beban Bantuan Sosial - LO 213
Tabel 5. 110. Beban Penyusutan Aset Tetap-LO 214
Tabel 5. 111. Beban Amortisasi - LO 214
Tabel 5. 112. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - LO 215
Tabel 5. 113. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain - LO 216
Tabel 5. 114. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 219
Tabel 5. 115. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 220
Tabel 5. 116. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan 221
Tabel 5. 117. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 221
Tabel 5. 118. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan 222
Tabel 5. 119. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan 222

Tabel 5. 120. Rincian Pajak Belanja 222
Tabel 5. 121. Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas.....223
Tabel 5. 122. Perhitungan Saldo Awal Kas.....224
Tabel 5. 123. Perhitungan Saldo Akhir Kas.....224
Tabel 5. 124. Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas.....224

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perhitungan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2023
Lampiran 2.	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023
Lampiran 3.	Daftar Aset Tetap Tanah Properti Investasi Tahun 2023
Lampiran 4.	Daftar Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Properti Investasi Tahun 2023
Lampiran 5.	Rincian Perhitungan Beban Persediaan – LO Tahun 2023
Lampiran 6.	Rincian Perhitungan Beban Jasa – LO Tahun 2023
Lampiran 7.	Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023
Lampiran 8.	Rekapitulasi Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023

Lampiran VII : PERATURAN DAERAH
Nomor : 1 Tahun 2024
Tanggal : 9 Agustus 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 di samping untuk memenuhi ketentuan yang diatur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta penilaian dalam rangka akuntabilitas guna pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik.

Dengan adanya Laporan Keuangan dapat diperoleh beberapa informasi yang diperlukan, diantaranya:

1. Informasi mengenai kemampuan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam satu periode tertentu;
2. Cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta output yang dihasilkan;
4. Cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan pembiayaannya;
5. Informasi mengenai posisi keuangan;
6. Informasi tentang perubahan posisi keuangan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter
- 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja Program Entitas Pemerintah Daerah

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Secara umum perekonomian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2022 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berikut indikator target kinerja makro daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Indikator Target Kinerja Makro Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Makro	RPJMD	P-RPJMD
1.	Pertumbuhan Ekonomi dengan migas	12,75 – 13,13	5,85 – 5,93
2.	Pertumbuhan Ekonomi tanpa migas	6,05 – 6,12	5,50 – 5,80
3.	Inflasi	3,20 – 3,10	2,50-2,00
4.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	80,1	81,00-82,00
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80-90)	A (80-90)
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,80 – 72,00	71,25-72,00
7.	Indeks Pembangunan Gender	91,70-91,75	92,75-93,00
8.	Angka Kemiskinan	11,95 – 11,88	11,55-11,00
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,95 – 2,80	3,50-3,00
10.	Indeks Gini	0,30 – 0,29	0,27-0,26
11.	Indeks Williamson	0,40–0,30	0,532-0,530

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023

Stabilitas ekonomi wilayah Kabupaten Bojonegoro akan tetap kondusif dalam menarik investor di Kabupaten Bojonegoro. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali diharapkan iklim usaha di Kabupaten Bojonegoro mampu membawa kondisi ekonomi menuju ke kondisi yang lebih baik. Laju inflasi tahun 2023 diprediksikan mampu mencapai angka 2,50-2,00% atau lebih rendah dibanding prediksi tahun 2022 sebesar 3,30–3,20%.

Sektor perbankan diharapkan terus meningkatkan dukungannya kepada sektor UMKM dengan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui bantuan keuangan dan kredit usaha dengan bunga terjangkau diharapkan mampu memenuhi kebutuhan permodalan bagi sektor riil.

PDRB Kabupaten Bojonegoro diprediksi mengalami peningkatan cukup signifikan meski terdapat sedikit fluktuasi di beberapa sektor, namun di tahun 2023 diprediksi mengalami peningkatan karena didorong oleh sektor pertambangan, pertanian dan perdagangan menunjukkan semakin berkembangnya perekonomian di Kabupaten Bojonegoro.

Dari tren perkembangan PDRB dari tahun ke tahun yang menunjukkan nilai positif tersebut memberikan harapan kedepan perekonomian Kabupaten Bojonegoro akan lebih baik. Maka estimasi PDRB tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2. Proyeksi PDRB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023

Uraian	Estimasi
- **Dengan Migas**	
PDRB atas dasar harga berlaku (Milyar Rupiah)	110.183,97
Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,64 %
PDRB per kapita (Rupiah/Th)	81.253.199
- **Tanpa Migas**	
PDRB atas dasar harga berlaku (Milyar Rupiah)	50.552,61
Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,12 %
PDRB per kapita (Rupiah/Th)	37.279.118

Sumber data: Bappeda (data diolah)

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Bojonegoro serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 juga harus mengacu pada kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, berikut beberapa alokasi yang menjadi Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2023:

1. Beasiswa *Scientist*, Beasiswa program 2 Sarjana per desa dan Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir;
2. DAK Madrasah Aliyah;
3. FS Pembangunan Jembatan Baureno - Plumpang Tuban;
4. Pembangunan Sarpras Puskesmas;
5. Aladin (Atap Lantai dan Dinding) atau RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
6. Penyediaan air bersih;
7. Santunan Duka;
8. Program Petani Mandiri;
9. Lanjutan pembangunan wisata religi;
10. Penuntasan pembangunan jalan cor kabupaten;
11. Pembangunan RS Wilayah Selatan;
12. Overlay Jalan Cor 2019;
13. DED dan AMDAL Pembangunan Flyover Jetak;
14. Lanjutan pelebaran jalan nasional;
15. Penuntasan Jalan Cor Kabupaten;
16. BKD jalan poros antar desa;
17. Pembangunan PJU lintas kecamatan;
18. Pembangunan saluran kota;
19. UHC/ Sharing JKN;
20. Green and Smart City;
21. Insentif RT / RW;
22. DED, AMDAL dan pembangunan Pasar Agro;
23. DED Pasar Kota;
24. BPNT Daerah;
25. Bansos Asistensi Penyandang Disabilitas;
26. Bansos untuk anak yatim dan anak terlantar non panti;

27. Bantuan untuk orang sakit menahun;
28. Bantuan untuk BUMDes;
29. Pelatihan ketrampilan job fair dan pelatihan wirausaha;
30. Festival budaya tahunan;
31. Sanitasi ODF;
32. Program Rantang Kasihmoe untuk lansia;
33. Harmonisasi Perundang-undangan;
34. Pembangunan Pintu pengendali banjir kali Ingas di Lebaksari.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik sesuai ketentuan. Oleh karena itu pengaturan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan antara lain:

1. Kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;
2. Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; dan
3. Melakukan evaluasi dan pengendalian untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, maka untuk memenuhi tingkat kebutuhan yang cenderung terus meningkat, perlu dilakukan pendekatan dalam menyusun skala prioritas pada setiap kebijakan.

2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas daerah dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2023 yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dan pengembangan basis data;
2. Penataan regulasi termasuk pengaturan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
4. Peningkatan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD;

5. Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD; dan
6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Target Pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, serta Dana Perimbangan lainnya.

Berikut implementasi kebijakan terkait Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023:

2.2.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dalam penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
   a. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
   b. Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi daerah harus didasarkan pada potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
   c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
   d. Untuk pendapatan retribusi disesuaikan dengan penangihan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojongeoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojongeoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Usaha yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojongeoro Nomor 10 Tahun 2020, untuk retribusi persampahan dalam pengelolaan tarif berdasarkan jenis pelayanan yaitu: Umum, Non Niaga, Niaga, Industri, Pasar, dan Khusus.
   e. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
g. Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
h. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
k. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
l. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
m. Tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

n. Tidak melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

   a. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
   b. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Lain-lain PAD Yang Sah:

   Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

   a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   c. Hasil kerja sama daerah;
   d. Jasa giro;
   e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
   f. Pendapatan bunga;
   g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
   h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
   i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   k. Pendapatan denda pajak daerah;
   l. Pendapatan denda retribusi daerah;
   m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
   n. Pendapatan dari pengembalian;

o. Pendapatan dari BLUD; dan
p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2.2.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
   a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022, apabila Tahun 2023 Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

      Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
   b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2023.

      Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

      Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan

daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaanya pada Tahun Anggaran 2023 secara bertahap atau sekaligus.

c. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

   Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

   Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

d. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023.

   Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2021.

   Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

   DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

   Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

   Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

   Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

   Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 belum dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan maka penganggaran pendapatan DAK dimaksud didasarkan pada penganggaran pendapatan DAK Tahun Anggaran 2022.

   Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, dalam menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Dana Insentif Daerah

   Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan maka maka penganggaran Dana Insentif Daerah tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5. Dana Desa

   Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

   Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

   Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka harus dilakukan penyesuaian dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2.2.1.1.3. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer antar daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

   Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Pendapatan Bantuan Keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

   Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2.2.1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah

   Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Hibah Dana BOS

   Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

   Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

   Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2022 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2022 ke rekening Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2023.

3. Dana Darurat

   a. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

      Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

      Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah

harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Bagi daerah yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

2.2.1.2. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah

Upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) fokus, yaitu:

a. Bidang Pendapatan
   1) Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah;
   2) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat/Provinsi dan BUMD/Lembaga Perbankan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah;
   3) Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi/ pemerintah pusat dibidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah; dan
   4) Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi.

b. Bidang Pelayanan Publik
   1) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kebutuhan dasar masyarakat;
   2) Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; dan
   3) Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kualitas kinerja.

c. Bidang Kelembagaan
   1) Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan;
   2) Pengembangan manajemen pengelolaan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
   3) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
   4) Program Rekruitmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi.

2. Dana Perimbangan

a. Memperjuangkan redistribusi penerimaan dari Pemerintah Pusat ke Daerah di luar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),

khususnya perolehan dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, DBHCHT dan Pajak Rokok; dan

b. Optimalisasi *Revenue Sharing* terhadap Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan sebagainya), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/ kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik (1) Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; 2) Penurunan Ketimpangan Wilayah; 3) Kerjasama dan Kemitraan; dan 4) Pemulihan Ekonomi dan Sosial Dampak Pandemi Covid-19. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Secara khusus kebijakan belanja juga diperuntukan untuk memenuhi program prioritas kabupaten yaitu pemenuhan 17 (tujuh belas) program prioritas. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Selain itu Belanja Daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);

2) Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

Disisi lain belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Kebijakan perencanaan belanja daerah dalam APBD 2023 dijabarkan sebagai berikut:

2.2.2.1. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

   Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

   a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
   b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
   c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

   Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
   b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023.
   c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
   d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
   f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   h. Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

   a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (*UHC*), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

   Kategori skema ganda, yaitu:
   1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan; dan
   2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

   Kategori bukan skema ganda, yaitu:
   1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan;
   2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah;
   3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya;
   4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
   a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
   b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
   c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota; dan
   d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
   1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
   1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
   2) Pimpinan dan anggota DPRD; dan
   3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan.

   Dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID*-19, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID*-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID*-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggara rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi

dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID*-19.

h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

   1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
      Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
   2) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
      Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
   3) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
   4) Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID*-19 (*rapid test*/*PCR test*/*swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID*-19).

   Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

n. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
   1) Hadiah yang bersifat perlombaan;
   2) Penghargaan atas suatu prestasi;
   3) Beasiswa kepada masyarakat;
   4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, dengan kriteria paling sedikit:

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
   1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Tanah
      Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
      Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
   c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
      Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
      Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
   e. Belanja Aset Tetap Lainnya
      Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   f. Belanja Aset Lainnya
      Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

   Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah

lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

   Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

   Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keperluan mendesak; dan/atau
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. Memanfaatkan kas yang tersedia.

2.2.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah dan/atau kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil

   Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

   a. Pendapatan Pajak Daerah

      Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen);
3) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

b. Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa
Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dan atau kepada pemerintah desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
a. Bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
b. Bantuan keuangan antar-daerah;
c. Bantuan keuangan daerah provinsi;
d. Bantuan keuangan daerah ke provinsi; dan
e. Bantuan keuangan daerah kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.
Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
Selain itu, pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2.2.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah pada hakekatnya merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan apabila terjadi selisih negatif, pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, maka sebagai Daerah Otonom perlu untuk menggali potensi-potensi ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pada sisi pembiayaan pembangunan.

Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023, meliputi:

2.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun 2023 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022. Penerimaan Pembiayaan berasal dari estimasi Sisa lebih Perhitungan Tahun lalu. Adapun komponen SiLPA antara lain berasal dari:

1. *Over* Target Penerimaan Pendapatan;
2. Efisiensi Belanja; dan/atau
3. Penundaan belanja.

2.2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD tahun 2023 digunakan untuk Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan. Dana Abadi adalah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pasal 164 ayat (1) Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Perda, ayat (2) Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan Pasal 166 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan Dana Abadi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU tersebut.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL DAN MONETER

2.3.1. Target Kinerja Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp5.455.797.012.840,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.200.963.805.566,00. Target kinerja pendapatan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.254.833.207.274,00 atau sebesar 29,87% dari target kinerja pendapatan tahun sebelumnya. Rincian perubahan target Pendapatan Daerah Tahun 2023 dibandingkan Tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3. Perbandingan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran TA. 2022 (Rp)	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	824.411.705.824,00	943.506.575.782,00	119.094.869.958,00	14,45
2.	Pendapatan Transfer	3.301.845.517.142,00	4.434.861.414.632,00	1.133.015.897.490,00	34,31
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	74.706.582.600,00	77.429.022.426,00	2.722.439.826,00	3,64
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**4.200.963.805.566,00**	**5.455.797.012.840,00**	**1.254.833.207.274,00**	**29,87**

Kenaikan target terdapat pada semua kelompok Pendapatan. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat kenaikan target PAD, kenaikan alokasi Pendapatan Transfer, dan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.3.2. Target Kinerja Belanja Tahun Anggaran 2023

Belanja pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp8.073.595.821.174,00 dibandingkan dengan anggaran belanja pada Tahun 2022 sebesar Rp6.493.152.149.138,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.580.443.672.036,00 atau sebesar 24,34% dari anggaran belanja Tahun sebelumnya. Rincian perubahan target Belanja Daerah Tahun 2023 dibandingkan Tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4. Perbandingan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Uraian Belanja	Anggaran TA 2022 (Rp)	Anggaran TA 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	3.124.737.359.689,00	4.157.084.827.072,00	1.032.347.467.383,00	33,04
2.	Belanja Modal	1.882.013.537.809,00	2.281.374.108.059,00	399.360.570.250,00	21,22
3.	Belanja Tak Terduga	71.041.491.483,00	65.993.420.313,00	(5.048.071.170,00)	(7,11)
4.	Belanja Transfer	1.415.359.760.157,00	1.569.143.465.730,00	153.783.705.573,00	10,87
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**6.493.152.149.138,00**	**8.073.595.821.174,00**	**1.580.443.672.036,00**	**24,34**

Kelompok Belanja Daerah yang mengalami penurunan dibandingkan Tahun sebelumnya adalah Belanja Tak Terduga. Sedangkan kelompok Belanja Daerah pada Tahun 2023 yang anggarannya lebih besar dibandingkan Tahun 2022 pada Belanja Operasi, Belanja Modal dan Transfer.

2.3.3. Target Kinerja Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.217.798.808.334,00 mengalami kenaikan sebesar Rp390.101.746.535,00 atau 13,80% dibandingkan penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp2.827.697.061.799,00. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya.

Adapun anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2023 sebesar Rp600.000.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp64.491.281.773,00 atau 12,04% dari Tahun 2022 sebesar Rp535.508.718.227,00. Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembentukan Dana Cadangan untuk invesatasi jangkan panjang (Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan). Dengan demikian, target pembiayaan netto Tahun 2023 sebesar Rp2.617.798.808.334,00, naik sebesar Rp325.610.464.762,00 atau 14,21% dari target pembiayaan nettoTahun 2022 sebesar Rp2.292.188.343.572,00.

Rincian perubahan target Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dibandingkan Tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 5. Perbandingan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Anggaran TA 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan		**2.827.697.061.799,00**	**3.217.798.808.334,00**	**390.101.746.535,00**	**13,80**
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.827.697.061.799,00	3.217.798.808.334,00	390.101.746.535,00	13,80
2.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	-
Pengeluaran Pembiayaan		**535.508.718.227,00**	**600.000.000.000,00**	**64.491.281.773,00**	**12,04**
1.	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000,00	600.000.000.000,00	100.000.000.000,00	20,00
2.	Penyertaan Modal Daerah	35.508.718.227,00	0,00	(35.508.718.227,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	**2.292.188.343.572,00**	**2.617.798.808.334,00**	**325.610.464.762,00**	**14,21**

2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM ENTITAS PELAPOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum pada APBD. Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 sebagai instrumen dalam pencapaian berbagai target pembangunan daerah, penyesuaian berbagai besaran komponen APBD mendesak untuk dilakukan penyesuaian sejalan dengan dinamika yang terus berkembang.

Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 merupakan langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD Tahun 2023 serta tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan daerah. Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro semester I Tahun 2023 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang meliputi:

1. Perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya yang harus dialokasikan pada anggaran Tahun berjalan.
2. Adanya penyesuaian Pendapatan Daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang juga harus dianggarkan dalam Tahun Anggaran berjalan Tahun 2023.
3. Penyesuaian terhadap Pendapatan, Belanja dan Pembiayan Daerah yang telah dialokasikan para perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Penyesuaian belanja daerah dalam rangka amanat peraturan perundang-undangan yang bersifat wajib mengikat seperti DBHCHT, DAK, DID dan lainnya

Sebelum dilakukan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, telah dilakukan penyusunan dan penetapan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 yang menjadi landasan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan mendasar pada perubahan asumsi-asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi pada stuktur APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 serta untuk menampung tambahan program/kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 atau menambah volume capaian kinerja program/kegiatan berdasarkan evaluasi pencapaian indikator kinerja masing-masing SKPD.

Selain itu, penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan sisa waktu pelaksanaan anggaran pada Tahun berjalan. Dengan tersedianya waktu yang cukup, maka diharapkan program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

Rincian perubahan anggaran sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp236.344.313.471,00 atau menjadi sebesar Rp5.455.797.012.840,00 dibandingkan dengan APBD induk sebesar Rp5.219.452.699.369,00 atau naik sebesar 4,53%. Berikut ini rincian Anggaran Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2023:

Tabel 2. 6. Anggaran Pendapatan pada APBD dan P-APBD Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (Rp)	(Rp)	%
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**900.087.500.609,00**	**943.506.575.782,00**	**43.419.075.173,00**	**4,82**
	Pajak Daerah	137.141.658.017,00	137.141.658.017,00	-	-
	Retribusi Daerah	69.323.659.475,00	69.323.659.475,00	-	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139.121.238.048,00	182.540.313.221,00	43.419.075.173,00	31,21
	Lain-lain PAD yang Sah	554.500.945.069,00	554.500.945.069,00	-	-
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4.244.658.616.160,00**	**4.434.861.414.632,00**	**190.202.798.472,00**	**4,48**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.145.425.348.513,00	4.283.560.590.811,00	138.135.242.298,00	3,33
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.233.267.647,00	151.300.823.821,00	52.067.556.174,00	52,47
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**74.706.582.600,00**	**77.429.022.426,00**	**2.722.439.826,00**	**3,64**

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (Rp)	(Rp)	%
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	74.706.582.600,00	77.429.022.426,00	2.722.439.826,00	3,64
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**5.219.452.699.369,00**	**5.455.797.012.840,00**	**236.344.313.471,00**	**4,53**

2. Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp1.099.330.094.923,00 atau menjadi sebesar RP8.073.595.821.174,00 dibandingkan dengan anggaran APBD induk sebesar Rp6.974.265.726.251,00 atau meningkat sebesar 15,76%. Berikut ini rincian Anggaran Belanja Daerah sebelum perubahan dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2023:

Tabel 2. 7. Anggaran Belanja pada APBD dan P-APBD Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (Rp)	(Rp)	%
1.	**BELANJA OPERASI**	**3.277.757.195.390,00**	**4.157.084.827.072,00**	**879.327.631.682,00**	**26,83**
	Belanja Pegawai	1.573.468.905.638,00	1.594.303.047.559,00	20.834.141.921,00	1,32
	Belanja Barang dan Jasa	1.330.276.332.253,00	1.544.138.902.629,00	213.862.570.376,00	16,08
	Belanja Subsidi	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(66,67)
	Belanja Hibah	320.449.957.499,00	848.813.161.084,00	528.363.203.585,00	164,88
	Belanja Bantuan Sosial	49.062.000.000,00	168.329.715.800,00	119.267.715.800,00	243,10
2.	**BELANJA MODAL**	**2.568.789.041.727,00**	**2.281.374.108.059,00**	**(287.414.933.668,00)**	**(11,19)**
	Belanja Modal Tanah	547.475.905.000,00	95.188.698.725,00	(452.287.206.275,00)	(82,61)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.631.439.870,00	263.219.681.627,00	66.588.241.757,00	33,86
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	312.644.401.774,00	389.777.666.492,00	77.133.264.718,00	24,67
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.506.087.325.298,00	1.526.001.455.682,00	19.914.130.384,00	1,32
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.949.969.785,00	7.186.605.533,00	1.236.635.748,00	20,78
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**82.611.042.774,00**	**65.993.420.313,00**	**(16.617.622.461,00)**	**(20,12)**
	Belanja Tidak Terduga	82.611.042.774,00	65.993.420.313,00	(16.617.622.461,00)	(20,12)
4.	**BELANJA TRANSFER**	**1.045.108.446.360,00**	**1.569.143.465.730,00**	**524.035.019.370,00**	**50,14**
	Belanja Bagi Hasil	23.183.164.686,00	26.396.822.032,00	3.213.657.346,00	13,86
	Belanja Bantuan Keuangan	1.021.925.281.674,00	1.542.746.643.698,00	520.821.362.024,00	50,96
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**6.974.265.726.251,00**	**8.073.595.821.174,00**	**1.099.330.094.923,00**	**15,76**

3. Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2023 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA dianggarkan secara definitif berdasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022. Besarnya Sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2022 sebelum

hasil audit BPK adalah Rp2.254.813.026.882,00 sedangkan besarnya Sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2022 Hasil Audit BPK sebesar Rp3.217.798.808.334,00 sehingga terdapat selisih SiLPA dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp962.985.781.452,00.

Selisih lebih atas proyeksi SiLPA tersebut sebagian besar merupakan anggaran yang harus dijadwalkan kembali untuk dipergunakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik grant, bersifat wajib dan mengikat seperti program kegiatan bersumber BKK Provinsi Jawa Timur, anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BOS, BLUD, serta anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun berkenaan. Anggaran sesuai alokasi yang terdapat dalam SiLPA, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku harus dianggarkan kembali dengan mengunakan petunjuk teknis yang berlaku pada Tahun berkenaan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp600.000.000.000,00.

Tabel 2. 8. Anggaran Pembiayaan pada APBD dan P-APBD Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (Rp)	(Rp)	%
1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**2.254.813.026.882,00**	**3.217.798.808.334,00**	**962.985.781.452,00**	**42,71**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.254.813.026.882,00	3.217.798.808.334,00	962.985.781.452,00	42,71
2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**500.000.000.000,00**	**600.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**20,00**
	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000,00	600.000.000.000,00	100.000.000.000,00	20,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**1.754.813.026.882,00**	**2.617.798.808.334,00**	**862.985.781.452,00**	**49,18**

Untuk selanjutnya nilai anggaran yang dipergunakan sebagai dasar/acuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah nilai Anggaran Perubahan Penjabaran setelah P-APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp6.016.822.709.302,80 atau mencapai 110,28% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp5.455.797.012.840,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp249.528.316.754,09 atau 4,33% dari realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp5.767.294.392.548,71.

Tabel 3. 1. Pendapatan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	943.506.575.782,00	875.581.318.302,80	92,80%	804.014.681.241,71
2	Pendapatan Transfer	4.434.861.414.632,00	5.064.750.744.721,00	114,20%	4.896.427.553.388,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	77.429.022.426,00	76.490.646.279,00	98,79%	66.852.157.919,00
	Jumlah Pendapatan	**5.455.797.012.840,00**	**6.016.822.709.302,80**	**110,28%**	**5.767.294.392.548,71**

3.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp875.581.318.302,80 atau 92,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp943.506.575.782,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp168.840.845.572,00; Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp39.424.212.326,52; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp182.683.243.729,88; dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp484.633.016.674,40.

Tabel 3. 2. Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pajak Daerah	137.141.658.017,00	168.840.845.572,00	123,11	159.937.230.964,00
2.	Retribusi Daerah	69.323.659.475,00	39.424.212.326,52	56,87	33.315.473.535,14
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	182.540.313.221,00	182.683.243.729,88	100,08	137.641.553.852,52
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	554.500.945.069,00	484.633.016.674,40	87,40	473.120.422.890,05
	JUMLAH	**943.506.575.782,00**	**875.581.318.302,80**	**92,80**	**804.014.681.241,71**

Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp71.566.637.061,09 atau 8,90% dibandingkan realisasi Tahun 2022 yang sebesar Rp804.014.681.241,71. Berdasarkan organisasi, realisasi pendapatan asli daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 3. Realisasi Pendapatan menurut Organisasi

No	Nama OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	31.398.518.637,00	16.313.207.961,00	51,96	9.985.207.060,00
2.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	307.239.202.240,00	262.371.745.640,51	85,40	272.152.719.017,34
3.	RSUD Sumberrejo	65.581.721.467,00	40.042.083.497,41	61,06	46.349.334.677,11
4.	RSUD Padangan	63.500.000.000,00	60.205.677.819,18	94,81	52.392.093.125,94
5.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	3.297.000.000,00	4.220.930.540,00	128,02	2.359.978.392,00
6.	Dinas PU Sumber Daya Air	63.000.000,00	210.839.400,00	334,67	220.273.300,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	341.250.000,00	1.050.977.596,52	307,98	979.260.605,14
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	155.998.500,00	112.952.328,00	72,41	129.569.770,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	1.189.125.000,00	953.121.000,00	80,15	1.334.202.500,00
10.	Dinas Perhubungan	21.092.719.988,00	11.059.451.000,00	52,43	11.802.401.000,00
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.363.800.000,00	1.430.408.472,00	32,78	779.717.888,00
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	315.000.000,00	472.530.000,00	150,01	122.568.000,00
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.574.281.800,00	1.062.279.000,00	67,48	2.019.048.000,00
14.	Dinas Peternakan dan Perikanan	341.250.000,00	47.011.500,00	13,78	50.249.000,00
15.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	12.016.740.212,00	4.201.399.544,00	34,96	5.346.489.254,00
16.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	134.246.700,00	32.789.000,00	24,42	48.317.000,00
17.	Kec Bojonegoro	1.050.000.000,00	1.047.707.829,00	99,78	992.809.795,00
18.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	109.855.750.000,00	301.851.081.403,18	274,77	236.421.532.288,18
19.	Badan Pendapatan Daerah	319.996.971.238,00	168.895.124.772,00	52,78	160.528.910.569,00
	JUMLAH	**943.506.575.782,00**	**875.581.318.302,80**	**92,80**	**804.014.681.241,71**

3.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp5.064.750.744.721,00 atau 114,20% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp4.434.861.414.632,00. Sementara itu, untuk Tahun 2022, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp4.896.427.553.388,00 sehingga Tahun 2023 pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp168.323.191.333,00 atau 3,44%.

Adapun rincian realisasi pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.830.845.711.311,00 atau 112,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.283.560.590.811,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp4.412.764.834.036,00; Dana Desa sebesar Rp406.556.846.275,00; dan Insentif Fiskal sebesar Rp11.524.031.000,00. Secara keseluruhan, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp130.495.889.427,00 atau 2,78% dibandingkan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.700.349.821.884,00.

   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut, belum termasuk Transfer Pusat yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) per tanggal 30 Desember 2023 atas tambahan DBH Kabupaten Bojonegoro sesuai PMK RI No. 159/2023 ditambah dengan penyaluran TDF pada tanggal 29 Desember 2023 atas sisa salur KB DBH sesuai KMK RI No. 38/KM.7/2023, yang terdiri dari DBH

Pajak sebesar Rp676.318.941.000,00 dan DBH SDA sebesar Rp757.926.348.000,00 yang rencananya akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah
   Pada tahun 2023, Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp233.905.033.410,00 atau 154,60% dari anggaran sebesar Rp151.300.823.821,00. Realisasi tersebut terdiri dari: Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp222.263.497.700,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp11.641.535.710,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp37.827.301.906,00 atau 19,29% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp196.077.731.504,00.

3.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pada tahun 2023 Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp76.490.646.279,00 atau 98,79% dari anggaran sebesar Rp77.429.022.426,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp9.638.488.360,00 atau sebesar 14,42% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yaitu sebesar Rp66.852.157.919,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2023 berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP non BLUD sebesar Rp76.490.646.279,00.

3.1.2. BELANJA DAERAH

Secara akumulatif anggaran belanja Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.348.088.886.775,55 atau 78,63% dari total anggaran belanja sebesar Rp8.073.595.821.174,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp970.046.575.315,56 atau 18,04% dari realisasi Tahun 2022 yang senilai Rp5.378.042.311.459,99. Belanja daerah tersebut terbagi ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Tabel 3. 4. Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	4.157.084.827.072,00	2.982.239.377.104,23	71,74	2.733.424.609.650,69
2	Belanja Modal	2.281.374.108.059,00	2.043.640.098.181,81	89,58	1.261.894.634.368,69
3	Belanja Tidak Terduga	65.993.420.313,00	37.318.031.053,00	56,55	34.072.835.218,00
4	Belanja Transfer	1.569.143.465.730,00	1.284.891.380.436,51	81,88	1.348.650.232.222,61
	JUMLAH	**8.073.595.821.174,00**	**6.348.088.886.775,55**	**78,63**	**5.378.042.311.459,99**

3.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi Tahun 2023 terealisasi Rp2.982.239.377.104,23 atau 71,74% dari anggaran sebesar Rp4.157.084.827.072,00. Realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp248.814.767.453,54 atau 9,10% dari realisasi Tahun 2022 yang sebesar Rp2.733.424.609.650,69. Rincian realisasi belanja operasi tahun 2023 adalah sebagai berikut: Belanja Pegawai sebesar Rp1.101.401.177.795,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.244.190.987.031,23; Belanja Subsidi sebesar Rp589.264.975,00; Belanja Hibah sebesar Rp507.992.576.618,00; dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp128.065.370.685,00.

3.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja modal selama Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.043.640.098.181,81 atau 89,58% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp2.281.374.108.059,00. Jumlah realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp 781.745.463.813,12 atau 61,95% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.261.894.634.368,69.

Rincian realisasi belanja modal tahun 2023 terdiri dari: Belanja Modal Tanah sebesar Rp10.503.081.650,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp231.057.841.248,00; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp361.189.683.243,81; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.433.892.555.625,00; serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.996.936.415,00.

3.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga Tahun 2023 terealisasi Rp37.318.031.053,00 atau mencapai 56,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp65.993.420.313,00 sedangkan Tahun 2022 belanja tak terduga terealisasi Rp34.072.835.218,00.

3.1.2.4. BELANJA TRANSFER

Belanja Transfer Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.284.891.380.436,51 atau 81,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.569.143.465.730,00. Realisasi Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar Rp63.758.851.786,10 atau 4,73% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.348.650.232.222,61.

Realisasi Belanja Transfer tahun 2023 terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp26.154.830.015,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp1.258.736.550.421,51.
Realisasi belanja berdasarkan organisasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 5. Realisasi Belanja Menurut Organisasi

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	1.491.426.341.438,00	956.654.821.430,85	64,14	870.065.635.380,36
2.	Dinas Kesehatan	664.214.273.121,00	616.170.702.893,38	92,77	455.016.334.931,56
3.	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	422.648.304.351,00	323.119.931.187,00	76,45	288.025.716.702,00
4.	RSUD Kelas D Sumberrejo	94.303.350.836,00	64.529.793.025,81	68,43	48.707.859.156,40
5.	RSUD Kelas D Padangan	90.130.852.412,00	73.097.939.363,00	81,10	68.430.783.454,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	1.367.132.145.188,00	1.222.388.703.080,00	89,41	700.423.447.664,20
7.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	571.812.580.194,00	296.330.356.295,00	51,82	90.031.093.390,10
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	720.845.935.387,00	640.712.582.246,00	88,88	680.278.249.891,84
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.548.855.488,00	53.080.103.529,00	95,56	9.714.409.441,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	18.013.408.233,00	16.120.213.597,00	89,49	15.237.748.586,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.928.201.109,00	6.528.835.843,00	94,24	12.096.877.403,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	17.893.702.692,00	13.310.339.347,00	74,39	10.063.699.364,00
13.	Dinas Sosial	108.147.429.198,00	72.560.075.485,00	67,09	39.426.339.580,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	30.322.274.999,00	25.046.304.610,00	82,60	24.359.318.528,12

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	130.011.238.472,00	73.455.243.440,00	56,50	151.017.435.068,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	38.211.539.948,00	35.015.633.831,00	91,64	34.392.084.145,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.082.657.226,00	12.951.053.564,00	91,96	12.249.916.699,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.127.969.854,00	32.929.077.315,00	96,49	25.096.558.660,00
19.	Dinas Perhubungan	26.322.257.335,00	25.110.018.412,00	95,39	25.270.748.318,61
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.158.224.568,00	15.889.503.530,00	82,94	15.152.790.243,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.142.651.399,00	7.601.291.354,00	93,35	6.946.084.076,00
22.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	40.899.334.624,00	32.525.925.777,00	79,53	22.805.185.829,26
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22.331.165.445,00	19.377.260.613,00	86,77	17.563.749.005,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.010.581.402,00	5.210.499.589,00	86,69	4.989.136.925,00
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	17.592.191.224,00	16.010.904.960,00	91,01	15.364.594.730,00
26.	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	16.475.930.355,00	14.100.424.549,00	85,58	15.871.831.832,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.585.682.620,00	8.093.597.710,00	69,86	10.489.675.753,00
28.	Sekretariat Daerah	137.181.651.439,00	121.898.853.945,00	88,86	108.825.045.157,00
29.	Sekretariat DPRD	72.914.500.580,00	60.400.991.859,00	82,84	54.278.404.479,00
30.	Kecamatan Bojonegoro	25.874.038.244,00	23.479.939.795,00	90,75	21.942.703.369,25
31.	Kecamatan Kapas	3.028.703.874,00	2.879.392.267,00	95,07	2.958.774.775,00
32.	Kecamatan Balen	3.492.942.383,00	3.338.101.667,00	95,57	3.447.345.831,00
33.	Kecamatan Sumberrejo	4.370.903.838,00	4.105.778.486,00	93,93	3.990.282.372,00
34.	Kecamatan Kanor	4.113.497.542,00	3.856.725.818,00	93,76	3.700.220.461,00
35.	Kecamatan Baureno	3.581.006.662,00	3.245.516.441,00	90,63	3.379.089.347,00
36.	Kecamatan Sugihwaras	3.233.638.175,00	3.037.962.219,00	93,95	2.993.435.415,00
37.	Kecamatan Kepohbaru	3.811.107.915,00	3.618.163.201,00	94,94	3.398.325.151,00
38.	Kecamatan Kedungadem	3.400.620.234,00	3.200.873.058,00	94,13	3.066.299.166,00
39.	Kecamatan Sukosewu	3.264.565.031,00	2.992.331.081,00	91,66	3.016.377.424,00
40.	Kecamatan Trucuk	2.899.423.245,00	2.689.362.699,00	92,76	2.709.665.957,00
41.	Kecamatan Malo	3.626.672.450,00	3.373.013.666,00	93,01	3.277.541.253,00
42.	Kecamatan Kalitidu	3.204.988.536,00	2.958.420.507,00	92,31	2.923.862.005,00

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
43.	Kecamatan Dander	3.097.108.525,00	2.848.584.386,00	91,98	2.667.300.898,00
44.	Kecamatan Padangan	2.911.923.987,00	2.701.918.620,00	92,79	2.684.135.586,00
45.	Kecamatan Purwosari	2.974.710.434,00	2.800.523.713,00	94,14	2.643.794.162,00
46.	Kecamatan Kasiman	3.082.359.578,00	2.866.141.779,00	92,99	2.836.156.091,00
47.	Kecamatan Kedewan	2.354.199.824,00	2.125.873.581,00	90,30	2.317.078.284,00
48.	Kecamatan Ngasem	3.229.304.466,00	3.006.708.424,00	93,11	2.908.866.042,00
49.	Kecamatan Ngambon	2.807.753.530,00	2.574.546.255,00	91,69	2.207.538.043,00
50.	Kecamatan Tambakrejo	2.906.402.693,00	2.728.351.533,00	93,87	2.933.089.028,00
51.	Kecamatan Ngraho	3.438.538.904,00	3.147.682.695,00	91,54	2.964.802.912,00
52.	Kecamatan Margomulyo	2.826.556.026,00	2.593.306.827,00	91,75	2.552.442.954,00
53.	Kecamatan Temayang	2.906.397.841,00	2.670.053.781,00	91,87	2.753.063.177,00
54.	Kecamatan Bubulan	2.303.574.138,00	2.118.515.420,00	91,97	2.105.681.453,00
55.	Kecamatan Gondang	2.428.006.626,00	2.254.168.233,00	92,84	2.098.829.034,00
56.	Kecamatan Sekar	2.372.156.632,00	2.153.973.536,00	90,80	2.117.843.077,00
57.	Kecamatan Gayam	2.995.687.810,00	2.717.082.275,00	90,70	3.063.018.237,00
58.	Inspektorat	15.024.814.045,00	12.968.014.053,00	86,31	11.425.832.339,68
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.626.619.904,00	11.610.251.115,00	91,95	10.065.657.791,20
60.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.650.202.109.326,00	1.334.842.361.502,51	80,89	1.396.782.103.592,41
61.	Badan Pendapatan Daerah	14.922.423.635,00	13.025.587.781,00	87,29	13.577.858.573,00
62.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	15.867.833.984,00	13.338.677.981,00	84,06	14.342.543.267,00
	JUMLAH	**8.073.595.821.174,00**	**6.348.088.886.775,55**	**78,63**	**5.378.042.311.459,99**

3.1.3. PEMBIAYAAN

Dari hasil perhitungan APBD Tahun 2023 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp3.218.313.739.958,40 dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

3.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan senilai Rp3.217.798.808.334,00 terealisasi sebesar Rp3.218.313.739.958,40 atau 100,02%. Realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp389.767.012.713,57 atau 13,78% dibanding realisasi Tahun 2022 yang sebesar Rp2.828.546.727.244,83. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) senilai Rp3.217.798.808.333,61 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah senilai Rp514.931.624,79.

3.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pada tahun 2023 ditetapkan anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp600.000.000.000,00 namun belum ada realisasi.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Tidak semua program maupun kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat direalisasikan. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target antara lain tidak dilaksanakannya paket kegiatan, dibayarkan sesuai progres kemajuan fisik, adanya penundaan pembayaran (kurang bayar) karena diberikan kesempatan 50 hari kalender. Penyerapan belanja modal tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga pengadaan spek barang menjadi terbatas. Penyerapan yang kurang optimal karena pengesahan pada P-APBD yang dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga berdampak pada beberapa pekerjaan yang belum terlaksana. Adanya tambahan anggaran pada P-APBD pada belanja pegawai terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetapi tidak dapat terealisasikan dikarenakan aturan yang belum ditetapkan sehingga tidak dapat terserap, selain itu anggaran tunjangan PPh TPP yang ditanggung oleh negara hanya dapat dibayarkan selama 2 bulan. Adapun terkait gaji PPPK yang belum terserap karena belum adanya rekruitmen pegawai PPPK.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas entitas-entitas akuntansi, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 67 OPD dan 3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 4. 1. Daftar Nama OPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi

Kode OPD	Nama OPD	Kode OPD	Nama OPD
1.01.01	Dinas Pendidikan	4.01.08	Kecamatan Sumberrejo
1.02.01	Dinas Kesehatan	4.01.09	Kecamatan Kanor
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	4.01.10	Kecamatan Baureno
1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	4.01.11	Kecamatan Sugihwaras
1.03.03	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4.01.12	Kecamatan Kepohbaru
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.01.13	Kecamatan Kedungadem
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	4.01.14	Kecamatan Sukosewu
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.01.15	Kecamatan Trucuk
1.05.04	Dinas Pemadam Kebakaran	4.01.16	Kecamatan Malo
1.06.01	Dinas Sosial	4.01.17	Kecamatan Kalitidu
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.01.18	Kecamatan Dander
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.01.19	Kecamatan Padangan
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	4.01.20	Kecamatan Purwosari
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.01.21	Kecamatan Kasiman
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.01.22	Kecamatan Kedewan
2.09.01	Dinas Perhubungan	4.01.23	Kecamatan Ngasem
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.01.24	Kecamatan Ngambon
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.01.25	Kecamatan Tambakrejo
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.01.26	Kecamatan Ngraho
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.01.27	Kecamatan Margomulyo
2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.01.28	Kecamatan Temayang
3.01.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.01.29	Kecamatan Bubulan

Kode OPD	Nama OPD	Kode OPD	Nama OPD
3.06.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	4.01.30	Kecamatan Gondang
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.01.31	Kecamatan Sekar
4.01.03	Sekretariat Daerah	4.01.32	Kecamatan Gayam
4.01.04	Sekretariat DPRD	4.02.01	Inspektorat
4.01.05	Kecamatan Bojonegoro	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.06	Kecamatan Kapas	4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.01.07	Kecamatan Balen	4.04.02	Badan Pendapatan Daerah
4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		

Tabel 4. 2. Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi

Kode SKPD	Nama BLUD
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo
1.02.04	Rumah Sakit Umum Daerah Padangan

Adapun Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi PD BPR Bojonegoro, PDAM, PT Asri Dharma Sejahtera, PT Bojonegoro Bangun Sarana, dan PT Griya Dharma Kusuma, tidak dikonsolidasikan dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena merupakan kekayaan yang pengelolaannya dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar; dan
2. Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1. KEBIJAKAN UMUM

1. Periode akuntansi yang digunakan adalah tahunan sebagaimana tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember;
2. Pengakuan dan pencatatan setiap kejadian/transaksi ekonomi dilakukan dalam mata uang Rupiah;
3. Transaksi yang terjadi dengan menggunakan mata uang asing dicatat dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasar kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi dibukukan;
4. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat OPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah;
5. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan dengan realisasi periode sebelumnya;
6. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD;
7. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;
8. Laporan realisasi anggaran gabungan Pemda disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh OPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD;
9. Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua OPD;
10. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
11. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
12. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat OPD, PPKD dan Pemerintah Daerah;
13. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca;
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasikenaikan atau penurunan Saldo anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Khusus untuk Tahun 2015 LPSAL disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04);
15. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
16. Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa;

17. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Khusus untuk Tahun 2015 LPE disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04);
18. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan;
19. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;
20. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas;
21. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
22. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah;
23. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

4.3.2. Pendapatan LRA

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD;
2. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi OPD;
3. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek;
4. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang *(recurring)* atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
7. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
8. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh OPD maupun PPKD;
9. Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
10. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.3. Belanja

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa

BUD/pengguna anggaran. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;

3. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
4. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

4.3.4. Transfer

1. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. Untuk penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.5. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
3. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto;
5. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto;
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
7. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.3.6. Pendapatan LO

1. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

2. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan *(earned)* atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized);*
3. Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan;
4. Pendapatan LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
   a. Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (Misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah;
   b. Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
5. Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
6. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
7. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.7. Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
3. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain;
4. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan;
5. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non Operasional;
6. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah;
7. Beban diakui pada:
   a. saat timbulnya kewajiban;
   b. saat terjadinya konsumsi aset; dan
   c. saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
8. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;

9. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
10. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu;
11. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
    a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
    b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
    c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
12. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
13. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
14. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pengeluaran tersebut diklasifikasikan sebagai Beban dibayar di Muka.
15. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.

4.3.8. Aset

1. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;
3. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
4. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Piutang Lain-lain; dan Persediaan;
5. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
6. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
7. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
8. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran;
9. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai *(cash dividend)* dicatat sebagai pendapatan;

10. Penilaian Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
11. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang;
12. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan;
13. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan;
14. Piutang dicatat sebesar nilai bersih, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih;
15. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
16. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik *(stock opname);*
17. Persediaan disajikan sebesar:
    a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
18. Penilaian investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan:
    a. Metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait;
    b. Metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurang sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah;
    c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, kriteria dalam penggunaan metode ini adalah untuk kepemilikan saham yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat.
19. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
20. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
21. Investasi Pemerintah dikategorikan dalam dua macam, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang;
22. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan;
23. Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen;
24. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar;
25. Investasi yang dapat digolongkan dalam investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara

otomatis, dan atau pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Daerah;

26. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dapat berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik daerah dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
27. Investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dapat berupa Pembelian obligasi jangka panjang oleh Pemerintah Daerah, Pemberian dana talangan untuk penyehatan Perusahaan Daerah, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga, dan Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
    a. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah, atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/*reliable;*
    b. Pengeluaran untuk investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
    c. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri serta biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
    d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
    e. Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 50% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih besar atau sama dengan 50%;
    f. Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan dinilai menggunakan metode rata-rata;
    g. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah;
    h. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lainnya dan sebaliknya.
28. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas;
29. Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan;
30. Aset tetap sebagaimana yang dimaksud adalah aset yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
31. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya
32. Aset tetap dicatat dengan menggunakan biaya perolehan;
33. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
34. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung untuk tenaga kerja, bahan baku termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
35. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dibebankan secara langsung dalam membawa

aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

36. Setiap potongan harga dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
37. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
38. Konstruksi dalam penyelesaian yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap;
39. Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
40. Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki nilai wajar yang serupa, biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas;
41. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
42. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan;
43. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;
44. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)*;
45. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
46. Penyusutan dihitung satu bulan penuh sejak bulan perolehan;
47. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset *idle* disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap;
48. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan;
49. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional yang memperbolehkannya;
50. Aset bersejarah tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam unit fisik dan tanpa nilai;
51. Aset bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran, diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
52. Aset infrastruktur diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
53. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa datang yang diharapkan dari pelepasannya;
54. Atas aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas maka harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
55. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

56. Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
57. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
58. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
59. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya lain secara khusus dapat dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
60. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan penyerahan pekerjaan yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
61. Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal;
62. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
63. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi tidak dikapitalisasi;
64. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh tempo pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman;
65. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan;
66. Batasan minimal kapitalisasi untuk belanja modal dalam aset tetap adalah Rp500.000,00, dikecualikan terhadap aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian;
67. Kebijakan kapitalisasi aset tersebut diterapkan untuk pengadaan belanja modal mulai Tahun Anggaran 2011.

4.3.9. Aset Lainnya

1. Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan;
2. Termasuk di dalam aset lainnya adalah: tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain;
3. Aset lainnya diakui pada saat: potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;
4. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa

datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;

5. Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun;
6. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya;

4.3.10. Dana Cadangan

1. Dana Cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud;
2. Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil-hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos lain-lain.

4.3.11. Kewajiban

1. Kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
2. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
3. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima;
5. Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas terbayar sampai saat tanggal pelaporan, dan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah;
6. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya, untuk itu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;
7. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya dan kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut, untuk itu secara umum kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi pertukaran;
8. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya;
9. Jika tagihan belum tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan, jumlah kewajiban tersebut harus diestimasikan;
10. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
11. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
12. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan;
13. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;

14. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah disajikan dalam mata uang Rupiah;
15. Pemerintah Daerah tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya. Meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan atau Pemerintah bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui;
16. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajiannya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.12. Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain;
2. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;
3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4.3.13. Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kewajiban operasional, investasi aset non keuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

4.3.14. Koreksi Kesalahan

1. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
4. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
5. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun lan-lain;
6. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4.4.1. TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang tersebut pada Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

4.4.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 dihasilkan dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan SIMDA BMD untuk Laporan Mutasi Barang.

BAB V
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Total realisasi pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp6.016.822.709.302,80 atau 110,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.455.797.012.840,00.

Realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp249.528.316.754,09 atau 4,33% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp5.767.294.392.548,71 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun 2023 adalah Rp875.581.318.302,80 atau 92,80% dari anggaran sebesar Rp943.506.575.782,00.

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp71.566.637.061,09 atau 8,90% dibandingkan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar Rp804.014.681.241,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pajak Daerah	137.141.658.017,00	168.840.845.572,00	123,11	159.937.230.964,00
2.	Retribusi Daerah	69.323.659.475,00	39.424.212.326,52	56,87	33.315.473.535,14
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	182.540.313.221,00	182.683.243.729,88	100,08	137.641.553.852,52
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	554.500.945.069,00	484.633.016.674,40	87,40	473.120.422.890,05
	JUMLAH	**943.506.575.782,00**	**875.581.318.302,80**	**92,80**	**804.014.681.241,71**

Jumlah tersebut terdiri dari:

5.1.1.1.1. PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp168.840.845.572,00 atau sebesar 123,11% dari anggaran sebesar Rp137.141.658.017,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 2. Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel	2.463.764.590,00	3.455.278.624,00	140,24	3.973.430.265,00
2.	Pajak Restoran	11.712.438.780,00	16.958.201.606,00	144,79	16.546.300.876,00
3.	Pajak Hiburan	416.160.752,00	578.079.136,00	138,91	493.755.777,00
4.	Pajak Reklame	2.216.952.490,00	3.133.000.549,00	141,32	2.543.412.537,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	47.735.012.095,00	57.668.053.973,00	120,81	49.859.880.887,00
6.	Pajak Parkir	232.934.203,00	292.316.623,00	125,49	241.404.567,00
7.	Pajak Air Tanah	1.851.313.960,00	2.152.233.395,00	116,25	1.856.291.457,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	16.300.000,00	16.979.400,00	104,17	20.875.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.928.340.495,00	14.781.182.678,00	148,88	15.788.715.096,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	45.065.435.191,00	46.806.881.524,00	103,86	44.470.049.842,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Perdesaan dan Perkotaan				
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.503.005.461,00	22.998.638.064,00	148,35	24.143.114.660,00
	JUMLAH	**137.141.658.017,00**	**168.840.845.572,00**	**123,11**	**159.937.230.964,00**

Secara keseluruhan realisasi pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah mencapai target yang telah ditetapkan.

5.1.1.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp39.424.212.326,52 atau 56,87% dari anggaran sebesar Rp69.323.659.475,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 3. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	60.654.082.475,00	34.934.486.825,52	57,60	28.873.497.127,14
2.	Retribusi Jasa Usaha	4.234.530.300,00	3.059.317.029,00	72,25	3.662.258.520,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.435.046.700,00	1.430.408.472,00	32,25	779.717.888,00
	JUMLAH	**69.323.659.475,00**	**39.424.212.326,52**	**56,87**	**33.315.473.535,14**

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar 88,61% dihasilkan dari obyek retribusi jasa umum yang totalnya mencapai Rp34.934.486.825,52. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp34.934.486.825,52 atau sebesar 57,60% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp60.654.082.475,00. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 4. Rincian Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**Dinas Kesehatan**	**31.379.199.137,00**	**16.292.623.325,00**	**51,92**	**9.982.847.460,00**
2.	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**	**Dinas Lingkungan Hidup**	**1.155.000.000,00**	**921.558.000,00**	**79,79**	**1.304.202.500,00**
3.	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**Dinas Perhubungan**	**19.229.721.000,00**	**9.917.571.000,00**	**51,57**	**10.453.106.000,00**
4.	**Retribusi Pelayanan Pasar**		**3.534.968.850,00**	**1.247.680.000,00**	**35,30**	**2.288.116.000,00**
		DLH	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	30.000.000,00
		Disdagkop	3.503.468.850,00	1.216.180.000,00	34,71	2.258.116.000,00
5.	**Retribusi Pengujian**	**Dinas Perhubungan**	**1.862.998.988,00**	**1.141.880.000,00**	**61,29**	**1.349.295.000,00**

No	Uraian	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Kendaraan Bermotor					
6.	**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**		**3.077.444.500,00**	**4.970.108.970,52**	**161,50**	**3.150.735.837,14**
		Dinas Kesehatan	19.319.500,00	20.584.636,00	106,55	2.359.600,00
		DPU Bina Marga	2.625.000.000,00	3.657.993.510,00	139,35	1.906.438.062,00
		DPU SDA	63.000.000,00	210.839.400,00	334,67	220.273.300,00
		DPKPCK	341.250.000,00	1.050.977.596,52	307,98	979.260.605,14
		DKP dan Pertanian	26.250.000,00	29.650.828,00	112,96	42.404.270,00
		DLH	2.625.000,00	63.000,00	2,40	-
7.	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**	**Disdagkop**	**215.250.000,00**	**167.083.500,00**	**77,62**	**200.912.000,00**
8.	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**DPU Bina Marga**	**199.500.000,00**	**275.982.030,00**	**138,34**	**144.282.330,00**
	JUMLAH		**60.654.082.475,00**	**34.934.486.825,52**	**57,60**	**28.873.497.127,14**

Beberapa pendapatan retribusi jasa umum tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2023, secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target yang ditetapkan karena Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang sudah UHC *(Universal Health Coverage)* dimana penduduknya sudah ter-*cover* jaminan kesehatan oleh BPJS, sehingga tidak semua pengguna layanan melakukan pembayaran atas layanan kesehatan yang didapat. Selain itu, target pendapatan RSUD kepohbaru terlalu tunggi mengingat RSUD Kepohbaru baru berdiri Tahun 2022. Penambahan pelayanan spesialis masih belum meningkatkan pendapatan secara signifikan karena layanan baru beroperasi pada Mei dan Juli 2023.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tidak mencapai target yang ditetapkan karena dari sejumlah 72 wajib retribusi tersebut terdapat 2 wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban retribusinya yaitu PT. Rekayasa Industri (REKIN) dan Desa Pungpungan.

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mencapai target yang ditetapkan karena penetapan target yang terlalu tinggi dan minimnya kendaraan berplat nomor luar Kabupaten Bojonegoro yang parkir di Bojonegoro, serta retribusi parkir berlangganan belum menerapkan tarif yang baru.

d. Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target yang ditetapkan karena adanya penolakan pembayaran sewa pasar kota lama oleh paguyuban pasar

kota lama selama pembangunan/renovasi bedak pasar wisata, pasar hewan, pasar kerajinan margomulyo, pasar ngasem dan pasar kedewan karena pada saat itu Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih dalam proses penetapan. Aturan tersebut baru ditetapkan pada 24 November 2023. Selain itu, kondisi ekonomi pasca covid seperti banyaknya *online shop* di masyarakat mempengaruhi transaksi di pasar tradisional, sehingga ada pedagang yang belum membayar sewa, dan banyak kios yang tutup sehingga mempengaruhi pendapatan sewa kios.

e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target yang ditetapkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi sehingga lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga sehingga penundaan tersebut berakibat harus membayar lebih karena terkena denda, kurangnya intensitas kegiatan operasi LALIN gabungan DISHUB Kabupaten, Provinsi dan SATLANTAS Polres, tidak adanya personil PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga setiap melakukan penertiban kendaraan harus berkoordinasi dengan PPNS dari DIHUB Provinsi, KEMENHUB Terminal Type A Rajekwesi Bojonegoro atau BPTD Prov JATIM, adanya larangan ODOL (Over Dimensi & Over Load) sehingga ODOL sebagian tidak lagi beroperasi maupun tidak melakukan uji KIR kendaraan, serta sebagian masyarakat sudah mengetahui bahwa tahun 2024 akan diberlakukan Retribusi Pengujian Kendaraan Gratis, sehingga memilih menunda untuk pengujian kendaraannya.

f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak mencapai target karena sebagian pemohon tera masa lakunya tidak setiap tahun dan ada yang berasal dari luar Bojonegoro sehingga tidak bisa tera ulang di Bojonegoro.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.059.317.029,00 atau sebesar 72,25% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 5. Rincian Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**		**2.140.359.900,00**	**1.586.596.529,00**	**74,13**	**1.562.492.520,00**
		DPU Bina Marga	472.500.000,00	286.955.000,00	60,73	309.258.000,00
		Dinas Pertanian	129.748.500,00	83.301.500,00	64,20	87.165.500,00
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	110.111.400,00	81.564.000,00	74,07	66.999.000,00
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	63.000.000,00	32.789.000,00	52,05	48.317.000,00
		Kecamatan Bojonegoro	1.050.000.000,00	1.047.707.829,00	99,78	992.809.795,00
		Badan Pendapatan Daerah	315.000.000,00	54.279.200,00	17,23	57.943.225,00
2.	**Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**218.320.200,00**	**47.550.000,00**	**21,78**	**1.204.500.000,00**

No	Uraian	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	/Villa					
3.	**Retribusi Rumah Potong Hewan**	**Dinas Peternakan**	**315.000.000,00**	**19.475.500,00**	**6,18**	**25.149.000,00**
4.	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**		**1.560.850.200,00**	**1.405.695.000,00**	**90,06**	**870.117.000,00**
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	315.000.000,00	472.530.000,00	150,01	122.568.000,00
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.245.850.200,00	933.165.000,00	74,90	747.549.000,00
	JUMLAH		**4.234.530.300,00**	**3.059.317.029,00**	**72,25**	**3.662.258.520,00**

Retribusi Jasa Usaha yang tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

1) Penyewaan Tanah dan Bangunan tidak mencapai target.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Sewa Lahan Pertanian adalah sebesar Rp1.000,00/m². Pada tahun 2023 Target Retribusi Sewa Lahan Pertanian adalah sebesar Rp1.500,00/m² sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian Target PAD pada tahun 2023 tersebut tidak tercapai karena harga pasaran sewa lahan pertanian di daerah setempat serta kemampuan petani menyewa rata–rata adalah Rp1.000,00/m². Selain itu lahan pertanian BPP Dander pada tahun 2023 tidak ada yang menyewa karena secara teknis airnya sulit sehingga tidak menguntungkan bagi penyewa. Selain itu, rendahnya realisasi pendapatan sewa tanah disebabkan pada Tahun 2023 tidak ada perpanjangan sewa PT. Bangkit Bangun Sarana di Desa Talok, padahal sewa tersebut masih dimasukkan dalam target penerimaan.
Rendahnya pendapatan sewa dari pemakaian kekayaan daerah berupa Laboratorium dikarenakan sewa laboratorium tidak hanya dimonopoli oleh Dinas PU Bina Marga, melainkan ada banyak tempat bagi penyedia untuk memilih Laboratorium di wilayah bojonegoro dan sekitarnya.

2) Penyewaan alat berat tidak tercapai karena sewa alat berat tidak hanya monopoli Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, tetapi ada banyak tempat bagi penyedia untuk sewa alat berat di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya.

3) Retribusi pemakaian alat/jasa gergaji kayu tidak tercapai karena Tahun 2023 para pengrajin mengalami penurunan pesanan dikarenakan kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik dan adanya kecenderungan bahan material baru sebagai pengganti bahan kayu menjadi besi alumunium dan lain sebagainya, belum tumbuhnya para pengrajin baru di saat adanya peningkatan target pendapatan.

b. Retribusi rumah potong hewan tidak tercapai karena fasilitas pemotongan hewan di RPH belum memenuhi persyaratan sehingga calon pengguna jasa enggan menyembelih di RPH dan lebih memilih untuk menyembelih di

tempatnya masing-masing, selain itu adanya penurunan aktifitas/jumlah pemotongan hewan dari pengguna jasa RPH menyebabkan turunnya PAD.

c. Retribusi tempat rekreasi tidak memenuhi target karena sejak pandemi Covid mulai terjadi pergeseran pola kerja, pola konsumsi, maupun adanya disrupsi dimana pesaing dari suatu produk barang dan atau jasa tidak hanya berasal dari jenis yang sama, hal ini berlaku untuk sektor pariwisata.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.430.408.472,00 atau sebesar 32,25% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 6. Rincian Perizinan Tertentu

No	Uraian	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPMPTSP	4.357.500.000,00	1.424.108.472,00	32,68	776.917.888,00
2	Retribusi Izin Trayek	DPMPTSP	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	2.800.000,00
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Dinas Perinaker	71.246.700,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH		**4.435.046.700,00**	**1.430.408.472,00**	**32,25**	**779.717.888,00**

Pendapatan retribusi IMB tidak dapat memenuhi target karena sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan yang menetapkan retribusi PBG adalah Dinas PKP Cipta Karya sedangkan DPMPTSP hanya menerbitkan SK PBG, selain itu hasil kajian telaah sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil Reviu tata kelola perizinan TA. 2022 oleh inspektorat, surat tanggal 2 Mei 2023 nomor: 503/229/412.215/2023 yang menyatakan DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi.

Pendapatan retribusi IMTA tidak terealisasi karena peraturan tentang retribusi IMTA sudah tidak berlaku sebagaimana diatur dalam PP No. 34 Th 2022 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, berubah menjadi RPTKA sebagaimana surat edaran Menteri, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Retribusi Daerah yang berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Pengunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, dimana Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi daerah yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi Pengunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atau pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan paling lambat tanggal 01 Juli 2022, dan sampai saat ini Perda tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) atau Perbup belum ditetapkan sehingga belum ada payung hukum untuk melakukan pemungutan.

5.1.1.1.3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp182.683.243.729,88 atau sebesar 100,08% dari anggaran sebesar

Rp182.540.313.221,00 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel 5. 7. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Bagian Laba PT Bank Jatim	15.942.323.472,00	15.942.323.472,88	100,00	15.648.040.613,52
2.	Bagian Laba PD BPR Bojonegoro	12.125.782.346,00	12.125.782.346,00	100,00	10.163.850.023,00
3.	Bagian Laba PT Asri Dharma Sejahtera	148.998.628.240,00	148.998.628.240,00	100,00	105.801.005.540,00
4.	Bagian Laba PT Bojonegoro Bangun Sarana	1.722.167.163,00	1.722.167.163,00	100,00	2.277.485.288,00
5.	Pendapatan BPR Jatim	501.412.000,00	501.412.000,00	100,00	442.632.000,00
6.	PDAM Bojonegoro	3.250.000.000,00	3.392.930.508,00	104,40	3.308.540.388,00
7.	Pendapatan PT Griya Dharma Kusuma	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**182.540.313.221,00**	**182.683.243.729,88**	**100,08**	**137.641.553.852,52**

Tahun 2023, pendapatan dari PT Griya Dharma Kusuma tidak dianggarkan karena berdasarkan hasil audit di tahun 2018, PT Griya Dharma Kusuma masih mengalami kerugian sehingga tidak dapat menyetorkan pendapatan. Dan pada saat ini sudah tidak beroperasi lagi.

5.1.1.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Lain-lain PAD yang sah yang mencapai Rp484.633.016.674,40 atau sebesar 87,40% dari anggaran sebesar Rp554.500.945.069,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 8. Lain-Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	1.076.250.000,00	849.694.709,00	78,95	468.069.758,00
2.	Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.923.021.362,00	3.125.988.056,00	28,62	2.901.683.754,00
3.	Pendapatan Jasa Giro	7.875.000.000,00	18.093.711.457,66	229,76	10.213.329.046,07
4.	Pendapatan Bunga	88.000.000.000,00	79.785.866.460,10	90,67	79.696.410.958,41
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.675.000.000,00	1.599.841.917,90	43,53	5.100.000,00
6.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.220.750.000,00	7.112.323.859,79	320,27	983.086.193,00
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	683.581.384,00	0,00	533.736.380,00
8.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	5.475.280,00	0,00	0,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian	4.410.000.000,00	10.664.299.966,85	241,82	0,00
10.	Pendapatan dari BLUD	436.320.923.707,00	362.619.506.957,10	83,11	370.894.146.820,39
11.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	1.977.481.757,14
12.	Pendapatan dari	0,00	0,00	0,00	5.447.378.223,04

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya				
13.	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	92.726.626,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**554.500.945.069,00**	**484.633.016.674,40**	**87,40**	**473.120.422.890,05**

Dari jumlah pendapatan tersebut, sebesar 74,82% dihasilkan dari pendapatan BLUD RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan yaitu sebesar Rp362.619.506.957,10 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	Rp	262.371.745.640,51
2. Pendapatan BLUD RSUD Sumberrejo	Rp	40.042.083.497,41
3. Pendapatan BLUD RSUD Padangan	Rp	60.205.677.819,18
Jumlah	**Rp**	**362.619.506.957,10**

5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.064.750.744.721,00 atau sebesar 114,20% dari anggaran sebesar Rp4.434.861.414.632,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 9. Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	3.864.902.869.811,00	4.412.764.834.036,00	114,18	4.326.959.404.057,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	418.657.721.000,00	418.080.877.275,00	99,86	373.390.417.827,00
3	Transfer Antar Daerah	151.300.823.821,00	233.905.033.410,00	154,60	196.077.731.504,00
	JUMLAH	**4.434.861.414.632,00**	**5.064.750.744.721,00**	**114,20**	**4.896.427.553.388,00**

5.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp4.412.764.834.036,00 atau sebesar 114,18% dari anggaran sebesar Rp3.864.902.869.811,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas:

Tabel 5. 10. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	**Dana Bagi Hasil Pajak**	**618.859.786.400,00**	**655.630.400.524,00**	**105,94**	**671.716.839.386,00**
	- DBH Pajak Bumi dan Bangunan	504.381.118.000,00	536.662.321.759,00	106,40	593.077.856.736,00
	- DBH PPh Pasal 21	20.000.000.000,00	24.332.413.535,00	121,66	21.041.199.000,00
	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.284.620.000,00	1.805.591.000,00	54,97	2.025.789.000,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	91.194.048.400,00	92.830.074.230,00	101,79	55.571.994.650,00
2	**Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)**	**1.948.482.234.411,00**	**2.468.798.051.604,00**	**126,70**	**2.418.712.905.490,00**
	- Provisi Sumber Daya Hutan	2.261.915.774,00	2.261.915.774,00	100,00	1.715.887.000,00
	- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	1.498.502.211,00	1.498.502.211,00	100,00	1.958.311.000,00
	- Pertambangan Minyak Bumi	1.943.735.370.515,00	2.451.820.579.308,00	126,14	2.396.550.597.505,00
	- Pertambangan Gas Alam/Bumi	000	12.230.608.400,00	0,00	15.408.991.000,00
	- Pertambangan Panas Bumi	13.392.320,00	13.392.320,00	100,00	29.976.000,00
	- Mineral dan Batubara - Royalty	973.053.591,00	973.053.591,00	100,00	3.049.142.985,00
3	**Dana Alokasi Umum**	**900.580.322.000,00**	**914.999.662.630,00**	**101,60**	**861.028.899.802,00**
4	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**34.257.391.000,00**	**31.486.932.421,00**	**91,91**	**38.098.520.212,00**
	- Bidang Pendidikan	12.692.186.000,00	10.119.689.780,00	79,73	18.153.246.000,00
	- Bidang Kesehatan	12.744.593.000,00	12.564.902.641,00	98,59	11.366.388.022,00
	- Bidang Air Minum dan Sanitasi	8.820.612.000,00	8.802.340.000,00	99,79	6.332.036.400,00
	- Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.246.849.790,00
5	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**362.723.136.000,00**	**341.849.786.857,00**	**94,25**	**337.402.239.167,00**
	- Bantuan Operasional Sekolah Reguler	102.781.620.000,00	102.473.974.908,00	99,70	104.599.315.109,00
	- Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	5.430.000.000,00	5.430.000.000,00	100,00	0,00
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	29.973.000.000,00	29.918.128.000,00	99,82	30.008.134.000,00
	- Tunjangan Profesi Guru	176.201.220.000,00	172.326.286.460,00	97,80	170.604.133.780,00
	- Tambahan Penghasilan Guru	3.105.500.000,00	2.329.125.000,00	75,00	2.461.625.000,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan	30.669.310.000,00	17.885.313.300,00	58,32	21.186.429.964,00
	- Bantuan Operasional KB	12.390.726.000,00	9.575.507.389,00	77,28	6.831.089.230,00
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.155.500.000,00	1.101.160.000,00	95,30	1.183.700.000,00
	- Dana Peningkatan Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	317.389.400,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Dana Fasilitasi Penanaman Modal	263.110.000,00	171.368.800,00	65,13	132.927.084,00
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	753.150.000,00	638.923.000,00	84,83	77.495.600,00
	JUMLAH	**3.864.902.869.811,00**	**4.412.764.834.036,00**	**114,18**	**4.326.959.404.057,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut, belum termasuk Transfer Pusat yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) per tanggal 30 Desember 2023 atas tambahan DBH Kabupaten Bojonegoro sesuai PMK RI No. 159/2023 ditambah dengan penyaluran TDF pada tanggal 29 Desember 2023 atas sisa salur KB DBH sesuai KMK RI No. 38/KM.7/2023, yang terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp676.318.941.000,00 dan DBH SDA sebesar Rp757.926.348.000,00 yang rencananya akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

5.1.1.2.2. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya sebesar Rp418.080.877.275,00 atau sebesar 99,86% dari anggaran yang ditetapkan merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	14.636.752.000,00
2	Dana Desa	407.133.690.000,00	406.556.846.275,00	99,86	358.753.665.827,00
3	Insentif Fiskal	11.524.031.000,00	11.524.031.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**418.657.721.000,00**	**418.080.877.275,00**	**99,86**	**373.390.417.827,00**

Insentif Fiskal merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan. Pada tahun 2023, Kabupaten Bojonegoro menerima Insentif Fiskal untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, dalam Laporan Realisasi Anggaran 2023, Dana Desa disajikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

5.1.1.2.3. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp233.905.033.410,00 atau 154,60% dari anggaran sebesar Rp151.300.823.821,00 merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.3.1. PENDAPATAN BAGI HASIL

Pendapatan Bagi Hasil merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Timur terealisasi sebesar Rp222.263.497.700,00 atau 161,21% dari anggaran sebesar Rp137.867.804.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 12. Pendapatan Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	35.799.788.800,00	54.372.768.700,00	151,88	47.846.185.920,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.448.757.600,00	29.501.534.200,00	169,08	25.513.431.620,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.111.198.400,00	61.109.880.300,00	217,39	44.045.811.460,00
4.	Pajak Air Permukaan	190.800.000,00	589.416.600,00	308,92	354.186.140,00
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	56.317.259.200,00	76.689.897.900,00	136,17	65.089.144.364,00
	JUMLAH	**137.867.804.000,00**	**222.263.497.700,00**	**161,21**	**182.848.759.504,00**

5.1.1.2.3.2. BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp11.641.535.710,00 atau 86,66% dari anggaran sebesar Rp13.433.019.821,00. Bantuan Keuangan dari provinsi dipergunakan untuk:

Tabel 5. 13. Rincian Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
BKK Bidang Kesehatan		**2.806.869.821,00**	**1.343.365.710,00**	**47,86**	**4.127.177.000,00**
1.	BKK Prov Honor Perawat Ponkesdes	2.573.000.000,00	1.147.000.000,00	44,58	3.217.800.000,00
2.	BKK Prov Transport kunjungan Konseling Kesehatan	166.000.000,00	164.800.000,00	99,28	358.561.000,00
3.	BKK Prov Pendamping kegiatan kunjungan konseling kesehatan (KOPIPU)	32.486.200,00	31.565.710,00	97,17	-
4.	BKK Prov Pendampingan Penyelenggaraan Pesantren Sehat	35.383.621,00	-	-	-
5.	BKK Prov pendampingan ibu hamil resiko tinggi	-	-	-	239.129.000,00
6.	BKK Prov untuk Pendampingan pencegahan stunting	-	-	-	238.954.000,00
7.	BKK Prov pendampingan Poskestren	-	-	-	72.733.000,00
BKK Bidang Pendidikan		**7.862.100.000,00**	**7.835.670.000,00**	**99,66**	**7.767.670.000,00**
1.	BKK Prov Honor Kepala/Guru Non PNS TK/PAUD	391.200.000,00	388.800.000,00	99,39	260.800.000,00
2.	Honorarium Kinerja Guru Non PNS	168.000.000,00	144.000.000,00	85,71	-
3.	BKK Prov Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	7.302.900.000,00	7.302.870.000,00	100,00	7.302.870.000,00
4.	BKK Prov Honor Guru Non PNS SMP	-	-	-	72.000.000,00
5.	BKK Prov Honor Guru Non PNS SD	-	-	-	12.000.000,00
6.	BKK Prov Honor Guru Non PNS TK	-	-	-	120.000.000,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
BKK Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		**2.764.050.000,00**	**2.462.500.000,00**	**89,09**	**1.334.125.000,00**
1.	BKK Prov Program Pemberdayaan BUMDesa, Program Jatim Puspa dan Program Desa Berdaya	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	150.500.000,00
2.	BKK Prov Honorarium Aparatur Pemerintah Desa	2.700.050.000,00	2.398.500.000,00	88,83	-
3.	BKK Prov Program Ketahanan Pangan di Desa	-	-	-	1.183.625.000,00
	JUMLAH	**13.433.019.821,00**	**11.641.535.710,00**	**86,66**	**13.228.972.000,00**

5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pada tahun 2023 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp76.490.646.279,00 atau 98,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp77.429.022.426,00 yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 14. Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

No	Nama FKTP	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp
1.	FKTP Margomulyo	1.211.780.113,00	1.236.500.610,00	102,04	1.136.596.056,00
2.	FKTP Ngraho	2.815.823.237,00	2.890.051.727,00	102,64	2.756.413.033,00
3.	FKTP Tambakrejo	3.354.838.079,00	3.218.871.127,00	95,95	3.116.893.242,00
4.	FKTP Ngambon	787.996.328,00	763.482.706,00	96,89	620.948.469,00
5.	FKTP Sekar	1.713.771.141,00	1.678.573.700,00	97,95	1.376.138.886,00
6.	FKTP Bubulan	1.030.874.224,00	1.008.289.179,00	97,81	793.871.122,00
7.	FKTP Gondang	1.265.134.554,00	1.276.395.887,00	100,89	1.286.879.838,00
8.	FKTP Temayang	2.305.370.258,00	2.298.256.079,00	99,69	1.816.221.905,00
9.	FKTP Sugihwaras	2.672.454.356,00	2.724.111.884,00	101,93	2.402.164.817,00
10.	FKTP Kedungadem	3.119.633.920,00	2.977.676.605,00	95,45	2.682.293.754,00
11.	FKTP Kesongo	1.772.478.844,00	1.765.158.705,00	99,59	1.505.079.734,00
12.	FKTP Kepohbaru	4.124.397.511,00	4.052.076.385,00	98,25	3.576.406.890,00
13.	FKTP Baureno	2.946.607.119,00	2.777.961.405,00	94,28	2.856.940.566,00
14.	FKTP Gunungsari	1.921.887.186,00	1.963.810.775,00	102,18	1.478.562.662,00
15.	FKTP Kanor	3.665.917.002,00	3.589.158.760,00	97,91	3.343.779.809,00
16.	FKTP Sumberrejo	2.044.967.570,00	1.919.334.000,00	93,86	1.828.643.951,00
17.	FKTP Mejuwet	2.085.361.834,00	2.083.383.784,00	99,91	1.665.874.658,00
18.	FKTP Balen	4.086.585.440,00	4.031.948.987,00	98,66	3.772.038.215,00
19.	FKTP Sukosewu	2.694.578.686,00	2.637.310.997,00	97,87	2.296.016.334,00
20.	FKTP Kapas	1.332.300.059,00	1.319.595.924,00	99,05	994.414.101,00
21.	FKTP Tanjungharjo	1.692.283.584,00	1.696.265.075,00	100,24	1.199.476.798,00
22.	FKTP Bojonegoro	2.230.556.023,00	2.210.596.014,00	99,11	2.036.230.898,00
23.	FKTP Wisma Indah	1.738.659.476,00	1.691.009.291,00	97,26	1.664.828.815,00
24.	FKTP Trucuk	1.985.874.595,00	2.097.950.952,00	105,64	1.618.515.510,00
25.	FKTP Dander	2.566.169.432,00	2.562.428.140,00	99,85	1.930.912.636,00
26.	FKTP Ngumpakdalem	2.597.152.579,00	2.595.683.657,00	99,94	2.334.151.654,00
27.	FKTP Ngasem	3.376.526.870,00	3.341.063.011,00	98,95	2.981.148.607,00

No	Nama FKTP	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp
28.	FKTP Kalitidu	1.897.402.058,00	1.788.805.024,00	94,28	1.618.162.620,00
29.	FKTP Pungpungan	1.603.641.574,00	1.616.004.540,00	100,77	1.331.782.199,00
30.	FKTP Malo	2.040.890.584,00	2.002.833.539,00	98,14	1.641.050.603,00
31.	FKTP Purwosari	1.901.021.167,00	1.857.030.926,00	97,69	1.786.170.369,00
32.	FKTP Padangan	2.619.033.133,00	2.585.115.735,00	98,70	2.271.300.618,00
33.	FKTP Kasiman	1.584.832.582,00	1.582.682.841,00	99,86	1.161.137.314,00
34.	FKTP Kedewan	760.373.250,00	771.067.943,00	101,41	524.924.211,00
35.	FKTP Gayam	1.881.848.058,00	1.880.160.365,00	99,91	1.446.187.025,00
	JUMLAH	**77.429.022.426,00**	**76.490.646.279,00**	**98,79**	**66.852.157.919,00**

Dari semua penjelasan atas pendapatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa untuk sisi pendapatan, kontribusi pendapatan terbesar adalah dari Kelompok Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp4.830.845.711.311,00 atau mencapai 80,29% dari total pendapatan. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp76.490.646.279,00 atau sebesar 1,27% dari total pendapatan.

5.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Total Belanja Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.348.088.886.775,55 atau 78,63% dari anggaran sebesar Rp8.073.595.821.174,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.982.239.377.104,23 atau sebesar 71,74% dari anggaran sebesar Rp4.157.084.827.072,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 15. Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.594.303.047.559,00	1.101.401.177.795,00	69,08	1.036.828.196.739,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.544.138.902.629,00	1.244.190.987.031,23	80,58	1.148.717.926.783,49
3	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	589.264.975,00	39,28	120.310.958,00
4	Belanja Hibah	848.813.161.084,00	507.992.576.618,00	59,85	397.833.592.970,20
5	Belanja Bantuan Sosial	168.329.715.800,00	128.065.370.685,00	76,08	149.924.582.200,00
	Jumlah	**4.157.084.827.072,00**	**2.982.239.377.104,23**	**71,74**	**2.733.424.609.650,69**

Jumlah tersebut terdiri dari:

5.1.2.1.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1.101.401.177.795,00 atau sebesar 69,08% dari anggaran sebesar Rp1.594.303.047.559,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 16. Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.082.438.108.651,00	641.447.937.342,00	59,26	592.561.765.853,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	134.857.758.223,00	118.679.466.703,00	88,00	117.406.780.288,00
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimp/Angg. DPRD/KDh/ WKDh	1.809.546.612,00	1.480.620.000,00	81,82	1.570.320.000,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.722.869.177,00	26.549.955.507,00	95,77	26.448.657.504,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.150.133.826,00	848.090.648,00	73,74	974.229.706,00
6.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	214.840.496.151,00	190.642.009.950,00	88,74	197.618.665.372,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	131.484.134.919,00	121.753.097.645,00	92,60	100.247.778.016,00
	JUMLAH	**1.594.303.047.559,00**	**1.101.401.177.795,00**	**69,08**	**1.036.828.196.739,00**

Realisasi belanja pegawai per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 17. Rincian Belanja Pegawai Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	990.015.312.199,00	563.443.185.877,00	56,91	545.680.817.596,00
2	Dinas Kesehatan	98.625.322.318,00	88.370.289.411,00	89,60	68.892.000.289,00
3	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	132.447.230.664,00	118.873.380.815,00	89,75	103.019.060.996,00
4	RSUD Sumberrejo	26.589.608.078,00	24.318.900.439,00	91,46	20.011.176.093,00
5	RSUD Padangan	38.466.677.072,00	32.961.947.719,00	85,69	23.008.003.432,00
6	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	9.809.810.178,00	8.488.403.866,00	86,53	7.883.185.355,00
7	Dinas PU Sumber Daya Air	5.769.975.749,00	5.083.613.905,00	88,10	4.786.626.210,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	9.363.673.786,00	7.520.207.489,00	80,31	7.320.955.592,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.345.294.535,00	2.685.189.810,00	80,27	3.300.524.484,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	5.954.908.536,00	5.408.448.385,00	90,82	5.302.726.389,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.892.477.001,00	1.701.414.979,00	89,90	1.557.792.385,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	3.834.101.590,00	3.419.467.744,00	89,19	3.460.896.804,00
13	Dinas Sosial	3.909.111.635,00	2.974.898.162,00	76,10	3.542.520.206,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.996.170.738,00	3.485.450.541,00	87,22	3.926.508.570,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.046.965.946,00	18.689.055.412,00	88,80	18.627.000.422,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	14.391.984.549,00	12.402.336.622,00	86,18	12.604.947.609,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.819.563.002,00	6.941.155.740,00	88,77	6.752.587.656,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.073.591.641,00	3.710.354.006,00	91,08	3.986.511.807,00
19	Dinas Perhubungan	7.995.334.598,00	7.242.952.806,00	90,59	7.445.083.393,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.042.984.406,00	4.495.919.335,00	89,15	4.688.394.107,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.415.816.444,00	3.045.797.803,00	89,17	3.032.373.791,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.609.076.087,00	2.896.464.407,00	80,26	3.195.589.198,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.060.878.921,00	5.251.644.645,00	86,65	5.181.894.505,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.006.372.973,00	3.471.261.405,00	86,64	3.308.291.436,00
25	Dinas Peternakan dan Perikanan	8.650.983.180,00	7.444.720.871,00	86,06	7.883.563.907,00
26	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	4.665.330.930,00	4.061.138.613,00	87,05	3.979.997.232,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.133.515.835,00	3.354.887.149,00	81,16	3.351.496.537,00
28	Sekretariat Daerah	25.103.767.654,00	21.897.687.334,00	87,23	21.554.000.283,00
29	Sekretariat DPRD	32.179.350.482,00	30.299.403.264,00	94,16	30.530.600.218,00
30	Kec Bojonegoro	9.268.085.935,00	8.504.109.976,00	91,76	9.299.095.097,00
31	Kec Kapas	1.966.280.145,00	1.828.479.628,00	92,99	2.065.680.944,00
32	Kec Balen	2.372.896.233,00	2.238.551.582,00	94,34	2.519.661.250,00
33	Kec Sumberrejo	3.241.029.815,00	2.997.050.410,00	92,47	3.023.628.247,00
34	Kec Kanor	2.994.998.137,00	2.798.879.368,00	93,45	2.784.554.161,00
35	Kec Baureno	2.403.011.447,00	2.127.523.770,00	88,54	2.345.826.043,00
36	Kec Sugihwaras	2.425.181.585,00	2.244.442.696,00	92,55	2.256.977.290,00
37	Kec Kepohbaru	2.613.129.549,00	2.428.421.593,00	92,93	2.415.501.618,00
38	Kec Kedungadem	2.308.897.618,00	2.115.786.482,00	91,64	2.188.206.785,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
39	Kec Sukosewu	2.656.006.946,00	2.396.351.817,00	90,22	2.523.219.384,00
40	Kec Trucuk	2.362.258.846,00	2.162.348.213,00	91,54	2.304.811.647,00
41	Kec Malo	2.682.827.770,00	2.446.586.045,00	91,19	2.475.914.702,00
42	Kec Kalitidu	2.241.220.062,00	2.002.114.080,00	89,33	2.096.838.865,00
43	Kec Dander	2.152.627.085,00	1.917.431.643,00	89,07	1.894.863.342,00
44	Kec Padangan	2.342.360.192,00	2.168.812.697,00	92,59	2.207.777.819,00
45	Kec Purwosari	2.382.905.948,00	2.223.480.949,00	93,31	2.184.076.125,00
46	Kec Kasiman	2.403.866.915,00	2.211.278.377,00	91,99	2.395.366.678,00
47	Kec Kedewan	1.909.412.971,00	1.700.451.490,00	89,06	1.663.763.372,00
48	Kec Ngasem	2.257.754.908,00	2.070.275.137,00	91,70	2.038.859.872,00
49	Kec Ngambon	2.337.181.226,00	2.145.904.025,00	91,82	1.850.780.813,00
50	Kec Tambakrejo	2.091.464.543,00	1.947.363.594,00	93,11	2.268.001.722,00
51	Kec Ngraho	2.595.681.367,00	2.333.102.654,00	89,88	2.256.743.884,00
52	Kec Margomulyo	2.216.370.773,00	2.044.392.113,00	92,24	2.095.327.101,00
53	Kec Temayang	2.420.772.111,00	2.195.586.242,00	90,70	2.264.700.148,00
54	Kec Bubulan	1.904.586.723,00	1.730.059.132,00	90,84	1.756.639.522,00
55	Kec Gondang	2.045.263.850,00	1.876.182.552,00	91,73	1.795.592.350,00
56	Kec Sekar	1.919.351.981,00	1.709.547.861,00	89,07	1.802.108.389,00
57	Kec Gayam	2.263.431.620,00	1.993.493.175,00	88,07	2.506.517.741,00
58	Inspektorat	8.032.450.173,00	7.208.766.431,00	89,75	6.669.814.345,00
59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.525.764.084,00	4.988.104.473,00	90,27	4.662.529.534,00
60	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.717.004.899,00	5.357.343.053,00	79,76	5.680.429.271,00
61	Badan Pendapatan Daerah	8.844.686.667,00	7.868.605.474,00	88,96	7.594.058.817,00
62	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.189.094.708,00	5.480.772.509,00	88,56	5.125.203.359,00
	JUMLAH	**1.594.303.047.559,00**	**1.101.401.177.795,00**	**69,08**	**1.036.828.196.739,00**

5.1.2.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Total realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 mencapai Rp1.244.190.987.031,23 atau sebesar 80,58% dari anggaran sebesar Rp1.544.138.902.629,00. Sedangkan di Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.148.717.926.783,49 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp95.473.060.247,74 atau 8,31%.

Tabel 5. 18. Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	201.864.316.648,00	176.057.884.262,38	87,22	140.234.190.447,41
2.	Belanja Bahan Tak Habis Pakai	2.647.932.868,00	2.346.404.075,00	88,61	1.317.851.637,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3.	Belanja Jasa Kantor	364.573.354.679,00	310.156.491.041,00	85,07	306.661.591.420,00
4.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	218.095.422.500,00	215.280.413.243,00	98,71	201.068.602.779,25
5.	Belanja Sewa Tanah	-	-	-	3.000.000,00
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.695.373.140,00	7.743.470.729,00	72,40	4.941.183.530,00
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.866.042.000,00	1.145.624.511,00	61,39	3.978.121.031,00
8.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	22.400.000,00
9.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	98.200.000,00	35.200.000,00	35,85	99.914.300,00
10.	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	7.345.110.227,00	4.542.061.950,00	61,84	14.297.915.530,00
11.	Belanja Jasa Konsultasi non Konstruksi	34.316.083.920,00	24.296.540.171,00	70,80	15.267.056.020,86
12.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availability Payment)*	200.000.000,00	102.949.650,00	51,47	1.713.693.750,00
13.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	789.105.000,00	607.375.000,00	76,97	151.785.000,00
14.	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.794.117.000,00	5.763.977.720,00	65,54	6.946.351.655,00
15.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	107.748.000,00	81.674.700,00	75,80	93.036.319,00
16.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	140.670.668,00	139.247.250,00	98,99	-
17.	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	942.432.900,00
18.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.520.234.016,00	14.459.698.332,00	82,53	12.403.349.563,00
19.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.932.101.623,00	13.204.937.013,00	94,78	13.364.439.362,82
20.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	36.430.384.565,00	26.566.117.433,00	72,92	63.154.258.374,79
21.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	199.850.000,00	99,93	-
22.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	198.579.000,00	99,29	-
23.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.548.271.105,00	55.430.590.222,00	67,15	49.677.158.434,00
24.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	450.000.000,00	-	-	685.897.965,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
25.	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga/ Masyarakat	91.826.855.560,00	67.388.817.250,00	73,39	23.432.908.110,00
26.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga/ Masyarakat	1.924.516.800,00	1.639.006.200,00	85,16	193.563.950,00
27.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	101.694.281.260,00	78.147.861.129,85	76,85	77.488.214.110,36
28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	345.878.781.050,00	238.656.216.149,00	69,00	210.579.010.594,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**1.544.138.902.629,00**	**1.244.190.987.031,23**	**80,58**	**1.148.717.926.783,49**

Rincian belanja barang dan jasa per SKPD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 19. Belanja Barang dan Jasa Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	212.548.086.387,00	145.037.797.825,85	68,24	135.376.479.278,36
2	Dinas Kesehatan	387.332.220.265,00	363.639.409.002,38	93,88	340.816.905.583,33
3	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	249.586.597.687,00	178.679.844.201,00	71,59	155.343.219.102,00
4	RSUD Sumberrejo	57.638.498.023,00	30.561.040.849,00	53,02	22.441.744.987,00
5	RSUD Padangan	38.653.685.340,00	29.415.331.099,00	76,10	32.794.046.505,00
6	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	56.091.414.636,00	29.527.188.020,00	52,64	37.468.512.535,00
7	Dinas PU Sumber Daya Air	29.419.003.497,00	24.074.658.217,00	81,83	36.167.507.354,06
8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	82.098.936.580,00	68.696.266.404,00	83,67	76.300.488.757,99
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.895.016.128,00	2.091.127.950,00	53,69	1.966.862.469,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	10.060.188.147,00	8.721.200.232,00	86,69	6.987.154.399,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.975.436.900,00	4.768.965.864,00	95,85	10.484.785.018,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	9.076.391.302,00	8.523.063.603,00	93,90	6.241.566.044,00
13	Dinas Sosial	36.629.310.762,00	30.560.947.323,00	83,43	7.586.704.374,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	25.271.483.667,00	20.660.559.213,00	81,75	19.540.269.849,57
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.068.857.486,00	9.406.015.116,00	77,94	10.923.845.002,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	21.651.328.799,00	20.457.655.109,00	94,49	18.406.506.536,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.969.925.674,00	4.757.302.174,00	95,72	4.122.399.432,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.937.832.613,00	29.103.066.309,00	97,21	20.561.019.253,00
19	Dinas Perhubungan	16.152.489.437,00	15.699.940.839,00	97,20	15.684.137.412,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.888.603.462,00	11.176.579.195,00	80,47	7.753.125.383,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.118.882.555,00	3.967.638.551,00	96,33	3.611.278.285,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	29.740.822.941,00	24.265.989.104,00	81,59	14.099.600.656,93
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.529.671.399,00	11.456.999.023,00	84,68	11.369.737.000,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.772.254.162,00	1.509.306.734,00	85,16	1.556.181.766,00
25	Dinas Peternakan dan Perikanan	8.409.934.671,00	8.063.628.589,00	95,88	4.852.914.702,00
26	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	9.024.376.878,00	8.266.502.778,00	91,60	7.275.719.001,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.652.444.217,00	4.729.386.561,00	83,67	6.943.175.016,00
28	Sekretariat Daerah	67.183.603.516,00	60.850.656.721,00	90,57	50.997.528.038,00
29	Sekretariat DPRD	36.163.842.767,00	25.993.493.255,00	71,88	23.370.105.596,00
30	Kec Bojonegoro	12.342.284.520,00	11.110.690.518,00	90,02	10.269.623.138,25
31	Kec Kapas	982.688.129,00	973.227.639,00	99,04	876.552.281,00
32	Kec Balen	1.092.337.050,00	1.072.315.085,00	98,17	927.684.581,00
33	Kec Sumberrejo	1.092.796.323,00	1.072.328.801,00	98,13	927.331.125,00
34	Kec Kanor	1.100.617.805,00	1.040.011.450,00	94,49	897.046.300,00
35	Kec Baureno	1.142.885.915,00	1.083.763.371,00	94,83	1.033.263.304,00
36	Kec Sugihwaras	808.456.590,00	793.519.523,00	98,15	736.458.125,00
37	Kec Kepohbaru	1.110.998.016,00	1.102.902.358,00	99,27	965.823.733,00
38	Kec Kedungadem	1.091.722.616,00	1.085.086.576,00	99,39	878.092.381,00
39	Kec Sukosewu	568.743.085,00	556.164.264,00	97,79	493.158.040,00
40	Kec Trucuk	530.682.199,00	520.532.286,00	98,09	402.379.310,00
41	Kec Malo	934.529.680,00	917.227.621,00	98,15	801.626.551,00
42	Kec Kalitidu	914.516.874,00	907.054.827,00	99,18	827.023.140,00
43	Kec Dander	839.482.697,00	830.602.743,00	98,94	772.437.556,00
44	Kec Padangan	569.563.795,00	533.105.923,00	93,60	476.357.767,00
45	Kec Purwosari	591.804.486,00	577.042.764,00	97,51	459.718.037,00
46	Kec Kasiman	564.900.863,00	545.011.402,00	96,48	440.789.413,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
47	Kec Kedewan	440.786.853,00	421.422.091,00	95,61	598.699.712,00
48	Kec Ngasem	967.049.558,00	931.933.287,00	96,37	870.006.170,00
49	Kec Ngambon	392.221.704,00	350.642.230,00	89,40	343.267.730,00
50	Kec Tambakrejo	784.653.150,00	751.187.939,00	95,74	665.087.306,00
51	Kec Ngraho	809.131.337,00	780.859.041,00	96,51	708.059.028,00
52	Kec Margomulyo	534.360.653,00	473.508.614,00	88,61	452.975.853,00
53	Kec Temayang	485.625.730,00	474.467.539,00	97,70	485.121.929,00
54	Kec Bubulan	398.987.415,00	388.456.288,00	97,36	349.041.931,00
55	Kec Gondang	373.427.776,00	368.785.681,00	98,76	303.236.684,00
56	Kec Sekar	371.361.351,00	365.705.675,00	98,48	315.734.688,00
57	Kec Gayam	693.447.290,00	685.064.100,00	98,79	552.650.496,00
58	Inspektorat	4.928.913.579,00	3.856.500.033,00	78,24	3.560.247.011,00
59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.784.276.420,00	6.313.209.142,00	93,06	5.356.957.257,20
60	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.835.354.006,00	6.775.256.948,00	86,47	7.687.883.530,80
61	Badan Pendapatan Daerah	5.256.118.634,00	4.410.235.939,00	83,91	5.182.772.727,00
62	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	9.263.036.632,00	7.461.605.472,00	80,55	8.057.300.613,00
	Jumlah	**1.544.138.902.629,00**	**1.244.190.987.031,23**	**80,58**	**1.148.717.926.783,49**

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Pada Tahun 2023, belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp589.264.975,00 atau 39,28 % dari yang dianggarkan. Belanja subsidi tersebut merupakan subsidi bunga mikro dan ultra mikro bagi peserta Kartu Pedagang Produktif (KPP) pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 merupakan realisasi belanja hibah kepada Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi, baik dalam bentuk uang maupun barang sebesar Rp507.992.576.618,00 atau sebesar 59,85% dari anggaran sebesar Rp848.813.161.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 20. Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	**Dinas Pendidikan**	**147.384.262.651,00**	**117.436.455.634,00**	**79,68**	**115.664.856.342,00**
	- Hibah Uang	147.259.091.451,00	117.436.455.634,00	79,75	115.664.856.342,00
	- Hibah Barang	125.171.200,00	-	-	-
2	**Dinas Kesehatan**	**1.430.000.000,00**	**1.412.324.777,00**	**98,76**	**-**
	- Hibah Barang	1.430.000.000,00	1.412.324.777,00	98,76	-
3	**Dinas PU Bina Marga**	**82.941.799.259,00**	**79.074.745.877,00**	**95,34**	**94.543.432.913,20**
	- Hibah Barang	82.941.799.259,00	79.074.745.877,00	95,34	94.543.432.913,20
4	**Dinas PU Sumber Daya Air**	**356.054.500.000,00**	**112.465.379.773,00**	**31,59**	-

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Hibah Barang	356.054.500.000,00	112.465.379.773,00	31,59	-
5	**Dinas PKP dan Cipta Karya**	**61.289.318.137,00**	**58.723.270.360,00**	**95,81**	**29.107.653.975,00**
	- Hibah Uang	5.819.000.000,00	4.319.000.000,00	74,22	3.636.527.400,00
	- Hibah Barang	55.470.318.137,00	54.404.270.360,00	98,08	25.471.126.575,00
6	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**48.116.773.769,00**	**48.116.773.769,00**	**100,00**	**4.215.445.588,00**
	- Hibah Uang	48.116.773.769,00	48.116.773.769,00	100,00	4.215.445.588,00
7	**Satpol PP**	**1.800.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	**100,00**	**2.196.000.000,00**
	- Hibah Uang	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	2.196.000.000,00
8	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**	**96.307.799.050,00**	**44.972.321.012,00**	**46,70**	**120.387.565.644,00**
	- Hibah Uang	23.278.125.000,00	5.777.788.619,00	24,82	65.036.119.474,00
	- Hibah Barang	73.029.674.050,00	39.194.532.393,00	53,67	55.351.446.170,00
9	**Dinas PMD**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000,00**
	- Hibah Uang	-	-	-	200.000.000,00
10	**Dinas Perhubungan**	**1.667.475.300,00**	**1.667.475.300,00**	**100,00**	**-**
	- Hibah Uang	1.667.475.300,00	1.667.475.300,00	100,00	-
11	**Dinas Kominfo**	**-**	**-**	**-**	**311.880.000,00**
	- Hibah Barang	-	-	-	311.880.000,00
12	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	**5.651.112.500,00**	**3.499.331.766,00**	**61,92**	**3.073.795.000,00**
	- Hibah Uang	5.651.112.500,00	3.499.331.766,00	61,92	3.073.795.000,00
13	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**1.900.397.850,00**	**1.899.498.350,00**	**99,95**	**-**
	- Hibah Uang	1.688.347.850	1.688.347.850,00	100,00	-
	- Hibah Barang	212.050.000	211.150.500,00	99,58	-
14	**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**-**	**-**	**-**	**1.991.267.898,00**
	- Hibah Uang	-	-	-	250.000.000,00
	- Hibah Barang	-	-	-	1.741.267.898,00
15	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**	**1.789.722.568,00**	**-**	**-**	**-**
	- Hibah Barang	1.789.722.568,00	-	-	-
16	**Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**42.480.000.000,00**	**36.925.000.000,00**	**86,92**	**25.869.240.000,00**
	Hibah Uang	42.480.000.000,00	36.925.000.000,00	86,92	25.869.240.000,00
17	**BPKAD**	-	-	-	**272.455.610,00**
	- Hibah Barang	-	-	-	272.455.610,00
	Jumlah Belanja Hibah	**848.813.161.084,00**	**507.992.576.618,00**	**59,85**	**397.833.592.970,20**

Secara rinci belanja hibah per OPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 21. Rincian Belanja Hibah Per OPD

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	**Dinas Pendidikan**	**147.384.262.651,00**	**117.436.455.634,00**	**79,68**	**115.664.856.342,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**109.854.080.770,00**	**106.154.706.150,00**	**96,63**	**104.812.256.000,00**
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.203.980.000,00	7.203.660.000,00	100,00	7.234.440.000,00
	- Penambahan Ruang Kelas Baru	8.792.644.000,00	8.195.000.000,00	93,20	5.715.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Pembangunan Perpustakaan Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	150.000.000,00
	- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	125.000.000,00
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.397.485.000,00	4.397.485.000,00	100,00	6.335.000.000,00
	- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	98.500.000,00	98.500.000,00	100,00	100.000.000,00
	- Penambahan Ruang Kelas Baru	5.555.000.000,00	5.155.000.000,00	92,80	2.165.000.000,00
	- Pembangunan Perpustakaan Sekolah	543.865.530,00	-	-	-
	- Pembangunan Laboratorium	620.003.090,00	-	-	400.000.000,00
	- Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula (MTs)	-	-	-	585.000.000,00
	- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	-
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	100,00	2.020.000.000,00
	- Rehab Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula (MTs)	-	-	-	195.000.000,00
	- Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
	- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Uang)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
	- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	9.781.379.000,00	9.325.404.000,00	95,34	10.815.262.000,00
	- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	870.304.150,00	870.304.150,00	100,00	590.500.000,00
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	100,00	2.220.000.000,00
	- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
	- Pengelolaan Dana BOP PAUD	29.867.400.000,00	29.814.753.000,00	99,82	29.876.794.000,00
	- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.155.500.000,00	1.101.160.000,00	95,30	1.183.700.000,00
	- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (BPPDGS)	34.694.820.000,00	33.734.640.000,00	97,23	34.694.760.000,00
	- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	523.200.000,00	508.800.000,00	97,25	406.800.000,00
	Belanja Hibah Dana BOS	**37.405.010.681,00**	**11.281.749.484,00**	**30,16**	**10.852.600.342,00**
	- Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	1.527.084.000,00	-	-	

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	35.877.926.681,00	11.281.749.484,00	31,44	10.852.600.342,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**125.171.200,00**	**-**	-	**-**
	- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	125.171.200,00	-	-	
	- Belanja Hibah untuk pengadaan peralatan TIK	125.171.200,00	-	-	-
2	**Dinas Kesehatan**	**1.430.000.000,00**	**1.412.324.777,00**	**98,76**	**-**
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**1.430.000.000,00**	**1.412.324.777,00**	98,76	**-**
	- Hibah alat kesehatan kepada PMI	1.430.000.000,00	1.412.324.777,00	98,76	
3	**Dinas PU Bina Marga**	**82.941.799.259,00**	**79.074.745.877,00**	**95,34**	**94.543.432.913,20**
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	**78.100.834.706,00**	**74.640.002.849,00**	95,57	**83.341.603.340,20**
	- Hibah untuk Pekerjaan Pelebaran Jalan Nasional (DPU Bina Marga)	78.100.834.706,00	74.640.002.849,00	95,57	83.341.603.340,20
	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	**4.840.964.553,00**	**4.434.743.028,00**	**91,61**	**11.201.829.573,00**
	- Hibah untuk pembangunan jalan dan jembatan desa (DPU Bina Marga)	4.840.964.553,00	4.434.743.028,00	91,61	11.201.829.573,00
4	**Dinas PU Sumber Daya Air**	**356.054.500.000,00**	**112.465.379.773,00**	**31,59**	**-**
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	**356.054.500.000,00**	**112.465.379.773,00**	**31,59**	**-**
	- Pengadaan tanah untuk pembangunan waduk/Bendungan	356.054.500.000,00	112.465.379.773,00	31,59	-
5	**Dinas PKP dan Cipta Karya**	**61.289.318.137,00**	**58.723.270.360,00**	**95,81**	**29.107.653.975,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**4.319.000.000,00**	**4.319.000.000,00**	**100,00**	**3.636.527.400,00**
	- Bantuan Hibah Uang untuk Sanitasi (MCK)	4.319.000.000,00	4.319.000.000,00	100,00	3.636.527.400,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**1.500.000.000,00**	**-**	**-**	**-**
	- Hibah Uang untuk GKI dan Asrama	Rp1.500.000.000	**-**	-	**-**
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**34.367.254.138,00**	**33.516.014.110,00**	**97,52**	**17.046.667.575,00**
	- Hibah barang untuk NU	3.158.060.398,00	3.033.759.451,00	96,06	2.818.899.762,00
	- Hibah barang untuk MD Kahmi	1.615.749.855,00	1.615.549.855,00	99,99	-
	- Hibah Barang untuk IKSPI	1.125.000.000,00	1.056.851.849,00	93,94	-

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Hibah barang untuk Karang Taruna SIDODADI	226.898.292,00	226.587.167,00	99,86	-
	- Hibah barang untuk LP MA'arif	1.844.417.135,00	1.681.909.195,00	91,19	99.361.000,00
	- Hibah barang untuk Pagar Nusa	587.172.230,00	556.912.827,00	94,85	29.696.000,00
	- Hibah barang untuk Pemuda Ansor	1.536.863.340,00	1.436.697.935,00	93,48	99.089.000,00
	- Hibah barang untuk GKJW Pepanthan	211.239.900,00	210.509.158,00	99,65	-
	- Hibah barang untuk Masjid di Kec. Ngraho dan Kec. Kepohbaru	427.126.600,00	425.873.288,00	99,71	-
	- Hibah barang untuk TPQ, MI dan TK di Kec. Kepohbaru dan Kec. Kanor	891.985.750,00	854.352.795,00	95,78	-
	- Hibah barang untuk Kantor MUI	211.145.500,00	210.405.769,00	99,65	-
	- Hibah barang untuk UNUGIRI	80.000.000,00	79.744.712,00	99,68	-
	- Hibah barang untuk BPN	60.000.000,00	59.600.000,00	99,33	-
	- Hibah barang KONI	100.000.000,00	99.495.543,00	99,50	-
	- Hibah barang PSHT	30.000.000,00	29.836.800,00	99,46	-
	- Hibah barang Gedung Bhineka Tunggal Ika	100.000.000,00	99.450.000,00	99,45	-
	- Hibah Barang untuk KODIM	8.547.411.698,00	8.311.543.014,00	97,24	99.475.000,00
	- Hibah Barang untuk POLRES	13.614.183.440,00	13.526.934.752,00	99,36	1.150.500.340,00
	- Hibah kepada Pondok Pesantren	-	-	-	209.822.000,00
	- Hibah kepada Polsek	-	-	-	6.525.172.689,00
	- Hibah kepada Karang Taruna	-	-	-	199.075.000,00
	- Hibah kepada Koramil	-	-	-	2.950.193.424,00
	- Hibah kepada Kejaksaan Negeri	-	-	-	1.378.932.000,00
	- Hibah kepada Masjid Hasyim Azhari Kec. Kedungadem	-	-	-	224.450.000,00
	- Hibah kepada Lemcadika	-	-	-	903.740.360,00
	- Hibah kepada Himpunan Mahasiswa Islam	-	-	-	79.689.000,00
	- Hibah kepada Fatayat NU	-	-	-	99.400.000,00
	- Hibah kepada BPP Unugiri Bojonegoro	-	-	-	99.422.000,00
	- Hibah kepada Pengadilan Agama	-	-	-	79.750.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**21.103.063.999,00**	**20.888.256.250,00**	**98,98**	**8.424.459.000,00**
	- Bantuan Hibah untuk Air Bersih (HIPPAM)	16.607.000.000,00	16.404.916.250,00	98,78	8.424.459.000,00
	- Bantuan Hibah untuk Air Bersih (HIPPAM DAK FISIK)	4.496.063.999,00	4.483.340.000,00	99,72	-
6	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**48.116.773.769,00**	**48.116.773.769,00**	**100,00**	**4.215.445.588,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	**39.644.753.769,00**	**39.644.753.769,00**	**100,00**	**-**
	- Hibah uang kepada KPU	32.354.911.769,00	32.354.911.769,00	100,00	-
	- Hibah uang kepada Bawaslu	7.289.842.000,00	7.289.842.000,00	100,00	-

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**630.000.000,00**	**630.000.000,00**	**100,00**	**294.435.588,00**
	- Hibah kepada GOW	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	- Hibah kepada Ormas Wanita Katolik	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
	- Hibah kepada Perkumpulan Pamong Seni Budaya Bojonegoro (PSBB)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
	- Hibah kepada PC Pagar Nusa	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	- Hibah kepada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
	- Hibah kepada Yayasan Gerontologi Abiyoso	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	- Hibah kepada PWRI	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
	- Hibah kepada FKUB	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	-
	- Hibah kepada Ormas BAMAG	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	- Hibah kepada MUI	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
	- Hibah kepada Ikatan Pondok Pesantren Bojonegoro (IPPB)	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
	- Hibah kepada ormas Ma'arif NU	-	-	-	25.000.000,00
	- Hibah kepada ormas PP TNI AD	-	-	-	15.000.000,00
	- Hibah kepada ormas PC IPNU	-	-	-	15.000.000,00
	- Hibah kepada ormas DPD KNPI	-	-	-	30.000.000,00
	- Hibah kepada Muslimat NU	-	-	-	189.408.000,00
	- Hibah kepada Perkumpulan Link Kontrol	-	-	-	8.000.000,00
	- Hibah kepada HMI	-	-	-	12.027.588,00
	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**7.842.020.000,00**	**7.842.020.000,00**	**100,00**	**3.921.010.000,00**
	- Belanja Hibah Kepada Partai Amanat Nasional	429.120.000,00	429.120.000,00	100,00	214.560.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	833.220.000,00	833.220.000,00	100,00	416.610.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Demokrat	934.800.000,00	934.800.000,00	100,00	467.400.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Gerindra	781.020.000,00	781.020.000,00	100,00	390.510.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Golkar	941.740.000,00	941.740.000,00	100,00	470.870.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Hanura	276.280.000,00	276.280.000,00	100,00	138.140.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	410.850.000,00	410.850.000,00	100,00	205.425.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera	387.440.000,00	387.440.000,00	100,00	193.720.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	1.381.470.000,00	1.381.470.000,00	100,00	690.735.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Belanja Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan	540.280.000,00	540.280.000,00	100,00	270.140.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Nasdem	523.080.000,00	523.080.000,00	100,00	261.540.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Garuda	103.310.000,00	103.310.000,00	100,00	51.655.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Persatuan Indonesia	299.410.000,00	299.410.000,00	100,00	149.705.000,00
7	**Satpol PP**	**1.800.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	**100,00**	**2.196.000.000,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	**1.800.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	**100,00**	**2.196.000.000,00**
	- Hibah kepada Kodim 0813 Bojonegoro	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	666.000.000,00
	- Hibah kepada Polres Bojonegoro	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.530.000.000,00
8	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**	**96.307.799.050,00**	**44.972.321.012,00**	**46,70**	**120.387.565.644,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**23.278.125.000,00**	**5.777.788.619,00**	**24,82**	**65.036.119.474,00**
	- Hibah uang kepada kelompok tani untuk pembelian benih dan pupuk	23.278.125.000,00	5.777.788.619,00	24,82	65.036.119.474,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**73.029.674.050,00**	**39.194.532.393,00**	**53,67**	**55.351.446.170,00**
	- Hibah Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	530.000.000,00	524.193.000,00	98,90	-
	- Hibah Pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam)	808.000.000,00	802.757.000,00	99,35	-
	- Hibah Pembangunan Jalan Usaha Tani	3.227.000.000,00	3.192.052.000,00	98,92	-
	- Hibah Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.225.000.000,00	1.054.489.000,00	86,08	-
	- Hibah Pembangunan Jalan Usaha Tani	2.940.000.000,00	2.913.174.000,00	99,09	-
	- Hibah Pembangunan Jalan Usaha Tani	19.201.000.000,00	18.870.447.770,00	98,28	-
	- Hibah Pembangunan Jalan Usaha Tani	4.740.000.000,00	4.472.837.148,00	94,36	-
	- Hibah Alsintan Combine Harvester Besar	32.250.000.000,00	-	-	-
	- Hibah Alsintan Traktor Roda 2	30.000.000,00	-	-	-
	- Hibah Alsintan Mesin Perontok Jagung	198.000.000,00	-	-	-
	- Hibah Pupuk NPK Non Subsidi	7.281.900.000,00	7.181.460.000,00	98,62	-
	- Hibah Alsintan Traktor Roda 2 Rotary	280.000.000,00	-	-	-
	- Hibah Alsintan Mesin Perajang Tembakau	120.000.000,00	-	-	-
	- Hibah Rumah Burung Hantu	47.040.000,00	42.652.000,00	90,67	-
	- Corn sheller mobile	109.200.000,00	104.800.000,00	95,97	-

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Penumbuhan Penangkar benih durian dalam rangka pendaftaran dan pelepasan Varietas durian lokal	12.778.650,00	11.047.275,00	86,45	-
	- Fasilitas Penumbuhan Kampung Sayur	29.755.400,00	24.623.200,00	82,75	-
	- Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	-	-	-	32.018.200,00
	- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	169.635.500,00
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-	-	34.068.762.000,00
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	-	-	3.294.251.000,00
	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	-	-	8.796.332.800,00
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	-	-	-	8.841.362.670,00
	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	149.084.000,00
9	**Dinas PMD**	**-**	**-**		**200.000.000,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	-		200.000.000,00
	- Hibah kepada Kodim 0813 Bojonegoro (Dinas PMD)				200.000.000,00
10	**Dinas Perhubungan**	**1.667.475.300,00**	**1.667.475.300,00**	**100,00**	**-**
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.667.475.300,00	1.667.475.300,00	100,00	-
	- Hibah uang kepada Polres Bojonegoro (Dinas Perhubungan)	1.667.475.300,00	1.667.475.300,00	100,00	-
11	**Dinas Kominfo**	-	-		**311.880.000,00**
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**-**	**-**		**311.880.000,00**
	- Hibah barang kepada pondok pesantren				311.880.000,00
12	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	**5.651.112.500,00**	**3.499.331.766,00**	**61,92**	**3.073.795.000,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**5.651.112.500,00**	**3.499.331.766,00**	**61,92**	**3.073.795.000,00**
	- Hibah Uang Kepada KONI Kabupaten Bojonegoro	4.648.000.000,00	2.496.219.266,00	53,71	2.486.245.000,00
	- Hibah Uang Kepada Kwarcab Gerakan Pramuka Bojonegoro	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	75.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Hibah uang Kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)	-	-		512.550.000,00
	- Hibah Uang Kepada Persaudaraan Setia Hati Terate Kabupaten Bojonegoro	193.607.500,00	193.607.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada Pagar Nusa Kabupaten Bojonegoro	134.272.500,00	134.272.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada Persaudaraan Beladiri Rajekwesi Kabupaten Bojonegoro	71.042.500,00	71.042.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Kabupaten Bojonegoro	45.692.500,00	45.692.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada Merpati Putih Kabupaten Bojonegoro	38.992.500,00	38.992.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada RASA Kabupaten Bojonegoro	42.542.500,00	42.542.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada Perguruan Pencak Silat Perisai Diri Kabupaten Bojonegoro	54.192.500,00	54.192.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada Persinas ASAD Kabupaten Bojonegoro	71.042.500,00	71.042.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada Cempaka Putih Kabupaten Bojonegoro	47.192.500,00	47.192.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada Tapak Suci Kabupaten Bojonegoro	53.642.500,00	53.642.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada Pencak Organisasi Kabupaten Bojonegoro	42.542.500,00	42.542.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada Gubug Remaja Kabupaten Bojonegoro	43.292.500,00	43.292.500,00	100,00	-
	- Hibah Uang Kepada Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti Kabupaten Bojonegoro	115.057.500,00	115.057.500,00	100,00	-
13	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**1.900.397.850,00**	**1.899.498.350,00**	**99,95**	**-**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**1.688.347.850,00**	**1.688.347.850,00**	**100,00**	**-**
	- Hibah Uang kepada 36 Grup Kesenian Jaranan dan Reog Kabupaten Bojonegoro	1.688.347.850,00	1.688.347.850,00	100,00	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**212.050.000,00**	**211.150.500,00**	**99,58**	**-**
	- Hibah Barang berupa Alat Musik Campursari	200.000.000,00	199.300.500,00	99,65	
	- Hibah Barang berupa Laptop dan Sound System untuk Sanggar Tari	12.050.000,00	11.850.000,00	98,34	
14	**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**-**	**-**	**-**	**1.991.267.898,00**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**-**	**-**	**-**	**250.000.000,00**
	- Hibah uang untuk paket Budidaya Ikan Lele di Kolam air tawar Mina santri	-	-	-	250.000.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**-**	**-**	**-**	**49.188.000,00**
	- Hibah barang untuk paket Budidaya Ikan Lele di Kolam Bundar	-	-	-	49.188.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**-**	**-**	**-**	**1.692.079.898,00**
	- Hibah untuk paket bududaya ikan lele di kolam bundar	-	-	-	49.188.000,00
	- Hibah untuk pengembangan bank pakan	-	-	-	1.642.891.898,00
15	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**	**1.789.722.568,00**	**-**	**-**	**-**
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**1.789.722.568,00**	**-**	**-**	**-**
	- Hibah barang kepada masyarakat, LPK Swasta berupa Mesin Jahit dan Digital Printing	**1.789.722.568,00**	**-**		**-**
16	**Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**42.480.000.000,00**	**36.925.000.000,00**	**86,92**	**25.869.240.000,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**885.000.000,00**	**885.000.000,00**	**100,00**	**1.104.240.000,00**
	- Hibah uang kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	710.000.000,00	710.000.000,00	100,00	250.000.000,00
	- Hibah uang Kepada Badan Hisab Rukyat	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	20.000.000,00
	- Hibah uang Kepada LPTQ	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
	- Hibah uang Kepada Marbot Masjid	-	-		834.240.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**41.595.000.000,00**	**36.040.000.000,00**	**86,65**	**24.765.000.000,00**
	- Hibah kepada musholla	515.000.000,00	390.000.000,00	75,73	2.530.000.000,00
	- Hibah kepada masjid	1.295.000.000,00	1.105.000.000,00	85,33	505.000.000,00
	- Hibah kepada madin	15.665.000.000,00	13.930.000.000,00	88,92	9.325.000.000,00
	- Hibah kepada LPQ/TPQ/TPA	9.005.000.000,00	7.475.000.000,00	83,01	5.130.000.000,00
	- Hibah kepada Ponpes Yayasan	15.115.000.000,00	13.140.000.000,00	86,93	7.275.000.000,00
17	**BPKAD**	-	-	-	**272.455.610,00**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	**-**	**-**	**-**	**272.455.610,00**
	- Hibah Peralatan kantor kepada Kantor Pertanahan	-	-	-	272.455.610,00
	Jumlah Belanja Hibah	**848.813.161.084,00**	**507.992.576.618,00**	**59,85**	**397.833.592.970,20**

5.1.2.1.5. Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp128.065.370.685,00 atau sebesar 76,08% dari anggaran sebesar Rp168.329.715.800,00. Belanja Bantuan Sosial tersebut merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 22. Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
I	**Bantuan Sosial kepada Individu**	**167.372.715.800,00**	**127.295.370.685,00**	**76,06**	**149.111.682.200,00**
I.a	**Bantuan Sosial Uang kepada Individu**	**76.507.715.800,00**	**38.157.900.000,00**	**49,87**	**27.505.700.000,00**
	Dinas Sosial	**66.244.800.000,00**	**37.855.400.000,00**	**57,14**	**27.250.700.000,00**
	- Bantuan sosial untuk penyandang cacat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	295.500.000,00
	- Bantuan sosial untuk anak yatim dan anak terlantar non panti	12.093.500.000,00	11.796.300.000,00	97,54	12.423.750.000,00
	- Bantuan sosial untuk orang sakit kronis	1.725.000.000,00	1.692.000.000,00	98,09	1.383.000.000,00
	- Bantuan Sosial BPNT Daerah	13.934.000.000,00	13.002.000.000,00	93,31	9.692.350.000,00
	- Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem	38.044.800.000,00	10.917.600.000,00	28,70	-
	- Bantuan Sosial BLT			-	3.318.200.000,00
	- Bantuan Sosial untuk disabilitas produktif	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00
	- Bantuan Sosial untuk eks ODGJ	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	39.000.000,00
	- Bantuan Sosial untuk korban tindak kekerasan	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	28.900.000,00
	Dinas Pendidikan	**5.005.000.000,00**	**302.500.000,00**	**6,04**	**255.000.000,00**
	- Bantuan Sosial Beasiswa Tugas Akhir	5.005.000.000,00	302.500.000,00	6,04	255.000.000,00
	Dinas Kesehatan	**4.000.000.000**	**-**	**-**	**-**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Gizi Bayi	4.000.000.000	-	-	-
	Dinas PKP dan Cipta Karya	**1.257.915.800,00**	**-**	**-**	**-**
	- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.257.915.800	-	-	-
I.b	**Bantuan Sosial Barang kepada Individu**	**90.865.000.000,00**	**89.137.470.685,00**	**98,10**	**121.605.982.200,00**
	Dinas PKP dan Cipta Karya	**90.865.000.000,00**	**89.137.470.685,00**	**98,10**	**121.605.982.200,00**
	- Bansos untuk Pembangunan Sanitasi (MCK)	10.667.000.000,00	9.935.445.000,00	93,14	5.180.737.000,00
	- Bansos untuk Perbaikan rumah tidak layak huni	80.198.000.000,00	79.202.025.685,00	98,76	116.425.245.200,00
II	**Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**	**-**	**-**	**-**	**28.900.000,00**
	- Bansos uang untuk keluarga anak terlantar	-	-	-	28.900.000,00
III	**Belanja Bantuan Sosial untuk Lembaga Non Pemerintahan**	**957.000.000,00**	**770.000.000,00**	**80,46**	**784.000.000,00**
	- Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	957.000.000,00	770.000.000,00	80,46	784.000.000,00
	JUMLAH	**168.329.715.800,00**	**128.065.370.685,00**	**76,08**	**149.924.582.200,00**

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.043.640.098.181,81 atau sebesar 89,58% dari anggaran sebesar Rp2.281.374.108.059,00 dan terdiri dari:

Tabel 5. 23. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	95.188.698.725,00	10.503.081.650,00	11,03	10.736.412.943,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	263.219.681.627,00	231.057.841.248,00	87,78	119.422.029.667,01

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	389.777.666.492,00	361.189.683.243,81	92,67	273.907.615.309,89
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.526.001.455.682,00	1.433.892.555.625,00	93,96	851.796.373.770,79
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.186.605.533,00	6.996.936.415,00	97,36	6.032.202.678,00
	JUMLAH	**2.281.374.108.059,00**	**2.043.640.098.181,81**	**89,58**	**1.261.894.634.368,69**

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.503.081.650,00 atau 11,03% dari anggaran sebesar Rp95.188.698.725,00. Realisasi belanja modal tanah digunakan untuk:

Tabel 5. 24. Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	**Belanja Modal Tanah Persil**	**24.173.729.339,00**	**10.403.581.650,00**	**43,04**	**446.978.000,00**
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	23.173.729.339,00	9.624.341.650,00	41,53	297.861.000,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.000.000.000,00	779.240.000,00	77,92	149.117.000,00
2.	**Belanja Modal Lapangan**	**71.014.969.386,00**	**99.500.000,00**	**0,14**	**5.309.410.943,00**
	- Belanja Modal Tanah untuk Jalan	71.014.969.386,00	99.500.000,00	0,14	2.853.109.943,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	-	-	-	2.456.301.000,00
3.	**Belanja Modal Tanah BLUD**	**-**	**-**	**-**	**4.980.024.000,00**
	JUMLAH	**95.188.698.725,00**	**10.503.081.650,00**	**11,03**	**10.736.412.943,00**

Rincian Belanja Modal Tanah pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 25. Belanja Modal Tanah Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	**Dinas Kesehatan**	**7.149.129.339,00**	**4.154.341.650,00**	**58,11**	**-**
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.149.129.339,00	4.154.341.650,00	58,11	-
2.	**RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo**	**-**	**-**	**-**	**4.980.024.000,00**
	- Belanja Modal Tanah BLUD	-	-	-	4.980.024.000,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3.	**Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang**	**68.152.569.386,00**	**99.500.000,00**	**0,15**	**396.109.943,00**
	- Belanja Modal Tanah untuk Jalan	68.152.569.386,00	99.500.000,00	0,15	396.109.943,00
4.	**Dinas PKP dan Cipta Karya**	**19.887.000.000,00**	**6.249.240.000,00**	**31,42**	**5.360.279.000,00**
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	16.024.600.000,00	5.470.000.000,00	34,14	297.861.000,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.000.000.000,00	779.240.000,00	77,92	149.117.000,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.862.400.000,00	-	-	2.457.000.000,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	-	-	-	2.456.301.000,00
	JUMLAH	**95.188.698.725,00**	**10.503.081.650,00**	**11,03**	**10.736.412.943,00**

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebesar Rp231.057.841.248,00 atau 87,78% dari anggaran sebesar Rp263.219.681.627,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp111.635.811.580,99 atau sebesar 93,48% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp119.422.029.667,01.

Tabel 5. 26. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar Darat	18.030.000.000,00	10.271.000.000,00	56,97	0,00
2.	Belanja Modal Alat Bantu	11.940.634.253,00	11.754.872.650,00	98,44	5.294.888.774,00
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.274.136.870,00	6.546.106.180,00	63,71	9.979.468.000,00
4.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	141.746.109,00	137.999.500,00	97,36	66.680.000,00
5.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	293.226.569,00	290.307.120,00	99,00	0,00
6.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	95.737.423,00	90.923.850,00	94,97	33.927.360,00
7.	Belanja Modal Alat Ukur	86.773.500,00	83.646.000,00	96,40	67.300.800,00
8.	Belanja Modal Alat Pengolahan	295.165.643,00	267.772.449,00	90,72	917.071.290,00
9.	Belanja Modal Alat Kantor	7.521.848.423,00	7.045.211.276,00	93,66	3.039.644.591,00
10.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.416.970.731,00	8.681.336.999,00	92,19	3.582.588.487,00
11.	Belanja Modal Komputer Unit	9.413.105.144,00	8.205.582.016,00	87,17	7.416.346.103,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
12.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.762.242.821,00	2.556.129.325,00	92,54	5.096.607.283,00
13.	Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.038.512.948,00	968.571.475,00	93,27	760.946.145,00
14.	Belanja Modal Alat Studio	2.372.391.394,00	2.155.281.315,00	90,85	1.219.866.381,00
15.	Belanja Modal Alat Komunikasi	618.608.260,00	577.952.130,00	93,43	213.759.558,00
16.	Belanja Modal Alat Kedokteran	97.305.182.442,00	95.700.425.062,00	98,35	8.474.553.180,00
17.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	26.472.746.808,00	26.210.239.940,00	99,01	17.376.670.597,00
18.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.016.334.532,00	2.893.420.000,00	95,93	7.688.247.634,00
19.	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	72.357.150,00	57.091.000,00	78,90	14.200.000,00
20.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	712.500.000,00	652.930.000,00	91,64	0,00
21.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	39.960.000,00	39.700.000,00	99,35	0,00
22.	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	94.616.430,00	0,00	0,00	19.566.000,00
23.	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	600.000.000,00	549.751.800,00	91,63	0,00
24.	Belanja Modal Alat Pelindung	792.816.000,00	787.560.000,00	99,34	0,00
25.	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	1.128.800.000,00	1.125.200.000,00	99,68	1.000.000.000,00
26.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	364.800.000,00	361.773.467,00	99,17	1.926.374.843,61
27.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	854.094.930,00	832.249.210,00	97,44	170.381.900,00
28.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	12.308.600.615,00	12.276.135.765,00	99,74	11.662.980.753,00
29.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BLUD	45.155.772.632,00	29.938.672.719,00	66,30	33.399.959.987,40
	Jumlah	**263.219.681.627,00**	**231.057.841.248,00**	**87,78**	**119.422.029.667,01**

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per SKPD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 27. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	14.686.784.960,00	13.854.975.170,00	94,34	11.949.239.343,00
2.	Dinas Kesehatan	147.391.427.389,00	144.786.717.574,00	98,23	41.456.675.020,00
3.	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	34.301.476.000,00	20.716.929.346,00	60,40	16.903.297.085,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
4.	RSUD Kelas D Sumberrejo	9.659.746.752,00	9.316.923.481,00	96,45	6.254.938.076,40
5.	RSUD Kelas C Padangan	7.034.490.000,00	5.596.562.892,00	79,56	10.388.799.826,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	2.132.544.854,00	2.095.605.500,00	98,27	1.025.587.700,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	20.094.368.932,00	11.920.015.750,00	59,32	1.272.696.000,00
8.	Dinas PKP dan Cipta Karya	920.113.700,00	718.213.460,00	78,06	829.418.506,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	190.027.056,00	187.012.000,00	98,41	108.062.000,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	198.311.550,00	190.564.980,00	96,09	730.867.798,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.287.208,00	58.455.000,00	96,96	54.300.000,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	4.983.209.800,00	1.367.808.000,00	27,45	313.575.295,00
13.	Dinas Sosial	407.206.801,00	398.830.000,00	97,94	233.515.000,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	309.015.510,00	307.075.403,00	99,37	463.261.450,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	587.615.990,00	387.851.900,00	66,00	1.029.074.000,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	1.802.956.600,00	1.791.350.000,00	99,36	3.281.511.000,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.293.168.550,00	1.252.595.650,00	96,86	1.374.929.611,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	116.545.600,00	115.657.000,00	99,24	349.027.600,00
19.	Dinas Perhubungan	476.958.000,00	470.567.467,00	98,66	2.141.527.513,61
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	226.636.700,00	217.005.000,00	95,75	2.399.390.753,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	589.952.400,00	569.855.000,00	96,59	302.432.000,00
22.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.216.442.400,00	1.192.020.500,00	97,99	439.992.400,00
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	467.338.150,00	421.731.200,00	90,24	273.717.500,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	176.954.267,00	175.148.150,00	98,98	65.102.000,00
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	531.273.373,00	502.555.500,00	94,59	96.416.200,00
26.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	393.694.150,00	350.525.500,00	89,03	215.850.156,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.000.000,00	9.324.000,00	93,24	195.004.200,00
28.	Sekretariat Daerah	2.414.280.269,00	2.225.509.890,00	92,18	10.375.976.836,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
29.	Sekretariat DPRD	4.504.707.331,00	4.059.255.340,00	90,11	377.698.665,00
30.	Kecamatan Bojonegoro	2.532.250.736,00	2.436.036.527,00	96,20	1.435.880.089,00
31.	Kecamatan Kapas	79.735.600,00	77.685.000,00	97,43	16.541.550,00
32.	Kecamatan Balen	27.709.100,00	27.235.000,00	98,29	-
33.	Kecamatan Sumberrejo	37.077.700,00	36.399.275,00	98,17	39.323.000,00
34.	Kecamatan Kanor	17.881.600,00	17.835.000,00	99,74	18.620.000,00
35.	Kecamatan Baureno	35.109.300,00	34.229.300,00	97,49	-
36.	Kecamatan Kepohbaru	71.261.100,00	71.120.000,00	99,80	16.999.800,00
37.	Kecamatan Sukosewu	39.815.000,00	39.815.000,00	100,00	-
38.	Kecamatan Trucuk	6.482.200,00	6.482.200,00	100,00	2.475.000,00
39.	Kecamatan Malo	9.315.000,00	9.200.000,00	98,77	-
40.	Kecamatan Kalitidu	49.251.600,00	49.251.600,00	100,00	-
41.	Kecamatan Dander	104.998.743,00	100.550.000,00	95,76	-
42.	Kecamatan Kasiman	113.591.800,00	109.852.000,00	96,71	-
43.	Kecamatan Kedewan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	54.615.200,00
44.	Kecamatan Ngasem	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
45.	Kecamatan Ngambon	78.350.600,00	78.000.000,00	99,55	13.489.500,00
46.	Kecamatan Tambakrejo	30.285.000,00	29.800.000,00	98,40	-
47.	Kecamatan Ngraho	33.726.200,00	33.721.000,00	99,98	-
48.	Kecamatan Margomulyo	75.824.600,00	75.406.100,00	99,45	4.140.000,00
49.	Kecamatan Temayang	-	-	-	3.241.100,00
50.	Kecamatan Gondang	9.315.000,00	9.200.000,00	98,77	-
51.	Kecamatan Sekar	81.443.300,00	78.720.000,00	96,66	-
52.	Kecamatan Gayam	38.808.900,00	38.525.000,00	99,27	3.850.000,00
53.	Inspektorat	922.149.500,00	895.540.110,00	97,11	611.577.370,00
54.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	166.579.400,00	160.475.000,00	96,34	46.171.000,00
55.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	485.114.378,00	473.100.012,00	97,52	418.267.740,00
56.	Badan Pendapatan Daerah	571.868.334,00	508.222.471,00	88,87	713.543.489,00
57.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	415.702.644,00	396.300.000,00	95,33	1.121.411.295,00
	JUMLAH	**263.219.681.627,00**	**231.057.841.248,00**	**87,78**	**119.422.029.667,01**

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp361.189.683.243,81 atau 92,67% dari anggaran sebesar Rp389.777.666.492,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp87.282.067.933,92 atau sebesar 31,87% dari realisasi Tahun 2022sebesar Rp273.907.615.309,89.

Tabel 5. 28. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	344.698.797.422,00	319.153.250.991,81	92,59	248.606.724.699,74
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.524.572.500,00	1.519.712.739,00	99,68	1.025.088.000,00
3.	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	27.500.000,00	18.181.150,00	66,11	1.178.054.000,00
4.	Belanja Modal Bangunan Tugu/Tanda Batas	32.857.796.570,00	31.784.244.530,00	96,73	15.672.529.654,15
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.669.000.000,00	8.714.293.833,00	81,68	7.425.218.956,00
	Jumlah	**389.777.666.492,00**	**361.189.683.243,81**	**92,67**	**273.907.615.309,89**

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 29. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	115.811.808.208,00	110.708.416.796,00	95,59	56.094.747.481,00
2.	Dinas Kesehatan	14.313.859.029,00	9.842.645.435,00	68,76	3.010.428.504,23
3.	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	4.693.000.000,00	3.590.196.180,00	76,50	5.592.187.444,00
4.	RSUD Kelas D Sumberrejo	415.497.983,00	332.928.256,81	80,13	-
5.	RSUD Kelas C Padangan	5.976.000.000,00	5.124.097.653,00	85,74	2.040.242.913,00
6.	Dinas PU Sumber Daya Air	45.027.765.016,00	37.476.168.915,00	83,23	1.221.767.340,00
7.	Dinas PKP dan Cipta Karya	199.441.446.984,00	190.523.231.308,00	95,53	197.568.784.876,10
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	123.514.900,00
9.	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	47.661.221,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	741.805.084,00	589.421.588,00	79,46	429.278.658,55
11.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	454.700.696,00	446.530.000,00	98,20	1.996.208.574,33
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	372.879.125,00	347.387.395,00	93,16	344.400.000,00
13.	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	-	-	65.619.870,00
14.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	872.278.397,00	815.137.778,00	93,45	4.248.155.205,00
15.	Sekretariat DPRD	66.600.000,00	48.840.000,00	73,33	-
16.	Kecamatan Bojonegoro	480.975.177,00	367.474.460,00	76,40	629.924.709,00
17.	Inspektorat	1.109.050.793,00	977.207.479,00	88,11	494.693.613,68
	Jumlah	**389.777.666.492,00**	**361.189.683.243,81**	**92,67**	**273.907.615.309,89**

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.433.892.555.625,00 atau 93,96% dari anggaran sebesar Rp1.526.001.455.682,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp582.096.181.854,21 atau sebesar 68,34% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp851.796.373.770,79.

Tabel 5. 30. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan	1.004.531.532.159,00	971.352.115.585,00	96,70	473.010.038.652,00
2.	Belanja Modal Jembatan	143.699.654.716,00	131.976.734.232,00	91,84	86.316.880.566,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	102.736.067.650,00	92.705.834.213,00	90,24	34.581.255.246,54
4.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	233.834.662.400,00	210.749.619.475,00	90,13	204.930.994.361,50
5.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	381.944.907,00	378.099.601,00	98,99	54.349.655,00
6.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	132.534.000,00
7.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	44.246.274,00	40.753.053,00	92,11	0,00
8.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.588.628.326,00	3.568.011.550,00	99,43	618.930.000,00
9.	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	99.234.000,00
10.	Belanja Modal Jaringan Listrik	35.624.719.250,00	21.864.210.221,00	61,37	49.702.435.511,75
11.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	1.560.000.000,00	1.257.177.695,00	80,59	2.349.721.778,00
	Jumlah	**1.526.001.455.682,00**	**1.433.892.555.625,00**	**93,96**	**851.796.373.770,79**

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 31. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	3.759.191.181,00	3.751.852.654,00	99,80	790.060.535,00
2.	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	1.560.000.000,00	1.257.177.695,00	80,59	2.150.031.000,00
3.	RSUD Kelas C Padangan	-	-	-	199.690.778,00
4.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	1.148.004.006.875,00	1.103.103.259.817,00	96,09	559.106.619.218,00
5.	Dinas PU Sumber Daya Air	115.446.967.000,00	105.310.519.735,00	91,22	46.582.496.486,04
6.	Dinas PKP dan Cipta Karya	255.625.030.400,00	219.047.993.540,00	85,69	241.932.383.984,75

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.800.000,00	3.797.865,00	99,94	-
8.	Dinas Lingkungan Hidup	119.500.000,00	118.732.100,00	99,36	-
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
10.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	227.180.000,00	225.590.000,00	99,30	-
11.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	220.300.000,00
12.	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	-	-	474.812.153,00
13.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	18.000.000,00	17.854.905,00	99,19	31.799.280,00
14.	Kecamatan Bojonegoro	1.204.060.976,00	1.022.058.064,00	84,88	308.180.336,00
15.	Kecamatan Kepohbaru	15.719.250,00	15.719.250,00	100,00	-
	Jumlah	**1.526.001.455.682,00**	**1.433.892.555.625,00**	**93,96**	**851.796.373.770,79**

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 adalah sebesarRp6.996.936.415,00 atau 97,36% dari anggaran sebesar Rp7.186.605.533,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp964.733.737,00 atau 15,99% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.032.202.678,00.

Tabel 5. 32. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	30.000.000,00	29.783.300,00	99,28	59.561.723,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	42.358.000,00	39.570.250,00	93,42	114.170.000,00
3.	Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	109.700.000,00
4.	Belanja Modal Tanda Penghargaan	6.750.000,00	-	-	-
5.	Belanja Modal Tanaman	264.660.500,00	258.683.600,00	97,74	301.457.000,00
6.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	812.250.000,00	795.006.187,00	97,88	559.921.540,00
7.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	60.000.000,00	2.402.950,00	4,00	37.897.075,00
8.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.970.587.033,00	5.871.490.128,00	98,34	4.849.495.340,00
	Jumlah	**7.186.605.533,00**	**6.996.936.415,00**	**97,36**	**6.032.202.678,00**

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 33. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	5.975.087.033,00	5.871.490.128,00	98,27	5.044.495.340,00
2.	Dinas Kesehatan	213.123.600,00	213.122.390,00	100,00	50.265.000,00
3.	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	60.000.000,00	2.402.950,00	4,00	37.897.075,00
4.	Dinas PKP dan Cipta Karya	97.500.000,00	96.689.000,00	99,17	252.303.000,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.744.000,00	-	-	-
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	21.000.000,00
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	-	49.950.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup	245.770.000,00	245.560.000,00	99,91	99.119.000,00
9.	Dinas Perhubungan	30.000.000,00	29.082.000,00	96,94	-
10.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	173.700.000,00
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	55.000.000,00	54.783.300,00	99,61	59.561.723,00
12.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	2.250.000,00	-	-	-
13.	Sekretariat Daerah	-	-	-	28.300.000,00
14.	Kecamatan Bojonegoro	46.380.900,00	39.570.250,00	85,32	-
15.	Inspektorat	32.250.000,00	30.000.000,00	93,02	89.500.000,00
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000,00	148.462.500,00	98,98	-
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.750.000,00	27.250.000,00	98,20	-
18.	Badan Pendapatan Daerah	249.750.000,00	238.523.897,00	95,51	87.483.540,00
19.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	38.628.000,00
	Jumlah	**7.186.605.533,00**	**6.996.936.415,00**	**97,36**	**6.032.202.678,00**

5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 adalah sebesar Rp37.318.031.053,00 atau sebesar 56,55% dari anggaran sebesar Rp65.993.420.313,00.

Rincian realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja tidak terduga untuk santunan kematian sebesar Rp30.807.000.000,00;
2. Belanja tidak terduga untuk santunan korban bencana sebesar Rp4.366.265.000,00;
3. Belanja tidak terduga untuk Insentif Calon Pengantin sebesar Rp100.000.000,00; dan
4. Belanja tidak terduga untuk pengembalian sisa Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur TA. 2020 s/d 2022 sebesar Rp2.044.766.053,00.

5.1.2.4. BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.284.891.380.436,51 atau sebesar 81,88% dari anggaran sebesar Rp1.569.143.465.730,00. Belanja Transfer tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 34. Belanja Transfer

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	26.396.822.032,00	26.154.830.015,00	99,08	21.197.184.063,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.542.746.643.698,00	1.258.736.550.421,51	81,59	1.327.453.048.159,61
JUMLAH	**1.569.143.465.730,00**	**1.284.891.380.436,51**	**81,88**	**1.348.650.232.222,61**

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp26.154.830.015,00 atau sebesar 99,08% dari anggaran sebesar Rp26.396.822.032,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 35. Belanja Bagi Hasil

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	17.554.281.693,00	17.391.878.164,00	99,07	15.575.048.940,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	8.842.540.339,00	8.762.951.851,00	99,10	5.622.135.123,00
JUMLAH	**26.396.822.032,00**	**26.154.830.015,00**	**99,08**	**21.197.184.063,00**

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp1.258.736.550.421,51 atau sebesar 81,59% dari anggaran sebesar Rp1.542.746.643.698,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 36. Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	**29.827.500.000,00**	**16.750.766.400,00**	**56,16**	**36.057.858.000,00**
- BKK – Infrastruktur Kabupaten Lamongan	29.827.500.000,00	16.750.766.400,00	56,16	-
- BKK – Infrastruktur Jalan Kabupaten Blora	-	-	-	32.807.858.000,00
- BKK - Penanganan Dampak Bencana Alam Gempa Bumi kepada Pemkab Cianjur	-	-	-	2.000.000.000,00
- BKK - Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pekerjaan Penataan Ruang Command Centre TA.2023 Kepada Pemkab Sumedang	-	-	-	1.250.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi/Kab/Kota ke Desa	**1.512.919.143.698,00**	**1.241.985.784.021,51**	**82,09**	**1.291.395.190.159,61**
Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintahan Desa	***1.020.146.654.915,00***	***1.018.099.403.063,00***	***99,80***	***811.307.397.865,00***

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
- Alokasi Dana Untuk Desa - APBN (DD)	407.133.690.000	406.556.846.275,00	99,86	358.753.665.827,00
- Alokasi Dana Untuk Desa - APBD (ADD)	613.012.964.915	611.542.556.788,00	99,76	452.553.732.038,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa	***492.772.488.783,00***	***223.886.380.958,51***	***45,43***	***480.087.792.294,61***
- Bantuan Keuangan untuk Stimulan Lomba Desa (Dinas PMD)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	5.405.000.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Penguatan Modal BUMDes (Dinas PMD)	2.500.000.000,00	1.400.000.000,00	56,00	1.300.000.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Pembentukan dan Kepengurusan RT/RW untuk Pemberian Insentif/Honor RT/RW (Dinas PMD)	17.312.400.000,00	17.278.200.000,00	99,80	11.536.800.000,00
- Bantuan Keuangan untuk pembangunan kantor desa/balai desa (Dinas PMD)	19.250.000.000,00	2.100.000.000,00	10,91	6.900.000.000,00
- Bantuan Keuangan untuk pengadaan mobil siaga desa	8.000.000.000,00	-	-	96.052.000.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Ruang Bermain Ramah (DP3AKB)	-	-	-	249.200.000,00
- Bantuan Keuangan untuk pemilihan kepala desa serentak tahun 2023	-	-	-	3.385.920.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Pasar Desa (DPMD)	1.974.370.893,00	1.974.370.850,00	100,00	-
- Bantuan Keuangan untuk Penyediaan Rumah Restorative Justice (DPMD)	500.000.000,00	499.492.000,00	99,90	-
- Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) (DPMD)	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	-
- Bantuan Keuangan untuk Jalan, Drainase, dan Aladin – TMMD (Dinas Perkim Cipta Karya)	-	-	-	470.000.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Jalan Aspal (DPU Binamarga)	245.147.298.415,00	147.977.950.718,20	60,36	-
- Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Jalan Beton (DPU Binamarga)	61.122.569.547,00	44.561.268.000,50	72,90	-

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
- Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Jembatan (DPU Binamarga)	111.421.949.928,00	5.185.505.239,81	4,65	-
- Bantuan Keuangan untuk Distribusi SPPT PBB-P2, Prestasi Pelunasan, Prestasi Pembayaran (Bapenda)	1.120.500.000,00	1.084.594.150,00	96,80	1.081.446.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Kebinamargaan Penunjang TMMD (DPU Binamarga)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	353.707.426.294,61
- Bantuan Keuangan untuk Pembangunan TPS	2.832.050.000,00	-	-	-
- Bantuan Keuangan untuk Linmas	6.166.350.000,00	-	-	-
- Bantuan Keuangan untuk Sanitasi	13.600.000.000,00	-	-	-
JUMLAH	**1.542.746.643.698,00**	**1.258.736.550.421,51**	**81,59**	**1.327.453.048.159,61**

Bantuan Keuangan yang tidak ada realisasi dikarenakan tidak ada ajuan terkait bantuan keuangan.

5.1.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

5.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.218.313.739.958,40 atau sebesar 100,02% dari anggaran sebesar Rp3.217.798.808.334,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 37. Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	**Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**	3.217.798.808.334,00	3.217.798.808.333,61	100,00	**2.827.697.408.698,37**
	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	3.217.798.808.334,00	3.217.798.808.333,61	100,00	2.827.697.061.799,02
	Koreksi SiLPA	-	-	-	346.899,35
2	**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**	-	**514.931.624,79**	-	**849.318.546,46**
	JUMLAH	**3.217.798.808.334,00**	**3.218.313.739.958,40**	**100,02**	**2.828.546.727.244,83**

Tahun 2023 tidak ada pinjaman baru baik kepada pihak pemerintah lain maupun perbankan. Jumlah penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp514.931.624,79 adalah

penerimaan kembali atas pinjaman yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 38. Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat Melalui SKPD Terkait

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	41.950.002,00
2.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.438.369,43
3.	Dinas Peternakan dan Perikanan	361.828.253,36
4.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	73.540.000,00
5.	Bagian Perekonomian dan SDA	21.175.000,00
	JUMLAH	**514.931.624,79**

5.1.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak mengeluarkan pinjaman modal kerja baru bagi masyarakat atas hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Bojonegoro Tahun 2014. Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp600.000.000.000,00 karena pengeluaran pembiayaan ini sedianya dilakukan untuk pembentukan dana abadi pendidikan berkelanjutan, akan tetapi regulasi yang ada (peraturan pemerintah tentang dana abadi) sampai saat ini belum terbentuk.

Tabel 5. 39. Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	600.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	600.000.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih Awal	**Rp**	**3.217.798.808.333,55**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**Rp**	**3.217.798.808.333,61**
Selisih	**Rp**	**(0,06)**
Realisasi Pendapatan TA. 2023	Rp	6.016.822.709.302,80
Realisasi Belanja TA. 2023	Rp	6.348.088.886.775,55
Surplus/Defisit	**Rp**	**(331.266.177.472,75)**
Penerimaan Pembiayaan TA. 2023	Rp	3.218.313.739.958,40
Pengeluaran Pembiayaan TA. 2023	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	**Rp**	**3.218.313.739.958,40**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	**Rp**	**0,06**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**Rp**	**2.887.047.562.485,65**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2023 adalah sebagai berikut:

5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	**3.217.798.808.333,55**	**2.827.697.061.799,02**

Nilai SAL awal sebesar Rp3.217.798.808.333,55 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2022. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2023.

5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**3.217.798.808.333,61**	**2.827.697.408.698,37**

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2022 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2023, yaitu sebesar Rp3.217.798.808.333,61.

5.2.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**2.887.047.562.485,65**	**3.217.798.808.333,55**

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp2.887.047.562.485,65, dengan rincian sebagai berikut:

Pelampauan Pendapatan Asli Daerah	Rp	(67.926.158.279,20)
Pendapatan Transfer	Rp	629.889.325.889,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	(938.376.147,00)
Jumlah	**Rp**	561.024.791.462,80
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya		
Belanja Operasi	Rp	1.174.818.450.171,17
Belanja Modal	Rp	237.734.009.877,19
Belanja Tidak Terduga	Rp	28.675.389.260,00
Belanja Transfer	Rp	284.252.085.293,49
Jumlah	**Rp**	1.725.479.934.601,85
Pembiayaan		
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	Rp	514.931.625,34
Sisa penghematan Pengeluaran Pembiayaan	Rp	600.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	**Rp**	600.514.931.625,34
SILPA Tahun Anggaran 2023	**Rp**	**2.887.047.562.485,65**

Tabel 5. 40. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan	5.455.797.012.840,00	6.016.822.709.302,80	110,28	5.767.294.392.548,71
Belanja dan Transfer	8.073.595.821.174,00	6.348.088.886.775,55	78,63	5.378.042.311.459,99
Surplus (Defisit)	(2.617.798.808.334,00)	(331.266.177.472,75)	12,65	389.252.081.088,72
Pembiayaan Netto	2.617.798.808.334,00	3.218.313.739.958,40	122,94	2.828.546.727.244,83
SILPA	**0,00**	**2.887.047.562.485,65**	**0,00**	**3.217.798.808.333,55**

5.2.4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	**0,06**	**346.899,35**

Pada tahun 2023, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi SiLPA dana BOS SD Negeri sebesar Rp0,03 dan BOP PAUD Negeri sebesar 0,03. Sedangkan pada tahun 2022, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan

koreksi atas saldo kas yang ada di bendahara BOP PAUD Negeri Tahun 2022 sebesar Rp346.899,35.

5.2.5. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AKHIR

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**2.887.047.562.485,65**	**3.217.798.808.333,55**

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp2.887.047.562.485,65.

5.3. NERACA

5.3.1. ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.795.343.373.200,55 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

5.3.1.1. ASET LANCAR

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.366.252.008.061,24 terdiri dari Kas, Piutang, Persediaan, dan Belanja dibayar di muka dengan penjelasan sebagai berikut.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas	2.887.047.562.485,65	3.217.798.808.333,55
Piutang	76.527.580.421,18	484.456.759.845,27
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(24.473.385.919,84)	(23.230.302.787,24)
Belanja dibayar di muka	141.666.667,00	41.614.583,33
Persediaan	427.008.584.407,25	234.475.861.924,84
Jumlah	**3.366.252.008.061,24**	**3.913.542.741.899,75**

5.3.1.1.1 Kas

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas	**2.887.047.562.485,65**	**3.217.798.808.333,55**

Jumlah saldo kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersebut diatas terdiri dari:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
- **Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)**	**2.817.802.051.807,30**	**3.118.233.753.215,13**
- **Kas di BLUD**	**60.784.410.860,30**	**98.486.764.894,20**
• Rek. Kas RSUD Sosodoro Djatikoesoemo No.0081011866	46.051.347.592,93	70.646.465.588,42
• Rek. Kas RSUD Sumberrejo No.0691002136	3.602.648.585,16	13.706.323.965,75
• Rek. Kas RSUD Padangan No.0081006857	11.130.414.682,21	14.133.975.340,03
- **Kas di Bendahara Pengeluaran**	**600.000,00**	**2.190.000,00**
- **Kas di Bendahara Penerimaan**	**76.555.812,00**	**5.946.000,00**
- **Kas di Bendahara JKN / FKTP**	**2.115.776.069,41**	**737.675.311,79**
- **Kas Dana BOS**	**656.645.414,26**	**0,00**
- **Kas Lainnya (BOS, BOP PAUD, dan BOK)**	**5.611.522.522,38**	**332.478.912,43**
Jumlah	**2.887.047.562.485,65**	**3.217.798.808.333,55**

5.3.1.1.1.1 Kas di Bendahara Umum Daerah

Jumlah kas di Bendahara Umum Daerah menurut buku sama dengan jumlah yang ada di rekening koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk Giro dengan nomor rekening 0081000500 yaitu sebesar Rp2.817.802.051.807,30.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Pada Tahun 2023 terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kecamatan Bojonegoro. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 41. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Dinas Perhubungan	50.000,00	-	50.000,00	-
Dinas Kesehatan	4.243.000,00	905.000,00	4.243.000,00	905.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.653.000,00	31.659.900,00	1.653.000,00	31.659.900,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	92.412,00	-	92.412,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	35.905.000,00	-	35.905.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	-	6.400.000,00	-	6.400.000,00
Kecamatan Bojonegoro	-	1.593.500,00	-	1.593.500,00
JUMLAH	**5.946.000,00**	**76.555.812,00**	**5.946.000,00**	**76.555.812,00**

Penambahan kas di bendahara penerimaan terdiri dari pendapatan pajak pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp31.659.900,00 dan pendapatan denda pajak pada BPKAD sebesar Rp92.412,00 yang dibayar melalui Tokopedia dan disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2024, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp35.905.000 yang disetor ke RKUD pada tanggal 2 dan 10 Januari 2024, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.400.000,00 yang disetor ke RKUD pada tanggal 3 Januari 2024, Retribusi Penyewaan Tanah eks bengkok Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp1.593.500,00 yang disetorkan ke RKUD pada tanggal 29 Januari 2024, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp905.000,00 yang baru disetorkan pada bulan Januari dan Februari 2024.

Pengurangan kas di bendahara penerimaan terdiri dari penerimaan retribusi parkir harian yang masih ada di rekening bendahara penerimaan Dinas Perhubungan per tanggal 31 Desember 2022 yang secara otomatis dipindahbukukan oleh Bank Jatim ke RKUD pada hari kerja berikutnya yaitu pada tanggal 2 Januari 2023 sebesar Rp50.000,00, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan senilai Rp4.243.000,00 yang disetorkan ke RKUD pada tanggal 2, 5, 6, 9, 10, 12, 18, 27 dan 30 Januari 2023 serta pendapatan pajak restoran dan pajak MBLB pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp1.653.000,00 yang disetorkan ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2023.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada Tahun 2023 terdapat kas di bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan sebesar Rp600.000,00 yang merupakan selisih lebih penyetoran PPh 4(2) pada SP2D No. 05.04/04.0/001112/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/12/ 2023 yang seharusnya potongan PPh 4(2) sebesar Rp3.847.464,00 tetapi jumlah e-billing sebesar Rp6.760.568,00, sehingga terjadi lebih potong sebesar Rp2.913.104,00. Atas jumlah tersebut sudah disetor kembali ke RKUD sebesar

Rp2.313.104,00 pada tanggal 30 Desember 2023 dan sisanya baru disetorkan kembali ke RKUD pada tanggal 1 Februari 2024.

Sedangkan pada tahun 2022 terdapat kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp2.190.000,00 yang merupakan pengembalian sisa UP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang belum disetorkan ke RKUD per tanggal 31 Desember 2023 dan baru disetor pada tanggal 5 Januari 2023.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di bendahara BLUD merupakan saldo kas di bendahara BLUD yang terdiri atas tiga RSUD. Jumlah kas pada bendahara BLUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp60.784.410.860,30 dan Rp98.486.764.894,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 42. Kas di Bendahara BLUD

No.	Nama BLUD	No. Rekening	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	0081011866	46.051.347.592,93	70.646.465.588,42
2	RSUD Sumberrejo	0691002136	3.602.648.585,16	13.706.323.965,75
3	RSUD Padangan	0081006857	11.130.414.682,21	14.133.975.340,03
JUMLAH			**60.784.410.860,30**	**98.486.764.894,20**

Dari total kas di bendahara BLUD terdapat kas tunai di bendahara BLUD RSUD Sumberrejo sebesar Rp3.589.510,00 dan RSUD Padangan sebesar Rp20.505.232,00.

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pada Tahun 2023 terdapat kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp2.115.776.069,41, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 43. Kas di Bendahara FKTP

No.	Nama FKTP	Saldo Kas Per 31 Des 2022 (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)
1	FKTP Margomulyo	19.968.811,00	1.236.500.610,00	1.192.036.491,00	64.432.930,00
2	FKTP Ngraho	2.987.389,98	2.890.051.727,00	2.791.313.417,00	101.725.699,98
3	FKTP Tambakrejo	224.760,00	3.218.871.127,00	3.147.195.287,00	71.900.600,00
4	FKTP Ngambon	2.544.365,00	763.482.706,00	751.389.513,00	14.637.558,00
5	FKTP Sekar	29.238,00	1.678.573.700,00	1.673.652.168,00	4.950.770,00
6	FKTP Bubulan	171.151,00	1.008.289.179,00	998.912.054,00	9.548.276,00
7	FKTP Gondang	700.175,00	1.276.395.887,00	1.255.216.417,00	21.879.645,00
8	FKTP Temayang	15.863,50	2.298.256.079,00	2.273.762.568,00	24.509.374,50
9	FKTP Sugihwaras	14.019.546,00	2.724.111.884,00	2.630.787.077,00	107.344.353,00
10	FKTP Kedungadem	32.549.650,50	2.977.676.605,00	2.840.838.108,00	169.388.147,50
11	FKTP Kesongo	6.265.431,00	1.765.158.705,00	1.732.168.826,00	39.255.310,00
12	FKTP Kepohbaru	26.036.740,00	4.052.076.385,00	4.063.418.401,40	14.694.723,60
13	FKTP Nglumber	58.315.144,00	-	-	58.315.144,00
14	FKTP Baureno	135.616.552,60	2.777.961.405,00	2.853.156.102,00	60.421.855,60
15	FKTP Gunungsari	7.777,88	1.963.810.775,00	1.866.283.953,96	97.534.598,92
16	FKTP Kanor	73.290.165,00	3.589.158.760,00	3.607.505.100,00	54.943.825,00

No.	Nama FKTP	Saldo Kas Per 31 Des 2022 (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)
17	FKTP Sumberrejo	156.963.883,00	1.919.334.000,00	1.959.547.671,00	116.750.212,00
18	FKTP Mejuwet	5.059,25	2.083.383.784,00	2.055.167.346,00	28.221.497,25
19	FKTP Balen	8.337,46	4.031.948.987,00	3.972.099.058,40	59.858.266,06
20	FKTP Sukosewu	36.027.514,00	2.637.310.997,00	2.582.658.202,00	90.680.309,00
21	FKTP Kapas	40.371,00	1.319.595.924,00	1.319.615.552,00	20.743,00
22	FKTP Tanjungharjo	1.933,00	1.696.265.075,00	1.582.652.413,00	113.614.595,00
23	FKTP Bojonegoro	32.125.017,00	2.210.596.014,00	2.227.438.533,00	15.282.498,00
24	FKTP Wisma Indah	40.912.211,00	1.691.009.291,00	1.705.087.239,00	26.834.263,00
25	FKTP Trucuk	164.519,94	2.097.950.952,00	1.919.022.794,50	179.092.677,44
26	FKTP Dander	3.486,00	2.562.428.140,00	2.544.440.849,00	17.990.777,00
27	FKTP Ngumpakdalem	45.670,00	2.595.683.657,00	2.536.042.723,00	59.686.604,00
28	FKTP Ngasem	19.212.750,44	3.341.063.011,00	3.271.728.383,00	88.547.378,44
29	FKTP Kalitidu	103.159,25	1.788.805.024,00	1.788.905.938,12	2.245,13
30	FKTP Pungpungan	28.015.906,00	1.616.004.540,00	1.549.188.832,00	94.831.614,00
31	FKTP Malo	2.861.644,00	2.002.833.539,00	1.962.684.584,00	43.010.599,00
32	FKTP Purwosari	24.057.473,00	1.857.030.926,00	1.772.778.642,00	108.309.757,00
33	FKTP Padangan	24.000.092,50	2.585.115.735,00	2.602.565.266,00	6.550.561,50
34	FKTP Kasiman	41.044,00	1.582.682.841,00	1.544.793.203,00	37.930.682,00
35	FKTP Kedewan	303.486,49	771.067.943,00	742.799.237,00	28.572.192,49
36	FKTP Gayam	38.994,00	1.880.160.365,00	1.795.693.572,00	84.505.787,00
	JUMLAH	**737.675.311,79**	**76.490.646.279,00**	**75.112.545.521,38**	**2.115.776.069,41**

Saldo kas di bendahara JKN per 31 Desember 2023 termasuk kas tunai sebesar Rp11.377,00 pada Puskesmas Baureno.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, Pasal 3 menerangkan bahwa UPTD Puskesmas sejumlah 35 Puskesmas dengan menghapuskan Puskesmas Nglumber sebagai UPTD. Hal ini dikarenakan pada wilayah kerja di Kecamatan Kepohbaru telah didirikan RSUD Kelas D Kepohbaru.

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Pada tahun 2022, Kas Lainnya merupakan Kas Dana BOS, Kas Dana BOP PAUD, dan Kas Dana BOK Kesehatan. Pada tahun 2023, Kas Lainnya terdiri dari Kas Dana BOP PAUD dan Kas Dana BOK Kesehatan, sedangkan Kas Dana BOS disajikan secara terpisah. Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo kas lainnya sebesar Rp 5.611.522.522,38 yang terdiri dari Kas Dana BOP PAUD TK Negeri sebesar Rp646.899,38 dan Kas Dana BOK Kesehatan sebesar Rp5.610.875.623,00.

Sisa dana BOP PAUD tetap berada di sekolah dan tidak disetorkan ke kas daerah. Rincian saldo kas dana BOP PAUD pada empat TK Negeri disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 44 Kas Dana BOP PAUD

No	Uraian	Saldo Kas Per 31 Des 2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	TKN Pembina Bojonegoro	159,831.37	0,03	24,600,000.00	24,600,000.00	159,831.40
2.	TKN Pembina Balen	611,074.01	-	28,849,850.00	29,400,000.00	60,924.01
3.	TKN Pembina Purwosari	1,619,910.04	-	26,602,150.00	27,900,000.00	322,060.04
4.	TKN Model Terpadu	181,083.93	-	23,323,000.00	23,400,000.00	104,083.93
	JUMLAH	**2.571.899,35**	**0,03**	**103.375.000,00**	**105.300.000,00**	**646.899,38**

Sedangkan rincian saldo kas dana BOK kesehatan pada puskesmas disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 45. Rincian Saldo Kas Dana BOK Kesehatan

No	Nama Puskesmas	Saldo Kas Per 31 Des 2022 (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Puskesmas Margomulyo	-	581.491.000,00	328.496.442,00	252.994.558,00
2.	Puskesmas Ngraho	-	691.464.000,00	663.405.572,00	28.058.428,00
3.	PuskesmasTambakrejo	-	746.913.000,00	377.211.675,00	369.701.325,00
4.	Puskesmas Ngambon	-	525.717.000,00	309.099.249,00	216.617.751,00
5.	Puskesmas Sekar	-	636.132.000,00	551.168.278,00	84.963.722,00
6.	Puskesmas Bubulan	-	442.544.000,00	299.463.168,00	143.080.832,00
7.	Puskesmas Gondang	-	608.498.000,00	385.791.137,00	222.706.863,00
8.	Puskesmas Temayang	-	553.100.000,00	476.617.450,00	76.482.550,00
9.	Puskesmas Sugihwaras	-	425.931.800,00	109.619.460,00	316.312.340,00
10.	Puskesmas Kedungadem	-	484.031.100,00	328.949.691,00	155.081.409,00
11.	Puskesmas Kesongo	-	553.180.000,00	363.648.700,00	189.531.300,00
12.	Puskesmas Kepohbaru	-	746.960.000,00	498.024.448,00	248.935.552,00
13.	Puskesmas Baureno	-	426.074.600,00	227.291.753,00	198.782.847,00
14.	Puskesmas Gunungsari	-	470.203.000,00	292.595.580,00	177.607.420,00
15.	Puskesmas Kanor	-	608.464.000,00	342.574.332,00	265.889.668,00
16.	Puskesmas Sumberrejo	-	445.027.800,00	320.286.766,00	124.741.034,00
17.	Puskesmas Mejuwet	-	425.948.600,00	384.999.187,00	40.949.413,00
18.	Puskesmas Balen	-	719.197.000,00	465.001.765,00	254.195.235,00
19.	Puskesmas Sukosewu	-	580.839.000,00	334.412.745,00	246.426.255,00
20.	Puskesmas Kapas	-	414.885.000,00	318.350.783,00	96.534.217,00
21.	Puskesmas Tanjungharjo	-	387.282.000,00	229.148.444,00	158.133.556,00
22.	Puskesmas Bojonegoro	-	425.977.300,00	260.477.470,00	165.499.830,00
23.	Puskesmas Wisma Indah	-	414.885.000,00	313.769.492,00	101.115.508,00
24.	Puskesmas Trucuk	-	470.203.000,00	347.640.320,00	122.562.680,00
25.	Puskesmas Dander	-	309.780.800,00	196.509.388,00	113.271.412,00
26.	Puskesmas Ngumpakdalem	-	470.203.000,00	316.140.967,00	154.062.033,00
27.	Puskesmas Ngasem	-	802.109.000,00	602.395.181,00	199.713.819,00
28.	Puskesmas Kalitidu	-	497.824.000,00	436.905.731,00	60.918.269,00
29.	Puskesmas Pungpungan	-	329.142.100,00	168.340.000,00	160.802.100,00
30.	Puskesmas Malo	-	464.667.700,00	385.677.003,00	78.990.697,00
31.	Puskesmas Purwosari	-	348.503.400,00	231.052.650,00	117.450.750,00

No	Nama Puskesmas	Saldo Kas Per 31 Des 2022 (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)
32.	Puskesmas Padangan	-	553.100.000,00	455.063.361,00	98.036.639,00
33.	Puskesmas Kasiman	-	497.862.000,00	422.973.220,00	74.888.780,00
34.	Puskesmas Kedewan	-	498.031.000,00	355.753.504,00	142.277.496,00
35.	Puskesmas Gayam	-	329.142.100,00	175.582.765,00	153.559.335,00
	Jumlah	**-**	**17.885.313.300,00**	**12.274.437.677,00**	**5.610.875.623,00**

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023, Kas Dana BOS disajikan secara terpisah. Saldo kas dana BOS tahun 2023 adalah sebesar Rp656.645.414,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 46. Kas Dana BOS

No.	Uraian	Saldo Kas Per 31 Des 2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)
1	SD Negeri	93.899.960,98	0,03	65.291.208.589,00	65.011.846.417,74	373.262.132,27
2	SMP Negeri	236.007.052,10	-	31.331.016.835,00	31.283.640.605,11	283.383.281,99
	JUMLAH	**329.907.013,08**	**0,03**	**96.622.225.424,00**	**96.295.487.022,85**	**656.645.414,26**

Sisa dana BOS tersebut tetap berada di sekolah dan tidak disetorkan ke kas daerah. Rincian perhitungan dana BOS disajikan dalam **Lampiran 1.**

5.3.1.1.2 Piutang

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang	**76.527.580.421,18**	**484.456.759.845,27**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

- Piutang Pajak	Rp	19.577.941.819,52
- Piutang Retribusi	Rp	1.761.286.170,33
- Bagian Lancar Piutang SKPD	Rp	10.606.425.730,99
- Bagian Lancar Piutang TP-TGR	Rp	9.100.000,00
- Piutang Lainnya	Rp	44.572.826.700,34
Jumlah	**Rp**	**76.527.580.421,18**

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak pada Tahun 2023 sebesar Rp19.577.941.819,52 terdiri dari:

Tabel 5. 47. Piutang Pajak

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	59.465.600,00	113.721.998,64	0,00	173.187.598,64
Piutang Pajak Reklame	224.188.115,00	40.044.694,00	70.201.562,00	194.031.247,00
Piutang Bahan Galian Gol C	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Piutang Pajak Restoran	4.879.458,00	517.358.553,40	0,00	522.238.011,40

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Piutang Pajak Parkir	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
Piutang Pajak Permukaan ABT	92.555.227,00	11.929.217,00	15.424.203,00	89.060.241,00
Piutang Pajak Sarang Burung	21.100.000,00	0,00	2.250.000,00	18.850.000,00
Piutang Pajak Hiburan	19.450.000,00	3.685.654,28	0,00	23.135.654,28
Piutang PPJ	3.973.741.384,00	4.639.381.157,00	3.973.741.384,00	4.639.381.157,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.992.067.614,20	999.961.115,00	1.075.784.819,00	13.916.243.910,20
Jumlah	**18.389.261.398,20**	**6.326.082.389,32**	**5.137.401.968,00**	**19.577.941.819,52**

Piutang pajak tersebut sudah termasuk piutang PBB pelimpahan dari KPP Pratama yang belum selesai diverifikasi.

Berdasarkan surat Bupati Bojonegoro kepada BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Nomor 973/110/412.304/2020 tanggal 15 Januari 2020 dapat dijelaskan bahwa:

1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pelimpahan PBB-P2 dari KPP Pratama kepada Pemkab Bojonegoro bahwa piutang PBB-P2 tahun 2001-2012 sebesar Rp8.169.455.650,00.
2. Berdasarkan LHP BPK-RI atas LKPD Kabupaten Bojonegoro tanggal 31 Desember 2016 bahwa saldo piutang sudah berkurang menjadi Rp6.473.082.069,61 atau ada pembayaran sebesar Rp1.696.373.580,39.
3. Berdasarkan LHP BPK-RI atas LKPD Kabupaten Bojonegoro tanggal 31 Desember 2018 bahwa saldo piutang berkurang lagi menjadi Rp6.447.175.064,61 atau ada pembayaran sebesar Rp25.907.005,00.
4. Setelah tahun 2016 hingga sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran piutang 2001-2012 tersebut.

Data piutang tersebut belum dapat diverifikasi dan divalidasi sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajarannya, maka tidak ada jumlah piutang yang pasti.

Sebagaimana rekomendasi BPK-RI bahwa Pemkab Bojonegoro harus memverifikasi dan memvalidasi piutang dimaksud maka Badan Pendapatan Daerah telah mengupayakan verifikasi mulai tanggal 5 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Surat Bupati Bojonegoro Nomor 973/1219/412.304/2019 tanggal 5 Juli 2019 untuk verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 desa-desa di Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Dander, Kalitidu, dan Gayam.
2. Surat Bupati Bojonegoro Nomor 973/209/412.304/2020 tanggal 4 Pebruari 2020 untuk verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 desa-desa di Kecamatan Kepohbaru, Kedungadem, Trucuk, dan Baureno.
3. Surat Bupati Bojonegoro Nomor 973/516/412.304/2020 tanggal 6 Maret 2020 untuk verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 desa-desa di Kecamatan Padangan, Tambakrejo, dan Sumberrejo.

Untuk menyelesaikan proses verifikasi dan validasi tersebut, Badan Pendapatan Daerah telah mengirimkan surat tagihan ke masing-masing kecamatan yang belum mengirimkan hasil verifikasi. Hasil verifikasi sementara ada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Dander, Kalitidu, dan Padangan. Setelah proses verifikasi selesai pada akhir bulan Juni 2020 maka akan ditetapkan besaran piutang PBB-P2 hasil verifikasi dengan SK Bupati.

Badan Pendapatan Daerah menyatakan bahwa dalam rangkaian kegiatan verifikasi piutang PBB-P2 mengalami kendala karena pelimpahan piutang PBB dari KPP Pratama tersebut tidak disertai rincian alamat wajib pajak. Sehingga atas piutang tersebut tidak memenuhi unsur subjektif dan tidak dapat dilakukan penagihan.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.761.286.170,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 48. Piutang Retribusi

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Piutang Retribusi Sewa Tanah	4.765.000,33	620.000,00	0,00	5.385.000,33
Piutang Retribusi Trayek	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Piutang Retribusi IMB	28.414.085,00	3.955.920,00	15.915.735,00	16.454.270,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	1.459.269.000,00	1.707.544.900,00	1.459.269.000,00	1.707.544.900,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	64.441.740,00	0,00	64.441.740,00	0,00
Piutang Retribusi Cetak Peta (DPKP Cipta Karya)	0,00	31.602.000,00	0,00	31.602.000,00
JUMLAH	**1.557.189.825,33**	**1.743.722.820,00**	**1.539.626.475,00**	**1.761.286.170,33**

5.3.1.1.2.3 Bagian Lancar Piutang SKPD

Jumlah Bagian Lancar Piutang SKPD per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.606.425.730,99. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 49. Bagian Lancar Piutang SKPD

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**	**1.815.982.660,77**	**-**	**16.438.369,43**	**1.799.544.291,34**
	Pinjaman Modal Industri	**1.046.246.593,94**	**-**	**7.238.369,43**	**1.039.008.224,51**
	- Pinjaman Modal IKDK 2005	17.542.000,00	-	-	17.542.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2006	2.071.000,00	-	-	2.071.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2007	2.915.000,00	-	-	2.915.000,0
	- Pinjaman Modal IKDK 2008	3.168.000,00	-	-	3.168.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2009	16.547.000,00	-	-	16.547.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2010	9.846.000,00	-	-	9.846.000,00

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
	- Pinjaman Modal Cukai 2010	62.346.000,00	-	-	62.346.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2011	77.731.000,00	-	–	77.731.000,00
	- Pinjaman Modal Cukai 2011	217.893.000,00	-	2.400.000,00	215.493.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2012	52.844.812,41	-	1.157.156,79	51.687.655,62
	- Pinjaman Modal Cukai 2012	141.084.386,28	-	-	141.084.386,28
	- Pinjaman Modal IKDK 2013	21.526.364,34	-	-	21.526.364,34
	- Pinjaman Modal Cukai 2013	66.268.155,71	-	-	66.268.155,71
	- Pinjaman Modal IKDK 2014	115.042.966,25	-	-	115.042.966,25
	- Pinjaman Modal Cukai 2014	239.420.908,95	-	3.681.212,64	235.739.696,31
	Pinjaman Tenaga Kerja	**769.736.066,83**	-	**9.200.000,00**	**760.536.066,83**
	- Pinjaman TKI 2001	57.511.352,73	-	-	57.511.352,73
	- Pinjaman TKI 2002	71.600.363,64	-	5.200.000,00	66.400.363,64
	- Pinjaman TKI 2003	571.240.018,46	-	-	571.240.018,46
	- Pinjaman TKI 2004	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00
	- Pinjaman TKI 2005	55.384.332,00	-	4.000.000,00	51.384.332,00
2	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**	**1.627.150.625,00**	-	**73.540.000,00**	**1.553.610.625,00**
	Pinjaman Modal Petani	**107.210.625,00**	-	-	**107.210.625,00**
	- Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah 2004	27.565.625,00	-	-	27.565.625,00
	- Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai 2005	-	-	-	-
	- Pinjaman Modal Petani Kecil 2007	20.400.000,00	-	-	20.400.000,00
	- Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija 2007	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	- Pinjaman Pupuk Berimbang 2008	55.245.000,00	-	-	55.245.000,00
	Pinjaman Usaha Tani Tembakau	**1.307.900.000,00**	-	**31.440.000,00**	**1.276.460.000,00**
	- Tembakau ON FARM (Kelompok Tani) 2010	96.275.000,00	-	-	96.275.000,00
	- Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2010	29.000.000,00	-	-	29.000.000,00
	- Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2011	123.000.000,00	-	19.000.000,00	104.000.000,00
	- Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2012	162.200.000,00	-	1.500.000,00	160.700.000,00
	- Tembakau ON FARM (Pengusaha) 2013	40.000.000,00	-	2.000.000,00	38.000.000,00
	- Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2013	857.425.000,00	-	8.940.000,00	848.485.000,00
	Pinjaman Bergulir (ex.	**212.040.000,00**	-	**42.100.000,00**	**169.940.000,00**

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
	Dinas Ketahanan Pangan)				
	- Pinjaman Modal Dryer 2005	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
	- Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2006	58.440.000,00	-	-	58.440.000,00
	- Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2007	94.200.000,00	-	22.700.000,00	71.500.000,00
	- Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2008	19.400.000,00	-	19.400.000,00	-
3	**Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah**	**197.750.000,00**	**-**	**21.175.000,00**	**176.575.000,00**
	- Pinjaman Dekranasda 2004	-	-		
	- Pinjaman Dekranasda 2005	22.250.000,00	-	450.000,00	21.800.000,00
	- Pinjaman Dekranasda 2006	6.400.000,00	-	500.000,00	5.900.000,00
	- Pinjaman Dekranasda 2007	1.200.000,00	-	400.000,00	800.000,00
	- Pengrajin kayu 2004	167.900.000,00	-	19.825.000,00	148.075.000,00
4	**Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM**	**1.609.706.190,94**	**-**	**41.950.002,00**	**1.567.756.188,94**
	- Piutang Koperasi 2001	43.800.000,00	-	-	43.800.000,00
	- Piutang Koperasi 2002	17.900.000,00	-	-	17.900.000,00
	- Piutang Koperasi 2003	22.750.000,00	-	-	22.750.000,00
	- Piutang Koperasi 2003 PAK	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
	- Piutang Koperasi 2004	32.000.000,00	-	7.700.000,00	24.300.000,00
	- Piutang UKM 2004	34.200.000,00	-	-	34.200.000,00
	- Piutang Koperasi 2005	59.000.000,00	-	-	59.000.000,00
	- Piutang Koperasi 2005 PAK	19.500.000,00	-	-	19.500.000,00
	- Piutang UKM 2005	24.724.600,00	-	-	24.724.600,00
	- Piutang Koperasi 2006	23.665.000,00	-	-	23.665.000,00
	- Piutang Koperasi 2006 PAK	-	-	-	-
	- Piutang UKM 2006	36.639.383,00	-	-	36.639.383,00
	- Piutang Koperasi 2007	10.000.000,00	-	3.000.000,00	7.000.000,00
	- Piutang UKM 2007	43.700.000,00	-	-	43.700.000,00
	- Piutang UKM 2007 PAK	76.425.000,00	-	-	76.425.000,00
	- Piutang Koperasi 2008	46.750.000,00	-	-	46.750.000,00
	- Piutang UKM 2008	259.125.660,00	-	-	259.125.660,00
	- Piutang Koperasi 2009	31.128.000,00	-	15.000.000,00	16.128.000,00
	- Piutang UKM 2009	191.797.000,00	-	14.000.000,00	177.797.000,00
	- Piutang Koperasi 2010	60.826.850,00	-	-	60.826.850,00
	- Piutang UKM 2010	144.772.067,00	-	1.500.002,00	143.272.065,00
	- Piutang Cukai 2011	88.750.000,00	-	-	88.750.000,00
	- Piutang Koperasi 2014	-	-	-	-
	- Piutang UKM 2014	242.252.630,94	-	750.000,00	241.502.630,94
5	**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**5.870.767.879,07**	**-**	**361.828.253,36**	**5.508.939.625,71**

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
	- Piutang Sapi Kreman 2003	129.144.500,00	-	-	129.144.500,00
	- Piutang Sapi Betina 2004	16.327.800,00	-	-	16.327.800,00
	- Piutang Sapi Betina 2005	44.150.400,00	-	-	44.150.400,00
	- Piutang Sapi Betina 2006	25.202.300,00	-	-	25.202.300,00
	- Piutang Sapi Betina 2011	241.500.000,00	-	11.500.000,00	230.000.000,00
	- Piutang Sapi Kreman 2011	112.000.000,00	-	22.000.000,00	90.000.000,00
	- Piutang Kambing/Domba 2011	1.075.200.000,00	-	35.500.000,00	1.039.700.000,00
	- Piutang Sapi Betina 2012	463.420.000,00	-	72.700.000,00	390.720.000,00
	- Piutang Sapi Kreman 2012	315.650.000,00	-	56.300.000,00	259.350.000,00
	- Piutang Kambing/Domba 2012	804.660.000,00	-	7.500.000,00	797.160.000,00
	- Piutang Budidaya Burung Puyuh 2012	6.300.000,00	-	-	6.300.000,00
	- Piutang Budidaya Ikan 2012	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
	- Piutang Sapi Kreman 2013	139.500.000,00	-	20.000.000,00	119.500.000,00
	- Piutang Sapi Betina 2013	551.100.000,00	-	11.795.000,00	539.305.000,00
	- Piutang Kambing/Domba 2013	1.016.880.000,00	-	67.000.000,00	949.880.000,00
	- Piutang Ikan 2013	-	-	-	-
	- Piutang Sapi Kereman 2014	265.944.175,53	-	4.000.000,00	261.944.175,53
	- Piutang Sapi Betina 2014	243.714.110,37	-	8.490.326,43	235.223.783,94
	- Piutang Kambing/domba 2014	212.217.699,19	-	45.042.926,93	167.174.772,26
	- Piutang Budidaya Ikan 2014	197.856.893,98	-	-	197.856.893,98
	JUMLAH	**11.121.357.355,78**	**-**	**514.931.624,79**	**10.606.425.730,99**

Bagian Lancar Piutang SKPD tersebut merupakan piutang dalam bentuk pemberian pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat dan sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di lima SKPD dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pinjaman modal tersebut harus di kembalikan ke Kas daerah dengan tenggat waktu pinjaman yang telah ditentukan dengan sifat lunas putus. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan pinjaman modal tersebut sejak Tahun 2004 sampai dengan 2014. Pada Tahun 2023 tidak ada pemberian pinjaman baru.

Secara terinci, bagian lancar piutang SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**
   Selama Tahun 2023 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pengurangan piutang senilai Rp16.438.369,43 merupakan pembayaran angsuran pinjaman selama Tahun 2023.

2. **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
   Selama Tahun 2023 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sedangkan pengurangan senilai Rp73.540.000,00 merupakan pembayaran angsuran pinjaman selama Tahun 2023.

3. **Bagian Perekonomian dan SDA**
   Selama Tahun 2023 tidak terdapat penambahan piutang pada Bagian Perekonomian dan SDA. Pengurangan piutang senilai Rp21.175.000,00 merupakan pembayaran pinjaman di Tahun 2023.

4. **Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro**
   Pada Tahun 2023 tidak terdapat penambahan piutang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Pengurangan piutang senilai Rp41.950.002,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2023.

5. **Dinas Peternakan dan Perikanan**
   Selama Tahun 2023 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Sedangkan pengurangan senilai Rp361.828.253,36 merupakan pembayaran selama Tahun 2023.

5.3.1.1.2.4 Bagian Lancar Piutang TP-TGR

Jumlah Piutang Lancar TP-TGR per 31 Desember 2023 sama dengan 31 Desember 2022 yaitu senilai Rp9.100.000,00 yang merupakan Piutang TP-TGR a.n. Baidowi yang belum lunas.

5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp44.572.826.700,34 dan Rp453.379.851.265,96 tersebut terdiri dari:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
- Piutang Bunga	153.721.195,11	154.321.195,11
- Piutang Klaim Kesehatan	38.690.813.568,00	43.868.246.974,02
- Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	8.291,00	252.118.423.831,00
- Piutang Dividen	2.285.500.000,00	154.517.341.089,60
- Piutang Lainnya	3.442.783.646,23	2.721.518.176,23
Jumlah	**44.572.826.700,34**	**453.379.851.265,96**

Mutasi piutang lainnya dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 50. Piutang Lainnya

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Piutang Bunga	**154.321.195,11**	**-**	**600.000,00**	**153.721.195,11**
- Dinas Peternakan dan Perikanan	43.016.330,00	-	-	43.016.330,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	400.000,00	-	-	400.000,00
- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM	86.181.490,00	-	-	86.181.490,00
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	24.723.375,11	-	600.000,00	24.123.375,11
Piutang Klaim Kesehatan	**43.868.246.974,02**	**295.903.643.299,00**	**301.081.076.705,02**	**38.690.813.568,00**
- KAI	21.738.480,00	37.587.016,00	46.915.490,00	12.410.006,00
- Inhealth	59.286.982,00	70.372.349,00	122.136.761,00	7.522.570,00
- BPJS kesehatan	39.162.262.188,00	281.788.903.790,00	283.147.170.899,00	37.803.995.079,00
- Jasa Raharja	1.825.726.105,00	10.873.470.126,00	12.493.719.609,00	205.476.622,00

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
- Pertamedika	13.218.853,00	535.500,00	13.754.353,00	-
- Pihak Ketiga	310.179.059,02	-	110.829.059,02	199.350.000,00
- BPJS Ketenagakerjaan	172.506.807,00	770.762.157,00	495.800.250,00	447.468.714,00
- Taspen	-	11.752.159,00	3.973.211,00	7.778.948,00
- Klaim Kemenkes (Covid)	2.271.893.500,00	2.309.577.500,00	4.581.471.000,00	-
- Pertamina EP Sukowati	31.435.000,00	3.630.000,00	35.065.000,00	--
- PT Kartika Bina Medikatama	-	37.052.702,00	30.241.073,00	6.811.629,00
Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	**252.118.423.831,00**	**1.044.909.219.260,00**	**1.297.027.634.800,00**	**8.291,00**
- DBH-Pajak Rokok	12.151.616.800,00	-	12.151.616.800,00	-
- DBH- PBB	-	-	-	-
- DBH- SDA	239.966.807.031,00	1.044.909.219.260,00	1.284.876.018.000,00	8.291,00
Piutang Deviden	**154.517.341.089,60**	**2.285.500.000,00**	**154.517.341.089,60**	**2.285.500.000,00**
- Deviden Bank Jatim	-	-	-	-
- Deviden BPR Bojonegoro	12.125.782.346,00	-	12.125.782.346,00	-
- Deviden PT ADS	138.998.628.240,00	-	138.998.628.240,00	-
- Dividen BPR Jatim	-	-	-	-
- Deviden PT BBS	-	-	-	-
- Deviden PDAM	3.392.930.503,60	2.285.500.000,00	3.392.930.503,60	2.285.500.000,00
- Deviden PT GDK	-	-	-	-
Piutang Lainnya	**2.721.518.176,23**	**803.526.724,00**	**82.261.254,00**	**3.442.783.646,23**
- Piutang Pihak Ketiga	2.667.256.922,23	-	28.000.000,00	2.639.256.922,23
- Remunerasi TKD TDF	54.261.254,00	-	54.261.254,00	-
- Piutang Sewa Kios/Toko/Bedak	-	803.526.724,00	-	803.526.724,00
JUMLAH	**453.379.851.265,96**	**1.343.901.889.283,00**	**1.752.708.913.848,62**	**44.572.826.700,34**

1. **Piutang Bunga**

   Pengurangan piutang bunga sebesar Rp600.000,00 terdiri dari pembayaran bunga pinjaman modal selama tahun 2023 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp600.000,00. Sehingga jumlah saldo piutang bunga pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp153.721.195,11.

2. **Piutang Klaim Kesehatan**

   Saldo piutang klaim kesehatan tahun 2023 sebesar Rp38.690.813.568,00 berasal dari penambahan piutang klaim kesehatan senilai Rp295.903.643.299,00 yang disebabkan adanya tagihan yang belum terbayar atas klaim KAI, *inhealth*, BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, Pihak Pertamedika, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Klaim Kementerian Kesehatan, Pertamina EP Sukowati dan PT Kartika Bina Medikatama selama Tahun 2023. Sedangkan pengurangan piutang klaim kesehatan

sebesar Rp301.081.076.705,02 merupakan pembayaran klaim kesehatan selama Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 51. Piutang Klaim Kesehatan

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	**KAI**	**21.738.480,00**	**37.587.016,00**	**46.915.490,00**	**12.410.006,00**
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	14.243.749,00	24.405.766,00	26.239.509,00	12.410.006,00
	- RSUD Padangan	7.494.731,00	13.181.250,00	20.675.981,00	-
2	**Inhealth**	**59.286.982,00**	**70.372.349,00**	**122.136.761,00**	**7.522.570,00**
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	59.286.982,00	70.372.349,00	122.136.761,00	7.522.570,00
3	**BPJS Kesehatan**	**39.162.262.188,00**	**281.788.903.790,00**	**283.147.170.899,00**	**37.803.995.079,00**
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	32.353.723.262,00	223.601.226.288,00	226.829.286.042,00	29.125.663.508,00
	- RSUD Sumberrejo	2.697.885.627,00	3.270.797.734,00	2.697.885.627,00	3.270.797.734,00
	- RSUD Padangan	4.110.653.299,00	54.916.879.768,00	53.619.999.230,00	5.407.533.837,00
4	**Jasa Raharja**	**1.825.726.105,00**	**10.873.470.126,00**	**12.493.719.609,00**	**205.476.622,00**
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	1.489.165.070,00	8.905.209.861,00	10.219.791.574,00	174.583.357,00
	- RSUD Sumberrejo	138.987.935,00	-	138.987.935,00	-
	- RSUD Padangan	197.573.100,00	1.968.260.265,00	2.134.940.100,00	30.893.265,00
5	**Pertamedika**	**13.218.853,00**	**535.500,00**	**13.754.353,00**	**-**
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	13.218.853,00	535.500,00	13.754.353,00	-
6	**Pihak Ketiga**	**310.179.059,02**	**-**	**110.829.059,02**	**199.350.000,00**
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	310.179.059,02	-	110.829.059,02	199.350.000,00
7	**BPJS Ketenagakerjaan**	**172.506.807,00**	**770.762.157,00**	**495.800.250,00**	**447.468.714,00**
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	172.506.807,00	636.458.512,00	495.800.250,00	313.165.069,00
	- RSUD Padangan	-	134.303.645,00	-	134.303.645,00
8	**Taspen**	**-**	**11.752.159,00**	**3.973.211,00**	**7.778.948,00**
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	-	11.752.159,00	3.973.211,00	7.778.948,00
9	**Klaim Kemenkes (Covid)**	**2.271.893.500,00**	**2.309.577.500,00**	**4.581.471.000,00**	**-**
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	1.886.375.500,00	1.759.154.500,00	3.645.530.000,00	-
	- RSUD Sumberrejo	120.450.000,00	-	120.450.000,00	-
	- RSUD Padangan	265.068.000,00	550.423.000,00	815.491.000,00	-
10	**Pertamina EP Sukowati**	**31.435.000,00**	**3.630.000,00**	**35.065.000,00**	**-**
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	31.435.000,00	3.630.000,00	35.065.000,00	-
11	**PT Kartika Bina Medikatama**	**-**	**37.052.702,00**	**30.241.073,00**	**6.811.629,00**
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	-	37.052.702,00	30.241.073,00	6.811.629,00
	Jumlah	**43.868.246.974,02**	**295.903.643.299,00**	**301.081.076.705,02**	**38.690.813.568,00**

3. **Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak**

Penambahan Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp1.044.909.219.260,00 terdiri dari pengakuan piutang DBH SDA berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 38/KM.7/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 sebesar Rp1.044.909.219.260,00.

Pengurangan Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak terdiri dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp12.151.616.800,00 serta penyelesaian atas kurang bayar DBH dan pemotongan lebih bayar DBH berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 38/KM.7/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 sebesar Rp1.284.876.018.000,00. Sehingga saldo piutang DBH Pajak dan DBH SDA per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.291,00.

4. **Piutang Deviden**

Penambahan piutang deviden pada tahun 2023 berupa piutang deviden PDAM tahun 2022 sebesar Rp2.285.500.000,00. Sedangkan pengurangan piutang deviden pada tahun 2023 terdiri:

a. Piutang Deviden PD BPR Bojonegoro atas laba tahun 2022 sebesar Rp12.125.782.346,00;
b. Piutang Deviden PT ADS atas laba tahun 2022 sebesar Rp138.998.628.240,00; dan
c. Piutang Deviden PDAM atas laba tahun 2019 sebesar Rp3.392.930.503,60.

Sehingga saldo piutang deviden per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.285.500.000,00.

5. **Piutang Lainnya**

Pengurangan senilai Rp82.261.254,00 terdiri dari pelunasan remunerasi atas transfer DBH Pajak dan SDA dengan mekanisme TDF *(Treasury Deposit Facility)* sebesar Rp54.261.254,00 dan pelunasan piutang Pihak Ketiga yang berasal dari koreksi atas kurang volume pemeriksaan BPK PDTT Belanja TA 2019 yang berpengaruh ke nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta penyusutan sebesar Rp28.000.000,00. Sehingga saldo piutang lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.639.256.922,23.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**(24.473.385.919,84)**	**(23.230.302.787,24)**

Penyisihan piutang tidak tertagih Tahun 2023 sebesar (Rp24.473.385.919,84) terdiri dari:

Tabel 5. 52. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	10.384.222.609,96	776.452.895,88	302.343.141,65	10.858.332.364,19
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.627.550.625,00	0,00	73.940.000,00	1.553.610.625,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.840.706.035,88	0,00	41.161.744,54	1.799.544.291,34
Dinas Peternakan dan Perikanan	5.913.784.209,07	0,00	404.844.583,36	5.508.939.625,71
Bagian Perekonomian dan SDA Setda	197.750.000,00	0,00	21.175.000,00	176.575.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM	1.695.887.680,94	4.017.633,62	128.131.492,00	1.571.773.822,56
Dinas Penanaman Modal & PTSP	442.070,43	82.271,35	142.070,43	382.271,35
RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	181.650.671,41	149.236.425,44	181.650.671,41	149.236.425,44
RSUD Padangan	22.903.945,65	27.863.653,74	22.903.945,65	27.863.653,74
RSUD Sumberrejo	14.786.617,81	16.353.988,67	14.786.617,81	16.353.988,67
BPKAD (PPKD)	9.371.306,27	2.792.978.117,34	271.306,27	2.802.078.117,34
Dinas Kesehatan	7.296.345,00	8.537.724,50	7.296.345,00	8.537.724,50
DPU Bina Marga	1.333.950.669,82	0,00	1.333.950.669,82	0,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	0,00	158.010,00	0,00	158.010,00
JUMLAH	**23.230.302.787,24**	**3.775.680.720,54**	**2.532.597.587,94**	**24.473.385.919,84**

Penyisihan Piutang Tidak tertagih sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi ditetapkan sebagai berikut:

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokan menjadi 4 (empat) klasifikasi yakni kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
2. Penggolongan kualitas piutang pajak dilakukan dengan ketentuan:
   a. Kualitas lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
   b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun;
   c. Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun;
   d. Kualitas macet, jika umur piutang diatas 5 tahun.
3. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
   a. Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
   b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
   c. Kualitas diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun;
   d. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.
4. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
   a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
   b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan.

5. Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar lima permil dari piutang daerah yang memiliki kualitas lancar;
6. Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar:
   a. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas kurang lancar;
   b. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang daerah dengankualitas diragukan; dan
   c. 100% (seratus perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas macet.

Rincian atas perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 53. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga	(%)	Peny Pokok	Peny Bunga	
1	**Badan Pendapatan Daerah**	Piutang Pajak Hotel	2009	14	15.946.000,00	-	100,00	15.946.000,00	-	15.946.000,00
		Piutang Pajak Hotel	2012	11	43.007.600,00	-	100,00	43.007.600,00	-	43.007.600,00
		Piutang Pajak Hotel	2014	9	512.000,00	-	100,00	512.000,00	-	512.000,00
		Piutang Pajak Hotel	2018	5	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak Hotel	2019	4	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak Hotel	2020	3	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Hotel	2021	2	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Hotel	2022	1	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Hotel	2023	0	113.721.998,64	-	0,50	568.609,99	-	568.609,99
		Piutang Pajak Reklame	2009	14	24.739.500,00	-	100,00	24.739.500,00	-	24.739.500,00
		Piutang Pajak Reklame	2012	11	2.737.500,00	-	100,00	2.737.500,00	-	2.737.500,00
		Piutang Pajak Reklame	2013	10	5.919.010,00	-	100,00	5.919.010,00	-	5.919.010,00
		Piutang Pajak Reklame	2016	7	117.688.043,00	-	100,00	117.688.043,00	-	117.688.043,00
		Piutang Pajak Reklame	2017	6	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang Pajak Reklame	2018	5	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak Reklame	2019	4	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak Reklame	2020	3	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Reklame	2021	2	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Reklame	2022	1	2.902.500,00	-	10,00	290.250,00	-	290.250,00
		Piutang Pajak Reklame	2023	0	40.044.694,00	-	0,50	200.223,47	-	200.223,47
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2009	14	850.000,00	-	100,00	850.000,00	-	850.000,00
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2018	5	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2019	4	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2020	3	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2021	2	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2022	1	-	-	10,00	-	-	-

No.	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga	(%)	Peny Pokok	Peny Bunga	
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2023	0	-	-	0,50	-	-	-
		Piutang Pajak Sarang Burung	2009	14	17.400.000,00	-	100,00	17.400.000,00	-	17.400.000,00
		Piutang Pajak Sarang Burung	2013	10	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang Pajak Sarang Burung	2015	8	1.450.000,00	-	100,00	1.450.000,00	-	1.450.000,00
		Piutang Pajak Sarang Burung	2020	3	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Sarang Burung	2021	2	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Sarang Burung	2022	1	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Sarang Burung	2023	0	-	-	0,50	-	-	-
		Piutang Pajak Restoran	2012	11	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang Pajak Restoran	2013	10	225.000,00	-	100,00	225.000,00	-	225.000,00
		Piutang Pajak Restoran	2014	9	1.042.858,00	-	100,00	1.042.858,00	-	1.042.858,00
		Piutang Pajak Restoran	2015	8	3.611.600,00	-	100,00	3.611.600,00	-	3.611.600,00
		Piutang Pajak Restoran	2018	6	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang Pajak Restoran	2019	4	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak Restoran	2020	3	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Restoran	2021	2		-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Restoran	2022	1		-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Restoran	2023	0	517.358.553,40	-	0,50	2.586.792,77	-	2.586.792,77
		Piutang Pajak Parkir	2013	10	811.000,00	-	100,00	811.000,00	-	811.000,00
		Piutang Pajak Parkir	2014	9	153.000,00	-	100,00	153.000,00	-	153.000,00
		Piutang Pajak Parkir	2015	8	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang Pajak Parkir	2018	5	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak Parkir	2019	4	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak Parkir	2020	3	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Parkir	2021	2		-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Parkir	2022	1		-	10,00	-	-	-

No.	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga	(%)	Peny Pokok	Peny Bunga	
		Piutang Pajak Parkir	2023	0		-	0,50	-	-	-
		Piutang Pajak ABT	2012	11	2.714.140,00	-	100,00	2.714.140,00	-	2.714.140,00
		Piutang Pajak ABT	2013	10	1.924.596,00	-	100,00	1.924.596,00	-	1.924.596,00
		Piutang Pajak ABT	2014	9	45.132.314,00	-	100,00	45.132.314,00	-	45.132.314,00
		Piutang Pajak ABT	2015	8	27.359.974,00	-	100,00	27.359.974,00	-	27.359.974,00
		Piutang Pajak ABT	2018	6	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang Pajak ABT	2019	4	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak ABT	2020	3	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak ABT	2021	2	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak ABT	2022	1	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak ABT	2023	0	11.929.217,00	-	0,50	59.646,09	-	59.646,09
		Piutang PPJ	2015	8	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang PPJ	2017	6	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang PPJ	2018	5	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang PPJ	2019	4	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang PPJ	2020	3	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang PPJ	2021	2	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang PPJ	2022	1	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang PPJ	2023	0	4.639.381.157,00	-	0,50	23.196.905,79	-	23.196.905,79
		Piutang Pajak Hiburan	2012	11	2.950.000,00	-	100,00	2.950.000,00	-	2.950.000,00
		Piutang Pajak Hiburan	2013	10	16.500.000,00	-	100,00	16.500.000,00	-	16.500.000,00
		Piutang Pajak Hiburan	2018	5	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak Hiburan	2019	4	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Pajak Hiburan	2020	3	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Hiburan	2021	2	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Pajak Hiburan	2022	1	-	-	10,00	-	-	-

No.	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga	(%)	Peny Pokok	Peny Bunga	
		Piutang Pajak Hiburan	2023	0	3.685.654,28	-	0,50	18.428,27	-	18.428,27
		Piutang PBB	2009≤	14	3.557.793.886,92	-	100,00	3.557.793.886,92	-	3.557.793.886,92
		Piutang PBB	2010	13	665.773.948,44	-	100,00	665.773.948,44	-	665.773.948,44
		Piutang PBB	2011	12	840.788.751,88	-	100,00	840.788.751,88	-	840.788.751,88
		Piutang PBB	2012	11	1.383.246.519,37	-	100,00	1.383.246.519,37	-	1.383.246.519,37
		Piutang PBB	2013	10	542.308.881,00	-	100,00	542.308.881,00	-	542.308.881,00
		Piutang PBB	2014	9	766.153.783,00	-	100,00	766.153.783,00	-	766.153.783,00
		Piutang PBB	2015	8	248.715.929,59	-	100,00	248.715.929,59	-	248.715.929,59
		Piutang PBB	2016	7	632.571.984,00	-	100,00	632.571.984,00	-	632.571.984,00
		Piutang PBB	2017	6	873.580.536,00	-	100,00	873.580.536,00	-	873.580.536,00
		Piutang PBB	2018	5	829.440.281,00	-	50,00	414.720.140,50	-	414.720.140,50
		Piutang PBB	2019	4	764.310.692,00	-	50,00	382.155.346,00	-	382.155.346,00
		Piutang PBB	2020	3	773.368.744,00	-	10,00	77.336.874,40	-	77.336.874,40
		Piutang PBB	2021	2	537.328.111,00	-	10,00	53.732.811,10	-	53.732.811,10
		Piutang PBB	2022	1	500.900.747,00	-	10,00	50.090.074,70	-	50.090.074,70
		Piutang PBB	2023	0	999.961.115,00	-	0,50	4.999.805,58	-	4.999.805,58
		Piutang Retribusi Sewa Tanah	2016	7	3.565.000,33	-	100,00	3.565.000,33	-	3.565.000,33
		Piutang Retribusi Sewa Tanah	2017	6	1.200.000,00	-	100,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
		Piutang Retribusi Sewa Tanah	2018	5	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang Retribusi Sewa Tanah	2019	4	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang Retribusi Sewa Tanah	2020	3	-	-	50,00	-	-	-
		Piutang Retribusi Sewa Tanah	2021	2	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Retribusi Sewa Tanah	2022	1	-	-	10,00	-	-	-
		Piutang Retribusi Sewa Tanah	2023	0	620.000,00	-	0,50	3.100,00	-	3.100,00
		Sub Jumlah 1			**19.583.326.819,85**	**-**		**10.858.332.364,19**	**-**	**10.858.332.364,19**

No.	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga	(%)	Peny Pokok	Peny Bunga	
2	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**	**Pinjaman Modal Petani**			**107.210.625,00**	**-**		**107.210.625,00**	**-**	**107.210.625,00**
		Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah	2004	19	27.565.625,00	-	100,00	27.565.625,00	-	27.565.625,00
		Pengembangan Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai	2005	18	-	-	100,00	-	-	-
		Pinjaman Modal Petani	2007	16	20.400.000,00	-	100,00	20.400.000,00	-	20.400.000,00
		Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija	2007	16	4.000.000,00	-	100,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00
		Pinjaman Pupuk Berimbang	2008	15	55.245.000,00	-	100,00	55.245.000,00	-	55.245.000,00
		Pinjaman Usaha Tani Tembakau			**1.276.460.000,00**	**-**		**1.276.460.000,00**	**-**	**1.276.460.000,00**
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Kelompok Tani)	2010	13	96.275.000,00	-	100,00	96.275.000,00	-	96.275.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2010	13	29.000.000,00	-	100,00	29.000.000,00	-	29.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2011	12	104.000.000,00	-	100,00	104.000.000,00	-	104.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2012	11	160.700.000,00	-	100,00	160.700.000,00	-	160.700.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Pengusaha)	2013	10	38.000.000,00	-	100,00	38.000.000,00	-	38.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2013	10	848.485.000,00	-	100,00	848.485.000,00	-	848.485.000,00
		Pinjaman Bergulir (ex. Dinas Ketahanan Pangan)			**169.940.000,00**	**-**		**169.940.000,00**	**-**	**169.940.000,00**

No.	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga	(%)	Peny Pokok	Peny Bunga	
		Pinjaman Modal Dryer	2005	18	40.000.000,00	-	100,00	40.000.000,00	-	40.000.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2006	17	58.440.000,00	-	100,00	58.440.000,00	-	58.440.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2007	16	71.500.000,00	-	100,00	71.500.000,00	-	71.500.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2008	15	-	-	100,00	-	-	-
		Sub Jumlah 2			**1.553.610.625,00**	**-**		**1.553.610.625,00**	**-**	**1.553.610.625,00**
3	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**	**Pinjaman Modal Industri**			**1.039.008.224,51**	**-**		**1.039.008.224,51**	**-**	**1.039.008.224,51**
		Pinjaman Modal IKDK	2005	18	17.542.000,00	-	100,00	17.542.000,00	-	17.542.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2006	18	2.071.000,00	-	100,00	2.071.000,00	-	2.071.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2007	16	2.915.000,00	-	100,00	2.915.000,00	-	2.915.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2008	15	3.168.000,00	-	100,00	3.168.000,00	-	3.168.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2009	14	16.547.000,00	-	100,00	16.547.000,00	-	16.547.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2010	13	9.846.000,00	-	100,00	9.846.000,00	-	9.846.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2010	13	62.346.000,00	-	100,00	62.346.000,00	-	62.346.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2011	12	77.731.000,00	-	100,00	77.731.000,00	-	77.731.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2011	12	215.493.000,00	-	100,00	215.493.000,00	-	215.493.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2012	11	51.687.655,62	-	100,00	51.687.655,62	-	51.687.655,62
		Pinjaman Modal Cukai	2012	11	141.084.386,28	-	100,00	141.084.386,28	-	141.084.386,28
		Pinjaman Modal IKDK	2013	10	21.526.364,34	-	100,00	21.526.364,34	-	21.526.364,34
		Pinjaman Modal Cukai	2013	10	66.268.155,71	-	100,00	66.268.155,71	-	66.268.155,71
		Pinjaman Modal IKDK	2014	9	115.042.966,25	-	100,00	115.042.966,25	-	115.042.966,25
		Pinjaman Modal Cukai	2014	9	235.739.696,31	-	100,00	235.739.696,31	-	235.739.696,31
		Pinjaman Tenaga Kerja			**760.536.066,83**	**-**		**760.536.066,83**	**-**	**760.536.066,83**
		Pinjaman TKI	2001	22	57.511.352,73	-	100,00	57.511.352,73	-	57.511.352,73
		Pinjaman TKI	2002	21	66.400.363,64	-	100,00	66.400.363,64	-	66.400.363,64

No.	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga	(%)	Peny Pokok	Peny Bunga	
		Pinjaman TKI	2003	20	571.240.018,46	-	100,00	571.240.018,46	-	571.240.018,46
		Pinjaman TKI	2004	19	14.000.000,00	-	100,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00
		Pinjaman TKI	2005	18	51.384.332,00	-	100,00	51.384.332,00	-	51.384.332,00
		Sub Jumlah 3			**1.799.544.291,34**	**-**		**1.799.544.291,34**	**-**	**1.799.544.291,34**
4	**Dinas Peternakan dan Perikanan**	Piutang Sapi Kreman	2003	20	129.144.500,00	-	100,00	129.144.500,00	-	129.144.500,00
		Piutang Sapi Betina	2004	19	16.327.800,00	-	100,00	16.327.800,00	-	16.327.800,00
		Piutang Sapi Betina	2005	18	44.150.400,00	-	100,00	44.150.400,00	-	44.150.400,00
		Piutang Sapi Betina	2006	17	25.202.300,00	-	100,00	25.202.300,00	-	25.202.300,00
		Piutang Sapi Betina	2011	12	230.000.000,00	-	100,00	230.000.000,00	-	230.000.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2011	12	90.000.000,00	-	100,00	90.000.000,00	-	90.000.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2011	12	1.039.700.000,00	-	100,00	1.039.700.000,00	-	1.039.700.000,00
		Piutang Sapi Betina	2012	11	390.720.000,00	-	100,00	390.720.000,00	-	390.720.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2012	11	259.350.000,00	-	100,00	259.350.000,00	-	259.350.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2012	11	797.160.000,00	-	100,00	797.160.000,00	-	797.160.000,00
		Piutang Burung Puyuh	2012	11	6.300.000,00	-	100,00	6.300.000,00	-	6.300.000,00
		Piutang Budidaya Ikan	2012	11	10.000.000,00	-	100,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2013	10	119.500.000,00	-	100,00	119.500.000,00	-	119.500.000,00
		Piutang Sapi Betina	2013	10	539.305.000,00	-	100,00	539.305.000,00	-	539.305.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2013	10	949.880.000,00	-	100,00	949.880.000,00	-	949.880.000,00
		Piutang Ikan	2013	10	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang Sapi Kereman	2014	9	261.944.175,53	-	100,00	261.944.175,53	-	261.944.175,53
		Piutang Sapi Betina	2014	9	235.223.783,94	-	100,00	235.223.783,94	-	235.223.783,94
		Piutang Kambing/domba	2014	9	167.174.772,26	-	100,00	167.174.772,26	-	167.174.772,26
		Piutang Budidaya Ikan	2014	9	197.856.893,98	-	100,00	197.856.893,98	-	197.856.893,98
		Sub Jumlah 4			**5.508.939.625,71**	**-**		**5.508.939.625,71**	**-**	**5.508.939.625,71**

No.	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga	(%)	Peny Pokok	Peny Bunga	
5	**Bagian Perekonomian dan SDA Setda**	Pinjaman Dekranasda	2004	19	-	-	100,00	-	-	-
		Pinjaman Dekranasda	2005	18	21.800.000,00	-	100,00	21.800.000,00	-	21.800.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2006	17	5.900.000,00	-	100,00	5.900.000,00	-	5.900.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2007	16	800.000,00	-	100,00	800.000,00	-	800.000,00
		Pengrajin kayu 2004	2004	19	148.075.000,00	-	100,00	148.075.000,00	-	148.075.000,00
		Sub Jumlah 5			**176.575.000,00**	**-**		**176.575.000,00**	**-**	**176.575.000,00**
6	**Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM**	Piutang Koperasi	2001	22	43.800.000,00	-	100,00	43.800.000,00	-	43.800.000,00
		Piutang Koperasi	2002	21	17.900.000,00	-	100,00	17.900.000,00	-	17.900.000,00
		Piutang Koperasi	2003	20	22.750.000,00	-	100,00	22.750.000,00	-	22.750.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2003	20	100.000.000,00	-	100,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00
		Piutang Koperasi	2004	19	24.300.000,00	-	100,00	24.300.000,00	-	24.300.000,00
		Piutang UKM	2004	19	34.200.000,00		100,00	34.200.000,00	-	34.200.000,00
		Piutang Koperasi	2005	18	59.000.000,00	-	100,00	59.000.000,00	-	59.000.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2005	18	19.500.000,00	-	100,00	19.500.000,00	-	19.500.000,00
		Piutang UKM	2005	18	24.724.600,00		100,00	24.724.600,00	-	24.724.600,00
		Piutang Koperasi	2006	17	23.665.000,00	-	100,00	23.665.000,00	-	23.665.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2006	17	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang UKM	2006	17	36.639.383,00	-	100,00	36.639.383,00	-	36.639.383,00
		Piutang Koperasi	2007	16	7.000.000,00	-	100,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00
		Piutang UKM	2007	16	43.700.000,00	-	100,00	43.700.000,00	-	43.700.000,00
		Piutang UKM (PAK)	2007	16	76.425.000,00	-	100,00	76.425.000,00	-	76.425.000,00
		Piutang Koperasi	2008	15	46.750.000,00	-	100,00	46.750.000,00	-	46.750.000,00
		Piutang UKM	2008	15	259.125.660,00	-	100,00	259.125.660,00	-	259.125.660,00
		Piutang Koperasi	2009	14	16.128.000,00	-	100,00	16.128.000,00	-	16.128.000,00
		Piutang UKM	2009	14	177.797.000,00	-	100,00	177.797.000,00	-	177.797.000,00
		Piutang Koperasi	2010	13	60.826.850,00	-	100,00	60.826.850,00	-	60.826.850,00

No.	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga	(%)	Peny Pokok	Peny Bunga	
		Piutang UKM	2010	13	143.272.065,00	-	100,00	143.272.065,00	-	143.272.065,00
		Piutang Cukai	2011	12	88.750.000,00	-	100,00	88.750.000,00	-	88.750.000,00
		Piutang Koperasi	2014	9	-	-	100,00	-	-	-
		Piutang UKM	2014	9	241.502.630,94	-	100,00	241.502.630,94	-	241.502.630,94
		Sub Jumlah 6			**1.567.756.188,94**	-		**1.567.756.188,94**	-	**1.567.756.188,94**
7	**Dinas Penanaman Modal & PTSP**	Piutang Retribusi Trayek	2013	10	300.000,00	-	100,00	300.000,00	-	300.000,00
		Piutang Retribusi IMB	2023	0	16.454.270,00	-	0,50	82.271,35	-	82.271,35
		Sub Jumlah 7			**16.754.270,00**			**382.271,35**	-	**382.271,35**
8	**RSUD Sosodoro**	Klaim Kesehatan	2023	0	29.847.285.087,00	-	0,50	149.236.425,44	-	149.236.425,44
		Sub Jumlah 8			**29.847.285.087,00**			**149.236.425,44**	-	**149.236.425,44**
9	**RSUD Padangan**	Klaim Kesehatan	2023	0	5.572.730.747,00	-	0,50	27.863.653,74	-	27.863.653,74
		Sub Jumlah 9			**5.572.730.747,00**			**27.863.653,74**	-	**27.863.653,74**
10	**RSUD Sumberrejo**	Klaim Kesehatan	2023	0	3.270.797.734,00	-	0,50	16.353.988,67	-	16.353.988,67
		Sub Jumlah 10			**3.270.797.734,00**	**-**		**16.353.988,67**	-	**16.353.988,67**
11	**BPKAD (PPKD)**	TGR an Baidowi	2010	13	9.100.000,00	-	100,00	9.100.000,00	-	9.100.000,00
		Remunerasi TKD TDF	2022	0	-	-	-	-	-	-
		Piutang Deviden	2023	0	2.285.500.000,00	-	-	-	-	-
		Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	2023	0	8.291,00	-	-	-	-	-
		Piutang Pihak Ketiga (DPUBM)	2019	4	2.639.256.922,23	-	100,00	2.639.256.922,23	-	2.639.256.922,23
		Piutang Bunga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2007	16	-	400.000,00	100,00	-	400.000,00	400.000,00
		Piutang Bunga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2001-2003	22	-	24.123.375,11	100,00	-	24.123.375,11	24.123.375,11
		Piutang Bunga Dinas Peternakan dan Perikanan	2003-2006	20	-	43.016.330,00	100,00	-	43.016.330,00	43.016.330,00
		Piutang Bunga Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM	2004-2010	19	-	86.181.490,00	100,00	-	86.181.490,00	86.181.490,00

No.	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga	(%)	Peny Pokok	Peny Bunga	
		Sub Jumlah 11			**4.933.865.213,23**	**153.721.195,11**		**2.648.356.922,23**	**153.721.195,11**	**2.802.078.117,34**
12	**Dinas Kesehatan**	JKN non Kapitasi (BPJS)	2023	0	1.707.544.900,00	-	0,50	8.537.724,50	-	8.537.724,50
		Sub Jumlah 12			**1.707.544.900,00**			**8.537.724,50**	**-**	**8.537.724,50**
13	**DPKP Cipta Karya**	Piutang Retribusi Cetak Peta	2023	0	31.602.000,00	-	0,50	158.010,00	-	158.010,00
		Sub Jumlah 13			**31.602.000,00**			**158.010,00**	**-**	**158.010,00**
14	**Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM**	Piutang Sewa Kios/Toko/Bedak	2023	0	803.526.724,00	-	0,50	4.017.633,62	-	4.017.633,62
		Sub Jumlah 14			**803.526.724,00**			**4.017.633,62**	**-**	**4.017.633,62**
		JUMLAH			**76.373.859.226,07**	**153.721.195,11**		**24.319.664.724,73**	**153.721.195,11**	**24.473.385.919,84**

5.3.1.1.4 Belanja Dibayar Di Muka

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Dibayar Di Muka	**141.666.667,00**	**41.614.583,33**

Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp141.666.667,00 merupakan belanja dibayar di muka dari Dinas Sosial atas Belanja Sewa Rumah Singgah untuk pasien PBI-JKN dan PBI-D yang dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya yang dibayarkan selama 2 tahun senilai Rp200.000.000,00 dengan masa kontrak 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2025 sesuai dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 14 Tanggal 12 Mei 2023. Rumah singgah tersebut beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VII-F/3 Surabaya atas nama Bambang Soeyitno Liem. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 masa sewa yang telah digunakan adalah 7 bulan yaitu 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, sedangkan sisanya selama 17 bulan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

5.3.1.1.5 Persediaan

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Persediaan	**427.008.584.407,25**	**234.475.861.924,84**

Jumlah persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp427.008.584.407,25. Pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 54. Persediaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	439.715.700,00
2.	Bahan Kimia	4.652.100.001,65	3.394.158.634,42
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	644.945.710,00	544.470.836,84
4.	Bahan/Bibit Tanaman	248.379.450,00	2.229.540.437,50
5.	Isi Tabung Gas	0,00	35.997.259,92
6.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	124.075.000,00	153.540.000,00
7.	Bahan Lainnya	6.034.349.512,49	8.318.486.707,36
8.	Suku Cadang Alat Besar	795.287.445,00	629.319.377,00
9.	Alat Tulis Kantor	2.184.945.622,16	2.992.006.654,56
10.	Bahan Cetak	2.733.937.227,40	1.582.586.522,60
11.	Benda Pos	194.361.347,83	13.784.500,00
12.	Alat Listrik	2.461.288.230,67	664.585.947,00
13.	Suvenir/Cendera Mata	0,00	25.750.000,00
14.	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	51.801.821.066,85	47.220.248.513,38
15.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	225.313.454,00
16.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	355.077.632.580,20	165.915.732.402,26
17.	Natura	55.461.213,00	90.624.978,00
	JUMLAH	**427.008.584.407,25**	**234.475.861.924,84**

1. Bahan Bangunan dan Konstruksi
   Saldo persediaan bahan bangunan dan konstruksi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp439.715.700,00.

2. Persediaan Bahan Kimia
   Saldo persediaan bahan kimia per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.652.100.001,65, terdiri dari persediaan bahan kimia sebesar Rp1.453.634.030,00, bahan radiologi sebesar Rp1.373.373.732,70, Haemodialisa sebesar Rp440.062.518,00, bahan laboratorium sebesar Rp1.097.700.547,45 dan CSSD sebesar Rp287.329.173,50.

   Sedangkan saldo persediaan bahan kimia per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.394.158.634,42, terdiri dari persediaan bahan kimia sebesar Rp984.670.648,00, bahan radiologi sebesar Rp1.142.407.509,64, Haemodialisa sebesar Rp424.485.670,00, bahan laboratorium sebesar Rp648.217.966,08 dan CSSD sebesar Rp194.376.840,70.

Tabel 5. 55. Rincian Persediaan Bahan Kimia

No	Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	3.253.217.546,50	2.518.928.313,70
2.	RSUD Sumberrejo	702.306.800,00	404.129.302,73
3.	RSUD Padangan	679.156.753,15	471.101.017,99
4.	Dinas Kesehatan	17.418.902,00	-
	JUMLAH	**4.652.100.001,65**	**3.394.158.634,42**

3. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas
   Saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp644.945.710,00 yang terdapat pada Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp623.496.430,00 dan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp21.449.280,00. Sedangkan saldo persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp544.470.836,84.

4. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
   Saldo Persediaan Bahan/Bibit Tanaman per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp248.379.450,00 yaitu terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp49.979.450,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp198.400.000,00

   Sedangkan saldo persediaan Bahan/Bibit Tanaman per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.229.540.437,50, yaitu terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp40.225.687,50, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.187.662.250,00 dan Dinas Pendidikan (persediaan BOS) sebesar Rp1.652.500,00.

5. Persediaan Isi Tabung Gas
   Saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan Saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.997.259,92 yang terdapat pada RSUD Sumberrejo sebesar Rp7.913.445,92, RSUD Padangan sebesar Rp2.040.000,00, RSUD Sosodoro Djatikusumo sebesar Rp25.715.814,00, dan Dinas Pendidikan (persediaan BOS) sebesar Rp328.000,00.

6. Persediaan Bibit Ternak/Bibit Ikan
   Persediaan Bibit Ternak terdapat pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp124.075.000,00, sedangkan saldo

persediaan Bibit Ternak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp153.540.000,00.

7. Persediaan Suku Cadang Alat Besar

   Saldo Persediaan suku cadang alat besar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp795.287.445,00, yaitu terdapat pada Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp694.500.545,00 dan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp100.786.900,00.

   Sedangkan saldo persediaan suku cadang alat besar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp629.319.377,00, yaitu terdapat pada Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp568.307.077,00 dan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp61.012.300,00.

8. Persediaan Alat Tulis Kantor

   Saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.184.945.622,16, sedangkan saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.992.006.654,56, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 56. Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	188.175.500,00	208.633.392,00
2.	Dinas Kesehatan	300.663.101,00	431.944.802,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	810.264.923,68	690.506.997,56
4.	RSUD Padangan	25.088.486,10	11.742.024,00
5.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	17.111.050,00	2.017.000,00
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	3.638.050,00	11.245.550,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.041.000,00	2.038.700,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.623.600,00	1.241.100,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.766.212,00	2.212.370,00
10.	Dinas Pemadam Kebakaran	883.800,00	157.550,00
11.	Dinas Sosial	4.997.600,00	6.835.350,00
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6.024.600,00	7.662.200,00
13.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.503.600,00	4.873.525,00
14.	Dinas Lingkungan Hidup	2.290.800,00	3.638.200,00
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	693.459.119,38	1.512.239.611,00
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.634.500,00	4.847.050,00
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.644.700,00	6.418.750,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.506.000,00	1.409.600,00
19.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	966.200,00	918.000,00
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.779.370,00	4.619.660,00
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	340.100,00	9.174.150,00
22.	Dinas Peternakan dan Perikanan	7.674.500,00	138.800,00
23.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	2.063.200,00	624.500,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	434.300,00	0,00
25.	Bagian Organisasi	-	877.950,00
26.	Bagian Pemerintahan	109.800,00	109.800,00

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
27.	Bagian Pembangunan	-	54.900,00
28.	Bagian Perekonomian dan SDA	807.000,00	171.000,00
29.	Bagian Umum	24.595.200,00	33.225.850,00
30.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	109.800,00
31.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1.294.200,00	1.697.500,00
32.	Sekretariat DPRD	4.653.850,00	550.760,00
33.	Kec Bojonegoro	546.000,00	546.000,00
34.	Kec Kapas	759.600,00	715.600,00
35.	Kec Balen	148.300,00	148.300,00
36.	Kec Sumberrejo	562.200,00	148.750,00
37.	Kec Kanor	150.000,00	357.000,00
38.	Kec Baureno	675.540,00	1.072.860,00
39.	Kec Sugihwaras	274.500,00	434.300,00
40.	Kec Kepohbaru	1.872.520,00	279.050,00
41.	Kec Kedungadem	54.900,00	54.900,00
42.	Kec Sukosewu	270.200,00	414.800,00
43.	Kec Trucuk	0,00	350.000,00
44.	Kec Malo	215.000,00	963.060,00
45.	Kec Kalitidu	160.000,00	65.000,00
46.	Kec Dander	340.500,00	340.500,00
47.	Kec Padangan	572.800,00	423.300,00
48.	Kec Purwosari	193.000,00	0,00
49.	Kec Kasiman	327.600,00	593.400,00
50.	Kec Kedewan	335.600,00	633.300,00
51.	Kec Ngasem	307.000,00	360.000,00
52.	Kec Ngambon	324.100,00	214.300,00
53.	Kec Tambakrejo	404.000,00	452.000,00
54.	Kec Ngraho	333.900,00	229.800,00
55.	Kec Margomulyo	1.020.400,00	274.500,00
56.	Kec Temayang	267.900,00	306.800,00
57.	Kec Bubulan	365.400,00	339.500,00
58.	Kec Gondang	1.174.000,00	234.800,00
59.	Kec Sekar	366.000,00	432.700,00
60.	Kec Gayam	312.800,00	319.000,00
61.	Inspektorat	12.741.400,00	2.054.000,00
62.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.575.400,00	2.331.000,00
63.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.214.250,00	3.432.000,00
64.	Badan Pendapatan Daerah	15.721.950,00	5.432.693,00
65.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.324.500,00	6.117.000,00
	JUMLAH	**2.184.945.622,16**	**2.992.006.654,56**

9. Persediaan Bahan Cetak

Saldo Persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.733.937.227,40, sedangkan saldo persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.582.586.522,60, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 57. Rincian Persediaan Bahan Cetak

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	0,00	7.266.000,00
2.	Dinas Kesehatan	640.199.699,00	272.151.823,00
3.	RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo	207.948.121,50	-
4.	RSUD Sumberrejo	-	29.344.500,00
5.	RSUD Padangan	239.190.971,90	128.839.386,40
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	950.000,00	850.000,00
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.600.000,00	13.200.000,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	336.111.846,00	452.834.232,20
9.	Dinas Perhubungan	448.956.439,00	377.729.191,00
10.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	62.195.250,00	109.237.890,00
11.	Dinas Peternakan dan Perikanan	653.250.000,00	51.900.000,00
12.	Inspektorat	6.875.000,00	6.200.000,00
13.	Badan Pendapatan Daerah	135.659.900,00	133.033.500,00
	JUMLAH	**2.733.937.227,40**	**1.582.586.522,60**

10. Persediaan Benda Pos

    Saldo Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp194.361.347,83 sedangkan saldo persediaan Benda Pos per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.784.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 58. Rincian Persediaan Benda Pos

No	Nama OPD	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	4.490.000,00	3.212.500,00
2.	Dinas Kesehatan	179.287.347,83	8.968.000,00
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.314.000,00	1.314.000,00
4.	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa		100.000,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika		90.000,00
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.940.000,00	-
7.	Kecamatan Temayang	70.000.00	-
8.	Kecamatan Gayam	60.000,00	-
9.	Kecamatan Kedewan	100.000,00	
10.	Kecamatan Ngambon	100.000,00	100.000,00
	JUMLAH	**194.361.347,83**	**13.784.500,00**

11. Persediaan Alat Listrik

    Saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.461.288.230,67, sedangkan saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp664.585.947,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 59. Rincian Persediaan Alat Listrik

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	5.858.700,00	9.864.900,00
2.	Dinas Kesehatan	38.815.824,30	46.562.755,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	136.751.667,00	138.731.130,00
4.	RSUD Sumberrejo	33.252.719,00	33.220.405,00

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.	RSUD Padangan	97.478.720,37	124.656.307,00
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	2.146.930.200,00	310.596.800,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	282.400,00	911.500,00
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.918.000,00	42.150,00
	JUMLAH	**2.461.288.230,67**	**664.585.947,00**

12. Persediaan Souvenir/Cendera Mata
    Persediaan Souvenir/Cendera Mata terdapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.750.000,00.

13. Persediaan Obat-obatan dan BMHP
    Saldo Persediaan Obat-obatan dan BMHP per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp51.801.821.066,85, sedangkan saldo persediaan obat-obatan dan BMHP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.220.248.513,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 60. Rincian Persediaan Obat-obatan dan BMHP

No	Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	6.359.450,00	11.438.450,00
2.	Dinas Kesehatan	30.153.724.157,94	27.792.618.575,26
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	10.934.606.041,00	7.156.273.695,42
4.	RSUD Sumberrejo	6.455.902.036,39	4.736.882.597,35
5.	RSUD Padangan	3.928.298.062,52	7.173.417.692,35
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	10.806.000,00	-
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	70.142.000,00	24.390.300,00
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	300.150,00	30.607.200,00
9.	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.387.719,00	9.482.853,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	237.295.450,00	284.962.150,00
11.	Kecamatan Ngambon	-	175.000,00
	JUMLAH	**51.801.821.066,85**	**47.220.248.513,38**

14. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
    Saldo Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp225.313.454,00, yaitu persediaan untuk bantuan korban bencana pada Dinas Sosial.

15. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
    Saldo Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp355.077.632580,20, yaitu persediaan dari belanja hibah yang belum diserahkan pada pihak ketiga pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya sebesar Rp287.882.100,00. Dinas PU Sumber Daya Air Rp112.465.379.773,00 dan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp242.324.370.707,20.

Saldo Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp165.915.732.402,26, yaitu persediaan dari belanja hibah yang belum diserahkan pada pihak ketiga pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya sebesar Rp2.218.229.772,57 dan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp163.697.502.629,69.

Persediaan tersebut diakui dari Belanja Hibah berupa Barang yang belum diserahterimakan kepada Penerima Hibah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 61. Persediaan dari Belanja Hibah

No	Nama SKPD	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
1	**Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang**	**242.324.370.707,20**	**163.697.502.629,69**
	- Pelebaran Jalan Nasional (Tahun 2021)	70.387.025.785,00	70.387.025.785,00
	- Pelebaran Jalan Nasional (Tahun 2022)	82.766.434.240,20	82.766.434.240,20
	- Pelebaran Jalan Nasional (Tahun 2023)	74.640.002.849,00	
	- Pembangunan Jalan Desa Panjang Kec. Kedungadem	1.685.738.420,00	1.440.463.479,89
	- Pembangunan Jalan Desa Papringan Kec. Temayang	1.376.971.304,00	1.376.971.304,00
	- Pembangunan Jalan Desa Soko Kec. Temayang [Dsn. Sekonang - Dsn. Soko]	3.316.844.040,00	1.426.906.306,00
	- Pembangunan Jalan Desa Soko Kec. Temayang [Dsn. Sekonang - Sekidang]	3.436.623.152,00	1.584.970.597,60
	- Pembangunan Jalan Desa Tondomulo Kec. Kedungadem [Kedunglele - Bunten]	4.714.730.917,00	4.714.730.917,00
2	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya**	**287.882.100,00**	**2.218.229.772,57**
	- Pembangunan sanitasi Limbah Setempat Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru	149.602.000,00	
	- Peningkatan Sarana Air Bersih HIPPAM Balongrejo Kecamatan Sugihwaras	138.280.100,00	
	- Pembangunan Gedung MWC NU Sugihwaras Desa Sugihwaras Sugihwaras*		560.661.247,50
	- Pembangunan Kantor Koramil Kapas		780.786.530,07
	- Pembangunan Kantor Koramil Sekar		876.781.995,00
3	**Dinas PU Sumber Daya Air**	**112.465.379.773,00**	
	- Tanah untuk Bendungan Karangnongko	112.465.379.773,00	
	JUMLAH	**355.077.632.580,20**	**165.915.732.402,26**

16. Persediaan Natura

    Saldo Persediaan Natura per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55.461.213,00 merupakan persediaan bahan makanan untuk pasien pada RSUD Padangan. Sedangkan saldo persediaan natura per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp90.624.978,00 merupakan persediaan bahan makanan untuk pasien pada RSUD Padangan sebesar Rp64.170.228,00 dan bahan makanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp26.454.750,00.

17. Persediaan Bahan Lainnya

    Saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.034.349.512,49. Saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.318.486.707,36 yang terdiri dari persediaan alat/bahan pembersih, linen, APD, BHP pemulasaran jenazah, plastik, dan karung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 62. Rincian Persediaan Bahan Lainnya

No	Nama SKPD	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
1.	Dinas Pendidikan	32.656.950,00	22.701.450,00
2.	Dinas Kesehatan	316.517.449,35	297.716.412,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	2.704.937.455,00	7.016.674.159,54
4.	RSUD Sumberrejo	245.671.534,25	175.376.359,88
5.	RSUD Padangan	342.707.439,14	374.524.700,34
6.	Dinas PU Sumber Daya Air	408.912.000,00	-
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.781.881.596,75	409.689.023,60
8.	Dinas Sosial	169.980.756,00	
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.416.382,00	17.418.950,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	440.800,00
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.406.000,00	571.200,00
12.	Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan	216.000,00	-
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20.336.950,00	1.200.000,00
14.	Dinas Peternakan dan Perikanan.		267.952,00
15.	Kecamatan Kanor	79.000,00	104.000,00
16.	Kecamatan Kedewan		54.000,00
17.	Kecamatan Ngasem		113.200,00
18.	Inspektorat	630.000,00	1.634.500,00
	JUMLAH	**6.034.349.512,49**	**8.318.486.707,36**

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen	561.111.946.265,10	555.212.100.868,73
Jumlah	**561.111.946.265,10**	**555.212.100.868,73**

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp561.111.946.265,10 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Investasi Non Permanen**
   Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah nihil karena tidak ada penempatan dana dalam bentuk investasi non permanen.

2. **Investasi Permanen**
   Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 sebesar Rp561.111.946.265,10 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah yang terdiri dari:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Investasi Permanen	**561.111.946.265,10**	**555.212.100.868,73**

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang terdiri dari:

Tabel 5. 63. Investasi Permanen

No	Perusahaan Daerah	Ekuitas Akhir 2022	Koreksi Ekuitas Akhir 2022	Mutasi					Penyesuaian Ekuitas 2023	Piutang Deviden	Ekuitas Akhir 2023
				Tambahan Modal Disetor	Dividen Setor	% Saham Pemkab	Laba/Rugi BUMD Tahun 2023	Bagian Laba/Rugi Pemkab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11	12 = 3+4+5-6-9+10-11
1.	PD BPR Bojonegoro	241.182.960.913,00			12.125.782.346,00	100,00	19.465.266.691,00	19.465.266.691,00	6.614.063.097,00	0,00	255.136.508.355,00
2.	PT Bojonegoro Bangun Sarana	29.209.479.758,00			1.722.167.163,00	100,00	1.012.305.208,00	1.012.305.208,00	(826.010.529,00)		27.673.607.274,00
3.	PDAM Bojonegoro	62.262.390.549,85			3.392.930.508,00	100,00	3.480.793.453,50	3.480.793.453,50	1.449.533.381,31	0,00	63.799.786.876,66
4.	PD Apotik Sidowaras	-			-	100,00	-	-			-
5.	PT Asri Dharma Sejahtera	122.121.944.526,00			138.998.628.240,00	25,00	441.636.863.125,00	110.409.215.781,25	140.158.964.534,31	119.624.777.964,00	114.066.718.637,56
6.	PT Griya Dharma Kusuma	7.363.167.121,88			-	99,00	-	-	-	-	7.363.167.121,88
7.	PT BPD Jawa Timur, Tbk	75.072.158.000,00			15.942.323.472,00	2,00	-	-	-	-	75.072.158.000,00
8.	PT BPR Jawa Timur	18.000.000.000,00			501.412.000,00		-	-	-	-	18.000.000.000,00
	TOTAL SELURUHNYA	**555.212.100.868,73**			**172.683.243.729,00**	**-**	**465.595.228.477,50**	**134.367.581.133,75**	**147.396.550.483,62**	**119.624.777.964,00**	**561.111.946.265,10**

a. PD BPR Bojonegoro

Penilaian investasi di PD BPR Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%. Penyertaan modal pada PD BPR Bojonegoro sebagaimana Perda Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro. Penyertaan modal pada PD BPR Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Kedua Perda No 14 Tahun 1995 yaitu perubahan modal dasar dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00. Penyertaan tersebut direncanakan untuk perluasan jaringan kantor berupa pembukaan kantor cabang dan kantor kas serta rencana renovasi kantor pusat maupun pengembangan IT (Informasi Teknologi).

Perincian penyertaan modal pada PD BPR Bojonegoro per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 64. Penyertaan Modal PD BPR Bojonegoro

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran Tahun 1996	150.000.000,00
2	Setoran Tahun 1998	150.000.000,00
3	Setoran Tahun 2002	200.000.000,00
4	Setoran Tahun 2004	500.000.000,00
5	Setoran Tahun 2006 Sesuai SPMU No 0001/BYA/2006 Tanggal 15 Maret 2006	300.000.000,00
6	Setoran Tahun 2007 Sesuai SPMU No 1181/BLBS/2007 Tanggal 8 Mei 2007	100.000.000,00
7	Setoran Tanggal 13 April 2010	600.000.000,00
8	Setoran Tanggal 18 Maret 2011 Setoran Tanggal 05 Okt 2011 Perubahan penggunaan metode penilaian investasi permanen selama Tahun 2011 Cadangan Umum :604.260.462,00 Cadangan Tujuan :437.582.128,00 Laba Tahun 2011: 1.426.207.026,00	2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2.468.049.616,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2011	**10.468.049.616,00**
9	Setoran Tanggal 27 Feb 2012 Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2012 Deviden 2011 : (713.103.513,00) Dana Kesra dan Jaspro : (285.241.405,00) Laba Tahun 2012 : 2.466.985.046,00	2.000.000.000,00 1.468.640.128,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2012	**13.936.689.744,00**
10	Setoran Tanggal 30 Des 2013	12.500.000.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2013 Deviden 2012 : (1.233.492.523,00) Dana Kesra dan Jaspro : (493.397.011,00) Laba Tahun 2013:2.640.881.056,00	913.991.522,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2013	**27.350.681.266,00**
11	Setoran Tanggal 22 Juli 2014 Setoran Tanggal 18 Desember 2014 Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2014 Deviden 2013 : (1.320.440.528,00) Dana Kesra dan Jaspro : (528.176.212,00) Laba Tahun 2014:3.407.879.305,00	30.000.000.000,00 45.000.000.000,00 1.559.262.565,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2014	**103.909.943.831.00**
12	Setoran Tanggal 24 Nov 2015 Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2015 Deviden 2014 : (1.703.939.652,00) Dana Kesra dan Jaspro : (681.575.861,00) Laba Tahun 2015:6.314.713.983,00	97.500.000.000,00 3.929.198.470,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2015	**205.339.142.301,00**
13	Setoran Tanggal 29 Des 2016 Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2016 Deviden 2015 : (3.157.356.991,00) Dana Kesra dan Jaspro: (1.262.942.797,00) Laba Tahun 2016: 4.531.610.921,00 yang belum ditentukan statusnya	15.000.000.000,00 111.311.133,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2016	**220.450.453.434,00**
14	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2017 Dana Kesra dan Jaspro : (1.812.644.368.00) CSR:(453.161.092,00) Laba Tahun 2017: 6.668.175.663,00	4.402.370.203,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2017	**224.852.823.637,00**
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2018 Deviden 2017 : (3.334.087.832,00) Dana Kesra dan Jaspro : (1.333.635.134.00) CSR :(333.408.784,00) Koreksi pengampunan pajak 2017 : 4.532.500,00 Laba Tahun 2018 : 3.861.179.458,00	(1.135.419.792,00)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2018	**223.717.403.845,00**
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2019 Laba Tahun 2019: 10.332.261.935,00	10.332.261.935,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2019	**234.049.665.780,00**
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2020 Deviden 2018 : (1.930.589.729,00) Dana Kesra dan Jaspro : (772.235.892.00) CSR: (193.058.973,00) Deviden 2019 : (5.682.744.064,00) Dana Kesra dan Jaspro : (2.273.097.627 ,00) CSR: (309.967.458,00) Laba Tahun 2020: 13.437.195.689,00	2.275.501.548,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2020	**236.325.167.328,00**
18	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2021 Deviden 2020: (7.390.457.629,00) Dana Kesra dan Jaspro : (1.612.463.483,00) CSR: (403.115.871,00) Laba Tahun 2021 : 18.479.727.316,00	9.073.690.333,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2021	**245.398.857.661,00**
19	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2022 Deviden 2020: (10.163.850.024,00) Dana Kesra dan Jaspro : (3.418.749.552,00) CSR: (554.391.819,00) Laba Tahun 2022 :22.046.876.993,00 Piutang deviden 2022: (12.125.782.346,00)	(4.215.896.748,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2022	**241.182.960.913,00**
20	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2023 Dana Kesra dan Jaspro : (4.850.312.939,00) CSR: (661.406.310,00) Laba Tahun 2023:19.465.266.691,00	13.953.547.442,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2023	**255.136.508.355,00**

b. PDAM Bojonegoro

Penilaian investasi di PDAM Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar 100%. Saldo investasi permanen pada PDAM Bojonegoro tahun 2023 sebesar Rp63.799.786.876,66.

Perincian penyertaan modal pada PDAM per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 65. Penyertaan Modal PDAM Bojonegoro

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 1990**	**16.405.000,00**
2.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 1991**	**16.405.000,00**
3.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 1992**	**16.405.000,00**
4.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 1993**	**16.405.000,00**
5.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 1993 Penyertaan modal : 1.500.000,00 berupa tanah	1.500.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 1994	**17.905.000,00**
6.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 1995**	**17.905.000,00**
7.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 1996**	**17.905.000,00**
8.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 1997**	**17.905.000,00**
9.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 1998**	**17.905.000,00**
10.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 1999**	**17.905.000,00**
11.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2000**	**17.905.000,00**
12.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2001**	**17.905.000,00**
13.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2002**	**17.905.000,00**
14.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2003**	**17.905.000,00**
15.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2004**	**17.905.000,00**
16.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2005 Penyertaan modal : 150.000.000,00	150.000.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2005	**167.905.000,00**
17.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2006**	**167.905.000,00**
18.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2007**	**167.905.000,00**
19.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2008**	**167.905.000,00**
20.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2009**	**167.905.000,00**
21.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2010**	**167.905.000,00**
22.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2011**	**167.905.000,00**
23.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2012**	**167.905.000,00**
24.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi	6.888.970.619,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	permanen selama Tahun 2012 Aset tetap yang sudah ditentukan Statusnya : 6.888.970.619,00	
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2013	**7.056.875.619,00**
25.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2014 Reklas utang kepada Pemkab, dana sosial serta jaspro:1.277.289.898,91	1.277.289.898,91
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2014	**8.334.165.517,91**
26.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2014 Laba Tahun 2014 :1.631.386.608,26	1.631.386.608,26
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2015	**9.965.552.126,70**
27.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2015 Laba Karena:6.522.340.543,00 Penghapusan utang Tax amnesty: 19.000.000,00 Laba Tahun 2015:1.492.910.505,24	8.034.251.048,24
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2016	**17.999.803.174,41**
28.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2017 Laba Tahun 2017:1.720.470.492,44 Koreksi Laba/Rugi Tahun Lalu : (7.545.226.080,00)	(5.824.755.587,56)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2017	**12.175.047.586,85**
29.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2018 Laba Tahun 2018:6.954.541.402,91	6.954.541.402,91
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2018	**19.129.588.989,76**
30.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2019 Laba Tahun 2019:6.168.964.552,00 Koreksi Penyertaan modal:33.041.494.067,79	39.210.458.619,79
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2019	**58.340.047.609,55**
31.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2020 Laba Tahun 2020:3.174.256.217,14	3.174.256.217,14
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2020	**61.514.303.826,69**
32.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi	(2.698.214.116,00)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	permanen selama Tahun 2021 Deviden 2020: (2.698.214.116,00)	
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2021	**58.816.089.710,69**
33.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2022 Penyesuaian ekuitas tahun lalu : 2.438.580.394,86 Deviden 2021 : (3.308.540.388,00) Laba Tahun 2022:6.236.198.153,50 Penyesuaian Ekuitas 2022 : 1.472.993.182,40 Piutang dividen 2023:(3.392.930.503,60)	3.446.300.839,16
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2022	**62.262.390.549,85**
34.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2023 Deviden 2022: (3.392.930.508,00) Laba Tahun 2023: 3.480.793.453,50 Penyesuaian Ekuitas: 1.449.533.381,31	1.537.396.326,81
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2023	**63.799.786.876,66**

c. PT Asri Dharma Sejahtera

Investasi permanen pada PT Asri Dharma Sejahtera tahun 2023 sebesar Rp122.121.944.526,00. Penyertaan modal pada PT Asri Dharma Sejahtera berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT Asri Dharma Sejahtera.

Sebagaimana perjanjian pemegang saham tanggal 31 Maret 2009 pada pasal 10.1 huruf h yang menyatakan bahwa SER akan memberikan dana sebesar US$50.000 yang akan dibayarkan setiap tahunnya.

PT ADS merupakan salah satu BUMD Pemkab Bojonegoro dengan bidang usaha semula dibidang kegiatan usaha minyak bumi dan gas. Pendirian tersebut selanjutnya disahkan dengan Akta Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH Nomor 484 Tahun 2002 dengan bidang usaha antara lain ekspor dan impor, perdagangan lokal, jasa angkutan, jasa pergudangan. Berdasarkan Perjanjian Penempatan Saham antara Pemkab Bojonegoro, PT ADS dan PT SER tanggal 31 Maret 2009, kepemilikan saham PT ADS dari semula dimiliki oleh Pemkab Bojonegoro dan INS menjadi dimiliki Pemkab Bojonegoro dan PT SER. Selain Perjanjian Penempatan Saham, pada tahun 2009 tersebut juga dibuat Perjanjian Pemegang Saham antara Pemkab Bojonegoro dan PT SER yang salah satu klausulnya adalah merubah anggaran dasar perusahaan. Dalam rangka memenuhi salah satu kesepakatan perjanjian tersebut, Pemkab Bojonegoro mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT ADS.

Selain itu, PT ADS juga membuat perubahan anggaran dasar yang telah diaktakan pada Notaris Sutjipto, SH, M.Kn dengan Akta Nomor 183 tanggal

22 Juni 2009 dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31870.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009. Pada saat perubahan anggaran dasar tersebut, modal saham seri A dan B telah disetorkan seluruhnya, sedangkan untuk saham seri C, dari modal dasar sebanyak 35.294 lembar, baru ditempatkan sebanyak 21.480 lembar dengan nilai nominal Rp270.825.897.360,00.

Berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal, SH, MKn, Nomor 5 tanggal 25 Juni 2010, modal saham seri C ditambah menjadi 28.643 lembar saham dan kemudian dengan Akta Notaris M. Nova Faisal, SH, MKn Nomor 31 tanggal 15 Pebruari 2012, ditambah lagi menjadi 30.511 lembar saham atau senilai Rp384.691.292.102,00. Kedua perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-17846 tertanggal 14 Juli 2010, Nomor AHU-AH.01.10-09096 tanggal 15 Maret 2012. Dengan akta perubahan anggaran dasar dan dua akta perubahan modal tersebut, maka jumlah modal dasar serta saham ditempatkan dan disetorkan PT ADS menjadi sebagai berikut:

Tabel 5. 66. Struktur Modal PT ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 22 Juni 2009

Jenis Saham	Pemilik	Modal Dasar			Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)
Seri A	Pemkab Bojonegoro	160.000	50,00	8.000.000,00	160.000	50,00	8.000.000,00
Seri B	Pemkab Bojonegoro	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00
	PT SER	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00
Seri C	PT SER	35.294	12.608.282,00	444.996.704.908,00	30.511	12.608.282,00	384.691.292.102,00
Jumlah		**275.294**		**453.004.704.908,00**	**270.511**		**392.699.292.102,00**

Berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Nomor 298 tanggal 31 Januari 2017, modal saham seri C ditambah menjadi 52.434 lembar saham dan disepakati kenaikan harga saham dari Rp12.608.282,00 menjadi Rp26.000.000,00 dengan pertimbangan agar Pemkab Bojonegoro tetap menjadi pemegang saham mayoritas di PT ADS. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0086878 tanggal 24 Pebruari 2017. Dengan akta perubahan anggaran dasar dan perubahan modal tersebut, maka jumlah modal dasar serta saham ditempatkan dan disetorkan PT ADS menjadi sebagai berikut:

Tabel 5. 67. Struktur Modal PT ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 31 Januari 2017

Jenis Saham	Pemilik	Modal Dasar			Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)
Seri A	Pemkab Bojonegoro	160.000	50,00	8.000.000,00	160.000	50,00	8.000.000,00
Seri B	Pemkab Bojonegoro	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00
	PT SER	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00
Seri C	PT SER	52.434	26.000.000,00	1.363.284.000.000,00	52.434	26.000.000,00	1.363.284.000.000,00
Jumlah		**292.434**		**1.371.292.000.000,00**	**292.434**		**1.371.292.000.000,00**

Berdasarkan akta notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn Nomor 25 tanggal 5 Agustus 2020 tentang pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar PT Asri Dharma Sejahtera dinyatakan bahwa:

1) Sehubungan dengan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2017 serta pembebasan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari tanggung jawab untuk tahun 2017, Para Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Komisaris atas kegiatan dan/atau tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2) Sehubungan dengan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 serta pembebasan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dari Tanggung Jawab untuk Tahun Buku 2018, Para Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Komisaris atas kegiatan dan/atau tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3) Dengan merujuk kepada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (9) Huruf C Anggaran Dasar Perseroan dan Surat SER Nomor 123YAS19 01 tertanggal 27 September 2019 terkait Permintaan Penarikan Kembali Saham Seri C dan setelah memperhatikan kondisi keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, posisi kas/dana Perseroan telah mampu untuk melakukan penarikan kembali seluruh Saham Seri C yang dimiliki oleh SER. Sehingga, Para Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui penurunan modal Perseroan dengan cara penarikan kembali seluruh Saham Seri C milik PT Surya Energi Raya berdasarkan permintaan tertulisnya sejumlah 52.434 lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.363.284.000.000,00 dan menyetujui tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Presiden Direktur dan satu orang Direktur lainnya sehubungan dengan penarikan Saham Seri C tersebut sebesar Rp1.363.284.000.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku kepada PT Surya Energi Raya dengan menggunakan kurs pada tanggal pencairan dana.

   Selanjutnya, apabila di kemudian hari dinyatakan terjadi kelebihan ataupun kekurangan bayar berdasarkan hasil audit yang dilakukan baik oleh pihak Independen, Badan Pemeriksa Keuangan, ataupun pihak lainnya, maka Para Pemegang Saham sepakat untuk memperbaikinya baik dengan cara mengembalikan ataupun menambah pembayaran sebagaimana dimaksud.

   Sehubungan dengan Penurunan Modal Perseroan dengan cara Penarikan Kembali Saham Seri C maka perlu diadakan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait Modal Perseroan dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan terkait Saham Perseroan. Oleh dan karena itu Para Pemegang

Saham memutuskan untuk Menyetujui dengan suara bulat perubahan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan menjadi seperti yang akan disebut dibawah ini.

4) Sehubungan dengan agenda-agenda di atas dan persetujuan-persetujuan yang telah diberikan Para Pemegang Saham, dengan ini Para Pemegang Saham menyetujui dengan suara bulat agar Presiden Direktur dan satu orang Direktur lainnya untuk menjadi penandatangan spesimen pada rekening-rekening bank milik dan atas nama Perseroan dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Presiden Direktur dan satu orang Direktur lainnya yang menjadi pemegang spesimen untuk melakukan transfer dana selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Persetujuan Penurunan Modal Perseroan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diantaranya:
   a) untuk pembayaran penarikan kembali Saham Seri C sebagaimana keputusan Para Pemegang Saham pada Agenda Ke 6, yang mana pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama PT Surya Energi Raya; dan
   b) untuk pembayaran pembagian dividen Seri B kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mana dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan kepada SER yang mana dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama PT Surya Energi Raya.

   Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 5 ayat 9 anggaran dasar Perseroan anggaran dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp8.008.000.000,00 terbagi atas 160.000 saham Seri A yang masing-masing sahamnya bernilai nominal Rp50,00 dan 80.000 saham Seri B yang masing-masing sahamnya bernilai nominal Rp100.000,00. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 100% atau sejumlah 240.000 saham yang terbagi atas 160.000 saham Seri A, dan 80.000 saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.008.000.000,00.
   b) Saham-saham Perseroan terdiri dari lebih dari 1 klasifikasi saham, yaitu:
      (1) Saham Seri A adalah Saham Biasa;
      (2) Saham Seri B adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk memberikan suara dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan; menerima Dividen terlebih dahulu dari Saham Seri A.
   c) Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
      (1) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 160.000 saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000,00 dan 20.000 saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,00;
      (2) PT Surya Energi Raya, sebanyak 60.000 saham Seri B dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000,00.

      Sehingga seluruhnya berjumlah Rp8.008.000.000,00 yang terdiri dari 160.000 saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000,00, dan 80.000 saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000.000,00.

Perincian penyertaan modal pada PT ADS per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 68. Penyertaan Modal PT Asri Dharma Sejahtera

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran Tahun 2002 Akta pendirian Perseroan Terbatas No 484/2002 tanggal 11 Juli 2002	250.000.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2002	**250.000.000,00**
2	Setoran Tahun 2003 Perda 8 Tahun 2002 tentang pembentukan Perseroan Terbatas	1.750.000.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2003	**2.000.000.000,00**
3	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2004**	**2.000.000.000,00**
4	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2005**	**2.000.000.000,00**
5	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2006**	**2.000.000.000,00**
6	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2007**	**2.000.000.000,00**
7	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2008**	**2.000.000.000,00**
8	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2009**	**2.000.000.000,00**
9	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2010**	**2.000.000.000,00**
10	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2011**	**2.000.000.000,00**
11	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2012**	**2.000.000.000,00**
12	Tambahan Penyertaan Modal	8.000.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2013	**2.008.000.000,00**
13	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2014**	**2.008.000.000,00**
14	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2015**	**2.008.000.000,00**
15	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2016**	**2.008.000.000,00**
16.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2017**	**2.008.000.000,00**
17.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2018**	**2.008.000.000,00**
18.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2019 Koreksi Ekuitas 2019: 2.258.312.799.848,21	2.258.312.799.848,21
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2019	**2.260.320.799.848,21**
19.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2020 Deviden 2019 : (122.937.725.813,25)	(122.937.725.813,25)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2020	**2.137.383.074.034,96**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
20.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2021 Deviden 2021: (371.781.425.705,25)	(371.781.425.705,25)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2021	**1.765.601.648.329,71**
21.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2022 Koreksi Ekuitas: (1.549.827.721.643,46) Deviden 2021: (97.801.005.540,00) Laba Tahun 2022 :143.147.651.619,75 Piutang deviden 2022 :(138.998.628.240,00)	(1.643.479.703.803,71)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2022	**122.121.944.526,00**
22.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2023 Dividen setor : (138.998.628.240,00) Laba Tahun 2023 :110.409.215.781,25 Penyesuaian ekuitas:140.158.964.534,31 Piutang deviden 2023: (119.624.777.964,00)	(8.055.225.888,44)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2023	**114.066.718.637,56**

d. PT Bank Jatim

Berdasarkan Surat Penyampaian Lembar Saham dari PT Bank Jatim bahwa bukti kepemilikan saham Pemerintah kabupaten Bojonegoro adalah sebesar Rp75.072.158.000,00 yang terbagi menjadi 300.288.632 lembar saham dengan nilai Rp250,00 per lembar saham. Penilaian investasi di PT Bank Jatim menggunakan metode biaya. Penyertaan modal pada PT Bank Jatim berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Perincian penyertaan modal pada PT Bank Jatim per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 69. Penyertaan Modal PT Bank Jatim

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Akte pendirian Perseroan Terbatas No 1 Tanggal 1 Mei 1999	425.000.000,00
2	Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RUPS Luar Biasa) Perseroan Terbatas Perseroan No 5 Tanggal 23 Maret 2001 (Penyertaan Modal)	30.000.000,00
	Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang SahamPerseroan No 28 Tanggal 14 Juni 2001	30.000.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	(Penyertaan Modal)	
3	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 20 Tanggal 2 September 2003 (penyetoran dari stok dividen)	52.000.000,00
4	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 78 Tanggal 22 Juni 2004 (penyetoran dari stok dividen)	59.000.000,00
5	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 53 Tanggal 23 Agustus 2005 (penyetoran dari stok dividen)	74.000.000,00
6	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 34 Tanggal 16 Mei 2006 (Penyertaan Modal)	330.000.000,00
	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 7 Tanggal 1 Desember 2006 (Penyertaan Modal)	140.000.000,00
	Deviden yang nilainya dibawah 1 juta	586.331,91
7	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No 44 Tanggal 25 Juni 2007 (penyetoran dari stok dividen)	253.000.000,00
	Deviden yang nilainya dibawah 1 juta	419.963,22
8	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 13 Tanggal 8 Juli 2008 (Penyertaan Modal)	100.000.000,00
9	Koreksi kesalahan pencatatan 2007	(221.027,83)
10	Setoran Tanggal 18 Maret 2011	5.000.000.000,00
11	Setoran Tanggal 30 September 2011	19.000.000.000,00
12	Setoran Tanggal 27 Februari 2012	20.000.000.000,00
13	Setoran Tanggal 30 Maret 2012	27.000.000.000,00
14	Saham yang dikonversi Tahun 2012 (Berdasarkan catatan Bank Jatim atas sisa deviden yang nilainya dibawah 1 juta pada tahun 2006, 2007 dan koreksi kesalahan pencatatan 2007 dilakukan konversi cadangan senilai Rp2.579.158.000,00)	2.578.372.732,70
	Jumlah Penyertaan Modal	**75.072.158.000,00**

e. **PT Bojonegoro Bangun Sarana**

Penilaian investasi di PT Bojonegoro Bangun Sarana menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%.

Investasi permanen pada PT Bojonegoro Bangun Sarana tahun 2023 sebesar Rp27.673.607.274,00 berasal dari saldo ekuitas awal sebesar Rp29.209.479.758,00 dikurangi deviden tahun 2023 yang disetor Rp1.722.167.163 ditambah laba tahun 2023 Rp1.012.305.208,00 dikurangi penyesuaian ekuitas tahun 2023 Rp826.010.529,00.

Perincian penyertaan modal pada PT BBS per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 70. Penyertaan Modal PT Bojonegoro Bangun Sarana

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran Tahun 2006	1.500.000.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2006	**1.500.000.000,00**
2	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2007**	**1.500.000.000,00**
3	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2008**	**1.500.000.000,00**
4	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2009**	**1.500.000.000,00**
5	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2010**	**1.500.000.000,00**
6	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2011 Laba tahun 2010 : Rp 6.642.228.202,00 Deviden: (Rp.3.487.169.805,00) Jasa Produksi dll: (Rp1.399.127.313,00) Laba Tahun 2011 : Rp.2.958.323.944,00	4.714.255.028,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2011	**6.214.255.028,00**
7	Setoran tanggal 26 Maret 2012	10.000.000.000,00
	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2012 Deviden 2011: (Rp.1.036.169.805,00) Jasa Produksi dll: (Rp,827.120.316,00) Laba Tahun 2012 : Rp.1.740.717.978,00	(122.572.143,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2012	**16.091.682.885,00**
8	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2013 Deviden 2012: (Rp.1.737.116.307,33) Jasa Produksi dll: (Rp 520.339.519,24) Pembentukan dana cad:Rp.1.125.846.527,03 Laba Tahun 2013 : Rp.14.662.393.009,21	13.530.783.709,68
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2013	**29.622.466.594,68**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
9	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2014 Deviden 2013 : (Rp.4.636.256.706,00) Jasa Produksi dll: (Rp3.924.503.848,20) Laba Tahun 2014 : Rp1.724.370.886,,26	(6.836.389.667,94)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2014	**22.786.076.926,74**
10	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2015 Deviden 2014 : (Rp.513.037.425,00) Jasa Produksi dll: (Rp.893.453.208,40) Laba Tahun 2015 : Rp.3.856.365.243,72	2.449.874.610,32
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2015	**25.235.951.537,06**
11	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2016 Deviden 2015: (Rp.1.425.395.199,00) Jasa Produksi dll: (Rp 300.785.075,07) Laba Tahun 2016 : (Rp.854.404.694,55)	(2.580.584.968,62)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2016	**22.655.366.568,44**
12	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2017 Deviden2016: 0,00 Jasa Produksi dll: (Rp.209.776.046,31) Laba Tahun 2017 : Rp.301.405.684,14	91.629.637,83
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2017	**22.746.996.206,27**
13	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2018 Deviden 2017: (Rp.120.562.274,00) Koreksi dll :Rp4.176.254,46 Laba Tahun 2018 : Rp.1.037.796.072,39	921.410.052,85
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2018	**23.668.406.259,12**
14	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2019	0.00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2019	**23.668.406.259,12**
15	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2020 Deviden 2018 : (Rp.415.118.429,00) Jaspro dll 2019 : (Rp.57.104.073,55) Laba Tahun 2019 :(Rp.3.185.161.754,94)	(3.657.384.257,49)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2020	**20.011.022.001,63**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
16	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2021 Deviden2020: (Rp.1.342.750.952,00)	(1.342.750.952,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2021	**18.668.271.049,63**
17	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2022 Deviden 2021: (Rp.2.277.485.288,00) Koreksi dll: Rp.8.513.276.088,37 Laba Tahun 2022 : Rp.4.305.417.908,00	10.541.208.708,37
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2022	**29.209.479.758,00**
18	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2023 Deviden 2022 : (Rp1.722.167.163,00) Penyesuaian ekuitas: (Rp.826.010.529,00) Laba Tahun 2023 : Rp.1.012.305.208,00	(1.535.872.484,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2023	**27.673.607.274,00**

f. BPR Jatim

Penilaian investasi di BPR Jatim menggunakan metode biaya. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas BPR Jatim sebesar nilai saham yang disetor yaitu Rp18.000.000.000,00 yang terdiri dari 180.000 lembar saham.

Perincian penyertaan modal pada BPR Jatim per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 71. Penyertaan Modal BPR Jatim

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran Tanggal 5 Maret 2012	500.000.000,00
2	Setoran Tanggal 30 Desember 2013	2.500.000.000,00
3	Setoran Tanggal 29 Oktober 2014	10.000.000.000,00
4	Setoran Tanggal 10 Desember 2015	5.000.000.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal	**18.000.000.000,00**

g. PT. Griya Dharma Kusuma (GDK)

Penilaian investasi di PT Griya Dharma Kusuma (GDK) menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99%. PT Griya Dharma Kusuma dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma. Tidak ada penambahan maupun pengurangan pada investasi permanen PT Griya Dharma Kusuma. Sejak Tahun 2022 PT Griya Dharma Kusuma sudah tidak beroperasi.

Perincian penyertaan modal pada PT GDK per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 72. Penyertaan Modal PT Griya Dharma Kusuma

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyertaan modal pemkab sd 2011 Penambahan/pengurangan investasi Tahun 2012 Rugi Tahun 2012: (Rp189.173.218,00)	7.911.063.292,00 (189.173.218,00)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2012	**7.721.890.074,00**
2.	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2013 Laba Tahun 2013 : Rp43.512.112,00 Koreksi laba tahun lalu : Rp22.258.171,00	65.770.283,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2013	**7.787.660.357,00**
3.	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2014 Laba Tahun 2014 : Rp312.736.367,00	312.736.367,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2014	**8.100.396.724,00**
4.	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2015 Deviden: (Rp106.935.496,43) Laba Tahun 2015 : Rp959.377.957,56	852.442.461,13
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2015	**8.952.839.185,13**
5.	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2016 Deviden: (Rp679.791.933,81) Laba Tahun 2016 : Rp36.291.641,00	(643.500.292,81)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2016	**8.309.338.892,32**
6.	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2017 Deviden :(Rp19.959.786,00) Rugi : (Rp926.211.984,44)	(946.171.770,44)
7.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2017**	**7.363.167.121,88**
8.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2018**	**7.363.167.121,88**
9.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2019**	**7.363.167.121,88**
10.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2020**	**7.363.167.121,88**
11.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2021**	**7.363.167.121,88**
12.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2022**	**7.363.167.121,88**
13.	**Saldo Ekuitas per 31 Des 2023**	**7.363.167.121,88**

Dalam pencatatan dan pengakuan penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode biaya untuk PT Bank Jatim dan BPR Jatim sedangkan kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD PDAM Bojonegoro, PD BPR Bojonegoro, PT Bangkit Bangun Sarana, PT Griya Dharma Kusuma dan PT Asri Dharma Sejahtera, adalah lebih dari 50% sehingga menggunakan metode ekuitas.

5.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap merupakan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau dari rampasan.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.293.945.000.957,50 dan saldo awal aset tetap Tahun 2023 sebesar Rp9.854.071.578.025,21. Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2023 seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 73. Mutasi Aset Tetap

Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tanah	2.310.795.886.699,80	49.544.577.450,00	39.211.745.800,00	2.321.128.718.349,80
Peralatan dan Mesin	1.672.471.617.410,10	342.278.072.420,62	113.798.627.049,00	1.900.951.062.781,72
Gedung dan Bangunan	2.720.125.202.852,34	604.019.479.679,23	406.414.868.940,32	2.917.729.813.591,25
Jalan Irigasi dan Jaringan	6.425.780.639.742,18	1.550.137.103.029,22	94.771.283.057,74	7.881.146.459.713,66
Aset Tetap Lainnya	116.645.113.346,47	6.207.727.560,68	302.718.000,00	122.550.122.907,15
Konstruksi dalam Pengerjaan	164.040.088.232,81	175.360.222.090,32	78.444.634.869,75	260.955.675.453,38
Akumulasi Penyusutan	(3.555.786.970.258,49)	(641.797.952.750,35)	(87.068.071.169,38)	(4.110.516.851.839,46)
Jumlah	**9.854.071.578.025,21**	**2.085.749.229.479,72**	**645.875.806.547,43**	**11.293.945.000.957,50**

5.3.1.3.1 Tanah

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tanah	**2.321.128.718.349,80**	**2.310.795.886.699,80**

Nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.321.128.718.349,80, dengan uraian sebagai berikut:

1.	**Saldo per 31 Desember 2022**	Rp	**2.310.795.886.699,80**	
2.	**Penambahan TA 2023:**		**0,00**	
3.	Belanja Modal	Rp	10.503.081.650,00	a)
4.	Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	0,00	b)
5.	Mutasi antar SKPD	Rp	39.041.495.800,00	c)
6.	Reklasifikasi	Rp	0,00	d)
7.	**Jumlah (3 sd 6)**	Rp	**49.544.577.450,00**	

8.	**Pengurangan TA 2023**			
9.	Penghapusan	Rp	(70.750.000,00)	e)
10.	Reklasifikasi	Rp	(99.500.000,00)	f)
11.	Mutasi Antar SKPD	Rp	(39.041.495.800,00)	g)
12.	**Jumlah (9 sd 11)**	Rp	**(39.211.745.800,00)**	
13.	**Saldo per 31 Desember 2023 (1+7+12)**	Rp	**2.321.128.718.349,80**	

Penjelasan terinci atas penambahan aset tetap tanah pada Tahun 2023 sebesar Rp49.544.577.450,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 74. Penambahan Aset Tetap Tanah

Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	**Belanja Modal Tahun 2023**	**10.503.081.650,00**
b)	**Hibah dari Pihak Ketiga**	**0,00**
c)	**Mutasi Antar SKPD**	**39.041.495.800,00**
	- Pengalihan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke BPBD untuk Perumahan Penampungan Pengungsi	860.886.800,00
	- Pengalihan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup untuk Tempat Pembuangan Akhir	8.885.583.000,00
	- Pengalihan dari Dinas Perhubungan ke Dinas Lingkungan Hidup	3.072.354.081,00
	- Pengalihan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk Museum Samin	725.423.250,00
	- Pengalihan dari Dinas Pendidikan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	705.280.000,00
	- Pengalihan dariBagian Umum Sekretariat Daerah ke Dinas Peternakan dan Perikanan	4.687.391.000,00
	- Pengalihan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	7.718.020.000,00
	- Pengalihan dari Dinas Perhubungan ke Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	2.327.645.919,00
	- Pengalihan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke Kecamatan Bojonegoro	10.058.911.750,00
d)	**Reklasifikasi**	**00,00**
	Jumlah	**49.544.577.450,00**

Pengurangan aset tanah selama tahun 2023 Rp 39.211.745.800,00 terdiri dari Penghapusan Aset Rp70.750.000,00 dan reklasifikasi aset Rp99.500.000,00 serta pengurangan lain Rp39.041.495.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 75. Pengurangan Aset Tetap Tanah

Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
e)	**Penghapusan**	**70.750.000,00**	
	Aset Tanah yang dihibahkan ke POLRES Bojonegoro:		**NPHD No. 032/629/412.303/2023**
	- Tanah atas bangunan Kantor Polsek Kasiman. Alamat Desa Sambeng Kec. Kasiman Luas 1750 m^2	36.750.000,00	SK Penghapusan No.188/262/KEP/412.303/2023
	- Tanah atas bangunan Kantor Polsek Ngambon. Alamat Desa Bondol Kec. Ngambon Luas 633 m^2	34.000.000,00	SK Penghapusan No.188/262/KEP/412.303/2023
f)	**Reklasifikasi**	**99.500.000,00**	

Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	- Reklas pengadaan Tanah ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	99.500.000,00	Reklas ke KDP karena belum selesai proses balik nama nya
g)	**Mutasi Antar SKPD**	**39.041.495.800,00**	
	- Pengalihan dari Dinas Pendidikan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	705.280.000,00	SK Penghapusan No.188/33/KEP/412.303/2023
	- Pengalihan dari Dinas Perhubungan ke Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup	5.400.000.000,00	SK Penghapusan No.188/36/KEP/412.303/2023
	- Pengalihan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Kecamatan Bojonegoro	32.936.215.800,00	SK Penghapusan No.188/37/KEP/412.303/2023
	JUMLAH	**39.211.745.800,00**	

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	**1.900.951.062.781,72**	**1.672.471.617.410,10**

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.900.951.062.781,72 dengan uraian sebagai berikut:

1.	**Saldo per 31 Desember 2022**	**Rp**	**1.672.471.617.410,10**	
2.	**Penambahan TA 2023:**			
3.	Belanja Modal	Rp	231.057.841.248,00	a)
4.	Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	816.755.000,00	b)
5.	Reklasifikasi	Rp	7.552.050.746,12	c)
6.	Mutasi Antar SKPD	Rp	102.851.425.426,50	d)
7.	**Jumlah (3 s.d. 6)**	**Rp**	**342.278.072.420,62**	
8.	**Pengurangan TA 2023:**			
9.	Penghapusan	Rp	(5.396.110.803,00)	e)
10.	Ekstrakom	Rp	(796.277.991,00)	f)
11.	Reklasifikasi	Rp	(21.649.997.132,50)	g)
12.	Pengurangan Lain	Rp	(14.938.150,00)	h)
13	Mutasi Antar SKPD	Rp	(85.941.302.972,50)	i)
14.	**Jumlah (9 s.d 13)**	**Rp**	**(113.798.627.049,00)**	
15.	**Saldo per 31 Desember 2023 (1+7+14)**	**Rp**	**1.900.951.062.781,72**	

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2023 sebesar Rp342.278.072.420,62 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 76. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
a)	**Belanja Modal**	**231.057.841.248,00**	
b)	**Hibah dari Pihak Ketiga**	**816.755.000,00**	
	Dinas Pendidikan	**47.225.000,00**	Hibah dari Komite SMPN 7 Bojonegoro
	- LED POLYTRON 55UG5959	6.900.000,00	
	- Bracket LED Standing Oximus	1.650.000,00	
	- Speaker Active POLYTRON Puma 9507	1.025.000,00	
	- PC Unit (Intel Core 5)	4.750.000,00	
	- PC Unit (Intel Core 5)	4.750.000,00	
	- LCD Projector EPSON EB-X500	6.100.000,00	
	- Meja Guru (21 buah)	22.050.000,00	21 buah x @1.050.000
	Dinas Kesehatan	**754.050.000,00**	Hibah Kendaraan Roda 2 dan 4 dari Kementerian Kesehatan yang berasal dari Dropping Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan NPHD No. KN.02.07/I/6375/2018
	- 2 Unit Ambulance Transport Single Grand Suzuki GC415V APV	521.550.000,00	
	- 10 Kendaraan Roda Dua (Bebek) Yamaha Mio Z	145.500.000,00	
	- 4 Kendaraan Roda Dua (Non Bebek) Yamaha New Bison F1/2UP	87.000.000,00	
	RSUD Sosodoro R. Djatikoesoemo	**15.480.000,00**	Hibah masuk dari PT. Finusol Prima Farma Internasional berupa Manekin Tools CAPD dan dari PT. Daewoong Infion berupa kulkas farmasi. Surat Penerimaan Hibah No. 911/6343/412.202/2023
	- Manekin Tools Edukasi CAPD	4.800.000,00	
	- Kulkas Farmasi GEA Phamac6utical Refrigerator. EXPO-280PH	10.680.000,00	
c)	**Reklasifikasi**	**7.552.050.746,12**	
	Pemecahan aset RSUD Sosodoro dari Gedung Bangunan menjadi Peralatan Mesin Gedung A (koreksi BPK)	149.123.496,12	PM Rp149.516.436,12 dikurangi barang *Extracomptable (Exhaust Fan)* Rp392.940
	Pemecahan aset RSUD Sosodoro dari Gedung Bangunan menjadi Peralatan Mesin Gedung H (koreksi BPK)	7.402.927.250,00	PM Rp7.426.727.250 dikurangi barang *Extracomptable (AC Central)* Rp23.800.000
d)	**Mutasi Antar SKPD**	**102.851.425.426,50**	
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Kesehatan	355.485.345,00	
	- Pengalihan dari RSUD Sosodoro R. Djatikoesoemo ke Dinas Kesehatan	828.245.000,00	
	- Pengalihan dari Dinas Kesehatan ke RSUD Sosodoro R. Djatikoesoemo	70.795.000.000,00	
	- Pengalihan dari Dinas Kesehatan ke RSUD Kepohbaru	141.480.000,00	
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Sosial	498.752.495,00	
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP	233.989.812,50	
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.396.443.104,00	
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Kebudayaan dan	45.350.000,00	

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	Pariwisata		
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.437.334.501,00	
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Sekretariat DPRD	11.961.911.209,00	
	- Pengalihan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro	7.719.600.000,00	
	- Pengalihan dari Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Ketahanan Pangan (Pengguna) ke BPKAD (Pengelola)	6.305.528.160,00	
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke BKPP	132.305.800,00	
	JUMLAH	**342.278.072.420,62**	

Penjelasan rinci atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2023 sebesar Rp113.798.627.049,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 77. Pengurangan Aset Peralatan Dan Mesin

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
e)	**Penghapusan**	**5.396.110.803,00**	
	- Kendaraan Roda 2 Honda Win S 9768 AC	5.000.000,00	Penjualan lelang. SK Penghapusan Nomor:188/25/KEP/412.13/2023 Dinas Kesehatan
	- 2 Unit Kendaraan Roda Dua Prisma P-XM	15.500.000,00	Penjualan lelang. SK Penghapusan Nomor:188/25/KEP/412.13/2023 Dinas PU Sumber Daya Air
	- Minibus ISUZU TBR528FSR Nopol S 1033 AP	70.000.000,00	Penjualan lelang. SK Penghapusan Nomor:188/26/KEP/412.13/2023 Dinas PU Sumber Daya Air
	- 1 Unit Kendaraan Roda DuaYamaha Alfa dan 5 Unit Suzuki R100	37.000.000,00	Penjualan lelang. SK Penghapusan Nomor:188/27/KEP/412.13/2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	- 2 Unit Station Wagon Isuzu Panther	133.876.000,00	Penjualan lelang. SK Penghapusan Nomor:188/26/KEP/412.13/2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	- 2 Unit Station Wagon Suzuki ST100SP dan 1 UnitIsuzu Panther 1 Unit Kendaraan Roda 2 Suzuki RC	116.000.000,00	Penjualan lelang. SK Penghapusan Nomor:188/26/KEP/412.13/2023 dan SK Penghapusan Nomor:188/25/KEP/412.13/2023 Dinas Perdagangan Koperasi, dan UKM
	- Peralatan Mesin Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah	4.888.694.803,00	- PM yang dihapus dari bagian umum karena dihibahkan ke Kantor Imigrasi Rp2.592.232.250 SK Penghapusan No.188/1/KEP/412.013/2023 - PM yang dihapus dari bagian umum karena dihibahkan ke polres Rp2.251.938.553 SK Penghapusan no.188/32/KEP/412.013/2023 - Penjualan lelang Kendaraan dinas Bagian Organisasi Rp 6.000.000SK Penghapusan Nomor: 188/26/KEP/412.13/2023 dan Rp

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
			29.500.000,00 SK Penghapusan Nomor: 188/27/KEP/412.13/2023 - Penjualan lelang Kendaraan dinas Bagian Administrasi Pembangunan Rp 9.000.000SK Penghapusan Nomor: 188/27/KEP/412.13/2023
	- 1 unit kendaraan roda dua Suzuki Shogun R dan Honda Supra Fit	27.250.000,00	Penjualan lelang. SK Penghapusan Nomor:188/26/KEP/412.13/2023 dan SK Penghapusan Nomor: 188/25/KEP/412.13/2023 Sekretariat DPRD
	- Kendaraan roda dua Kelurahan Mojokampung, Kepatihan, dan Sumbang	46.000.000,00	- Kel Mojokampung Rp22.000.000,00 SK Penghapusan No.188/27/KEP/412.013/2023 - Kel Kepatihan Rp6.000.000,00 SK Penghapusan No.188/27/KEP/412.013/2023 - Kel Sumbang Rp18.000.000,00 SK Penghapusan No.188/27/KEP/412.013/2023
	- 2 unit kendaraan roda dua Suzuki RC Kecamatan Kedungadem	12.000.000,00	- SK Penghapusan No. 188/25/KEP/412.013/2023 Rp6.000.000 - SK Penghapusan No. 188/26/KEP/412.013/2023 Rp6.000.000
	- 2 unit kendaraan roda dua Suzuki RC Kecamatan Margomulyo	10.500.000,00	Penjualan lelang. SK Penghapusan Nomor:188/27/KEP/412.13/2023 Kecamatan Margomulyo
	- 1 Unit Kendaraan Roda Dua Suzuki A100dan 2 Unit Honda MCB97	21.000.000,00	Penjualan lelang. SK Penghapusan Nomor:188/27/KEP/412.13/2023 Inspektorat
	- 2 Unit Kendaraan Roda Dua Honda MCB WIN	13.290.000,00	Penjualan lelang. SK Penghapusan Nomor:188/27/KEP/412.13/2023 Badan Pendapatan Daerah
f)	**Extracomptable**	**796.277.991,00**	
	- Alat kantor dan rumah tangga (Harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	396.403.445,00	Dinas Pendidikan
	- Alat kantor dan rumah tangga, Alat Kedokteran dan kesehatan dan Alat ukur (Harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	34.096.500,00	Dinas Kesehatan
	- Alat kantor dan rumah tangga, Alat Kedokteran dan kesehatan dan Alat ukur (Harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	170.460.796,00	RSUD Kelas B Dr. R.SOSODORO DJATIKOESOEMO
	- Alat kantor dan rumah tangga, Alat Kedokteran dan kesehatan dan Alat ukur (Harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	3.305.000,00	RSUD Kelas D KEPOHBARU
	- Papan nama instansi (harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	13.580.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	- Alat bengkel dan alat ukur; alat kantor dan rumah tangga; dan alat laboratorium (harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	155.550.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	- (harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	425.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
	- (harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	2.048.250,00	Sekretariat Daerah
	- (Harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	3.284.000,00	Sekretariat DPRD
	- (Harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	2.250.000,00	Kecamatan Bojonegoro
	- Kabel UTP (Harga satuan kurang dari	25.000,00	Kecamatan Sumberrejo

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	Rp500.000,00)		
	- Alat kantor dan rumah tangga (Harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	14.400.000,00	Kecamatan Kasiman
	- Mouse (harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	450.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
g)	**Reklasifikasi Aset**	**21.649.997.132,50**	
	- Reklas Aset Rusak Berat	96.557.300,00	RSUD Kelas B Dr. R.SOSODORO DJATIKOESOEMO
	- Reklas Aset Rusak Berat	5.833.777.276,00	RSUD Kelas D SUMBERREJO
	- Reklas Aset Rusak Berat	707.676.994,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	- Reklas Aset Rusak Berat	11.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	- Reklas Aset Rusak Berat	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	- Reklas Aset Rusak Berat	376.058.650,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Reklas Aset Rusak Berat	492.796.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Reklas Aset Rusak Berat	279.624.600,00	Dinas Perhubungan
	- Reklas Aset Rusak Berat	2.002.927.921,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	- Reklas Aset Rusak Berat	994.225.840,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	- Reklas Aset Rusak Berat	1.206.942.733,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Reklas Aset Rusak Berat	85.171.614,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	- Reklas Aset Rusak Berat	81.545.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	- Reklas Aset Rusak Berat	488.023.380,00	Sekretariat Daerah
	- Reklas Aset Rusak Berat	22.600.000,00	Kecamatan Bojonegoro
	- Reklas Aset Rusak Berat	117.231.800,00	Kecamatan Balen
	- Reklas Aset Rusak Berat	247.146.130,00	Kecamatan Kanor
	- Reklas Aset Rusak Berat	106.870.000,00	Kecamatan Baureno
	- Reklas Aset Rusak Berat	424.683.850,00	Kecamatan Kepohbaru
	- Reklas Aset Rusak Berat	375.624.295,00	Kecamatan Kedungadem
	- Reklas Aset Rusak Berat	88.075.615,00	Kecamatan Sukosewu
	- Reklas Aset Rusak Berat	44.200.000,00	Kecamatan Malo
	- Reklas Aset Rusak Berat	171.923.340,00	Kecamatan Padangan
	- Reklas Aset Rusak Berat	229.016.950,00	Kecamatan Purwosari
	- Reklas Aset Rusak Berat	4.250.000,00	Kecamatan Tambakrejo
	- Reklas Aset Rusak Berat	98.729.000,00	Kecamatan Ngraho
	- Reklas Aset Rusak Berat	267.282.600,00	Kecamatan Margomulyo
	- Reklas Aset Rusak Berat	168.848.100,00	Kecamatan Bubulan
	- Reklas Aset Rusak Berat	414.923.755,00	Kecamatan Sekar
	- Reklas Aset Rusak Berat	172.377.500,00	Kecamatan Gayam
	- Reklas Aset Rusak Berat	808.750.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Reklas Aset Rusak Berat	1.623.500.195,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	- Reklas Aset Rusak Berat	60.978.300,00	Inspektorat
	- Rubah Kondisi Rusak berat	3.282.626.904,5	Dinas Kesehatan
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB	185.329.990,00	
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	48.200.000,00	Sekretariat DPRD
h)	**Pengurangan Lainnya**	**14.938.150,00**	

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	- Pelunasan Utang Puskesmas Baureno	3.549.550,00	Dinas Kesehatan
	- Pelunasan Utang Puskesmas Purwosari	11.388.600,00	Dinas Kesehatan
i)	**Mutasi Antar SKPD**	**85.941.302.972,50**	
	- Pengalihan dari Dinas Kesehatan ke RSUD Sosodoro R. Djatikoesoemo	70.795.000.000,00	
	- Pengalihan dari Dinas Kesehatan ke RSUD Kepohbaru	141.480.000,00	
	- Pengalihan dari RSUD Sosodoro R. Djatikoesoemoke Dinas Kesehatan	828.245.000,00	
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karyake Dinas Penanaman Modal dan PTSP	233.989.812,50	
	- Pengalihan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke BPKAD	244.210.000,00	
	- Pengalihan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro	7.719.600.000,00	
	- Pengalihan dari Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro ke BPKAD (Pengelola Barang)	5.978.778.160,00	
	JUMLAH	**113.798.627.049,00**	

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Gedung dan Bangunan	**2.917.729.813.591,25**	**2.720.125.202.852,34**

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.917.729.813.591,25 dengan uraian sebagai berikut:

1.	**Saldo per 31 Desember 2022**	**Rp**	**2.720.125.202.852,34**	
2.	**Penambahan TA 2023:**			
3.	Belanja Modal	Rp	361.189.683.243,81	a)
4.	Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	1.039.494.552,00	b)
5.	Reklasifikasi Aset	Rp	35.672.795.143,45	c)
6.	Penambahan Lain	Rp	244.261.600,00	d)
7.	Mutasi Antar SKPD	Rp	205.873.245.139,97	e)
8.	**Jumlah (3 s.d. 7)**	**Rp**	**604.019.479.679,23**	
9.	**Pengurangan TA 2023:**			
10.	Penghapusan	Rp	(565.009.095,00)	f)
11.	Reklasifikasi Aset	Rp	(157.678.304.859,10)	g)
12.	Pengurangan Lain	Rp	(2.254.333.313,25)	h)
13.	Mutasi Antar SKPD	Rp	(245.917.221.672,97)	i)
14.	**Jumlah (10 s.d. 13)**	**Rp**	**(406.414.868.940,32)**	
15.	**Saldo per 31 Desember 2023 (1+8+14)**	**Rp**	**2.917.729.813.591,25**	

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap gedung dan bangunan pada Tahun 2023

sebesar Rp604.019.479.679,23 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 78. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
a)	**Belanja Modal**	**361.189.683.243,81**	
b)	**Hibah dari Pihak Ketiga**	**1.039.494.552,00**	
	Dinas Pendidikan		
	- Ruang Tata Usaha	331.900.000,00	Hibah dari Komite SMP Negeri 3 Bojonegoro BAST No.001/K/SMPN 3/2023
	- Lobby Sekolah	105.185.000,00	
	- Ruang Kepala Sekolah	117.300.000,00	
	- Ruang Bimbigan Konseling	214.600.000,00	
	- Ruang Laboratorium	270.509.552,00	Hibah dari Bank Indonesia BAST No. 25/274/Sb/Srt/B
c)	**Reklasifikasi Aset**	**35.672.795.143,45**	
	- Reklas KDP yang sudah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	256.859.517,00	Dinas Pendidikan
	- Reklas KDP yang sudah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	768.558.482,00	RSUD Kelas C Padangan
	- Reklas KDP yang sudah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	34.413.847.154,45	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	- Koreksi dari peralatan dan mesin	185.329.990,00	Dinas Kesehatan
	- Koreksi dari peralatan dan mesin	48.200.000,00	Sekretariat DPRD
d)	**Penambahan Lain**	**244.261.600,00**	
	- Utang atas Pagar SDN Krangkong II Kec. Kepohbaru	244.261.600,00	Dinas Pendidikan
e)	**Mutasi Antar SKPD**	**205.873.245.139,97**	
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Kesehatan	8.328.120.858,00	Dinas Kesehatan
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	209.635.500,00	Gedung Kantor PU SDA
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah	187.792.000,00	Pavingisasi area kantor BPBD
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Pemadam Kebakaran	211.628.500,00	Gedung Kantor Dinas Pemadam Kebakaran
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Sosial	9.830.533.871,00	Paving Pagar Gedung Kantor Dinas Sosialdan Sarana prasarana TMP
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Lingkungan Hidup	21.420.285.572,53	Pembangunan dan penataan ulang landscape taman, air mancur, tugu, pos keamanan, dan Lokasi tebing Bengawan Solo Utara Pasar kota
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	512.734.835,00	Rumah Genset MPP

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	13.270.437.870,41	Stadion Letjend H. Sudirman
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.026.270.488,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	62.536.835.177,82	Pasar Banjarejo II , Pavingisasi Area Parkir dan Pagar Parkir Pasar Wisata
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Bagian Umum Sekretariat Daerah	3.514.422.423,17	Masjid Al Abidin, Rumah Genset Rumah Dinas Bupati, Gedung Area Pemkab
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Sekretariat DPRD	62.733.798.325,00	Kantor Sekretariat DPRD
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Bojonegoro	1.179.682.745,00	Gedung Kantor Kelurahan Jetak, Kadipaten, Ledok Kulon, dan Ledok Wetan; Pendopo Kelurahan Karang pacar; Gedung PKK Kelurahan Ngrowo
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Kapas	211.106.895,00	Pagar Kantor Kecamatan Kapas
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Balen	211.954.812,00	Pavingisasi area Kantor Kecamatan Balen
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Sugihwaras	199.665.000,00	Pavingisasi area KantorKecamatan Sugihwaras
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Kepohbaru	147.523.657,00	Pavingisasi area KantorKecamatan Kepohbaru
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Kedungadem	284.146.000,00	Tempat Parkir dan Rumah Dinas Kecamatan Kedungadem
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Sukosewu	159.712.188,00	Pavingisasi area KantorKecamatan Sukosewu
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Trucuk	1.321.902.000,00	Kecamatan Trucuk
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Malo	424.142.508,00	Pavingisasi Area Kantor dan Pagar Kecamatan Malo
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Dander	423.347.390,00	Pavingisasi Area Kantor dan Pagar Kecamatan Dander
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Kedewan	188.490.475,00	Pavingisasi area Kantor Kecamatan Kedewan
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Ngasem	211.315.400,00	Pagar KantorKecamatan Ngasem
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Ngambon	371.095.466,00	Pavingisasi Area Kantor dan Pagar Kecamatan Ngambon
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Tambakrejo	211.628.460,00	Pavingisasi Area KantorKecamatan Tambakrejo
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Margomulyo	421.753.540,00	Pavingisasi Halaman Kantor dan Rumah Dinas Kecamatan Margomulyo
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta	633.486.133,00	Pavingisasi Area Kantor dan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	Karya ke Kecamatan Temayang		Pagar Kecamatan Temayang
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Bubulan	568.928.282,00	Pavingisasi Area Kantor dan Pagar Kecamatan Bubulan
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Sekar	424.825.851,00	Pavingisasi Area Kantor dan Pagar Kecamatan Sekar
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.956.829.364,53	Gudang Aset BPKAD; Pagar, Pos Jaga, dan Pavingisasi Area Gedung Kantor Jl. Dr. Wahidin
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	7.539.213.552,51	Sarana Prasarana, Drop Off zone, dan Pagar gedung pusdiklat
	Jumlah	**604.019.479.679,23**	

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2023 senilai Rp402.249.355.828 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 5. 79. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
f)	**Penghapusan**	**565.009.095,00**	
	Hibah kepada BPS		
	- Gedung Kantor Badan Pusat Statistika Bojonegoro (Dinas PKP Cipta Karya)	206.990.900,00	SK Penghapusan No. 188/30/412.013/2023 BAST Hibah No. 032/1074/412.205/2021
	Hibah kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak		
	- Pengurukan dan Pemasangan Paving Halaman Bangunan Gudang Jl. Pattimura No.26 Bojonegoro (BPKAD)	84.507.195,00	SK Penghapusan No. 188/32/412.013/2023 BAST Hibah No. 032/807.BAST/412.303/2022
	- Bangunan Tempat Parkir Jl. Pattimura No.26 Bojonegoro (BPKAD)	48.264.000,00	
	- Banguanna Pagar Beton Jl. Pattimura No.26 Bojonegoro (BPKAD)	150.247.000,00	
	- Bangunan Gedung Mushola Jl. Pattimura No.26 Bojonegoro (BPKAD)	75.000.000	
g)	**Reklasifikasi Aset**	**157.678.304.859,10**	
	Reklasifikasi Aset Kondisi Rusak Berat		
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	668.256.310,00	Dinas Kesehatan
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	928.740.200,00	RSUD Kelas D Sumberrejo
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	788.285.000,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	253.537.000,00	Dinas P3AKB
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	84.506.250,00	Dinas Perhubungan
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	861.737.500,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	118.000.000,00	Kecamatan Balen

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	336.062.000,00	Kecamatan Kedungadem
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	10.400.000,00	Kecamatan Tambakrejo
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	245.000.000,00	Kecamatan Margomulyo
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	11.000.000,00	Kecamatan Gayam
	Reklasifikasi Aset KDP		
	- Aset yang belum selesai	2.136.957.295,00	RSUD Kelas C Padangan
	- Aset yang belum selesai	26.935.018.486,00	Dinas PU Sumber Daya Air
	- Aset yang belum selesai	97.342.940.609,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Aset yang belum selesai	48.840.000,00	Sekretariat DPRD
	- Aset yang belum selesai	977.207.479,00	Inspektorat
	Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
	- Reklas Bangunan Air Irigasi Lainnya *(U-Ditch)*	4.000.000,00	Kecamatan Bojonegoro
	- Reklas Bangunan (PJU)	6.000.000,00	Kecamatan Bojonegoro
	Koreksi BPK	**21.756.303.618,10**	
	- Pemecahan aset RSUD Sosodoro dari Gedung Bangunan menjadi Peralatan Mesin dan Jalan Irigasi Jaringan Gedung A	247.731.973,82	PM Rp149.516.436,12 JIJ Rp98.215.537,70
	- Pemecahan aset RSUD Sosodoro dari Gedung Bangunan menjadi Peralatan Mesin dan Jalan Irigasi Jaringan Gedung H	21.508.571.644,28	PM Rp7.426.727.250,00 JIJ Rp14.081.844.394,28
	- Koreksi BPK atas Pembangunan PKM Tanjungharjo turun ke KDP karena belum jadi 100% terdiri dari pengurugan tanah, pagar, pembangunan gedung	4.165.513.112,00	Dinas Kesehatan (Puskesmas Tanjungharjo)
h)	**Pengurangan Lain**	**2.254.333.313,25**	
	- Pembayaran utang dari aset (Aset sudah dicatat Tahun 2022)	667.021.472,00	RSUD Kelas C Padangan
	- Pembayaran utang dari aset (Aset sudah dicatat Tahun 2022)	1.587.311.841,25	Dinas PKP Cipta Karya
i)	**Mutasi Antar SKPD**	**245.917.221.672,97**	
	- Pengalihan Aset dari PKP Cipta Karya ke OPD lain	245.917.221.672,97	SK Penghapusan No. 188/30/KEP/412.013/2023
	JUMLAH	**406.414.868.940,32**	

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**7.881.146.459.713,66**	**6.425.780.639.742,18**

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.881.146.459.713,66 dengan uraian sebagai berikut:

1.	**Saldo per 31 Desember 2022**	**Rp**	**6.425.780.639.742,18**	
2.	**Penambahan TA 2023:**			
3.	Belanja Modal	Rp	1.433.892.555.625,00	a)
4.	Hibah Pihak Ketiga	Rp	82.216.000,00	b)
5.	Reklasifikasi Aset	Rp	55.485.733.795,22	c)
6.	Penambahan Lain	Rp	37.542.743.530,00	d)
7.	Mutasi Antar SKPD	Rp	23.133.854.079,00	e)
8.	**Jumlah (3 s.d. 7)**	**Rp**	**1.550.137.103.029,22**	
9.	**Pengurangan TA 2023:**			
10.	Penghapusan	Rp	(0,00)	f)
11.	Ekstrakom	Rp	(6.341.865,00)	g)
12.	Reklasifikasi Aset	Rp	(90.719.356.643,94)	h)
13.	Pengurangan Lain	Rp	(4.045.584.548,80)	i)
14.	Mutasi Antar SKPD	Rp	(0,00)	j)
15.	**Jumlah (10 s.d. 14)**	**Rp**	**(94.771.283.057,74)**	
16.	**Saldo per 31 Desember 2023 (1+8+15)**	**Rp**	**7.881.146.459.713,66**	

Rincian penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 5. 80. Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
a)	**Belanja Modal**	**1.433.892.555.625,00**	
b)	**Hibah dari Pihak Ketiga**	**82.216.000,00**	
	- Temuan BPK atas LKPD 2022 terkait saluran air dan PJU Talok *The Residence* yang belum dicatat	82.216.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
c)	**Reklasifikasi**	**55.485.733.795,22**	
	- Reklas KDP yang sudah menjadi aset Tetap Jalan, jaringan dan irigasi	39.892.370.064,74	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
	- Reklas KDP yang sudah menjadi aset Tetap Jalan, jaringan dan irigasi	1.012.732.830,00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	- Reklas KDP yang sudah menjadi aset Tetap Jalan, jaringan dan irigasi	216.731.500,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	- Reklas Peralatan Mesin yang seharusnya JIJ (PJU dan U-Ditch)	10.000.000,00	Kecamatan Bojonegoro
	- Pemecahan aset dari Gedung Bangunan menjadi Jalan Irigasi dan Jaringan (Koreksi BPK)	98.215.537,70	Gedung A RSUD Sosodoro Djatikusumo

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	- Pemecahan aset dari Gedung Bangunan menjadi Jalan Irigasi dan Jaringan (Koreksi BPK)	14.081.844.394,28	Gedung H RSUD Sosodoro Djatikusumo
	- Reklas KDP yang sudah menjadi aset Tetap Jalan, jaringan dan irigasi	173.839.468,50	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
d)	**Penambahan Lain**	**37.542.743.530,00**	
	- Aset dari Utang Belanja Modal Dinas PKP Cipta Karya Tahun 2023	34.043.834.080,00	Pembangunan saluran drainase, pemeliharaan jalan lingkungan dan penerangan jalan umum yang progres fisik nya sudah 100% tetapi pembayaran belum selesai
	- Koreksi atas kesalahan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa rekonstruksi pasca bencana jalan rigid jalan Kawengan-Wonocolo Kec. Kedewan (Koreksi BPK)	3.498.909.450,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
e)	**Mutasi Antar SKPD**	**23.133.854.079,00**	
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Kesehatan	528.897.839,00	Dinas Kesehatan
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Sosial	746.335.804,00	Dinas Sosial
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.522.525.410,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	9.333.929.073,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Sekretariat Daerah	923.189.560,00	Sekretariat Daerah
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Sekretariat DPRD	7.276.015.116,00	Sekretariat DPRD
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Kepohbaru	38.902.343,00	Kecamatan Kepohbaru
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Kecamatan Trucuk	16.191.000,00	Kecamatan Trucuk
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	129.330.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	- Pengalihan dari Dinas PKP Cipta Karya ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	603.537.334,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	JUMLAH	**1.550.137.103.029,22**	

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2023

senilai Rp94.771.283.057,74 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 5. 81. Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
e)	**Penghapusan**	**0,00**	
f)	**Extracomptable**	**6.341.865,00**	
	- Instalasi jaringan listrik di TPA Kecamatan Sumberrejo	3.797.865,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	- Sumur resapan di Pusdiklat Ngumpakdalem, Dander	2.544.000,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
g)	**Reklasifikasi Aset**	**90.719.356.643,94**	
	- Reklasifikasi ke aset rusak berat	25.714.080,00	RSUD Kelas D SUMBERREJO
	- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk pekerjaan yang progres fisiknya belum 100%	30.671.666.841,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
	- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan karena progres fisik belum 100%	833.956.165,00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	- Reklasifikasi ke aset rusak berat	58.173.924.472,94	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan karena progres fisik belum 100%	732.706.585,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	- Reklasifikasi ke aset rusak berat	281.388.500,00	Dinas Perhubungan
h)	**Pengurangan Lain**	**4.045.584.548,80**	
	- Pelunasan utang belanja modal tahun 2022	3.051.716.748,80	Dinas Pekerjaan Bina Marga dan Penataan Ruang
	- Jurnal koreksi atas belanja jasa konsultasi pengawasan yang dianggarkan pada belanja modal jalan kabupaten	101.160.800,00	Dinas Pekerjaan Bina Marga dan Penataan Ruang
	- Jurnal Koreksi atas Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan yang dianggarkan pada Belanja Modal	892.707.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
i)	**Mutasi Antar SKPD**	**0,00**	
	JUMLAH	**94.771.283.057,74**	

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	**122.550.122.907,15**	**116.645.113.346,47**

Nilai aset tetap Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp122.550.122.907,15 dengan uraian sebagai berikut:

1.	**Saldo per 31 Desember 2022**	**Rp**	**116.645.113.346,47**	
2.	**Penambahan TA 2023:**			
3.	Belanja Modal	Rp	6.201.930.228,00	a)
4.	Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	5.797.332,68	b)
5.	**Jumlah (3 s/d 4)**	**Rp**	**6.207.727.560,68**	
6.	**Pengurangan TA 2023:**			
7.	Reklasifikasi Aset	Rp	(302.718.000,00)	c)
8.	**Jumlah (7)**	**Rp**	**(302.718.000,00)**	
9.	**Saldo per 31 Desember 2023 (1+5+8)**	**Rp**	**122.550.122.907,15**	

Selama tahun berjalan terjadi penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.207.727.560,68. Penambahan Aset Tetap Lainnya ini berasal dari belanja modal tahun 2023 sebesar Rp6.201.930.228,00 dan Hibah dari pegawai RSUD Sosodoro berupa buku bacaan dalam rangka Pencanangan "Pekan Donor Buku, One Staff One Book" sebesar Rp5.797.332,68.

Disisi lain, pada tahun 2023 terjadi pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp302.718.000,00 yang berasal dari:

Tabel 5. 82. Pengurangan Aset Tetap Lainnya

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
c)	Reklasifikasi Aset	302.718.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Reklas ke Aset Rusak Berat)
	JUMLAH	**302.718.000,00**	

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Konstruksi dalam Pengerjaan	**260.955.675.453,38**	**164.040.088.232,81**

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp260.955.675.453,38 dengan uraian sebagai berikut:

1.	**Saldo per 31 Desember 2022**	**Rp**	**164.040.088.232,81**	
2.	**Penambahan TA 2023:**			
3.	Reklasifikasi Aset	Rp	163.944.306.572,00	a)
4.	Penambahan Lain	Rp	11.415.915.518,32	b)
5.	**Jumlah (3 s.d 4)**	**Rp**	**175.360.222.090,32**	
6.	**Pengurangan TA 2023:**			
7.	Reklasifikasi Aset	Rp	(76.734.939.016,69)	c)
8.	Pengurangan Lain	Rp	(1.709.695.853,06)	d)
9.	**Jumlah (7 s.d 8)**	**Rp**	**(78.444.634.869,75)**	
10.	**Saldo per 31 Desember 2023 (1+5+9)**	**Rp**	**260.955.675.453,38**	

Rincian penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 5. 83. Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	**Reklasifikasi Aset**	**163.944.306.572,00**
	- Dinas Kesehatan	4.165.513.112,00
	- RSUD Kelas C Padangan	2.136.957.295,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	30.771.166.841,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	27.768.974.651,00
	- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	98.075.647.194,00
	- Sekretariat DPRD	48.840.000,00
	- Inspektorat	977.207.479,00
b)	**Penambahan Lain**	**11.415.915.518,32**
	- Utang Belanja Pembangunan Gedung Puskesmas Tanjungharjo (Dinas Kesehatan)	345.332.727,45
	- Utang Belanja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Tanjungharjo (Dinas Kesehatan)	19.954.000,00
	- Utang Belanja Modal (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang)	7.916.726.464,00
	- Koreksi BPK atas penambahan utang belanja modal pada Dinas PU Sumber Daya Air, yang terdiri dari: • Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Pompa Desa Kalirejo Kec. Bojonegoro Tahap II Rp881.652.300,00; • Pembangunan Pompa dan Pintu Pengendali Banjir Kali Ingas Desa Lebaksari Kec. Baureno Rp1.319.032.000,00; • Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi D.I Nolo/Ngasinan Kec. Padangandan Pilangsari Rp131.133.915,00; • Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi D.I Pilangsari Rp77.128.205,60.	2.408.946.420,60
	- Koreksi BPK atas penambahan Utang Belanja Modal Pemasangan Baru Penerangan Jalan pada Dinas PKP dan Cipta karya	724.955.906,27
	JUMLAH	**175.360.222.090,32**

Rincian pengurangan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 5. 84. Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
c)	**Reklasifikasi Aset**	**76.734.939.016,69**
	- Dinas Pendidikan	256.859.517,00
	- RSUD Kelas C Padangan	768.558.482,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	39.892.370.064,74
	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	1.012.732.830,00
	- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	34.630.578.654,45
	- Koreksi BPK reklas ke JIJ atas pembangunan TPT Jalan Kepohkidul-Sumberrejo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga	173.839.468,50
d)	**Pengurangan Lain**	**1.709.695.853,06**
	Utang Belanja Modal pada Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang dicatat sebesar Nilai Kontrak dikurangi yang telah terbayar, yang seharusnya dicatat dengan nilai pekerjaan sesuai progres 31 Desember 2023 dikurangi realisasi pembayaran (Koreksi atas review Inspektorat)	1.709.695.853,06
	JUMLAH	**78.444.634.869,75**

Rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 85. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD

No	OPD	KDP - Tanah	KDP-Peralatan dan Mesin	KDP-Gedung dan Bangunan	KDP-Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo Per 31 Desember 2023
1.	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	121.129.434,00	0,00	121.129.434,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	4.530.799.839,45	0,00	4.530.799.839,45
3.	RSUD Padangan	0,00	0,00	2.136.957.295,00	0,00	2.136.957.295,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	99.500.000,00	0,00	0,00	43.056.159.149,50	43.155.659.149,50
5.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	0,00	0,00	32.446.372.526,00	4.118.177.987,06	36.564.550.513,06
6.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	0,00	0,00	170.949.547.169,10	2.434.334.574,27	173.383.881.743,37
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	36.650.000,00	0,00	36.650.000,00
8.	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	48.840.000,00	0,00	48.840.000,00
9.	Inspektorat	0,00	0,00	977.207.479,00	0,00	977.207.479,00
	JUMLAH	**99.500.000,00**	**0,00**	**211.247.503.742,55**	**49.608.671.710,83**	**260.955.675.453,38**

Rincian daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 2.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus *(Straight line method)*.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Aset Tetap berikut yang tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan ternak dan tanaman. Terhadap Aset Tetap Lainnya berupa buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan ternak dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek *(which ever is shorter)* antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pada Tahun 2023 terdapat perubahan pencatatan aset tetap, yaitu telah dilakukan atribusi atas pekerjaan rehabilitasi/renovasi pada aset induk Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sebelumnya dicatat sebagai aset induk tersendiri. Terhadap atribusi aset-aset tersebut berdampak pada perubahan masa manfaat aset dan perhitungan akumulasi penyusutan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	**(4.110.516.851.839,46)**	**(3.555.786.970.258,49)**

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp4.110.516.851.839,46) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 86. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 2022 (Rp)	Saldo Awal terkoreksi (Rp)	Beban Penyusutan 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	1.170.535.473.537,88	1.142.563.025.805,38	180.260.531.261,42	1.322.823.557.066,80
Gedung dan Bangunan	441.019.575.473,37	437.224.105.386,00	55.182.317.922,00	492.406.423.308,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.943.259.159.989,24	1.900.506.636.395,66	393.661.318.927,00	2.294.167.955.322,66
Aset Tetap Lainnya	972.761.258,00	972.761.258,00	146.154.884,00	1.118.916.142,00
Jumlah	**3.555.786.970.258,49**	**3.481.266.528.845,04**	**629.250.322.994,42**	**4.110.516.851.839,46**

5.3.1.4. ASET LAINNYA

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, aset kondisi rusak berat dan amortisasi.

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.574.034.417.916,71, terdiri atas:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00
Aset Tidak Berwujud	12.455.075.502,00	11.660.069.315,00
Aset Lain-lain	1.729.700.398.606,23	435.490.066.448,79
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(157.380.993.014,05)	(88.158.622.205,02)
Amortisasi	(10.743.253.177,47)	(9.537.047.281,00)
Jumlah Aset Lainnya	**1.574.034.417.916,71**	**349.457.656.277,77**

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	**3.190.000,00**	**3.190.000,00**

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 Rp3.190.000,00 tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan TGR An. Rusman.

Terdapat perbedaan antara jumlah yang disajikan pada laporan keuangan dengan rekapitulasi hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah. Hal ini dikarenakan:

1. Sudah lunas tapi belum terhapus karena belum dilengkapi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tapi sudah ada penetapan oleh Majelis TP-TGR;
2. Temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum tetapi belum dihapuskan dari daftar temuan;
3. Sudah lunas tapi belum melalui proses mekanisme TP-TGR sehingga belum bisa diselesaikan;
4. Belum dilakukan pelunasan.

5.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Tak Berwujud	**12.455.075.502,00**	**11.660.069.315,00**

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud terdiri atas *goodwill*, hak paten atau hak cipta, *royalty*, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

Nilai Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.455.075.502,00.

1.	**Saldo per 31 Desember 2022**	**Rp**	**11.660.069.315,00**	
2.	**Penambahan TA 2023:**			
3.	Reklas dari Belanja Modal ATL	Rp	795.006.187,00	a)
4.	**Pengurangan TA 2023**			
5.	*Extracomptable*	Rp	0,00	
6.	**Saldo per 31 Desember 2023 (1+3+5)**	**Rp**	**12.455.075.502,00**	

Keterangan:

a. Penambahan dari reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2023 Rp795.006.187,00. Tahun 2023 belanja modal aset tak berwujud di SIPD diklasifikasikan dalam aset tetap lainnya.

Rekapitulasi aset tak berwujud per OPD disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 87. Rekapitulasi Aset Tak Berwujud Per OPD

No	Nama OPD	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	1.439.303.200,00	1.439.303.200,00
2.	Dinas Kesehatan	572.473.790,00	372.475.000,00
3.	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	433.603.900,00	433.603.900,00
4.	RSUD Sumberejo	502.798.000,00	502.798.000,00
5.	RSUD Padangan	142.506.000,00	142.506.000,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	1.302.449.000,00	1.302.449.000,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1.016.495.120,00	919.806.120,00

No	Nama OPD	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	99.000.000,00	99.000.000,00
9.	Dinas Sosial	16.500.000,00	16.500.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	49.965.000,00	49.965.000,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	98.074.000,00	98.074.000,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	227.841.000,00	227.841.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.500.000,00	49.500.000,00
14.	Dinas Perhubungan	630.227.600,00	601.145.600,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.804.647.465,00	1.804.647.465,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	402.530.000,00	402.530.000,00
17.	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	54.000.000,00	54.000.000,00
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.000.000,00	0,00
19.	Dinas Peternakan dan Perikanan	99.850.000,00	99.850.000,00
20.	Dinas Perdagangan	25.700.000,00	25.700.000,00
21.	Bagian Organisasi (Setda)	315.664.000,00	315.664.000,00
22.	Bagian Perekonomian dan SDA (Setda)	9.999.990,00	9.999.990,00
23.	Bagian Umum (Setda)	69.640.000,00	69.640.000,00
24.	Bagian Protokol dan Komunikaasi Pimpinan (Setda)	5.000.000,00	5.000.000,00
25.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Setda)	90.400.000,00	90.400.000,00
26.	Sekretariat DPRD	96.337.500,00	96.337.500,00
27.	Kecamatan Bojonegoro	145.000.000,00	145.000.000,00
28.	Inspektorat	119.500.000,00	89.500.000,00
29.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	604.223.500,00	455.761.000,00
30.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	641.375.000,00	614.125.000,00
31.	Badan Pendapatan Daerah	1.120.640.937,00	882.117.040,00
32.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	244.830.500,00	244.830.500,00
	JUMLAH	**12.455.075.502,00**	**11.660.069.315,00**

Rincian aset tak berwujud per OPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 88. Rincian Aset Tak Berwujud per OPD

No	OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Software Aplikasi Sistem Informasi Absensi	79.650.000,00
		OS, Office system dan windows server sarpras SMP	1.164.653.200,00
		Software PPDB Online SMP Negeri Tahun Ajaran 2021/2022	195.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Aplikasi Program Gizi	6.900.000,00
		Aplikasi Jamkesda	6.900.000,00
		Akbid	40.000.000,00
		Perijinan PIRT	77.330.000,00
		Software Aplikasi PSC 119	191.950.000,00
		Software SINTESA + lanjutan	99.393.840,00
		Software Saji Pangan Sistem Informasi Perizinan Usaha Pengelolaan Pangan dan Kesehatan Lingkungan	50.000.000,00

No	OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
		Software Aplikasi Sipatas	50.000.000,00
		Software Cekatan	49.999.950,00
3	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	Software Farmasi dan Laboratorium	90.000.000,00
		Software Jasa administrasi Keuangan	159.999.400,00
		SIM Rumah Sakit	93.000.000,00
		Website RSUD Sosodoro, www.rssosodoro.com	51.600.000,00
		Lisensi Aplikasi Sismadak	5.205.000,00
		Aplikasi JDIH	33.799.500,00
4	RSUD Sumberejo	SIM Rumah Sakit Lanjutan	356.298.000,00
		SIM Rumah Sakit	49.500.000,00
		Software Elektronik Rekam Medik dan Verifikasi Klaim	97.000.000,00
5	RSUD Padangan	SIM Rumah Sakit	58.305.000,00
		Software Aplikasi Hospital System & Aplikasi Instalasi Penunjang	79.201.000,00
		Lisensi Aplikasi Sismadak	5.000.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	Data Base Jalan	177.979.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Sumberejo	49.799.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Kanor	49.800.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Baureno	49.800.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Balen	49.799.000,00
		Database jembatan wilayah selatan	49.800.000,00
		Database jembatan wilayah Timur	49.850.000,00
		Database jembatan wilayah Barat	49.800.000,00
		Database jembatan wilayah Utara	49.800.000,00
		Aplikasi E Reporting data jalan	49.025.000,00
		Data Base Jalan Poros Desa Kec. Dander, Kedungadem, Kalitidu dan Padangan	198.015.000,00
		Database Jalan	175.257.000,00
		Database Jembatan	276.775.000,00
		Aplikasi persuratan	26.950.000,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Database Sekolah Dasar	44.770.000,00
		Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	197.165.000,00
		Data Base Sistem Pengendalian Kegiatan Fisik Bidang Tata Bangunan	49.016.000,00
		Aplikasi Database Rumah Tidak Layak Huni	49.362.000,00
		Aplikasi SIIAB	149.050.000,00
		Database Gedung atau Kantor	182.707.500,00
		Aplikasi CLOUD	49.995.000,00
		Aplikasi GIS	99.275.000,00
		Database PJU	98.465.620,00
		Aplikasi Sisa Kemampuan Paket	96.689.000,00
8	SATPOL PP	Aplikasi Trantibum Tranmas	99.000.000,00
9	Dinas Sosial	Sistem aplikasi pencairan dana bantuan sosial pada dinas sosial kab. bojonegoro	16.500.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi Pelaporan Pengelolaan Lingkungan oleh Pelaku usaha	49.965.000,00

No	OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Website www.pertanianbojonegoro.net	6.000.000,00
		Aplikasi SMS Center & Website	42.124.000,00
		Aplikasi Sistem Informasi Profil Kelompok Tani	49.950.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Pendukung Surat	78.500.000,00
		Software Aplikasi Arsip	49.150.000,00
		Aplikasi Monitoring Jaringan Komputer SIAK	26.525.000,00
		Aplikasi Windows Server Standart 2008 R2	14.150.000,00
		Aplikasi Pendaftaran Pelayanan Adminstrasi Kependudukan Online	59.516.000,00
13	DPMD	Software SI BUMBO	49.500.000,00
14	Dinas Perhubungan	Software Aplikasi (Pendataan Retribusi)	60.335.000,00
		Traffic Information Center (TIC)	29.997.000,00
		Pengadaan Software Aplikasi (Customize) Sistem Informasi Manajemen Perhubungan	154.715.000,00
		Sistem Pendataan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	128.577.000,00
		Softwere Aplikasi (Customize), Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan	197.390.600,00
		Aplikasi Pendaftaran Online PKB	29.524.000,00
		Aplikasi E-Office	29.689.000,00
15	Dinas Kominfo	Software Redisgn portal Web bojonegorokab.go.id	164.000.000,00
		Manajemen Software Kantor Maya serta Network Monitoring VMWare	143.042.000,00
		Software Security	46.938.000,00
		Aplikasi E Latter	370.315.000,00
		Sistem Informasi Web Portal	167.255.000,00
		Aplikasi Absensi Online	127.490.000,00
		Sistem Aplikasi Informasi UKM Online	114.565.000,00
		Sistem Informasi Disperindag Online	114.510.000,00
		Software VM Ware	101.069.980,00
		SIMTAPAT (Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat)	221.996.485,00
		Aplikasi Windows server dan SQL server Standard Licensed	56.672.000,00
		Aplikasi Dashboard Baseline Data Daerah	34.980.000,00
		Software Database System dan Office System	13.414.000,00
		Aplikasi Sistem Informasi Data Perdagangan	35.600.000,00
		Aplikasi Customize Absensi Online Berbasis Lokasi	92.800.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Aplikasi Sistem	43.500.000,00
		Software Aplikasi	198.850.000,00
		Aplikasi Arsip Digital	25.000.000,00
		Software mesin antrian	51.480.000,00
		Aplikasi Perizinan Terintegrasi	83.700.000,00
17	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Website Pariwisata	50.000.000,00
		HAKI penciptaan lagu dan seni lainnya @400,000x10	4.000.000,00
18	Dinas Peternakan dan Perikanan	Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Ternak Sapi Produktif Bojonegoro	99.850.000,00
19	Dinas Perdagangan	Aplikasi UPT Metrologi Legal	25.700.000,00

No	OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
20	Bagian Organisasi (Setda)	Aplikasi Informasi Jabatan (SINJAB)	151.664.000,00
		Aplikasi EVJAB (Evaluasi Jabatan)	99.500.000,00
		Software aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi	64.500.000,00
21	Bagian Perekonomian dan SDA (Setda)	Aplikasi sofware spesifikasi Android Data Pelaku Ekonomi Bojonegoro	9.999.990,00
22	Bagian Umum (Setda)	SIMPEG	24.640.000,00
		Sistem Manajemen Surat	45.000.000,00
23	Bagian Protokol dan Komunikaasi Pimpinan (Setda)	Video Editing	5.000.000,00
24	Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Setda)	Software komputer (license) pada Tahun 2019	90.400.000,00
25	Sekretariat DPRD	Aplikasi Perjalanan Dinas DPRD	49.500.000,00
		Software Aplikasi	46.837.500,00
26	Kecamatan Bojonegoro	Software Display Informasi kelurahan Kadipaten	20.000.000,00
		Software display informasi Kelurahan Banjarejo	20.000.000,00
		Software Aplikasi untuk kegiatan Layanan Kelurahan Klangon	20.000.000,00
		Software administrasi kependudukan dan surat menyurat Kelurahan Karangpacar	20.000.000,00
		Software Aplikasi untuk kegiatan Layanan Kelurahan Ngrowo	20.000.000,00
		Aplikasi Software (Website) Kelurahan Kepatihan	22.500.000,00
		Website Kelurahan Ledok kulon	22.500.000,00
27	Inspektorat	Aplikasi SIPINTAR DAN PERISAI	25.000.000,00
		Software Integrasi antar Aplikasi Pengawasan Inspektorat dan Aplikasi Progres Konstruksi (E-Prog)	27.000.000,00
		Aplikasi SiMwaskab.bjn	25.000.000,00
		Software (Game Integrity Goals)	12.500.000,00
		Aplikasi Elektronik Survey Internal / ESI	30.000.000,00
28	Bappeda	Aplikasi SIPPDA	49.500.000,00
		Aplikasi Monitoring & Evaluasi GDSC	14.932.000,00
		Aplikasi monitoring dan Evaluasi HIV-AIDS	14.932.000,00
		Aplikasi SIPD	49.700.000,00
		Aplikasi Sitem Informasi Perencanaan pembangunan e-monev	227.697.000,00
		Aplikasi Geospasial	99.000.000,00
		Aplikasi E-LKPJ Berbasis Web	74.425.500,00
		software untuk Lomba Inovasi dengan spesifikasi Fitur alat managemen dan operasional (Panel admin, akses, dasbord, statistik dan alaistik)	74.037.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	SIPADU BPHTB	94.700.000,00
		Software Oracle	96.000.000,00
		Web design	9.240.000,00
		Software Mapinfo 12	43.375.000,00
		Software Pendukung Aplikasi Pajak Daerah	92.000.000,00
		Software Aplikasi Pelayanan PBB-P2	24.200.000,00
		Software Aplikasi Sistem Informasi BPHTB	104.500.000,00

No	OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
		Online	
		Aplikasi SIMPATDU + lanjutan	267.533.683,00
		Aplikasi SIM KSWPD	85.453.500,00
		Aplikasi Paymant Gateway	49.750.000,00
		Aplikasi Smart Water	96.800.000,00
		Aplikasi ETPD (Elektronifikasi Pembayaran Transaksi Daerah)	157.088.754,00
30	BPKAD	Sistem Operasi Server	12.500.000,00
		Sitem Operasi Server & Software Backup Database	26.000.000,00
		Software Aplikasi sistem Pencairan Dana	19.900.000,00
		Software Remote Server	9.950.000,00
		Sistem Pembuatan DPA & SPD	29.900.000,00
		Sistem Proteksi Update Anggaran	29.950.000,00
		Aplikasi BPKB Bid. Kekayaan Daerah	19.950.000,00
		Software Komputer Sistem Pergeseran	30.000.000,00
		Windows server dan SQL Server	64.675.000,00
		Aplikasi sistem AT dan Integrasi simda BMD dengan Simda Keuangan	80.000.000,00
		Sistem Informasi Transparansi Anggaran	31.875.000,00
		Sistem Informasi Belanja PPKD	33.550.000,00
		Back up system (2 UNIT)	14.700.000,00
		Database Development Tool	14.850.000,00
		Office System (6 UNIT)	47.550.000,00
		Operating System (2 UNIT)	49.100.000,00
		Software Aplikasi Customize AISA	25.075.000,00
		Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Sistem Tanda Tangan Elektronik	24.950.000,00
		Operating System Tahun 2021	23.250.000,00
		Microsoft Office	26.400.000,00
		Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Realisasi (RANIA)	27.250.000,00
31	BKPP	SIMPEG	156.202.500,00
		Aplikasi SIMANTAP	88.628.000,00
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aplikasi Alihmedia Kearsipan	25.000.000,00
		JUMLAH	**12.455.075.502,00**

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Lain-lain	**1.729.700.398.606,23**	**435.490.066.448,79**

Nilai Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.729.700.398.606,23 dengan uraian sebagai berikut:

1.	**Saldo per 31 Desember 2022**	**Rp**	**435.490.066.448,79**	
2.	**Penambahan TA 2023:**			
3.	Reklasifikasi Aset	Rp	84.505.736.455,44	a)
4.	Penambahan lain	Rp	1.434.245.889.000,00	b)
5.	**Jumlah (3 s.d. 4)**	**Rp**	**1.518.751.625.455,44**	
6.	**Pengurangan TA 2023:**			
7.	Penghapusan	Rp	(811.600.000,00)	c)
8.	Reklasifikasi	Rp	(0,00)	
9.	Pengurangan Lain	Rp	(223.729.693.298,00)	d)
10.	**Jumlah (7 s.d 9)**	**Rp**	**(224.541.293.298,00)**	
11.	**Saldo per 31 Desember 2023 (1+5+10)**	**Rp**	**1.729.700.398.606,23**	

Keterangan:

a) Penambahan aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset atau penurunan kondisi aset tetap ke aset rusak berat sebesar Rp84.505.736.455,44, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 89. Penambahan Aset Lain-Lain

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	**Reklasifikasi aset**	
	Penambahan Aset Lain-Lain dari Penurunan Kondisi Rusak Berat:	
	- Dinas Kesehatan	3.950.910.214,50
	- RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	96.557.300,00
	- RSUD Sumberrejo	6.788.231.556,00
	- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	59.669.886.466,94
	- Satuan Polisi Pamong Praja	11.500.000,00
	- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	283.537.000,00
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	376.058.650,00
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	492.796.800,00
	- Dinas Perhubungan	645.519.350,00
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	2.002.927.921,00
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	994.225.840,00
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.068.680.233,00
	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	387.862.614,00
	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	81.545.000,00
	- Sekretariat Daerah	488.023.380,00
	- Kecamatan Bojonegoro	22.600.000,00
	- Kecamatan Balen	235.231.800,00
	- Kecamatan Kanor	247.146.130,00
	- Kecamatan Baureno	106.870.000,00
	- Kecamatan Kepohbaru	424.683.850,00
	- Kecamatan Kedungadem	711.686.295,00
	- Kecamatan Sukosewu	88.075.615,00
	- Kecamatan Malo	44.200.000,00

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	- Kecamatan Padangan	171.923.340,00
	- Kecamatan Purwosari	229.016.950,00
	- Kecamatan Tambakrejo	14.650.000,00
	- Kecamatan Ngraho	98.729.000,00
	- Kecamatan Margomulyo	512.282.600,00
	- Kecamatan Bubulan	168.848.100,00
	- Kecamatan Sekar	414.923.755,00
	- Kecamatan Gayam	183.377.500,00
	- Inspektorat	60.978.300,00
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	808.750.700,00
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.623.500.195,00
	JUMLAH	**84.505.736.455,44**

b) Penambahan aset lain-lain sebesar Rp1.434.245.889.000,00 berasal dari TDF Kab. Bojonegoro pada Tahun 2023 yang terdiri dari penyaluran TDF pada tanggal 30 Desember 2023 atas tambahan DBH Kab. Bojonegoro sesuai PMK RI No. 159/2023 sebesar Rp222.506.445.000,00ditambah dengan penyaluran TDF pada tanggal 29 Desember 2023 atas sisa salur KB DBH sesuai KMK RI No. 38/KM.7/2023 sebesar Rp1.211.739.444.000,00.

c) Pengurangan aset lain-lain yang berasal dari penghapusan sebesar Rp811.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 90. Pengurangan Aset Lain-Lain

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
c)	**Penghapusan**		
	Dinas Kesehatan	230.800.000,00	- Kendaraan rusak berat dilelang berdasarkan SK Penghapusan No.188/25/KEP/412.013/2023
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64.000.000,00	- SK Penghapusan No.188/14/KEP//412.013/2023 PM dilelang Rp40.000.000,00 (mobil); - SK Penghapusan No.188/25/kEP/412.013/2023 PM dilelang Rp12.000.000,00(motor); - SK Penghapusan No.188/27/412.013/2023 PM dilelang Rp12.000.000 (motor)
	Dinas Sosial	37.000.000,00	- SK Penghapusan No.188/17/KEP/412.013/2023 ttg Kendaraan dinas (pick up) yg dihapus krn lelang Rp15.500.000,00 - SK Penghapusan No.188/27/KEP/412.013/2023 ttg Kendaraan yg dihapus krn lelang (motor) Rp21.500.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.000.000,00	- SK Penghapusan No.188/25/KEP/412.013/2023 Rp4.000.000,00
	Dinas Perhubungan	248.300.000,00	- SK Penghapusan No.188/15/KEP/412.013/2023 ttg Kendaraan dinas yg dihapus krn lelang Rp240.000.000,00 - SK Penghapusan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
			No.188/25/KEP/412.013/2023 ttg Kendaraan dinas yg dihapus krn lelang Rp8.300.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.000.000,00	- SK Penghapusan No.188/25/KEP/412.013/2023 ttg Kendaraan dinas yg dihapus krn lelang Rp4.000.000,00 - SK Penghapusan No.188/27/KEP/412.013/2023 ttg Kendaraan dinas yg dihapus krn lelang Rp14.000.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	54.000.000,00	- SK Penghapusan No.188/26/KEP/412.013/2023 ttg Kendaraan dinas yg dihapus krn lelang Rp54.000.000,00
	Sekretariat Daerah	76.000.000,00	- Penghapusan kendaraan dinas Bagian Perekonomian dan SDA Rp7.000.000,00 SK No. 188/25/KEP/412.303/2023; - Penghapusan kendaraan dinas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rp10.000.000,00 SK No.188/25/KEP/412.303/2023; - Penghapusan kendaraan dinas bagian pemerintahan Rp45.000.000,00 SK No.188/26/KEP/412.303/2023; - Penghapusan kendaraan dinas Bagian Administrasi Pembangunan Rp5.000.000,00 SK No.188/27/KEP/412.303/2023 - Penghapusan kendaraan dinas bagian umum Rp9.000.000,00 SK No.188/27/KEP/412.303/2023
	Sekretariat DPRD	4.000.000,00	- SK No.188/25/KEP/412.303/2023 Rp4.000.000,00
	Kecamatan Kepohbaru	6.000.000,00	- SK Penghapusan No.188/25/KEP/412.013/2023 karena lelang Rp6.000.000,00
	Inspektorat	42.500.000,00	- SK penghapusan SK No.188/26/KEP/412.303/2023 kendaraan nopol S 1046 AP Rp35.000.000,00; - SK Penghapusan SK No.188/27/KEP/412.303/2023 kendaraan nopol S 4069 CP Rp4.000.000,00 dan kendaraan nopol S 3864 CP Rp3.500.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	6.000.000,00	- Penghapusan Karena Lelang SK No.188/27/KEP/412.013/2023 Rp6.000.000,00
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	21.000.000,00	- Penghapusan Karena Lelang SK No.188/25/KEP/412.013/2023 Rp21.000.000,00
	JUMLAH	**811.600.000,00**	

d) Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp223.729.693.298,00 merupakan DBH Pajak dan SDA dengan mekanisme TDF tahun 2022 yang disalurkan ke RKUD setelah masa *holding period* berakhir, yaitu pada tanggal 11 April 2023 sebesar Rp7.079.209.400,00, tanggal 14 April 2023 sebesar Rp108.325.242.000,00, dan tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp108.325.241.898,00.

5.3.1.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	**(157.380.993.014,05)**	**(88.158.622.205,02)**

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa aset disajikan sesuai dengan nilai netto, maka pada tahun ini dilakukan koreksi atas akumulasi penyusutan aset lainnya sehingga diharapkan aset lainnya dapat disajikan dengan benar.

Tabel 5. 91. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No	Nama OPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	34.493.676.558,80	-		34.493.676.558,80
2.	Dinas Kesehatan	9.609.537.845,46	3.413.659.924,50	(201.800.000,00)	12.821.397.769,96
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	7.433.676.284,00	96.557.300,00		7.530.233.584,00
4.	RSUD Sumberrejo	907.203.500,00	6.033.407.837,00		6.940.611.337,00
5.	RSUD Padangan	1.204.554.125,00			1.204.554.125,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	511.485.977,52			511.485.977,52
7.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	372.154.369,00			372.154.369,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	2.609.998.879,44	48.490.381.005,53		51.100.379.884,97
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99.600.000,00	-		99.600.000,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	31.850.000,00	11.500.000,00		43.350.000,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.925.000,00	-		39.925.000,00
12.	Dinas Sosial	449.418.200,00	-	(37.000.000,00)	412.418.200,00
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	383.402.450,00	62.114.686,00		445.517.136,00
14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	712.541.500,00			712.541.500,00
15.	Dinas Lingkungan Hidup	2.154.344.163,00	-		2.154.344.163,00
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	396.707.200,00	368.755.945,00		765.463.145,00
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	399.495.005,00	492.796.800,00		892.291.805,00
18.	Dinas Perhubungan	1.364.014.297,00	400.233.274,00	(247.450.000,00)	1.516.797.571,00
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.224.945.468,00	1.963.587.328,00		3.188.532.796,00
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79.893.362,00	949.022.133,00		1.028.915.495,00
21.	Dinas Kepemudaan	46.200.000,00	-		46.200.000,00

No	Nama OPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
	dan Olahraga				
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.233.440.000,00	1.381.192.409,00	-	6.614.632.409,00
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	972.809.713,00	84.654.950,00	(48.150.000,00)	1.009.314.663,00
24.	Dinas Peternakan dan Perikanan	916.211.000,00	-		916.211.000,00
25.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	82.372.600,00	-		82.372.600,00
26.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	338.145.650,00	81.545.000,00		419.690.650,00
27.	Bagian Organisasi	128.126.400,00	56.300.000,00		184.426.400,00
28.	Bagian Pemerintahan	85.817.980,00	91.742.834,00	(45.000.000,00)	132.560.814,00
29.	Bagian Hukum	334.297.498,00	-		334.297.498,00
30.	Bagian Administrasi Pembangunan	7.750.000,00	61.244.880,00		68.994.880,00
31.	Bagian Perekonomian dan SDA	8.566.178.169,00	-	(7.000.000,00)	8.559.178.169,00
32.	Bagian Umum	228.234.666,00	-		228.234.666,00
33.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	135.585.000,00	-		135.585.000,00
34.	Bagian Kesejahteraan Rakyat		75.000.000,00		75.000.000,00
35.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	24.600.000,00	110.196.400,00		134.796.400,00
36.	Sekretariat DPRD	87.480.000,00	-		87.480.000,00
37.	Kec Bojonegoro	417.649.900,00	22.600.000,00		440.249.900,00
38.	Kec Kapas	48.568.667,00	-		48.568.667,00
39.	Kec Balen	185.026.962,00	164.171.799,00		349.198.761,00
40.	Kec Sumberrejo	158.173.050,00			158.173.050,00
41.	Kec Kanor	185.120.425,80	246.920.940,00		432.041.365,80
42.	Kec Baureno	97.453.696,00	106.870.000,00		204.323.696,00
43.	Kec Sugihwaras	21.093.750,00	-		21.093.750,00
44.	Kec Kepohbaru	294.900.000,00	424.141.850,00		719.041.850,00
45.	Kec Kedungadem	54.451.360,00	414.557.967,00		469.009.327,00
46.	Kec Sukosewu	91.775.000,00	88.075.615,00		179.850.615,00
47.	Kec Trucuk	102.619.013,00	-		102.619.013,00
48.	Kec Malo	92.497.584,00	44.200.000,00		136.697.584,00
49.	Kec Kalitidu	39.890.000,00			39.890.000,00
50.	Kec Dander	113.767.873,00			113.767.873,00
51.	Kec Padangan	35.675.000,00	171.585.267,00		207.260.267,00
52.	Kec Purwosari	17.160.300,00	229.016.950,00		246.177.250,00
53.	Kec Kasiman	38.602.500,00			38.602.500,00
54.	Kec Kedewan	12.000.000,00			12.000.000,00
55.	Kec Ngasem	57.690.000,00			57.690.000,00
56.	Kec Ngambon	128.148.800,00			128.148.800,00
57.	Kec Tambakrejo	203.022.974,00	7.122.000,00		210.144.974,00
58.	Kec Ngraho	21.900.000,00	98.729.000,00		120.629.000,00
59.	Kec Margomulyo	118.199.000,00	338.935.140,00		457.134.140,00

No	Nama OPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
60.	Kec Temayang	266.064.585,00			266.064.585,00
61.	Kec Bubulan	14.000.000,00	168.848.100,00		182.848.100,00
62.	Kec Gondang	57.074.334,00	-		57.074.334,00
63.	Kec Sekar	8.570.000,00	412.910.498,00		421.480.498,00
64.	Kec Gayam		175.127.500,00		175.127.500,00
65.	Inspektorat	178.207.200,00	60.978.300,00		239.185.500,00
66.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	105.300.000,00	808.750.700,00		914.050.700,00
67.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.018.956.371,00	1.601.336.477,00		4.620.292.848,00
68.	Badan Pendapatan Daerah	181.876.000,00	-		181.876.000,00
69.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	127.515.000,00	-		127.515.000,00
	JUMLAH	**88.158.622.205,02**	**69.808.770.809,03**	**(586.400.000,00)**	**157.380.993.014,05**

5.3.1.4.5 Amortisasi

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Amortisasi	**(10.743.253.177,47)**	**(9.537.047.281,00)**

Nilai amortisasi aset tak berwujud sampai dengan akhir tahun 2023 senilai (Rp10.743.253.177,47). Nilai tersebut didapatkan dari peningkatan beban amortisasi aset tak berwujud selama tahun berjalan.

Tabel 5. 92. Rincian Amortisasi 2023

No.	Nama OPD	Amortisasi 2023 (Rp)	Amortisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	1.206.944.560,00	958.655.920,00
2.	Dinas Kesehatan	342.471.958,00	240.713.000,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	402.137.000,00	389.783.500,00
4.	RSUD Sumberrejo	463.998.000,00	434.698.000,00
5.	RSUD Padangan	142.506.000,00	142.506.000,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	1.291.669.000,00	1.230.924.000,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	939.143.920,00	833.717.496,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	99.000.000,00	79.200.000,00
9.	Dinas Sosial	9.900.000,00	6.600.000,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	68.104.000,00	58.114.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	19.986.000,00	9.993.000,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	215.937.800,00	204.034.600,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.700.000,00	19.800.000,00

No.	Nama OPD	Amortisasi 2023 (Rp)	Amortisasi 2022 (Rp)
14.	Dinas Perhubungan	563.399.066,67	469.359.880,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.748.307.465,00	1.719.944.665,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	358.754.000,00	331.718.000,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50.000.000,00	50.000.000,00
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.000.000,00	
19.	Dinas Peternakan dan Perikanan	79.880.000,00	59.910.000,00
20.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	20.560.000,00	15.420.000,00
21.	Sekretariat Daerah	446.778.394,00	426.698.396,00
22.	Sekretariat DPRD	96.337.500,00	96.337.500,00
23.	Kec Bojonegoro	107.000.000,00	78.000.000,00
24.	Inspektorat	41.800.000,00	17.900.000,00
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	485.453.500,00	395.799.016,00
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	564.470.000,00	500.760.000,00
27.	Badan Pendapatan Daerah	772.876.213,80	637.562.008,00
28.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	171.138.800,00	128.898.300,00
	JUMLAH	**10.743.253.177,47**	**9.537.047.281,00**

5.3.1.4.6 Pengungkapan Tambahan atas Aset Tetap - Properti Investasi

Sebagai tindak lanjut pemberlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) Properti Investasi yang berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023, sementara disisi lain untuk Bagan Akun Standar belum disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka hal-hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah menginventarisir Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang berpotensi untuk diklasifikasikan sebagai Properti Investasi serta menyusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi yang didalamnya memuat Kebijakan Akuntansi Properti Investasi. Untuk Kebijakan Akuntansi Properti Investasi, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi.

Dalam kebijakan akuntansi dijelaskan bahwa Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Adapun untuk inventarisasi Aset Tetap Tanah maupun Gedung dan Bangunan yang berpotensi menjadi Properti Investasi diringkas sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 5. 93. Properti Investasi

No	Nama Aset	SKPD Pengelola	Harga Perolehan (Rp)
1.	Tanah	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.628.437.000,00
		- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.723.481.000,00
		- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.259.150.000,00
		- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.292.282.000,00
		- Dinas Lingkungan Hidup	3.515.200.000,00
		- Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	49.831.258.000,00
		- Kecamatan Kedewan	12.008.500,00
		- Kecamatan Bojonegoro	50.959.651.019,00
		- RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	18.488.769.000,00
		- RSUD Kelas C Padangan	3.858.000.000,00
		- RSUD Kelas D Sumberrejo	2.445.000.000,00
		- Sekretariat Daerah	17.340.754.200,00
Jumlah Properti Investasi - Tanah			**181.353.990.719,00**
2.	Gedung dan Bangunan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.472.240.847,86
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.706.500.000,00
		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	216.346.887.696,89
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	630.962.496,00
		Dinas Peternakan dan Perikanan	915.650.000,00
Jumlah Properti Investasi - Gedung dan Bangunan			**235.072.241.040,75**

Rincian aset properti investasi dapat dilihat dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4.

5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp120.619.754.390,35 yang merupakan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah nihil.

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp120.619.754.390,35 yang terdiri dari:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1.928.854.424,23	2.024.574.500,77
Utang Jangka Pendek Lainnya	118.690.899.966,12	81.902.531.277,33
JUMLAH	**120.619.754.390,35**	**83.927.105.778,10**

Jumlah tersebut merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi yang terdiri dari:

Tabel 5. 94. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	**2.024.574.500,77**	**1.830.358.893,28**	**1.926.078.969,82**	**1.928.854.424,23**
Utang Jangka Pendek Lainnya	**81.902.531.277,33**	**133.826.187.494,87**	**97.037.818.806,08**	**118.690.899.966,12**
– Utang Pegawai	12.352.545.379,14	52.101.786.434,57	12.352.545.379,14	52.101.786.434,57
– Utang Jasa Pelayanan	2.418.559.290,00	4.021.450.496,63	2.418.559.290,00	4.021.450.496,63
– Utang Usaha	6.306.608.138,00	18.102.273.808,41	6.286.794.608,00	18.122.087.338,41
– Utang Belanja Hibah	475.884.314,75	287.882.100,00	475.884.314,75	287.882.100,00
– Utang Belanja Modal	5.430.022.400,30	43.994.315.345,26	5.320.988.212,05	44.103.349.533,51
– Utang DBH	53.659.678.803,00	15.317.434.060,00	68.977.103.000,00	9.863,00
– Utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	1.259.232.952,14	1.045.250,00	1.205.944.002,14	54.334.200,00
JUMLAH	**83.927.105.778,10**	**135.656.546.388,15**	**98.963.897.775,90**	**120.619.754.390,35**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Tidak ada penambahan utang perhitungan fihak ketiga.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.830.358.893,28 terdiri dari pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame senilai Rp1.218.805.225,94, retribusi izin trayek senilai Rp3.391.667,00, retribusi sewa tanah senilai Rp11.209.935,34, retribusi uji kendaraan bermotor senilai Rp323.305.833,00, dan sewa tanah milik Pemkab di jalan Mastrip No. 35 oleh PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro sebesar Rp273.646.232,00.

Pengurangan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.926.078.969,82 terdiri dari pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame senilai Rp1.115.586.278,49, retribusi izin trayek senilai Rp1.700.000,00, retribusi sewa tanah senilai Rp5.229.698,63, retribusi uji kendaraan bermotor senilai Rp362.035.000,00, sewa beberapa tanah eks. bengkok kelurahan oleh PT Pertamina Gas senilai Rp325.149.830,48, sewa tanah milik Pemkab Bojonegoro di Jl. Mastrip No.35 oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro senilai Rp68.411.558,22, sewa tanah milik Pemkab Bojonegoro oleh PT Bojonegoro Bangun Sarana senilai Rp37.002.604,00, sewa tanah milik Pemkab oleh Bank Jatim senilai Rp8.220.000,00 dan sewa tanah milik Pemkab oleh DPC PPP sebesar Rp2.744.000,00. Sehingga saldo pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.928.854.424,23.

Tabel 5. 95. Rincian Pendapatan Diterima Di Muka

Kewajiban	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Pajak Reklame	1.115.586.278,49	1.218.805.225,94	1.115.586.278,49	1.218.805.225,94
Retribusi Izin Trayek	1.700.000,00	3.391.667,00	1.700.000,00	3.391.667,00

Kewajiban	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Retribusi Sewa Tanah	5.229.698,63	11.209.935,34	5.229.698,63	11.209.935,34
Retribusi Uji Kendaraan Bermotor	362.035.000,00	323.305.833,00	362.035.000,00	323.305.833,00
Sewa Beberapa Tanah Eks. Bengkok Kelurahan	407.880.260,76	-	325.149.830,48	82.730.430,28
Sewa Tanah Milik Pemkab Bojonegoro di Jl. Mastrip No.35	68.411.558,22	273.646.232,00	68.411.558,22	273.646.232,00
Sewa Tanah milik Pemkab Bojonegoro oleh PT Bojonegoro Bangun Sarana	43.169.704,67	-	37.002.604,00	6.167.100,67
Sewa Tanah Milik Pemkab Bojonegoro untuk ATM Bank Jatim	12.330.000,00	-	8.220.000,00	4.110.000,00
Sewa Tanah Milik Pemkab Bojonegoro untuk kantor DPC PPP	8.232.000,00		2.744.000,00	5.488.000,00
JUMLAH	**2.024.574.500,77**	**1.830.358.893,28**	**1.926.078.969,82**	**1.928.854.424,23**

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp118.690.899.966,12 terdiri dari:

1. Utang Belanja Pegawai

   Penambahan Utang Belanja Pegawai berasal dari kekurangan pembayaran gaji pegawai dan kekurangan pembayaran tunjangan fungsional hasil penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintah kabupaten Bojonegoro, serta utang jasa pelayanan pada tiga RSUD sebesar Rp52.101.786.434,57.

   Pengurangan senilai Rp12.352.545.379,14 merupakan pembayaran yang telah dilakukan atas Utang Belanja Pegawai tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 96. Rincian Utang Belanja Pegawai

Nama OPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan	7.522.871,00	14.323.588.745,00	7.522.871,00	14.323.588.745,00
Dinas Kesehatan	13.400.841,00	7.520.877.498,57	13.400.841,00	7.520.877.498,57
RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	7.068.422.688,14	25.996.890.310,00	7.068.422.688,14	25.996.890.310,00
RSUD Sumberrejo	1.242.461.581,00	1.434.403.933,00	1.242.461.581,00	1.434.403.933,00
RSUD Padangan	3.882.659.951,00	2.063.899.100,00	3.882.659.951,00	2.063.899.100,00
Dinas PU Sumber Daya Air	2.434.764,00		2.434.764,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	458.400,00		458.400,00	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		22.560.000,00		22.560.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja		18.256.803,00		18.256.803,00
Dinas Sosial	444.537,00	24.100.800,00	444.537,00	24.100.800,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.017.302,00	38.940.000,00	2.017.302,00	38.940.000,00

Nama OPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Berencana				
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.941.402,00	137.701.536,00	1.941.402,00	137.701.536,00
Dinas lingkungan Hidup		33.839.592,00		33.839.592,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.100.000,00	36.480.000,00	7.100.000,00	36.480.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.345.800,00	28.896.000,00	6.345.800,00	28.896.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.666.988,00	47.084.192,00	49.666.988,00	47.084.192,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		9.120.000,00		9.120.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		27.155.000,00		27.155.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	1.838.200,00		1.838.200,00	
Bagian Umum	1.713.201,00	131.704.241,00	1.713.201,00	131.704.241,00
Sekretariat DPRD	847.641,00		847.641,00	
Kec Kapas	405.201,00		405.201,00	
Kec Balen	492.011,00		492.011,00	
Kec Sumberrejo	858.885,00		858.885,00	
Kec Kanor	3.081.417,00		3.081.417,00	
Kec Sugihwaras	560.226,00		560.226,00	
Kec Kepohbaru	1.079.226,00		1.079.226,00	
Kec Sukosewu	1.336.623,00		1.336.623,00	
Kec Trucuk	765.039,00		765.039,00	
Kec Kalitidu	1.718.205,00		1.718.205,00	
Kec Padangan	1.089.342,00		1.089.342,00	
Kec Purwosari	2.448.003,00		2.448.003,00	
Kec Kasiman	860.136,00		860.136,00	
Kec Kedewan	867.558,00		867.558,00	
Kec Ngasem	1.557.819,00		1.557.819,00	
Kec Ngambon	880.020,00		880.020,00	
Kec Tambakrejo	1.359.639,00		1.359.639,00	
Kec Margomulyo	1.110.015,00		1.110.015,00	
Kec Dander		1.262.888,00		1.262.888,00
Kec Temayang	314.070,00		314.070,00	
Inspektorat	1.853.400,00	15.680.000,00	1.853.400,00	15.680.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		107.520.000,00		107.520.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		39.533.496,00		39.533.496,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		42.292.300,00		42.292.300,00
Badan Pendapatan Daerah	40.632.377,00	0,00	40.632.377,00	
JUMLAH	**12.352.545.379,14**	**52.101.786.434,57**	**12.352.545.379,14**	**52.101.786.434,57**

2. Utang Jasa Pelayanan

   Utang Jasa Pelayanan tahun 2023 merupakan penambahan utang jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.331.759.114,63.

Pengurangan sebesar Rp2.418.559.290,00 berasal dari pembayaran yang telah dilakukan atas Utang Jasa Pelayanan tahun 2022. Terdapat koreksi pengurangan utang jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp310.308.618,00), sehingga saldo utang jasa pelayanan kesehatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.021.450.496,63.

3. Utang Usaha

Utang usaha tahun 2023 sebesar Rp18.122.087.338,41 berasal dari utang belanja barang jasa tahun 2019 yang belum dibayar pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya sebesar Rp19.813.530,00 dan penambahan utang usaha pada tahun 2023 sebesar Rp18.102.273.808,41 terdiri dari utang listrik, air, telepon, internet, surat kabar pada semua OPD, utang kepada pihak ketiga (PMI), obat, oksigen, bbm, jasa uji laborat, jasa pembuangan sampah medis dan non medis pada RSUD dan Dinas Kesehatan, serta belanja JKK/JKM non ASN. Terdapat juga koreksi penambahan utang belanja pemeliharaan makam dan pemeliharaan jalan lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. Sedangkan pengurangan sebesar Rp6.286.794.608,00 berasal dari pembayaran yang dilakukan selama tahun 2023 atas utang usaha tahun sebelumnya. Rincian utang usaha disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 97. Rincian Utang Usaha

Nama OPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan	52.496.889,00	41.744.192,00	52.496.889,00	41.744.192,00
Dinas Kesehatan	431.785.384,00	537.684.347,00	431.785.384,00	537.684.347,00
RSUD Sosodoro Djatikusumo	2.783.497.581,00	8.243.349.541,00	2.783.497.581,00	8.243.349.541,00
RSUD Sumberrejo	187.268.070,00	240.338.081,00	187.268.070,00	240.338.081,00
RSUD Padangan	240.872.155,00	1.783.262.212,00	240.872.155,00	1.783.262.212,00
Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	26.133.050,00	28.570.353,00	26.133.050,00	28.570.353,00
Dinas PU Sumber Daya Air	12.692.344,00	16.469.733,00	12.692.344,00	16.469.733,00
Dinas PKP & Cipta Karya	2.340.542.653,00	6.667.628.473,41	2.320.729.123,00	6.687.442.003,41
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.711.355,00	8.324.066,00	6.711.355,00	8.324.066,00
Dinas Sosial	513.700,00	20.959.667,00	513.700,00	20.959.667,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	11.924.734,00	-	11.924.734,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.639.158,00	13.567.778,00	21.639.158,00	13.567.778,00
Dinas Lingkungan Hidup	373.400,00	49.129.902,00	373.400,00	49.129.902,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.349.804,00	11.028.972,00	9.349.804,00	11.028.972,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	490.200,00	9.298.100,00	490.200,00	9.298.100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	32.182.341,00	31.966.540,00	32.182.341,00	31.966.540,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.000,00	34.922.988,00	96.000,00	34.922.988,00
Dinas Kepemudaan & Olah Raga	427.140,00	-	427.140,00	-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.398.200,00	29.313.971,00	2.398.200,00	29.313.971,00
Dinas Peternakan & Perikanan	14.907.306,00	11.878.758,00	14.907.306,00	11.878.758,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	25.242.886,00	32.260.854,00	25.242.886,00	32.260.854,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14.243.965,00	14.332.550,00	14.243.965,00	14.332.550,00
Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	-	196.567.311,00	-	196.567.311,00

Nama OPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Kecamatan Kapas	1.306.700,00	1.164.300,00	1.306.700,00	1.164.300,00
Kecamatan Balen	1.942.690,00	2.061.765,00	1.942.690,00	2.061.765,00
Kecamatan Sugihwaras	418.637,00	200.536,00	418.637,00	200.536,00
Kecamatan Dander	200.000,00	-	200.000,00	-
Kecamatan Sukosewu	1.948.505,00	1.913.990,00	1.948.505,00	1.913.990,00
Kecamatan Malo	5.660.582,00	3.432.397,00	5.660.582,00	3.432.397,00
Kecamatan Kasiman	713.784,00	719.176,00	713.784,00	719.176,00
Kecamatan Margomulyo	3.032.044,00	2.992.955,00	3.032.044,00	2.992.955,00
Kecamatan Temayang	1.671.938,00	4.604.928,00	1.671.938,00	4.604.928,00
Inspektorat	10.414.339,00	16.392.380,00	10.414.339,00	16.392.380,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66.200,00	105.550,00	66.200,00	105.550,00
Badan Pendapatan Daerah	11.152.520,00	11.375.658,00	11.152.520,00	11.375.658,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	64.216.618,00	22.787.050,00	64.216.618,00	22.787.050,00
JUMLAH	**6.306.608.138,00**	**18.102.273.808,41**	**6.286.794.608,00**	**18.122.087.338,41**

4. Utang Belanja Hibah

   Utang Belanja Hibah tahun 2023 sebesar Rp287.882.100,00 merupakan utang belanja hibah pada Dinas PKP dan Cipta Karya.

   Pengurangan Utang Belanja Hibah 2022 sebesar Rp475.884.314,75 merupakan pelunasan dari utang belanja hibah pada Dinas PKP dan Cipta Karya Rp127.506.515,15 dan DPU Bina Marga Rp348.377.799,60.

5. Utang Belanja Modal

   Utang belanja modal tahun 2023 sebesar Rp44.103.349.533,51 terdiri dari utang belanja modal tahun 2022 yang belum dibayar pada Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp9.847.062,75; utang belanja modal tahun 2019 dan 2022 yang belum dibayar pada Dinas PKP dan Cipta Karya masing-masing sebesar Rp75.478.125,50 dan Rp23.709.000,00; penambahan utang belanja modal pada tahun 2023 sebesar Rp43.994.315.345,26 berasal dari Dinas Pendidikan sebesar Rp244.261.600,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp365.286.727,45, Dinas PKP dan Cipta Karya sebesar Rp34.768.789.986,27, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp6.207.030.610,94, serta Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp2.408.946.420,60.

   Sedangkan pengurangan sebesar Rp5.320.988.212,05 merupakan pelunasan utang belanja modal tahun sebelumnya yang berasal dari Dinas Kesehatan sebesar Rp14.938.150,00, RSUD Padangan sebesar Rp667.021.472,00, Dinas PU Bina Marga Rp3.051.716.747,80, serta Dinas PKP dan Cipta Karya sebesar Rp1.587.311.842,25.

6. Utang Dana Bagi Hasil (DBH)

   Pengakuan utang DBH Pajak dan SDA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 sebesar Rp53.659.678.803,00 untuk Lebih Bayar DBH s/d tahun 2021 dan sebesar Rp15.317.434.060,00 untuk Lebih Bayar DBH tahun 2022.

   Pengurangan utang DBH sebesar Rp68.977.103.000 merupakan Pelunasan atau Penyelesaian Lebih Bayar yang dipotongkan langsung dari penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan SDA pada tanggal 29 Desember 2023

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 38/KM.7/2023. Sehingga saldo utang DBH tahun 2023 adalah sebesar Rp9.863,00.

7. Utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi

   Penambahan utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi sebesar Rp1.045.250,00 adalah sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023 yang masih ada di RKUD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

   Pengurangan sebesar Rp1.205.944.002,14 merupakan pelunasan utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp910.508.612,14 dan Rp295.435.390,00 yang disetor ke RKUD Provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan SP2D Nomor 05.04/04.0/000633/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/8/2023.

   Sehingga utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi per 31 Desember adalah sebesar Rp54.334.200,00 merupakan sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2021 sd 2023 yang masih ada di RKUD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan belum disetorkan ke rekening kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah nihil.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Jangka Panjang Lainnya	**0,00**	**0,00**

KEWAJIBAN KONTIJENSI

1. Pada akhir tahun 2022, Pemkab Bojonegoro sedang menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Bojonegoro terkait kepemilikan aset tanah seluas 3.679 m^2 di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Sertipikat Hak Pakai Nomor 16 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dan saat ini digunakan sebagai Rumah Potong Hewan (RPH) pengganti RPH wilayah kota Bojonegoro. Gugatan tersebut atas nama Sdr. S. Marman ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dengan turut tergugat Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang mana penggugat menyatakan klaim atas tanah yang dikuasai Pemkab Bojonegoro tersebut. Sampai dengan akhir tanggal Neraca, proses persidangan masih berlangsung dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2. Penyertaan modal pada PD Apotik Sidowaras Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 1989 tanggal 04 Juli 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotik "SIDOWARAS". Pada Tahun 2014, ini PD Apotik Sidowaras kegiatan operasionalnya dibekukan sedangkan karyawannya dilimpahkan ke RSUD Sosodoro Djatikoesoemo sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/232/KEP/412.11/2014.

   Setelah dilakukan pembekuan sementara telah dilakukan audit penutupan sebagaimana hasil Audit KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor LAI-162/LK/KAP-BWP/XII/2014 Tanggal 05 Desember 2014.

   Kondisi aset dan kewajiban sebagaimana hasil audit per 30 September 2014:

a. Aset lancar dengan total Rp212.168.932,06 dengan rincian:

Kas dan setara kas	:	Rp	90.057.733,57
(dititipkan di RKUD, sebagai titipan uang operasional)			
Persediaan barang	:	Rp	32.781.060,00
Uang muka pajak	:	Rp	89.330.138,49

b. Aset tetap dengan total Rp10.883.447,63

c. Kewajiban kepada para pihak:

Hutang pajak	:	Rp	2.804.566,74
Hutang pembagian laba	:	Rp	22.663.507,42

Terdapat hutang pajak sebesar Rp559.096.904,00 sebagaimana surat dari KPP Pratama Bojonegoro nomor SPHP-00025/WPJ.24/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memproses pembubaran PD Apotek Sidowaras dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 4 Pebruari 2016 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro. Sebagai tindak lanjut atas Perda tersebut, Bagian Perekonomian sedang dalam proses membuat usulan pembentukan Tim Likuidatur dan pendamping Tim Likuidatur yang akan bertugas mengurusi terkait masalah aset, kewajiban dan ekuitas dari BUMD bersangkutan.

5.3.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih antara total Aset dengan total Utang. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.674.723.618.810,20.

	Tahun 2023 (Rp)	**Tahun 2022 (Rp)**
Ekuitas	**16.674.723.618.810,20**	**14.588.356.971.293,36**

Termasuk dalam komponen ekuitas tersebut adalah SILPA Tahun 2023 senilai Rp2.887.047.562.485,65 yang terdiri atas:

- **Kas di Bendahara Umum Daerah**	**Rp**	**2.817.802.051.807,30**
- **Kas di BLUD**	**Rp**	**60.784.410.860,30**
• Rek. Kas RSUD Sosodoro Djatikoesoemo No.0081011866	Rp	46.051.347.592,93
• Rek. Kas RSUD Sumberrejo No.0691002136	Rp	3.602.648.585,16
• Rek. Kas RSUD Padangan No.0081006857	Rp	11.130.414.682,21
- **Kas di Bendahara Pengeluaran**	**Rp**	**600.000,00**
- **Kas di Bendahara Penerimaan**	**Rp**	**76.555.812,00**
- **Kas di Bendahara JKN / FKTP**	**Rp**	**2.115.776.069,41**
- **Kas Dana BOS**	**Rp**	**656.645.414,26**
- **Kas Lainnya (BOP PAUD dan BOK)**	**Rp**	**5.611.522.522,38**
Jumlah	**Rp**	**2.887.047.562.485,65**

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai:

1. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang;
4. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan kenaikan ekuitas (bila surplus operasional).

Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan LO, beban dan pos luar biasa.

5.4.1. PENDAPATAN LO

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah Rp6.477.301.243.144,24 terdiri atas:

Tabel 5. 98. Pendapatan LO

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LO	**726.283.301.516,42**	**771.320.553.080,70**
- Pendapatan Pajak Daerah – LO	169.928.557.045,88	160.058.463.512,42
- Pendapatan Retribusi Daerah - LO	39.659.365.934,81	33.661.537.502,83
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	36.351.248.036,65	195.853.675.914,77
- Lain-lain PAD yang sah - LO	480.344.130.499,08	381.746.876.150,68
Pendapatan Transfer-LO	**5.671.456.246.300,14**	**5.027.149.796.945,00**
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	***5.436.973.899.938,00***	***4.815.049.658.480,00***
- Dana Bagi Hasil Pajak - LO	1.339.235.754.479,00	713.930.637.080,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	2.809.401.763.551,00	2.864.589.362.219,00
- Dana Alokasi Umum - LO	914.999.662.630,00	861.028.899.802,00
- Dana Alokasi Khusus - LO	373.336.719.278,00	375.500.759.379,00
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya-LO	***11.524.031.000,00***	***14.636.752.000,00***
- Dana Insentif Daerah - LO	0,00	14.636.752.000,00
- Insentif Fiskal - LO	11.524.031.000,00	0,00
Transfer Pemerintah Provinsi-LO	***222.958.315.362,14***	***197.463.386.465,00***
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO	210.111.880.900,00	184.530.029.855,00
- Pendapatan lainnya (Bantuan Keuangan) - LO	12.846.434.462,14	12.933.356.610,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	***79.561.695.327,68***	**106.426.348.807,00**
- Pendapatan Hibah - LO	3.071.049.048,68	39.574.190.888,00
- Pendapatan Lainnya - LO	76.490.646.279,00	66.852.157.919,00
Total Pendapatan	**6.477.301.243.144,24**	**5.904.896.698.832,70**

5.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO berasal dari semua pendapatan pajak LRA selama tahun 2023 yaitu Rp168.840.845.572,00 dikurangi pembayaran piutang pajak tahun sebelumnya senilai Rp5.135.151.968,00 ditambah piutang yang timbul selama tahun 2023 senilai Rp6.326.082.389,32 ditambah pendapatan diterima dimuka tahun 2022 senilai Rp1.115.586.278,49 dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 senilai Rp1.218.805.225,93. Sehingga total pendapatan pajak daerah LO tahun 2023 adalah sebesar Rp169.928.557.045,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 99. Pendapatan Pajak Daerah - LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel - LO	3.569.000.622,64	3.973.430.265,00
2.	Pajak Restoran - LO	17.475.560.159,40	16.546.300.876,00
3.	Pajak Hiburan - LO	581.764.790,28	493.755.777,00
4.	Pajak Reklame - LO	2.999.624.733,56	2.647.261.467,42
5.	Pajak Penerangan Jalan - LO	58.333.693.746,00	50.423.471.011,00
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- LO	14.781.182.678,00	15.788.715.096,00
7.	Pajak Parkir - LO	292.316.623,00	241.404.567,00
8.	Pajak Air Tanah - LO	2.148.738.409,00	1.868.587.886,00
9.	Pajak Sarang Burung - LO	16.979.400,00	20.875.000,00
10.	PBBP2 - LO	46.731.057.820,00	43.911.546.907,00
11.	BPHTB - LO	22.998.638.064,00	24.143.114.660,00
	JUMLAH	**169.928.557.045,88**	**160.058.463.512,42**

5.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO berasal dari semua pendapatan LRA tahun 2023 senilai Rp39.424.212.326,52 dikurangi piutang retribusi tahun sebelumnya yang terbayar selama tahun 2023 senilai Rp1.539.626.475,00 ditambah piutang retribusi yang timbul selama tahun 2023 senilai Rp1.743.722.820,00 ditambah dengan pendapatan diterima dimuka tahun 2022 senilai Rp368.964.698,63 dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 senilai Rp337.907.435,34. Sehingga total pendapatan retribusi daerah LO tahun 2023 adalah sebesar Rp39.659.365.934,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 100. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	**Retribusi Jasa Umum LO**	**35.188.652.152,52**	**29.220.914.867,14**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan LO	16.541.605.680,00	10.299.535.960,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan LO	921.558.000,00	1.304.202.500,00
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum LO	9.917.571.000,00	10.453.106.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar LO	1.247.680.000,00	2.288.116.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO	1.180.609.167,00	1.315.582.500,00
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta LO	5.001.004.515,52	3.150.735.837,14

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Retribusi pelayanan tera dan tera ulang LO	167.083.500,00	200.912.000,00
	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi LO	211.540.290,00	208.724.070,00
2	**Retribusi Jasa Usaha LO**	**3.053.956.792,29**	**3.675.130.568,69**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO	1.581.236.292,29	1.575.364.568,69
	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa LO	47.550.000,00	1.204.500.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga LO	1.405.695.000,00	870.117.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan LO	19.475.500,00	25.149.000,00
3	**Retribusi Jasa Perizinan Tertentu LO**	**1.416.756.990,00**	**765.492.067,00**
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan LO	1.412.148.657,00	760.850.400,00
	Retribusi Pemberian Izin Trayek LO	4.608.333,00	4.641.667,00
	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing LO	-	-
	Jumlah	**39.659.365.934,81**	**33.661.537.502,83**

5.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO senilai Rp36.351.248.036,65 berasal dari jumlah keseluruhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023. Nilainya sama dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA yaitu Rp182.683.243.729,88 dikurangi dengan piutang tahun sebelumnya senilai Rp154.517.341.089,60 ditambah dengan piutang deviden yang timbul selama tahun 2023 senilai Rp2.285.500.000,00 Perumda Air Minum Tirta Buana ditambah dengan pendapatan yang diterima karena penggunaan metode ekuitas pada PT Bojonegoro Bangun Sarana senilai (Rp1.535.872.484,00), PD BPR Kabupaten Bojonegoro senilai Rp13.953.547.442,00, PT Asri Dharma Sejahtera senilai (Rp8.055.225.888,44), dan Perumda Air Minum Tirta Buana senilai Rp1.537.396.326,81.

Tabel 5. 101. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	BPD Jawa Timur	15.942.323.472,88	15.648.040.613,52
2.	PD BPR Kabupaten Bojonegoro	13.953.547.442,00	18.073.735.620,00
3.	PT Asri Dharma Sejahtera	1.944.774.111,56	151.147.651.619,75
4.	PT Bojonegoro Bangun Sarana	186.294.679,00	4.305.417.908,00
5.	BPR Jatim	501.412.000,00	442.632.000,00
6.	PT Griya Dharma Kusuma	-	-
7.	PDAM	3.822.896.331,21	6.236.198.153,50
	JUMLAH	**36.351.248.036,65**	**195.853.675.914,77**

5.4.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Lain-Lain PAD yang Sah - LO berasal dari Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda Pajak Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Nilainya adalah sama dengan penerimaan lain-lain PAD yang sah LRA yaitu Rp484.633.016.674,40 ditambah dengan penambahan piutang selama tahun 2023 yang terdiri dari piutang klaim kesehatan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo senilai Rp235.049.797.637,00, RSUD Padangan senilai Rp57.583.047.928,00 dan RSUD Sumberrejo senilai Rp3.270.797.734,00, serta piutang sewa kios/toko/bedak pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp803.526.724,00. Ditambah pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp540.023.523,65.

Dikurangi piutang klaim kesehatan tahun sebelumnya dari RSUD Sosodoro Djatikoesoemo senilai Rp241.532.646.832,02, RSUD Sumberrejo senilai Rp2.957.323.562,00 dan RSUD Padangan senilai Rp56.591.106.311,00. Dikurangi piutang bunga tahun sebelumnya yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp600.000,00. Dikurangi pelunasan piutang pihak ketiga senilai Rp28.000.000,00 yang berasal dari koreksi volume pemeriksaan BPK PDTT Belanja TA. 2019. Dikurangi remunerasi TDF tahun 2022 senilai Rp54.261.254,00. Dikurangi pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp372.141.762,95, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 102. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penerimaan Jasa Giro	18.093.711.457,66	10.213.329.046,07
Penerimaan Bunga	79.731.005.206,10	79.744.072.212,41
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.571.841.917,90	5.100.000,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.112.323.859,79	983.086.193,00
Pendapatan Dari Pengembalian	10.664.299.966,85	5.435.378.223,04
Pendapatan BLUD	357.442.073.551,08	278.958.026.427,41
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	1.977.481.757,14
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	849.694.709,00	468.069.758,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	4.097.396.540,70	3.428.596.153,61
Pendapatan Denda Pajak Daerah	683.581.384,00	533.736.380,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.475.280,00	-
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	92.726.626,00	-
JUMLAH	**480.344.130.499,08**	**381.746.876.150,68**

5.4.1.5 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp1.339.235.754.479,00 berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak LRA sebesar Rp655.630.400.524,00 ditambah penerimaan transfer DBH Pajak dengan mekanisme TDF per Desember 2023 sebesar Rp676.318.941.000,00, utang (lebih salur) DBH Pajak tahun 2022 sebesar Rp53.659.678.803,00, dan piutang (kurang salur) DBH Pajak tahun 2023 sebesar Rp3.692,00 dikurangi DBH Pajak

dengan mekanisme TDF per Desember 2022 sebesar Rp42.213.797.694,00, dan piutang (kurang salur) DBH Pajak tahun 2022 sebesar Rp4.159.471.846,00.

5.4.1.6 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp2.809.401.763.551,00 berasal dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA sebesar Rp2.468.798.051.604,00 ditambah penerimaan transfer DBH Pajak dengan mekanisme TDF per Desember 2023 sebesar Rp757.926.948.000,00 dan piutang DBH tahun 2023 sebesar Rp4.599,00. Dikurangi dengan DBH SDA dengan mekanisme TDF per Desember 2022 sebesar Rp181.515.895.604,00, utang DBH tahun 2023 sebesar Rp9.863,00 dan piutang (kurang salur) DBH Pajak tahun 2022 sebesar Rp235.807.335.185,00,00.

5.4.1.7 Dana Alokasi Umum - LO

Realisasi Dana Alokasi Umum - LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum LRA Rp914.999.662.630,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2022 maupun 2023.

5.4.1.8 Dana Alokasi Khusus - LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus-LO sebesar Rp373.336.719.278,00 sama dengan jumlah realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik LRA sebesar Rp31.486.932.421,00 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik LRA yaitu sebesar Rp341.849.786.857,00. Tidak ada piutang baik di Tahun 2022 maupun 2023. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari: TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, dana BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOKKB-BOK, BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, BOKKB-Akreditasi Puskesmas, BOKKB-Jaminan Persalinan, BOKKB-BOKB, PK2UKM, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

5.4.1.9 Dana Insentif Daerah - LO

Realisasi Dana Insentif Daerah-LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah LRA yaitu Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2022 maupun 2023.

5.4.1.10 Insentif Fiskal - LO

Realisasi Insentif Fiskal - LO sama dengan realisasi pendapatan Insentif Fiskal LRA sebesar Rp11.524.031.000,00 karena tidak ada piutang di Tahun 2023.

5.4.1.11 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO sama dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi LRA dikurangi dengan piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2022. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi LRA adalah Rp 222.263.497.700,00 dikurangi dengan piutang dana bagi hasil pajak provinsi 2022 sebesar Rp12.151.616.800,00. Ditambah piutang bagi hasil pajak provinsi Tahun 2023 senilai Rp0,00, sehingga nilai pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi - LO adalah Rp210.111.880.900,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 103. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	54.372.768.700,00	47.846.185.920,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.501.534.200,00	25.513.431.620,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	61.109.880.300,00	44.045.811.460,00
4.	PPABT	589.416.600,00	354.186.140,00
5.	Pajak Rokok	64.538.281.100,00	66.770.414.715,00
	JUMLAH	**210.111.880.900,00**	**184.530.029.855,00**

5.4.1.12 Bantuan Keuangan Provinsi - LO

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi - LO sebesar Rp12.846.434.462,14 sama dengan realisasi Bantuan Keuangan Provinsi LRA yaitu sebesar Rp11.641.535.710,00 dan pelunasan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp963.617.562,14 dan Rp295.615.390,00 dikurangi sisa dana Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2023 yang masih ada di RKUD dan belum disetorkan kembali ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp54.334.200,00. Tidak ada penambahan karena tidak ada piutang baik di Tahun 2022 maupun di Tahun 2023.

5.4.1.13 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah LO sebesar Rp3.071.049.048,68 berasal dari pendapatan hibah dari pihak ketiga berupa aset tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.086.719.552,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp754.050.000,00, RSUD dr. R. Sosodoro Djatikusumo sebesar Rp21.277.332,68 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp82.216.000,00 serta hibah berupa barang pakai habis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.126.786.164,00.

5.4.1.14 Pendapatan Lainnya - LO

Realisasi Pendapatan Lainnya – LO adalah sama dengan pendapatan Lainnya LRA sebesar Rp76.490.646.279,00 yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

5.4.2. BEBAN LO

Jumlah beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah Rp4.421.948.436.089,90 yang terdiri dari:

Tabel 5. 104. Beban LO

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
BEBAN OPERASI	**3.543.613.901.928,39**	**3.229.220.209.804,36**
Beban Pegawai	1.141.150.418.850,43	1.038.082.363.175,86
Beban Persediaan	324.038.109.284,91	268.608.801.950,52
Beban Jasa	788.191.321.892,22	707.073.057.648,65
Beban Pemeliharaan	83.326.030.298,00	111.560.567.557,61
Beban Perjalanan Dinas	57.204.766.089,00	51.710.121.404,00
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	589.264.975,00	120.310.958,00
Beban Hibah	318.713.424.225,31	306.146.727.052,61
Beban Bantuan Sosial	128.065.370.685,00	149.924.582.200,00
Beban Penyusutan	629.250.322.994,42	588.633.594.110,20
Beban Amortisasi	1.206.205.896,47	1.367.071.182,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.243.083.132,60	198.700.874,91
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	69.808.770.809,03	5.273.570.985,00
Beban Lain-Lain	826.812.796,00	520.740.705,00
BEBAN TRANSFER	**878.334.534.161,51**	**989.896.566.395,61**
Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa LO	26.154.830.015,00	21.197.184.063,00

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LO	852.179.704.146,51	968.699.382.332,61
JUMLAH BEBAN	**4.421.948.436.089,90**	**4.219.116.776.199,97**

5.4.2.1 Beban Pegawai–LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Pegawai	**1.141.150.418.850,43**	**1.101.401.177.795,00**	**39.749.241.055,43**

Nilai beban pegawai dalam laporan operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.141.150.418.850,43, sedangkan nilai realisasi belanja pegawai dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.101.401.177.795,00. Selisih antara beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA adalah sebesar Rp39.749.241.055,43. Perhitungan beban pegawai disajikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai-LRA	**Rp**	**1.101.401.177.795,00**
Penambahan		
a. Utang belanja pegawai tahun 2023	Rp	48.505.301.675,57
b. Koreksi penambahan Utang belanja pegawai pada RSUD Sosodoro dan RSUD Padangan tahun 2023	Rp	3.596.484.759,00
Jumlah Penambahan	**Rp**	**52.101.786.434,57**
Pengurangan		
a. Utang belanja pegawai tahun 2022	Rp	(12.352.545.379,14)
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**(12.352.545.379,14)**
Beban Pegawai - LO	**Rp**	**1.141.150.418.850,43**

Tabel 5. 105. Beban Pegawai - LO

No	Nama OPD	Utang B. Pegawai 2022 (Rp)	Belanja Pegawai 2023 (Rp)	Utang B. Pegawai 2023 (Rp)	Beban Pegawai 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	7.522.871,00	563.443.185.877,00	14.323.588.745,00	577.759.251.751,00
2.	Dinas Kesehatan	13.400.841,00	88.370.289.411,00	7.520.877.498,57	95.877.766.068,57
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	7.068.422.688,14	118.873.380.815,00	25.996.890.310,00	137.801.848.436,86
4.	RSUD Sumberrejo	1.242.461.581,00	24.318.900.439,00	1.434.403.933,00	24.510.842.791,00
5.	RSUD Padangan	3.882.659.951,00	32.961.947.719,00	2.063.899.100,00	31.143.186.868,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	-	8.488.403.866,00	-	8.488.403.866,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	2.434.764,00	5.083.613.905,00	-	5.081.179.141,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman	-	7.520.207.489,00	-	7.520.207.489,00

No	Nama OPD	Utang B. Pegawai 2022 (Rp)	Belanja Pegawai 2023 (Rp)	Utang B. Pegawai 2023 (Rp)	Beban Pegawai 2023 (Rp)
	dan Cipta Karya				
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	2.685.189.810,00	22.560.000,00	2.707.749.810,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	5.408.448.385,00	18.256.803,00	5.426.705.188,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	458.400,00	1.701.414.979,00	-	1.700.956.579,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	-	3.419.467.744,00	-	3.419.467.744,00
13.	Dinas Sosial	444.537,00	2.974.898.162,00	24.100.800,00	2.998.554.425,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.017.302,00	3.485.450.541,00	38.940.000,00	3.522.373.239,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.941.402,00	18.689.055.412,00	137.701.536,00	18.824.815.546,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	-	12.402.336.622,00	33.839.592,00	12.436.176.214,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.100.000,00	6.941.155.740,00	36.480.000,00	6.970.535.740,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	3.710.354.006,00	-	3.710.354.006,00
19.	Dinas Perhubungan	-	7.242.952.806,00	-	7.242.952.806,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.345.800,00	4.495.919.335,00	28.896.000,00	4.518.469.535,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.666.988,00	3.045.797.803,00	47.084.192,00	3.043.215.007,00
22.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	2.896.464.407,00	-	2.896.464.407,00
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	5.251.644.645,00	9.120.000,00	5.260.764.645,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	3.471.261.405,00	27.155.000,00	3.498.416.405,00
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	7.444.720.871,00	-	7.444.720.871,00
26.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	1.838.200,00	4.061.138.613,00	-	4.059.300.413,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	3.354.887.149,00	-	3.354.887.149,00
28.	Sekretariat Daerah	1.713.201,00	21.897.687.334,00	131.704.241,00	22.027.678.374,00
29.	Sekretariat DPRD	847.641,00	30.299.403.264,00	-	30.298.555.623,00
30.	Kec Bojonegoro	-	8.504.109.976,00	-	8.504.109.976,00
31.	Kec Kapas	405.201,00	1.828.479.628,00	-	1.828.074.427,00
32.	Kec Balen	492.011,00	2.238.551.582,00	-	2.238.059.571,00

No	Nama OPD	Utang B. Pegawai 2022 (Rp)	Belanja Pegawai 2023 (Rp)	Utang B. Pegawai 2023 (Rp)	Beban Pegawai 2023 (Rp)
33.	Kec Sumberrejo	858.885,00	2.997.050.410,00	-	2.996.191.525,00
34.	Kec Kanor	3.081.417,00	2.798.879.368,00	-	2.795.797.951,00
35.	Kec Baureno	-	2.127.523.770,00	-	2.127.523.770,00
36.	Kec Sugihwaras	560.226,00	2.244.442.696,00	-	2.243.882.470,00
37.	Kec Kepohbaru	1.079.226,00	2.428.421.593,00	-	2.427.342.367,00
38.	Kec Kedungadem	-	2.115.786.482,00	-	2.115.786.482,00
39.	Kec Sukosewu	1.336.623,00	2.396.351.817,00	-	2.395.015.194,00
40.	Kec Trucuk	765.039,00	2.162.348.213,00	-	2.161.583.174,00
41.	Kec Malo	-	2.446.586.045,00	-	2.446.586.045,00
42.	Kec Kalitidu	1.718.205,00	2.002.114.080,00	-	2.000.395.875,00
43.	Kec Dander	-	1.917.431.643,00	1.262.888,00	1.918.694.531,00
44.	Kec Padangan	1.089.342,00	2.168.812.697,00	-	2.167.723.355,00
45.	Kec Purwosari	2.448.003,00	2.223.480.949,00	-	2.221.032.946,00
46.	Kec Kasiman	860.136,00	2.211.278.377,00	-	2.210.418.241,00
47.	Kec Kedewan	867.558,00	1.700.451.490,00	-	1.699.583.932,00
48.	Kec Ngasem	1.557.819,00	2.070.275.137,00	-	2.068.717.318,00
49.	Kec Ngambon	880.020,00	2.145.904.025,00	-	2.145.024.005,00
50.	Kec Tambakrejo	1.359.639,00	1.947.363.594,00	-	1.946.003.955,00
51.	Kec Ngraho	-	2.333.102.654,00	-	2.333.102.654,00
52.	Kec Margomulyo	1.110.015,00	2.044.392.113,00	-	2.043.282.098,00
53.	Kec Temayang	314.070,00	2.195.586.242,00	-	2.195.272.172,00
54.	Kec Bubulan	-	1.730.059.132,00	-	1.730.059.132,00
55.	Kec Gondang	-	1.876.182.552,00	-	1.876.182.552,00
56.	Kec Sekar	-	1.709.547.861,00	-	1.709.547.861,00
57.	Kec Gayam	-	1.993.493.175,00	-	1.993.493.175,00
58.	Inspektorat	1.853.400,00	7.208.766.431,00	15.680.000,00	7.222.593.031,00
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	4.988.104.473,00	107.520.000,00	5.095.624.473,00
60.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	5.357.343.053,00	39.533.496,00	5.396.876.549,00
61.	Badan Pendapatan Daerah	40.632.377,00	7.868.605.474,00	-	7.827.973.097,00
62.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	5.480.772.509,00	42.292.300,00	5.523.064.809,00
	JUMLAH	**12.352.545.379,14**	**1.101.401.177.795,00**	**52.101.786.434,57**	**1.141.150.418.850,43**

5.4.2.2 Beban Persediaan–LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Persediaan	**324.038.109.284,91**	**178.404.288.337,38**	**145.633.820.947,53**

Nilai beban persediaan dalam laporan operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp324.038.109.284,91, sedangkan nilai realisasi belanja persediaan dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp178.404.288.337,38. Selisih antara beban persediaan-LO dan belanja persediaan-LRA adalah sebesar Rp145.633.820.947,53. Beban persediaan dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Barang - LRA	**Rp**	**178.404.288.337,38**
Penambahan		
b. Belanja Barang Pakai Habis BLUD 2023	Rp	147.877.857.088,00
c. Saldo awal persediaan 2023	Rp	68.560.129.522,58
d. Koreksi beban persediaan atas persediaan dari hibah pihak ketiga	Rp	977.986.164,00
Jumlah Penambahan	**Rp**	**217.415.972.774,58**
Pengurangan		
a. Saldo akhir persediaan 2023	Rp	(71.782.151.827,05)
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**(71.782.151.827,05)**
Beban Persediaan - LO	**Rp**	**324.038.109.284,91**

Rincian beban persediaan disajikan pada Lampiran 5.

5.4.2.3 Beban Jasa–LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Jasa	**788.191.321.892,22**	**774.066.085.768,85**	**14.125.236.123,37**

Nilai beban jasa dalam laporan operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp788.191.321.892,22, sedangkan nilai realisasi belanja jasa dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp774.066.085.768,85. Selisih antara beban jasa LO dan belanja jasa LRA adalah sebesar Rp14.125.236.123,37. Beban jasa dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Jasa Tahun 2023	**Rp**	**774.066.085.768,85**
Penambahan		
a. Utang Jasa Pelayanan tahun 2023 pada Dinkes	Rp	4.331.759.114,63
b. Utang Usaha Tahun 2023	Rp	16.012.697.993,00
c. Belanja sewa dibayar dimuka Tahun 2022	Rp	41.614.583,33
d. Koreksi belanja jasa konsultansi tahun 2023	Rp	993.867.800,00
e. Koreksi utang jasa tahun 2023	Rp	1.799.080.727,41

Jumlah Penambahan	**Rp**	**23.179.020.218,37**
Pengurangan		
a. Utang Jasa Pelayanan Tahun 2022 pada Dinkes	Rp	(2.418.559.290,00)
b. Utang Usaha Tahun 2022	Rp	(6.306.608.138,00)
c. Belanja sewa dibayar dimuka Tahun 2023	Rp	(141.666.667,00)
d. Koreksi beban jasa yang menjadi aset tetap		(186.950.000,00)
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**(9.053.784.095,00)**
Beban Jasa - LO	**Rp**	**788.191.321.892,22**

Rincian beban jasa disajikan pada Lampiran 6.

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan – LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Pemeliharaan	**83.326.030.298,00**	**54.629.181.778,00**	**28.696.848.520,00**

Beban pemeliharaan dalam laporan operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp83.326.030.298,00, sedangkan belanja pemeliharaan dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.629.181.778,00. Selisih antara beban pemeliharaan - LO dan belanja pemeliharaan - LRA adalah sebesar Rp28.696.848.520,00. Selisih tersebut merupakan beban pemeliharaan BLUD sebesar Rp32.008.807.970,00 dikarenakan jenis belanja pada BLUD di LRA tidak diuraikan per rincian obyek belanja, sehingga belanja pemeliharaan pada BLUD termasuk di dalam belanja barang dan jasa BLUD. Terdapat juga koreksi pengurangan beban pemeliharaan yang menjadi aset tetap atas kesalahan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa rekonstruksi pasca bencana jalan rigid jalan Kawengan-Wonocolo Kec. Kedewan pada Dinas PU Bina Marga sebesar (Rp3.311.959.450,00).

Tabel 5. 106. Beban Pemeliharaan - LO

No	Nama OPD	Belanja Pemeliharaan (Rp)	Belanja Pemeliharaan BLUD (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Pemeliharaan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	500.862.455,00			500.862.455,00
2.	Dinas Kesehatan	6.898.846.619,00			6.898.846.619,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo		21.229.455.570,00		21.229.455.570,00
4.	RSUD Sumberrejo		6.269.015.151,00		6.269.015.151,00
5.	RSUD Padangan		4.510.337.249,00		4.510.337.249,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	4.696.925.706,00		(3.311.959.450,00)	1.384.966.256,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	5.562.967.917,00			5.562.967.917,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	21.123.662.952,00			21.123.662.952,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.391.000,00			47.391.000,00

No	Nama OPD	Belanja Pemeliharaan (Rp)	Belanja Pemeliharaan BLUD (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Pemeliharaan (Rp)
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	173.213.500,00			173.213.500,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	450.169.550,00			450.169.550,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	1.114.595.490,00			1.114.595.490,00
13.	Dinas Sosial	263.999.200,00			263.999.200,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	45.993.757,00			45.993.757,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	593.400.108,00			593.400.108,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	2.695.092.750,00			2.695.092.750,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	261.787.990,00			261.787.990,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	179.403.650,00			179.403.650,00
19.	Dinas Perhubungan	670.124.126,00			670.124.126,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	917.359.972,00			917.359.972,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	515.579.721,00			515.579.721,00
22.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	890.896.642,00			890.896.642,00
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	849.082.736,00			849.082.736,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	102.513.500,00			102.513.500,00
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	214.829.006,00			214.829.006,00
26.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	236.693.617,00			236.693.617,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	117.427.980,00			117.427.980,00
28.	Sekretariat Daerah	2.026.494.426,00			2.026.494.426,00
29.	Sekretariat DPRD	998.325.720,00			998.325.720,00
30.	Kec Bojonegoro	469.064.652,00			469.064.652,00
31.	Kec Kapas	8.070.000,00			8.070.000,00
32.	Kec Balen	4.548.000,00			4.548.000,00
33.	Kec Sumberrejo	50.143.472,00			50.143.472,00
34.	Kec Kanor	6.966.500,00			6.966.500,00
35.	Kec Baureno	8.567.000,00			8.567.000,00
36.	Kec Sugihwaras	21.165.935,00			21.165.935,00
37.	Kec Kepohbaru	17.865.500,00			17.865.500,00
38.	Kec Kedungadem	5.765.000,00			5.765.000,00

No	Nama OPD	Belanja Pemeliharaan (Rp)	Belanja Pemeliharaan BLUD (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Pemeliharaan (Rp)
39.	Kec Sukosewu	32.196.950,00			32.196.950,00
40.	Kec Trucuk	20.405.731,00			20.405.731,00
41.	Kec Malo	11.531.300,00			11.531.300,00
42.	Kec Kalitidu	30.152.100,00			30.152.100,00
43.	Kec Dander	12.255.000,00			12.255.000,00
44.	Kec Padangan	8.682.600,00			8.682.600,00
45.	Kec Purwosari	79.294.000,00			79.294.000,00
46.	Kec Kasiman	57.754.200,00			57.754.200,00
47.	Kec Kedewan	14.166.000,00			14.166.000,00
48.	Kec Ngasem	13.127.900,00			13.127.900,00
49.	Kec Ngambon	7.850.000,00			7.850.000,00
50.	Kec Tambakrejo	600.000,00			600.000,00
51.	Kec Ngraho	25.530.800,00			25.530.800,00
52.	Kec Margomulyo	9.200.000,00			9.200.000,00
53.	Kec Temayang	9.900.000,00			9.900.000,00
54.	Kec Bubulan	6.455.000,00			6.455.000,00
55.	Kec Gondang	13.399.000,00			13.399.000,00
56.	Kec Sekar	8.520.000,00			8.520.000,00
57.	Kec Gayam	14.138.000,00			14.138.000,00
58.	Inspektorat	349.208.229,00			349.208.229,00
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47.571.100,00			47.571.100,00
60.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	429.851.565,00			429.851.565,00
61.	Badan Pendapatan Daerah	477.231.154,00			477.231.154,00
62.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	210.365.000,00			210.365.000,00
	JUMLAH	**54.629.181.778,00**	**32.008.807.970,00**	**(3.311.959.450,00)**	**83.326.030.298,00**

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas - LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Perjalanan Dinas	**57.204.766.089,00**	**55.430.590.222,00**	**1.774.175.867,00**

Beban perjalanan dinas dalam laporan operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp57.204.766.089,00 sedangkan belanja Belanja Perjalanan Dinas dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55.430.590.222,00. Selisih antara beban perjalanan dinas-LO dan belanja perjalanan dinas-LRA adalah sebesar Rp1.774.175.867,00. Selisih tersebut terjadi karena jenis belanja pada BLUD di LRA tidak diuraikan per rincian obyek belanja, sehingga belanja perjalanan dinas pada BLUD termasuk dalam belanja barang dan jasa BLUD.

Tabel 5. 107. Beban Perjalanan Dinas - LO

No	Nama OPD	Belanja Perjalanan Dinas LRA (Rp)	Belanja Perjalanan Dinas BLUD (Rp)	Beban Perjalanan Dinas (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	605.882.266,00		605.882.266,00
2.	Dinas Kesehatan	8.204.644.723,00		8.204.644.723,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo		1.305.377.231,00	1.305.377.231,00
4.	RSUD Sumberrejo		238.705.986,00	238.705.986,00
5.	RSUD Padangan		230.092.650,00	230.092.650,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	1.720.476.428,00		1.720.476.428,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	924.233.197,00		924.233.197,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	558.358.761,00		558.358.761,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	419.698.730,00		419.698.730,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	999.328.057,00		999.328.057,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	292.794.161,00		292.794.161,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	410.056.933,00		410.056.933,00
13.	Dinas Sosial	652.665.865,00		652.665.865,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.089.811.240,00		2.089.811.240,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.420.754.493,00		1.420.754.493,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	309.807.410,00		309.807.410,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	702.258.982,00		702.258.982,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	706.643.529,00		706.643.529,00
19.	Dinas Perhubungan	636.397.391,00		636.397.391,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	794.765.773,00		794.765.773,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	507.453.854,00		507.453.854,00
22.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	592.944.148,00		592.944.148,00
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	757.051.425,00		757.051.425,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	335.415.373,00		335.415.373,00
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.002.656.967,00		1.002.656.967,00
26.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	920.012.372,00		920.012.372,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	616.127.907,00		616.127.907,00
28.	Sekretariat Daerah	4.345.433.800,00		4.345.433.800,00
29.	Sekretariat DPRD	16.806.644.576,00		16.806.644.576,00
30.	Kec Bojonegoro	264.163.500,00		264.163.500,00
31.	Kec Kapas	45.315.000,00		45.315.000,00

No	Nama OPD	Belanja Perjalanan Dinas LRA (Rp)	Belanja Perjalanan Dinas BLUD (Rp)	Beban Perjalanan Dinas (Rp)
32.	Kec Balen	87.631.000,00		87.631.000,00
33.	Kec Sumberrejo	60.772.868,00		60.772.868,00
34.	Kec Kanor	72.199.000,00		72.199.000,00
35.	Kec Baureno	68.286.500,00		68.286.500,00
36.	Kec Sugihwaras	49.148.500,00		49.148.500,00
37.	Kec Kepohbaru	78.880.000,00		78.880.000,00
38.	Kec Kedungadem	23.523.500,00		23.523.500,00
39.	Kec Sukosewu	35.190.700,00		35.190.700,00
40.	Kec Trucuk	69.909.300,00		69.909.300,00
41.	Kec Malo	46.184.600,00		46.184.600,00
42.	Kec Kalitidu	40.781.000,00		40.781.000,00
43.	Kec Dander	88.850.000,00		88.850.000,00
44.	Kec Padangan	42.197.500,00		42.197.500,00
45.	Kec Purwosari	57.708.500,00		57.708.500,00
46.	Kec Kasiman	46.932.012,00		46.932.012,00
47.	Kec Kedewan	28.745.000,00		28.745.000,00
48.	Kec Ngasem	74.420.000,00		74.420.000,00
49.	Kec Ngambon	30.766.000,00		30.766.000,00
50.	Kec Tambakrejo	45.010.000,00		45.010.000,00
51.	Kec Ngraho	38.895.000,00		38.895.000,00
52.	Kec Margomulyo	40.345.000,00		40.345.000,00
53.	Kec Temayang	50.195.000,00		50.195.000,00
54.	Kec Bubulan	30.356.000,00		30.356.000,00
55.	Kec Gondang	34.362.620,00		34.362.620,00
56.	Kec Sekar	45.885.000,00		45.885.000,00
57.	Kec Gayam	79.955.000,00		79.955.000,00
58.	Inspektorat	1.452.317.526,00		1.452.317.526,00
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.284.190.422,00		1.284.190.422,00
60.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.861.926.993,00		1.861.926.993,00
61.	Badan Pendapatan Daerah	785.595.807,00		785.595.807,00
62.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.037.633.013,00		1.037.633.013,00
	JUMLAH	**55.430.590.222,00**	**1.774.175.867,00**	**57.204.766.089,00**

5.4.2.6 Beban Subsidi – LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Subsidi	**589.264.975,00**	**589.264.975,00**	**0,00**

Nilai Beban Subsidi-LO sama dengan realisasi belanja subsidi LRA yaitu sebesar Rp589.264.975,00 yang merupakan pemberian subsidi bunga mikro dan ultra mikro bagi peserta Kartu Pedagang Produktif (KPP) pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023.

5.4.2.7 Beban Hibah – LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Hibah	**318.713.424.225,31**	**507.992.576.618,00**	**(189.279.152.392,69)**

Nilai beban Hibah dalam laporan operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp318.713.424.225,31, sedangkan realisasi belanja Hibah dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp507.992.576.618,00. Selisih sebesar (Rp189.279.152.392,69) merupakan persediaan hibah tahun 2023 sebesar Rp355.077.632.580,20 dan utang belanja hibah 2022 sebesar Rp475.884.314,75 dikurangi persediaan hibah tahun 2022 sebesar Rp165.915.732.402,26, utang belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp287.882.100,00 dan koreksi beban atas tanah yang dihibahkan kepada Polsek Kasiman dan Polsek Ngambon sebesar Rp70.750.000,00.

Tabel 5. 108. Beban Hibah - LO

No	Nama OPD	Beban Hibah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	117.436.455.634,00
2.	Dinas Kesehatan	1.412.324.777,00
3.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	99.499.999,89
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	60.813.993.617,42
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.116.773.769,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.800.000.000,00
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	44.972.321.012,00
8.	Dinas Perhubungan	1.667.475.300,00
9.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.499.331.766,00
10.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.899.498.350,00
11.	Sekretariat Daerah	36.925.000.000,00
12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	70.750.000,00
	JUMLAH	**318.713.424.225,31**

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial – LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Bantuan Sosial	**128.065.370.685,00**	**128.065.370.685,00**	**0,00**

Nilai beban Bantuan Sosial dalam laporan operasional sama dengan realisasi belanja Bantuan Sosial dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp128.065.370.685,00.

Tabel 5. 109. Beban Bantuan Sosial - LO

No	Nama OPD	Beban Bansos (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	302.500.000,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	89.137.470.685,00
3.	Dinas Sosial	38.625.400.000,00
	JUMLAH	**128.065.370.685,00**

5.4.2.9 Beban Penyusutan - LO

Beban penyusutan-LO merupakan penurunan manfaat ekonomis dari suatu aset tetap selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman tidak disusutkan. Beban penyusutan hanya diakui dalam laporan operasional. Besarnya beban penyusutan selama tahun 2023 adalah sebesar Rp629.250.322.994,42.

Tabel 5. 110. Beban Penyusutan Aset Tetap-LO

Rekening	Beban Penyusutan 2023 (Rp)	Beban Penyusutan 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	180.260.531.261,42	170.461.105.363,23
Gedung dan Bangunan	55.182.317.922,00	50.648.083.556,45
Jalan, Irigasi dan Jaringan	393.661.318.927,00	367.427.494.398,52
Aset Tetap Lainnya	146.154.884,00	96.910.792,00
JUMLAH	**629.250.322.994,42**	**588.633.594.110,20**

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap per OPD disajikan dalam Lampiran 7.

5.4.2.10 Beban Amortisasi – LO

Beban Amortisasi-LO merupakan penurunan manfaat ekonomis dari aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi hanya diakui dalam laporan operasional. Besarnya beban amortisasi selama Tahun 2023 adalah Rp1.206.205.896,47.

Tabel 5. 111. Beban Amortisasi - LO

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	248.288.640,00	404.288.640,00
2.	Dinas Kesehatan	101.758.958,00	63.735.000,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	12.353.500,00	13.394.500,00
4.	RSUD Sumberrejo	29.300.000,00	29.300.000,00
5.	RSUD Padangan	-	1.000.000,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	60.745.000,00	95.796.400,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	105.426.424,00	125.771.024,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	19.800.000,00	19.800.000,00
9.	Dinas Sosial	3.300.000,00	3.300.000,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.990.000,00	9.990.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	9.993.000,00	9.993.000,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.903.200,00	11.903.200,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.900.000,00	9.900.000,00
14.	Dinas Perhubungan	94.039.186,67	102.224.320,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	28.362.800,00	65.583.200,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.036.000,00	27.036.000,00

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.000.000,00	-
18.	Dinas Peternakan dan Perikanan	19.970.000,00	19.970.000,00
19.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	5.140.000,00	5.140.000,00
20.	Sekretariat Daerah	20.079.998,00	40.042.798,00
21.	Kec Bojonegoro	29.000.000,00	29.000.000,00
22.	Inspektorat	23.900.000,00	17.900.000,00
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89.654.484,00	39.880.992,00
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	63.710.000,00	87.195.000,00
25.	Badan Pendapatan Daerah	135.314.205,80	92.686.608,00
26.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	42.240.500,00	42.240.500,00
	JUMLAH	**1.206.205.896,47**	**1.367.071.182,00**

5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih – LO

Beban penyisihan piutang tak tertagih–LO merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tak tertagih hanya diakui dalam laporan operasional.

Tabel 5. 112. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - LO

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	1.241.379,50	1.583.442,50
2.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	(32.414.245,97)	(381.310.223,54)
3.	RSUD Sumberrejo	1.567.370,86	(59.872.313,22)
4.	RSUD Padangan	4.959.708,09	(18.498.065,21)
5.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	(1.333.950.669,82)	1.066.024.977,60
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(73.940.000,00)	(298.890.000,00)
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(59.799,08)	(80.337,44)
8.	Dinas Peternakan dan Perikanan	(404.844.583,36)	(413.400.577,30)
9.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	(124.113.858,38)	(97.667.969,16)
10.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(41.161.744,54)	(6.009.333,00)
11.	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)	(21.175.000,00)	(39.950.000,00)
12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.792.706.811,07	271.306,27
13.	Badan Pendapatan Daerah	474.109.754,23	446.499.967,41
14.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	158.010,00	-
	JUMLAH	**1.243.083.132,60**	**198.700.874,91**

5.4.2.12 Beban Penyusutan Aset Lain-Lain - LO

Beban Penyusutan Aset Lain-Lain LO merupakan beban penyusutan aset tetap yang direklasifikasi ke dalam aset lain-lain sebesar Rp69.808.770.809,03.

Tabel 5. 113. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain - LO

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.413.659.924,50	2.328.596.736,00
2	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	96.557.300,00	50.000.000,00
3	RSUD Sumberrejo	6.033.407.837,00	-
4	RSUD Padangan	-	289.644.252,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	-	372.154.369,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	48.490.381.005,53	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	11.500.000,00	17.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	62.114.686,00	-
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	368.755.945,00	78.750.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	492.796.800,00	82.835.005,00
11	Dinas Perhubungan	400.233.274,00	17.825.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.963.587.328,00	747.295.930,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	949.022.133,00	-
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.381.192.409,00	-
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84.654.950,00	231.027.000,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	81.545.000,00	257.687.850,00
17	Sekretariat Daerah	394.484.114,00	94.055.500,00
18	Kec Bojonegoro	22.600.000,00	-
19	Kec Balen	164.171.799,00	-
20	Kec Sumberrejo	-	45.211.800,00
21	Kec Kanor	246.920.940,00	49.193.733,00
22	Kec Baureno	106.870.000,00	-
23	Kec Kepohbaru	424.141.850,00	-
24	Kec Kedungadem	414.557.967,00	-
25	Kec Sukosewu	88.075.615,00	-
26	Kec Malo	44.200.000,00	22.154.584,00
27	Kec Padangan	171.585.267,00	23.200.000,00
28	Kec Purwosari	229.016.950,00	-
29	Kec Ngambon	-	42.500.000,00
30	Kec Tambakrejo	7.122.000,00	189.147.974,00
31	Kec Ngraho	98.729.000,00	6.300.000,00

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
32	Kec Margomulyo	338.935.140,00	-
33	Kec Temayang	-	213.064.585,00
34	Kec Bubulan	168.848.100,00	-
35	Kec Sekar	412.910.498,00	-
36	Kec Gayam	175.127.500,00	-
37	Inspektorat	60.978.300,00	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	808.750.700,00	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.601.336.477,00	115.926.667,00
	JUMLAH	**69.808.770.809,03**	**5.273.570.985,00**

5.4.2.13 Beban Lain-Lain – LO

Realisasi Beban lain-lain-LO Tahun 2023 sebesar Rp826.812.796,00 merupakan nilai aset yang tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi aset tetap *(extracomptable)* sebesar Rp826.812.796,00.

5.4.2.14 Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa - LO

Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa-LO besarnya sama dengan belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA. Besarnya beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 2023 adalah Rp26.154.830.015,00.

5.4.2.15 Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa - LO

Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa besarnya adalah sama dengan Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA yaitu sebesar Rp1.258.736.550.421,51 dikurangi dengan Dana Desa senilai Rp406.556.846.275,00 sehingga nilainya menjadi Rp852.179.704.146,51.

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus dari operasi merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban dalam satu periode pelaporan. Jumlah surplus dari kegiatan operasi per 31 Desember 2023 adalah Rp2.055.352.807.054,34.

5.4.3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 adalah Rp5.967.020,00 merupakan laba dari hasil penjualan aset tetap yang dilakukan pada tahun 2023.

5.4.3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih kurang atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 adalah (Rp6.772.719.898,00) merupakan nilai buku dari aset yang dihapuskan pada tahun 2023.

5.4.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;

2. Tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang;
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar (Rp37.318.031.053,00). Jumlah tersebut berasal dari realisasi belanja tak terduga 2023 untuk bantuan santunan kematian senilai Rp30.807.000.000,00, santunan korban bencana senilai Rp4.366.265.000,00, Insentif Calon Pengantin senilai Rp100.000.000,00, dan pengembalian sisa BKK Provinsi Jatim TA. 2020-2022 senilai Rp2.044.766.053,00.

5.4.5. SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2023 adalah Rp2.011.256.089.083,34.

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada TA 2023 adalah Rp1.711.524.226.000,06. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk sebesar Rp6.015.973.014.593,80 dikurangi dengan arus kas keluar sebesar Rp4.304.448.788.593,74.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	6.015.973.014.593,80	5.766.826.322.790,71
Arus Kas Keluar	4.304.448.788.593,74	4.116.147.677.091,30
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**1.711.524.226.000,06**	**1.650.678.645.699,41**

Arus Kas Masuk sebesar Rp6.015.973.014.593,80 terdiri dari:

Tabel 5. 114. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Pajak Daerah	168.840.845.572,00	159.937.230.964,00
2.	Retribusi Daerah	39.424.212.326,52	33.315.473.535,14
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	182.683.243.729,88	137.641.553.852,52
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	483.783.321.965,40	472.652.353.132,05
5.	Dana Bagi Hasil Pajak	655.630.400.524,00	671.716.839.386,00
6.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.468.798.051.604,00	2.418.712.905.490,00
7.	Dana Alokasi Umum	914.999.662.630,00	861.028.899.802,00
8.	Dana Alokasi Khusus	373.336.719.278,00	375.500.759.379,00
9.	Dana Insentif Daerah	11.524.031.000,00	14.636.752.000,00
10.	Dana Desa	406.556.846.275,00	358.753.665.827,00
11.	Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	222.263.497.700,00	182.848.759.504,00
12.	Bantuan Keuangan	11.641.535.710,00	13.228.972.000,00
13.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
14.	Pendapatan Lainnya	76.490.646.279,00	66.852.157.919,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**6.015.973.014.593,80**	**5.766.826.322.790,71**

Realisasi belanja dan pendapatan dari BLUD dalam hal ini RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo, RSUD Padangan dan FKTP dikonsolidasikan langsung dengan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Arus Kas Keluar sebesar Rp4.304.448.788.593,74 terdiri dari:

Tabel 5. 115. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.101.401.177.795,00	1.036.828.196.739,00
2	Belanja Barang Jasa	1.244.190.987.031,23	1.148.717.926.783,49
3	Belanja Bunga	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	589.264.975,00	120.310.958,00
5	Belanja Hibah	507.992.576.618,00	397.833.592.970,20
6	Belanja Bantuan Sosial	128.065.370.685,00	149.924.582.200,00
7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	26.154.830.015,00	21.197.184.063,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	1.258.736.550.421,51	1.327.453.048.159,61
9	Belanja Tidak Terduga	37.318.031.053,00	34.072.835.218,00
	Jumlah Arus Kas	**4.304.448.788.593,74**	**4.116.147.677.091,30**

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada TA 2023 adalah (Rp2.042.790.403.472,81). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	849.694.709,00	468.069.758,00
Arus Kas Keluar	2.043.640.098.181,81	1.261.894.634.368,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	**(2.042.790.403.472,81)**	**(1.261.426.564.610,69)**

Arus Kas Masuk sebesar Rp849.694.709,00 terdiri dari:

Tabel 5. 116. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penjualan Peralatan Kantor Tidak Terpakai	0,00	0,00
2	Penjualan atas aset lainnya (penjualan kendaraan dinas yang tidak terpakai)	0,00	0,00
3	Penjualan hasil perikanan	27.536.000,00	25.100.000,00
4	Penjualan Aset Tetap	822.158.709,00	442.969.758,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**849.694.709,00**	**468.069.758,00**

Arus Kas Keluar sebesar Rp2.043.640.098.181,81 terdiri dari:

Tabel 5. 117. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	10.503.081.650,00	10.736.412.943,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.057.841.248,00	119.422.029.667,01
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	361.189.683.243,81	273.907.615.309,89
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.433.892.555.625,00	851.796.373.770,79
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.996.936.415,00	6.032.202.678,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**2.043.640.098.181,81**	**1.261.894.634.368,69**

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Pada Tahun 2023, jumlah total arus kas dari aktivitas pendanaan adalah Rp514.931.624,79. Jumlah total tersebut didapat dari Arus kas masuk Rp514.931.624,79 dikurangi Arus kas keluar Rp0,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	514.931.624,79	849.318.546,46
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**514.931.624,79**	**849.318.546,46**

Arus Kas Masuk sebesar Rp514.931.624,79 terdiri dari:

Tabel 5. 118. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penerimaan kembali pinjaman	514.931.624,79	849.318.546,46
Jumlah Arus Kas Masuk	**514.931.624,79**	**849.318.546,46**

Arus Kas Keluar sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 5. 119. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Pada Tahun 2023, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp0,06. Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp374.471.218.527,06 dikurangi Arus Kas Keluar Rp374.471.218.527,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	374.471.218.527,06	217.298.748.752,00
Arus Kas Keluar	374.471.218.527,00	217.298.748.752,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**0,06**	**0,00**

Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp0,06, jumlah tersebut didapat dari Arus kas masuk yang terdiri atas penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) selama Tahun 2023 sebesar Rp374.471.218.527,00 dan koreksi SILPA BOP PAUD dan BOS sebesar Rp0,06.

Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke fihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 120. Rincian Pajak Belanja

No	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Taperum	0,00	0,00
2.	Askes	22.854.841.397,00	22.854.841.397,00
3.	Pajak Penghasilan Ps 21	27.189.067.030,00	27.189.067.030,00
4.	Pajak Penghasilan Ps 22	4.135.727.866,00	4.135.727.866,00

No	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
5.	Pajak Penghasilan Ps 23	1.157.326.207,00	1.157.326.207,00
6.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	40.506.153.471,00	40.506.153.471,00
7.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	238.521.536.629,00	238.521.536.629,00
8.	Iuran Jaminan Kecelekaan Kerja	1.066.330.321,00	1.066.330.321,00
9.	Iuran Jaminan Kematian	3.121.616.584,00	3.121.616.584,00
10.	IWP 8%	29.690.231.117,00	29.690.231.117,00
11.	Pajak Penghasilan Ps 25	31.930.195,00	31.930.195,00
12.	IWP 1%	5.730.182.528,00	5.730.182.528,00
13.	Pajak Penghasilan Ps 26	415.032.765,00	415.032.765,00
14.	BPJS Kesehatan	42.925.462,00	42.925.462,00
15.	BPJS Ketenagakerjaan	37.500,00	37.500,00
16.	Pajak Penghasilan Ps 15	8.279.455,00	8.279.455,00
Jumlah		**374.471.218.527,00**	**374.471.218.527,00**

Penerimaan dan pengeluaran Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran merupakan arus masuk dan keluar kas berupa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan selama tahun 2023.

5.5.5. KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	**(330.751.245.847,90)**	**390.101.399.635,18**

Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar Rp330.751.245.847,90. Perhitungan penurunan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 121. Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	1.711.524.226.000,06	1.650.678.645.699,41
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(2.042.790.403.472,81)	(1.261.426.564.610,69)
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	514.931.624,79	849.318.546,46
4.	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	0,06	0,00
JUMLAH		**(330.751.245.847,90)**	**390.101.399.635,18**

5.5.6. SALDO AWAL KAS DI BUD

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Awal Kas di BUD	**3.217.798.808.333,55**	**2.827.697.408.698,37**

Saldo Awal Kas di BUD sebesar Rp3.217.798.808.333,55 merupakan saldo Kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2022 Rp3.217.798.808.333,55, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 122. Perhitungan Saldo Awal Kas

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas Awal di BUD	3.118.233.753.215,13	
2	Kas Awal di Bendahara Penerimaan	5.946.000,00	
3	Kas Awal di Bendahara Pengeluaran	2.190.000,00	
4	Kas Awal di BLUD	98.486.764.894,20	Saldo Kas BLUD di 3 RSUD
5	Kas Awal di FKTP	737.675.311,79	Saldo Kas JKN di 35 FKTP
6	Kas Awal Dana BOS	332.478.912,43	
Saldo Awal Kas di BUD		**3.217.798.808.333,55**	

5.5.7. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas sebesar Rp2.887.047.562.485,65 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per tanggal 31 Desember 2023. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 5. 123. Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode	(330.751.245.847,90)	390.101.399.635,18
2	Saldo awal kas di BUD	3.217.798.808.333,55	2.827.697.408.698,37
3	Saldo kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		**2.887.047.562.485,65**	**3.217.798.808.333,55**

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp2.887.047.562.485,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 124. Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Kas akhir di BUD	2.817.802.051.807,30	-
2.	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	76.555.812,00	-
3.	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	600.000,00	-
4.	Kas akhir di BLUD	60.784.410.860,30	Saldo Kas BLUD di 3 RSUD
5.	Saldo Akhir Kas di FKTP	2.115.776.069,41	Saldo Akhir Kas JKN di 35 FKTP
6.	Saldo Akhir Kas Dana BOS, BOP PAUD dan BOK	6.268.167.936,64	-
7.	Saldo Akhir Setara Kas	0,00	-
	Saldo Akhir Kas	**2.887.047.562.485.65**	**-**

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.

5.6.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp14.588.356.971.293,36.

5.6.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp2.011.256.089.083,34. Jumlah tersebut merupakan/sama dengan saldo surplus (defisit) pindahan dari Laporan Operasional.

5.6.3. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi atas persediaan sebesar Rp0,00.

5.6.4. KOREKSI ATAS SELISIH NILAI REVALUASI ASET

Koreksi atas selisih nilai revaluasi aset sebesar Rp0,00.

5.6.5. KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Nilai koreksi aset per 31 Desember 2023 adalah Rp75.110.558.433,50 terdiri dari:

1. Koreksi Ekuitas atas SiLPA dana BOS dan BOP PAUD 2022 sebesar Rp0,06;
2. Koreksi Ekuitas atas pembayaran piutang sarang burung tahun 2009 pada Badan Pendapatan Daerah yang belum tercatat sebesar (Rp2.250.000,00);
3. Koreksi Ekuitas atas saldo awal penyusutan aset tetap TA. 2023 sebesar Rp72.802.921.915,44;
4. Koreksi Ekuitas atas penyusutan aset tetap karena penghapusan sebesar Rp4.478.151.673,00;
5. Koreksi Ekuitas atas penyusutan aset lain-lain karena penghapusan sebesar Rp586.400.000,00;
6. Koreksi atas penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan pada Gedung H RSUD Sosodoro Djatikusumo sebesar (Rp2.754.665.155,00).

5.6.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp16.674.723.618.810,20.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah provinsi Jawa Timur yang tercatat berpenduduk sebanyak 1,2 juta lebih pada tahun 2016 dengan luas wilayah lebih dari 2 ribu km^2, yang terletak diantara 111° 25' dan 112^0 09' bujur timur dan 6° 59' dan 7° 37' lintang selatan. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Gunung Kramat dan Gunung Gajah. Dilihat secara keseluruhan 81,29% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian di bawah 25 m lebih, selebihnya 18,71% berada pada ketinggian di bawah 25 m. Luas kemiringan 2-14,99% (36,16%) dan sisanya (8,74%) kemiringannya di atas 15%. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40,14% merupakan Hutan Negara, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah tercatat sekitar 32,58%. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

6.2. BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BOJONEGORO

Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban;
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan;
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah).

6.3. PEMBAGIAN DAN KEBIJAKAN PERWILAYAHAN

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 28 Kecamatan, 430 desa/kelurahan yang terdiri dari 419 desa dan 11 kelurahan atau sekitar 1.300 dusun, 1.997 RW dan 7.696 RT. Wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian, dengan luas sawah 71,44 ribu hektar. Tanaman utamanya adalah padi sekitar 110,258 ribu hektar dan lainnya digunakan sebagai lahan tanaman palawija, sayur-sayuran dan tembakau pada musim kemarau.

6.4. PENGGABUNGAN ATAU PEMEKARAN ENTITAS AKUNTANSI TAHUN BERJALAN

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 3 (tiga) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan. Selaku BLUD ketiga RSUD tersebut memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai salah satu entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/412/KEP/412.12/2009 tanggal 28 November 2009, RSUD Sumberrejo telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/226/KEP/412.013/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan RSUD Padangan juga telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/225/KEP/412.013/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 96 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, RSUD Kepohbaru juga telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Di samping itu Kabupaten Bojonegoro mempunyai Perusahaan Daerah namun tidak termasuk dalam entitas akuntansi, yaitu:

1. Bidang Perbankan:
   PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
2. Bidang Konstruksi:
   PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS);
3. Bidang Jasa lainnya:
   a. PDAM Kab. Bojonegoro;
   b. PT Griya Dharma Kusuma;
4. Bidang Pertambangan:
   PT Asri Dharma Sejahtera (ADS).

6.5. LAIN-LAIN

Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 diatur tentang pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri dari

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

Pembentukan Perangkat Daerah tersebut dilakukan berdasarkan asas:

1. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, maksudnya adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Efisiensi, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh.
3. Efektivitas, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
4. Pembagian habis tugas, maksudnya pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.
5. Rentang kendali, maksudnya penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.
6. Tata kerja yang jelas, maksudnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horisontal.
7. Fleksibilitas, maksudnya penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan perangkat daerah itu terdiri dari

1. Sekretariat Daerah yang bertipe A, maksudnya adalah sekretariat daerah yang terdiri atas paling banyak tiga asisten, masing-masing Asisten terdiri atas paling banyak empat bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.

2. Sekretariat DPRD yang bertipe A, maksudnya adalah Sekretariat DPRD yang terdiri atas paling banyak empat bagian dan masing masing bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
3. Inspektorat yang bertipe A, maksudnya adalah Inspektorat yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat Inspektur Pembantu. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian.
4. Dinas yang terbagi menjadi dua tipe yaitu A dan B. Tipe A maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan bidang terdiri atas atas paling banyak tiga seksi. Tipe B maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak tiga bidang. Sekretaris terdiri atas dua sub bagian dan bidang terdiri atas paling banyak tiga seksi.

   Dinas terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
   b. Dinas Kesehatan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;
   d. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air;
   e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan persampahan serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
   f. Dinas Sosial bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
   g. Dinas Pemadam Kebakaran bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran;
   h. Satuan Polisi Pamong Praja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
   i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
   l. Dinas Perhubungan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
   m. Dinas Komunikasi dan Informatika bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian;
   n. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;

o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
q. Dinas Lingkungan Hidup bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang kehutanan, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan persampahan;
r. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
t. Dinas Peternakan dan Perikanan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan:
   1) Bidang pertanian, terdiri dari
      a) Sub urusan sarana pertanian dengan fungsi/layanan:
         (1) Pengelolaan sumber daya genetik hewan
         (2) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
         (3) Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer
         (4) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
         (5) Penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah propinsi lain
      b) Sub urusan prasarana pertanian dengan fungsi/layanan:
         (1) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak
         (2) Pengembangan lahan penggembalaan umum
      c) Sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
      d) Sub urusan perizinan usaha pertanian fungsi/layanan
         (1) Penertiban izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan
         (2) Penertiban izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
   2) Bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan budidaya
u. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura (gabungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian);
v. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (gabungan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro).

5. Badan, keseluruhan bertipe A, maksudnya adalah badan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak tiga sub bidang.
   Badan terdiri dari:

a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah);
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
d. Badan Pendapatan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertipe A, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. Kecamatan, keseluruhan bertipe A, maksudnya Kecamatan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak lima seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak dua sub bagian.

   Kecamatan terdiri dari:
   a. Kecamatan Bojonegoro bertipe A
   b. Kecamatan Kapas bertipe A
   c. Kecamatan Balen bertipe A
   d. Kecamatan Sumberrejo bertipe A
   e. Kecamatan Kanor bertipe A
   f. Kecamatan Baureno bertipe A
   g. Kecamatan Sugihwaras bertipe A
   h. Kecamatan Kepohbaru bertipe A
   i. Kecamatan Kedungadem bertipe A
   j. Kecamatan Sukosewu bertipe A
   k. Kecamatan Trucuk bertipe A
   l. Kecamatan Malo bertipe A
   m. Kecamatan Kalitidu bertipe A
   n. Kecamatan Dander bertipe A
   o. Kecamatan Padangan bertipe A
   p. Kecamatan Purwosari bertipe A
   q. Kecamatan Kasiman bertipe A
   r. Kecamatan Kedewan bertipe A
   s. Kecamatan Ngasem bertipe A
   t. Kecamatan Ngambon bertipe A
   u. Kecamatan Tambakrejo bertipe A
   v. Kecamatan Ngraho bertipe A
   w. Kecamatan Margomulyo bertipe A
   x. Kecamatan Temayang bertipe A
   y. Kecamatan Bubulan bertipe A
   z. Kecamatan Gondang bertipe A
   aa. Kecamatan Sekar bertipe A
   bb. Kecamatan Gayam bertipe A

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Bupati/Wali Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Kabupaten Bojonegoro tercantum dalam **Lampiran 8**.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama satu periode, untuk Tahun 2023. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini disajikan dengan kondisi yang sebenarnya, transparan, andal, komparatif sehingga mudah untuk dipahami.

Laporan Keuangan yang disusun telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sistematika penyusunan dalam CaLK telah disesuaikan sebagaimana sistematika penulisan CaLK dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya CaLK, menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih informatif dan diharapkan dapat membantu pembaca laporan dalam memahami informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pengguna laporan dalam menganalisis informasi yang ada.

Demikian, semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik.

Bojonegoro, 9 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NURUL AZIZAH

Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd

ADRIYANTO

LAMPIRAN 1

PERHITUNGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TA 2023

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
1	001. SDN BALENREJO BALEN	BALEN	132.983,32		132.983,32	45.927.017,00	38.190.800,00	3.500.000,00	4.369.200,00	46.060.000,00	0,32
2	002. SDN BULAKLO BALEN	BALEN	40,61		40,61	29.140.000,00	24.487.000,00	1.975.000,00	2.678.000,00	29.140.000,00	40,61
3	003. SDN BULU I BALEN	BALEN	9.665,53		9.665,53	31.950.335,00	29.593.450,00	700.000,00	1.666.550,00	31.960.000,00	0,53
4	004. SDN KABUNAN BALEN	BALEN	0,24		0,24	73.320.000,00	52.140.000,00	14.595.000,00	6.585.000,00	73.320.000,00	0,24
5	005. SDN KEDUNGBONDO II BALEN	BALEN	85,95		85,95	73.320.000,00	61.288.675,00	5.500.000,00	6.531.325,00	73.320.000,00	85,95
6	006. SDN KEDUNGBONDO III BALEN	BALEN	951,11		951,11	46.060.000,00	40.955.700,00	1.430.700,00	3.673.600,00	46.060.000,00	951,11
7	007. SDN KEDUNGDOWO II BALEN	BALEN	101,84		101,84	81.780.000,00	61.184.300,00	15.494.000,00	5.101.700,00	81.780.000,00	101,84
8	008. SDN KEMAMANG BALEN	BALEN	1.541.100,16		1.541.100,16	102.798.900,00	80.368.600,00	15.016.000,00	8.955.400,00	104.340.000,00	0,16
9	009. SDN KENEP 2 BALEN	BALEN	64,59		64,59	34.780.000,00	23.375.500,00	8.450.000,00	2.954.500,00	34.780.000,00	64,59
10	010. SDN LENGKONG BALEN	BALEN	675.844,36		675.844,36	59.484.570,00	39.030.660,00	15.028.400,00	5.425.510,00	59.484.570,00	675.844,36
11	011. SDN MARGOMULYO I BALEN	BALEN	78,72		78,72	93.940.000,00	89.132.100,00	1.400.000,00	3.407.900,00	93.940.000,00	78,72
12	012. SDN MARGOMULYO II BALEN	BALEN	74.000,89		74.000,89	77.006.000,00	54.267.000,00	17.000.000,00	5.813.000,00	77.080.000,00	0,89
13	013. SDN MAYANGKAWIS I BALEN	BALEN	596,46		596,46	63.920.000,00	53.883.000,00	5.665.000,00	4.372.000,00	63.920.000,00	596,46
14	014. SDN MAYANGKAWIS II BALEN	BALEN	4.805,77		4.805,77	110.915.195,00	81.270.300,00	17.620.000,00	12.029.700,00	110.920.000,00	0,77
15	015. SDN MULYOAGUNG BALEN	BALEN	85,48		85,48	128.720.000,00	96.783.700,00	22.325.000,00	9.611.300,00	128.720.000,00	85,48
16	016. SDN MULYOREJO I BALEN	BALEN	696,51		696,51	41.360.000,00	30.569.800,00	6.771.000,00	4.019.200,00	41.360.000,00	696,51
17	017. SDN MULYOREJO II BALEN	BALEN	573,57		573,57	70.500.000,00	58.326.300,00	5.150.000,00	7.023.700,00	70.500.000,00	573,57
18	018. SDN NGADILUHUR I BALEN	BALEN	40.527,56		40.527,56	89.260.000,00	69.192.000,00	15.000.000,00	5.108.000,00	89.300.000,00	527,56
19	019. SDN NGADILUHUR II BALEN	BALEN	38,92		38,92	68.620.000,00	53.435.800,00	10.000.000,00	5.184.200,00	68.620.000,00	38,92
20	020. SDN PENGANTEN I BALEN	BALEN	587,73		587,73	56.400.000,00	49.205.400,00	2.500.000,00	4.694.600,00	56.400.000,00	587,73
21	021. SDN PENGANTEN II BALEN	BALEN	640,91		640,91	26.320.000,00	24.920.000,00	-	1.400.000,00	26.320.000,00	640,91
22	022. SDN PENGANTEN III BALEN	BALEN	10.178,78		10.178,78	33.829.855,00	32.020.225,00	-	1.819.775,00	33.840.000,00	33,78
23	023. SDN PILANGGEDE BALEN	BALEN	0,88		0,88	30.080.000,00	23.080.500,00	3.325.000,00	3.674.500,00	30.080.000,00	0,88
24	024. SDN POHBOGO II BALEN	BALEN	0,06		0,06	71.440.000,00	54.205.900,00	12.346.600,00	4.887.500,00	71.440.000,00	0,06
25	025. SDN PRAMBATAN I BALEN	BALEN	41.645,42		41.645,42	119.380.000,00	101.880.000,00	11.500.000,00	6.000.000,00	119.380.000,00	41.645,42
26	026. SDN SARIREJO BALEN	BALEN	148,81		148,81	44.180.000,00	38.837.600,00	3.100.000,00	2.242.400,00	44.180.000,00	148,81
27	027. SDN SEKARAN BALEN	BALEN	69,19		69,19	26.320.000,00	25.163.800,00	-	1.156.200,00	26.320.000,00	69,19
28	028. SDN SIDOBANDUNG I BALEN	BALEN	98.826,09		98.826,09	104.181.244,00	87.644.000,00	10.550.000,00	6.086.000,00	104.280.000,00	70,09
29	029. SDN SIDOBANDUNG II BALEN	BALEN	717,06		717,06	109.040.000,00	86.999.000,00	15.900.000,00	6.141.000,00	109.040.000,00	717,06
30	030. SDN SOBONTORO I BALEN	BALEN	110.630,92		110.630,92	160.569.500,00	133.164.800,00	16.500.000,00	11.015.200,00	160.680.000,00	130,92

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
31	031. SDN SOBONTORO II BALEN	BALEN	79.789,61		79.789,61	60.080.250,00	45.060.000,00	10.930.000,00	4.170.000,00	60.160.000,00	39,61
32	032. SDN SUWALOH BALEN	BALEN	18.240,17		18.240,17	123.121.760,00	94.727.660,00	20.000.000,00	8.394.100,00	123.121.760,00	18.240,17
33	033. SDN BANJARAN BAURENO	BAURENO	1.100,11		1.100,11	173.898.900,00	142.400.000,00	21.500.000,00	10.000.000,00	173.900.000,00	0,11
34	034. SDN BANJARANYAR I BAURENO	BAURENO	57.968,16		57.968,16	68.620.000,00	54.620.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	68.620.000,00	57.968,16
35	035. SDN BANJARANYAR II BAURENO	BAURENO	0,94		0,94	68.560.000,00	56.560.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	68.560.000,00	0,94
36	036. SDN BAURENO I BAURENO	BAURENO	2.185.949,00		2.185.949,00	314.892.035,00	199.169.440,00	90.450.000,00	25.018.600,00	314.638.040,00	2.439.944,00
37	037. SDN BAURENO III BAURENO	BAURENO	260.235,37		260.235,37	131.465.001,00	95.540.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	131.540.000,00	185.236,37
38	038. SDN BLONGSONG I BAURENO	BAURENO	126.889,39		126.889,39	83.535.834,00	60.505.972,00	19.600.000,00	3.321.500,00	83.427.472,00	235.251,39
39	039. SDN BLONGSONG II BAURENO	BAURENO	465,83		465,83	32.900.000,00	13.052.500,00	-	-	13.052.500,00	19.847.965,83
40	040. SDN BUMIAYU BAURENO	BAURENO	109.443,66		109.443,66	45.097.870,00	38.729.420,00	2.500.000,00	3.676.500,00	44.905.920,00	301.393,66
41	041. SDN DRAJAT BAURENO	BAURENO	297.780,14		297.780,14	25.380.000,00	22.014.900,00	1.300.000,00	2.065.100,00	25.380.000,00	297.780,14
42	042. SDN GAJAH I BAURENO	BAURENO	-		-	60.160.000,00	56.461.500,00	-	3.698.500,00	60.160.000,00	-
43	043. SDN GAJAH II BAURENO	BAURENO	429.275,90		429.275,90	70.500.000,00	50.334.000,00	11.750.000,00	8.416.000,00	70.500.000,00	429.275,90
44	044. SDN GUNUNGSARI I BAURENO	BAURENO	0,78		0,78	64.860.000,00	50.877.300,00	7.500.000,00	6.482.700,00	64.860.000,00	0,78
45	045. SDN GUNUNGSARI II BAURENO	BAURENO	88,16		88,16	88.360.000,00	72.150.100,00	12.530.000,00	3.679.900,00	88.360.000,00	88,16
46	046. SDN KADUNGREJO I BAURENO	BAURENO	19,29		19,29	39.480.000,00	32.480.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	39.480.000,00	19,29
47	047. SDN KADUNGREJO II BAURENO	BAURENO	0,16		0,16	78.960.000,00	54.800.800,00	20.000.000,00	4.159.200,00	78.960.000,00	0,16
48	048. SDN KALISARI BAURENO	BAURENO	10.500,00		10.500,00	69.549.500,00	57.783.900,00	6.050.000,00	5.726.100,00	69.560.000,00	-
49	049. SDN KARANGDAYU I BAURENO	BAURENO	-		-	56.400.000,00	41.900.000,00	11.500.000,00	3.000.000,00	56.400.000,00	-
50	050. SDN KARANGDAYU II BAURENO	BAURENO	0,95		0,95	49.760.000,00	13.630.000,00	-	-	13.630.000,00	36.130.000,95
51	051. SDN KAUMAN I BAURENO	BAURENO	1.553.699,74		1.553.699,74	236.320.000,00	171.380.740,00	36.700.000,00	29.500.000,00	237.580.740,00	292.959,74
52	052. SDN KAUMAN II BAURENO	BAURENO	0,78		0,78	25.380.000,00	11.082.000,00	-	1.518.000,00	12.600.000,00	12.780.000,78
53	053. SDN LEBAKSARI BAURENO	BAURENO	212.599,43		212.599,43	58.280.000,00	47.128.200,00	5.400.000,00	5.751.800,00	58.280.000,00	212.599,43
54	054. SDN NGEMPLAK I BAURENO	BAURENO	395.529,55		395.529,55	125.960.000,00	97.960.000,00	28.000.000,00	-	125.960.000,00	395.529,55
55	055. SDN NGEMPLAK II BAURENO	BAURENO	0,27		0,27	156.140.000,00	83.010.500,00	67.825.000,00	5.304.500,00	156.140.000,00	0,27
56	056. SDN PASINAN BAURENO	BAURENO	0,45		0,45	49.760.000,00	48.760.000,00	700.000,00	300.000,00	49.760.000,00	0,45
57	057. SDN POMAHAN I BAURENO	BAURENO	297.501,05		297.501,05	91.180.000,00	75.890.000,00	13.790.000,00	1.500.000,00	91.180.000,00	297.501,05
58	058. SDN POMAHAN III BAURENO	BAURENO	0,78		0,78	51.700.000,00	41.490.200,00	9.000.000,00	1.209.800,00	51.700.000,00	0,78
59	059. SDN PUCANGARUM I BAURENO	BAURENO	-		-	59.220.000,00	46.525.510,00	6.900.000,00	5.732.100,00	59.157.610,00	62.390,00
60	060. SDN PUCANGARUM II BAURENO	BAURENO	-		-	66.740.000,00	42.879.500,00	20.050.000,00	3.810.500,00	66.740.000,00	-
61	061. SDN SEMBUNGLOR BAURENO	BAURENO	227.000,00		227.000,00	128.553.000,00	98.277.900,00	20.059.000,00	10.269.100,00	128.606.000,00	174.000,00

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
62	062. SDN SRATUREJO I BAURENO	BAURENO	30.000,91		30.000,91	221.000.000,00	133.193.500,00	70.918.000,00	16.888.500,00	221.000.000,00	30.000,91
63	063. SDN SRATUREJO II BAURENO	BAURENO	10.263,68		10.263,68	40.420.000,00	31.763.200,00	6.715.000,00	1.941.800,00	40.420.000,00	10.263,68
64	064. SDN SUMURAGUNG I BAURENO	BAURENO	383.109,11		383.109,11	58.280.000,00	43.078.800,00	10.300.000,00	4.901.200,00	58.280.000,00	383.109,11
65	065. SDN SUMURAGUNG II BAURENO	BAURENO	43.320,05		43.320,05	37.600.000,00	18.800.000,00	-	-	18.800.000,00	18.843.320,05
66	066. SDN TANGGUNGAN BAURENO	BAURENO	24,15		24,15	46.060.000,00	38.193.735,00	3.500.000,00	4.338.400,00	46.032.135,00	27.889,15
67	067. SDN TLOGOAGUNG I BAURENO	BAURENO	1.478.569,55		1.478.569,55	56.393.958,00	53.103.000,00	-	3.297.000,00	56.400.000,00	1.472.527,55
68	068. SDN TLOGOAGUNG II BAURENO	BAURENO	5.144,54		5.144,54	102.460.000,00	76.868.300,00	20.900.000,00	4.691.700,00	102.460.000,00	5.144,54
69	069. SDN TROJALU BAURENO	BAURENO	690.697,49		690.697,49	86.729.800,00	70.048.245,00	10.744.500,00	5.941.500,00	86.734.245,00	686.252,49
70	070. SDN TULUNGAGUNG I BAURENO	BAURENO	49.500,00		49.500,00	113.630.500,00	81.589.520,00	27.549.000,00	4.500.000,00	113.638.520,00	41.480,00
71	071. SDN BANJARJO I BOJONEGORO	BOJONEGORO	-		-	231.240.000,00	180.090.000,00	20.825.000,00	30.325.000,00	231.240.000,00	-
72	072. SDN BANJARJO II BOJONEGORO	BOJONEGORO	634.000,00		634.000,00	117.806.000,00	78.280.000,00	28.200.000,00	11.960.000,00	118.440.000,00	-
73	073. SDN BANJARJO III BOJONEGORO	BOJONEGORO	0,51		0,51	46.060.000,00	20.587.536,00	2.400.000,00	-	22.987.536,00	23.072.464,51
74	074. SDN CAMPUREJO I BOJONEGORO	BOJONEGORO	17.785,58		17.785,58	245.322.215,00	175.076.000,00	52.891.000,00	17.373.000,00	245.340.000,00	0,58
75	075. SDN CAMPUREJO II BOJONEGORO	BOJONEGORO	405.227,00		405.227,00	148.114.773,00	131.344.680,00	12.750.000,00	4.308.000,00	148.402.680,00	117.320,00
76	076. SDN KADIPATEN I BOJONEGORO	BOJONEGORO	132.482,14		132.482,14	466.107.518,00	398.544.090,00	36.060.000,00	31.635.300,00	466.239.390,00	610,14
77	077. SDN KADIPATEN II BOJONEGORO	BOJONEGORO	1.139.409,52		1.139.409,52	426.560.840,00	355.067.500,00	47.481.500,00	24.743.600,00	427.292.600,00	407.649,52
78	078. SDN KADIPATEN III BOJONEGORO	BOJONEGORO	26.520,45		26.520,45	112.773.480,00	100.077.800,00	6.500.000,00	6.222.200,00	112.800.000,00	0,45
79	079. SDN KALIREJO BOJONEGORO	BOJONEGORO	0,01		0,01	112.800.000,00	101.835.700,00	6.092.000,00	4.872.300,00	112.800.000,00	0,01
80	080. SDN KARANGPACAR BOJONEGORO	BOJONEGORO	367.943,01		367.943,01	59.792.065,00	39.989.795,00	14.325.000,00	5.317.288,00	59.632.083,00	527.925,01
81	081. SDN KAUMAN I BOJONEGORO	BOJONEGORO	46.130,90		46.130,90	454.914.150,00	356.715.100,00	65.521.400,00	31.717.500,00	453.954.000,00	1.006.280,90
82	082. SDN KAUMAN II BOJONEGORO	BOJONEGORO	0,73		0,73	299.860.000,00	227.561.362,00	56.992.500,00	15.074.800,00	299.628.662,00	231.338,73
83	083. SDN KEPATIHAN BOJONEGORO	BOJONEGORO	31.273,89		31.273,89	457.748.732,00	383.450.212,00	39.400.000,00	32.671.300,00	455.521.512,00	2.258.493,89
84	084. SDN KLANGON I BOJONEGORO	BOJONEGORO	204.789,32		204.789,32	37.599.736,00	34.341.000,00	-	3.259.000,00	37.600.000,00	204.525,32
85	085. SDN LEDOKKULON I BOJONEGORO	BOJONEGORO	0,29		0,29	155.100.000,00	115.896.600,00	22.511.500,00	16.691.900,00	155.100.000,00	0,29
86	086. SDN LEDOKKULON III BOJONEGORO	BOJONEGORO	0,48		0,48	58.280.000,00	51.879.800,00	4.500.000,00	1.900.000,00	58.279.800,00	200,48
87	087. SDN LEDOKWETAN I BOJONEGORO	BOJONEGORO	48.499,13		48.499,13	102.411.501,00	84.843.080,00	12.150.000,00	5.321.800,00	102.314.880,00	145.120,13
88	088. SDN MOJOKAMPUNG BOJONEGORO	BOJONEGORO	100.000,31		100.000,31	71.440.000,00	59.003.850,00	6.000.000,00	6.436.150,00	71.440.000,00	100.000,31
89	089. SDN MULYOAGUNG I BOJONEGORO	BOJONEGORO	17.019,07		17.019,07	110.920.000,00	95.020.000,00	8.600.000,00	7.300.000,00	110.920.000,00	17.019,07
90	090. SDN MULYOAGUNG II BOJONEGORO	BOJONEGORO	842.100,80		842.100,80	91.277.900,00	78.382.700,00	6.200.000,00	7.337.250,00	91.919.950,00	200.050,80
91	091. SDN NGROWO II BOJONEGORO	BOJONEGORO	428.400,62		428.400,62	126.798.240,00	112.203.410,00	7.658.000,00	6.776.200,00	126.637.610,00	589.030,62
92	092. SDN PACUL I BOJONEGORO	BOJONEGORO	-		-	143.820.000,00	116.512.500,00	19.500.000,00	7.700.000,00	143.712.500,00	107.500,00

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
93	093. SDN PACUL III BOJONEGORO	BOJONEGORO	53.014,91		53.014,91	112.747.004,00	78.081.854,00	21.000.000,00	13.480.000,00	112.561.854,00	238.164,91
94	094. SDN SEMANDING BOJONEGORO	BOJONEGORO	0,60		0,60	73.320.000,00	66.078.000,00	4.700.000,00	2.542.000,00	73.320.000,00	0,60
95	095. SDN SUKOREJO I BOJONEGORO	BOJONEGORO	281,29		281,29	251.920.000,00	215.534.725,00	19.700.000,00	16.685.275,00	251.920.000,00	281,29
96	096. SDN SUKOREJO III BOJONEGORO	BOJONEGORO	236,75		236,75	88.360.000,00	82.218.700,00	-	6.102.900,00	88.321.600,00	38.636,75
97	097. SDN SUMBANG I BOJONEGORO	BOJONEGORO	0,29		0,29	67.680.000,00	63.822.725,00	-	3.857.275,00	67.680.000,00	0,29
98	098. SDN BUBULAN 1 BUBULAN	BUBULAN	143.561,07		143.561,07	196.256.439,00	170.261.548,00	18.550.000,00	7.252.700,00	196.064.248,00	335.752,07
99	099. SDN BUBULAN II BUBULAN	BUBULAN	1.067,49		1.067,49	81.780.000,00	71.280.000,00	9.500.000,00	1.000.000,00	81.780.000,00	1.067,49
100	100. SDN CANCUNG I BUBULAN	BUBULAN	1.747,28		1.747,28	67.680.000,00	54.430.000,00	12.250.000,00	1.000.000,00	67.680.000,00	1.747,28
101	101. SDN CANCUNG II BUBULAN	BUBULAN	65,00		65,00	60.159.935,00	55.504.480,00	2.500.000,00	2.000.000,00	60.004.480,00	155.520,00
102	102. SDN CLEBUNG I BUBULAN	BUBULAN	999,69		999,69	37.540.000,00	37.540.000,00	-	-	37.540.000,00	999,69
103	103. SDN CLEBUNG III BUBULAN	BUBULAN	56.499,24		56.499,24	51.700.000,00	49.700.000,00	-	2.000.000,00	51.700.000,00	56.499,24
104	104. SDN CLEBUNG IV BUBULAN	BUBULAN	58.609,67		58.609,67	48.880.000,00	48.880.000,00	-	-	48.880.000,00	58.609,67
105	105. SDN NGOROGUNUNG II BUBULAN	BUBULAN	836,66		836,66	121.200.000,00	105.440.000,00	12.000.000,00	3.760.000,00	121.200.000,00	836,66
106	106. SDN SUMBERBENDO I BUBULAN	BUBULAN	78.341,18		78.341,18	77.960.000,00	71.000.000,00	4.960.000,00	2.000.000,00	77.960.000,00	78.341,18
107	107. SDN SUMBERBENDO II BUBULAN	BUBULAN	541.762,82		541.762,82	74.260.000,00	59.060.000,00	15.200.000,00	-	74.260.000,00	541.762,82
108	108. SDN CLEBUNG II BUBULAN	BUBULAN	39,64		39,64	107.100.000,00	101.100.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	107.100.000,00	39,64
109	109. SDN DANDER I DANDER	DANDER	191,00		191,00	351.499.817,00	256.152.332,00	83.661.365,00	10.624.900,00	350.438.597,00	1.061.411,00
110	110. SDN DANDER II DANDER	DANDER	1.260,50		1.260,50	162.618.753,00	123.689.800,00	34.991.500,00	3.911.650,00	162.592.950,00	27.063,50
111	111. SDN DANDER III DANDER	DANDER	0,57		0,57	71.440.000,00	55.745.395,00	10.700.000,00	4.994.605,00	71.440.000,00	0,57
112	112. SDN DANDER IV DANDER	DANDER	299,98		299,98	168.259.701,00	133.509.600,00	30.650.000,00	4.000.000,00	168.159.600,00	100.400,98
113	113. SDN GROWOK I DANDER	DANDER	82,26		82,26	112.800.000,00	78.449.300,00	28.750.000,00	4.125.000,00	111.324.300,00	1.475.782,26
114	114. SDN GROWOK II DANDER	DANDER	21.000,93		21.000,93	47.939.560,00	46.633.560,00	-	1.306.000,00	47.939.560,00	21.000,93
115	115. SDN JATIBLIMBING I DANDER	DANDER	4,77		4,77	74.260.000,00	63.020.000,00	9.000.000,00	2.240.000,00	74.260.000,00	4,77
116	116. SDN JATIBLIMBING II DANDER	DANDER	103.492,00		103.492,00	122.096.526,00	101.590.832,00	14.400.000,00	6.095.400,00	122.086.232,00	113.786,00
117	117. SDN JATIBLIMBING III DANDER	DANDER	40.022,15		40.022,15	77.061.000,00	48.073.000,00	21.600.000,00	7.407.000,00	77.080.000,00	21.022,15
118	118. SDN KARANGSONO I DANDER	DANDER	95.173,03		95.173,03	149.332.000,00	93.304.500,00	52.320.000,00	3.800.000,00	149.424.500,00	2.673,03
119	119. SDN KARANGSONO II DANDER	DANDER	816,57		816,57	44.180.000,00	10.090.000,00	12.000.000,00	-	22.090.000,00	22.090.816,57
120	120. SDN KUNCI I DANDER	DANDER	43,94		43,94	146.580.000,00	134.145.400,00	9.700.000,00	2.734.600,00	146.580.000,00	43,94
121	121. SDN KUNCI III DANDER	DANDER	68.624,11		68.624,11	165.427.500,00	136.045.540,00	26.450.000,00	2.928.860,00	165.424.400,00	71.724,11
122	122. SDN MOJORANU I DANDER	DANDER	8.738,86		8.738,86	79.892.768,00	71.887.802,00	8.000.000,00	-	79.887.802,00	13.704,86
123	123. SDN MOJORANU II DANDER	DANDER	20,88		20,88	178.699.980,00	127.354.300,00	45.965.000,00	5.380.700,00	178.700.000,00	0,88

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
124	124. SDN NGABLAK I DANDER	DANDER	524.687,94		524.687,94	152.695.345,00	113.994.800,00	24.300.000,00	14.925.200,00	153.220.000,00	32,94
125	125. SDN NGABLAK II DANDER	DANDER	759.171,71		759.171,71	57.620.000,00	46.255.000,00	7.025.000,00	5.000.000,00	58.280.000,00	99.171,71
126	126. SDN NGRASEH DANDER	DANDER	4.124,90		4.124,90	85.540.000,00	57.875.800,00	22.500.000,00	4.560.500,00	84.936.300,00	607.824,90
127	127. SDN NGULANAN I DANDER	DANDER	95.135,41		95.135,41	100.484.900,00	84.701.940,00	13.000.000,00	2.865.500,00	100.567.440,00	12.595,41
128	128. SDN NGULANAN II DANDER	DANDER	120.710,32		120.710,32	125.882.500,00	102.494.600,00	18.870.000,00	4.517.900,00	125.882.500,00	120.710,32
129	129. SDN NGUMPAKDALEM I DANDER	DANDER	15,45		15,45	221.840.000,00	190.852.650,00	11.220.000,00	19.767.350,00	221.840.000,00	15,45
130	130. SDN NGUMPAKDALEM II DANDER	DANDER	615.546,91		615.546,91	153.545.300,00	112.457.200,00	33.500.500,00	8.202.300,00	154.160.000,00	846,91
131	131. SDN NGUMPAKDALEM IV DANDER	DANDER	590.227,56		590.227,56	64.260.200,00	60.259.000,00	3.800.000,00	741.000,00	64.800.000,00	50.427,56
132	132. SDN NGUNUT I DANDER	DANDER	369,72		369,72	149.460.000,00	113.859.752,00	32.180.000,00	3.390.064,00	149.429.816,00	30.553,72
133	133. SDN NGUNUT II DANDER	DANDER	500,00		500,00	64.859.580,00	47.507.708,00	16.000.000,00	1.351.872,00	64.859.580,00	500,00
134	134. SDN SENDANGREJO I DANDER	DANDER	121.280,45		121.280,45	116.559.820,00	73.319.200,00	40.900.600,00	2.340.000,00	116.559.800,00	121.300,45
135	135. SDN SENDANGREJO II DANDER	DANDER	5.389,39		5.389,39	101.520.000,00	85.641.900,00	7.770.000,00	8.108.100,00	101.520.000,00	5.389,39
136	136. SDN SUMBERAGUNG I DANDER	DANDER	664.176,11		664.176,11	87.265.500,00	80.603.135,00	5.000.000,00	1.662.365,00	87.265.500,00	664.176,11
137	137. SDN SUMBERAGUNG II DANDER	DANDER	344.846,67		344.846,67	56.055.154,00	47.039.485,00	8.700.000,00	630.482,00	56.369.967,00	30.033,67
138	138. SDN SUMBERAGUNG III DANDER	DANDER	10.000,48		10.000,48	122.190.097,00	103.033.491,00	9.600.000,00	9.556.606,00	122.190.097,00	10.000,48
139	139. SDN SUMBERARUM I DANDER	DANDER	5.092,37		5.092,37	233.995.000,00	170.931.200,00	54.850.000,00	8.218.800,00	234.000.000,00	92,37
140	140. SDN SUMBERARUM II DANDER	DANDER	266.296,80		266.296,80	172.664.938,00	123.496.900,00	42.000.000,00	7.403.100,00	172.900.000,00	31.234,80
141	141. SDN SUMBERARUM IV DANDER	DANDER	75.937,90		75.937,90	63.784.160,00	57.009.840,00	6.000.000,00	850.000,00	63.859.840,00	257,90
142	142. SDN SUMBERTLASEH I DANDER	DANDER	1.079.359,06		1.079.359,06	105.201.000,00	81.665.600,00	19.980.000,00	3.555.400,00	105.201.000,00	1.079.359,06
143	143. SDN SUMBERTLASEH II DANDER	DANDER	10.864,77		10.864,77	71.440.000,00	58.949.500,00	9.750.000,00	2.740.500,00	71.440.000,00	10.864,77
144	144. SDN SUMODIKARAN I DANDER	DANDER	80,38		80,38	167.320.000,00	118.032.700,00	35.100.000,00	14.187.300,00	167.320.000,00	80,38
145	145. SDN SUMODIKARAN II DANDER	DANDER	165.640,00		165.640,00	101.354.490,00	82.974.300,00	16.000.000,00	2.545.700,00	101.520.000,00	130,00
146	146. SDN BEGADON GAYAM	GAYAM	438,21		438,21	90.240.000,00	59.425.120,00	21.000.000,00	9.813.900,00	90.239.020,00	1.418,21
147	147. SDN BEGED GAYAM	GAYAM	9.953,71		9.953,71	99.640.000,00	68.498.000,00	16.750.000,00	14.392.000,00	99.640.000,00	9.953,71
148	148. SDN BONOREJO GAYAM	GAYAM	284.406,99		284.406,99	89.100.000,00	72.083.850,00	8.500.000,00	8.716.150,00	89.300.000,00	84.406,99
149	149. SDN BRABOWAN GAYAM	GAYAM	839.800,94		839.800,94	142.880.000,00	98.457.500,00	26.400.000,00	17.982.500,00	142.840.000,00	879.800,94
150	150. SDN CENGUNGKLUNG GAYAM	GAYAM	118.134,33		118.134,33	121.260.000,00	79.229.700,00	25.699.600,00	16.330.700,00	121.260.000,00	118.134,33
151	151. SDN GAYAM I	GAYAM	1.093.300,00		1.093.300,00	141.786.700,00	90.289.050,00	35.150.000,00	17.220.950,00	142.660.000,00	220.000,00
152	152. SDN GAYAM II	GAYAM	101.988,77		101.988,77	141.940.000,00	90.675.050,00	35.500.000,00	15.444.950,00	141.620.000,00	421.988,77
153	153. SDN GAYAM III	GAYAM	626.104,12		626.104,12	86.830.000,00	72.353.000,00	9.000.000,00	6.067.000,00	87.420.000,00	36.104,12
154	154. SDN KATUR I GAYAM	GAYAM	647.430,24		647.430,24	69.853.000,00	60.069.650,00	5.300.000,00	5.130.350,00	70.500.000,00	430,24

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
155	155. SDN KATUR II GAYAM	GAYAM	2.614,21		2.614,21	47.940.000,00	36.822.600,00	10.000.000,00	1.117.400,00	47.940.000,00	2.614,21
156	156. SDN MANUKAN GAYAM	GAYAM	328.000,60		328.000,60	163.560.000,00	125.847.100,00	23.000.000,00	14.712.900,00	163.560.000,00	328.000,60
157	157. SDN MOJODELIK I GAYAM	GAYAM	137.452,34		137.452,34	126.900.000,00	95.887.450,00	20.200.000,00	10.812.550,00	126.900.000,00	137.452,34
158	158. SDN MOJODELIK II GAYAM	GAYAM	2.400.052,70		2.400.052,70	104.760.000,00	75.536.850,00	20.900.000,00	10.723.150,00	107.160.000,00	52,70
159	159. SDN NGRAHO I GAYAM	GAYAM	248,58		248,58	164.125.000,00	137.190.300,00	17.000.000,00	9.934.700,00	164.125.000,00	248,58
160	160. SDN SUDU I GAYAM	GAYAM	120.073,98		120.073,98	197.500.000,00	109.639.100,00	76.905.000,00	10.955.900,00	197.500.000,00	120.073,98
161	161. SDN SUDU II GAYAM	GAYAM	0,97		0,97	62.040.000,00	42.306.600,00	15.000.000,00	4.733.400,00	62.040.000,00	0,97
162	162. SDN GONDANG I GONDANG	GONDANG	0,92		0,92	139.060.000,00	111.160.000,00	24.900.000,00	3.000.000,00	139.060.000,00	0,92
163	163. SDN GONDANG II GONDANG	GONDANG	2.528,92		2.528,92	90.237.500,00	69.140.000,00	16.500.000,00	4.600.000,00	90.240.000,00	28,92
164	164. SDN JARI I GONDANG	GONDANG	21,54		21,54	81.780.000,00	74.870.000,00	5.500.000,00	1.410.000,00	81.780.000,00	21,54
165	165. SDN JARI II GONDANG	GONDANG	2.049,26		2.049,26	86.478.000,00	73.130.000,00	6.600.000,00	6.750.000,00	86.480.000,00	49,26
166	166. SDN KRONDONAN I GONDANG	GONDANG	2.800,00		2.800,00	62.039.000,00	61.040.000,00	-	800.000,00	61.840.000,00	201.800,00
167	167. SDN KRONDONAN II GONDANG	GONDANG	2.552,46		2.552,46	82.717.500,00	66.820.000,00	9.900.000,00	6.000.000,00	82.720.000,00	52,46
168	168. SDN KRONDONAN III GONDANG	GONDANG	0,34		0,34	39.480.000,00	38.050.000,00	-	1.430.000,00	39.480.000,00	0,34
169	169. SDN KRONDONAN IV GONDANG	GONDANG	78,41		78,41	38.480.000,00	37.794.600,00	-	685.400,00	38.480.000,00	78,41
170	170. SDN PAJENG I GONDANG	GONDANG	3.290,01		3.290,01	126.896.800,00	97.275.000,00	22.800.000,00	6.550.000,00	126.625.000,00	275.090,01
171	171. SDN PAJENG II GONDANG	GONDANG	0,17		0,17	60.160.000,00	46.503.600,00	11.600.000,00	2.056.400,00	60.160.000,00	0,17
172	172. SDN PAJENG III GONDANG	GONDANG	25,98		25,98	36.660.000,00	35.100.000,00	-	1.560.000,00	36.660.000,00	25,98
173	173. SDN PRAGELAN I GONDANG	GONDANG	88,65		88,65	33.840.000,00	25.270.000,00	3.500.000,00	5.070.000,00	33.840.000,00	88,65
174	174. SDN PRAGELAN II GONDANG	GONDANG	21.035,35		21.035,35	79.885.928,00	56.347.500,00	19.692.000,00	3.852.300,00	79.891.800,00	15.163,35
175	175. SDN PRAGELAN III GONDANG	GONDANG	61,49		61,49	24.440.000,00	20.778.000,00	3.000.000,00	562.000,00	24.340.000,00	100.061,49
176	176. SDN SAMBONGREJO I GONDANG	GONDANG	171,89		171,89	115.620.000,00	93.970.000,00	15.400.000,00	6.250.000,00	115.620.000,00	171,89
177	177. SDN SAMBONGREJO II GONDANG	GONDANG	26,17		26,17	177.660.000,00	143.930.000,00	25.800.000,00	7.930.000,00	177.660.000,00	26,17
178	178. SDN SAMBONGREJO III GONDANG	GONDANG	560.072,77		560.072,77	57.720.000,00	49.228.600,00	6.791.600,00	1.984.800,00	58.005.000,00	275.072,77
179	179. SDN SENGANTEN II GONDANG	GONDANG	20,30		20,30	195.520.000,00	152.755.000,00	38.765.000,00	4.000.000,00	195.520.000,00	20,30
180	180. SDN GONDANG III GONDANG	GONDANG	6.606,66		6.606,66	48.880.000,00	35.124.900,00	10.767.000,00	2.988.100,00	48.880.000,00	6.606,66
181	181. SDN BRENGGOLO KALITIDU	KALITIDU	10.810,07		10.810,07	50.758.345,00	37.872.845,00	9.700.000,00	3.185.500,00	50.758.345,00	10.810,07
182	182. SDN GREBEGAN KALITIDU	KALITIDU	49.360,02		49.360,02	121.239.960,00	87.109.400,00	28.199.500,00	5.931.000,00	121.239.900,00	49.420,02
183	183. SDN KALITIDU I KALITIDU	KALITIDU	1.255,98		1.255,98	265.080.000,00	176.883.900,00	73.000.000,00	15.196.100,00	265.080.000,00	1.255,98
184	184. SDN KALITIDU II KALITIDU	KALITIDU	17.256,24		17.256,24	121.200.000,00	118.200.000,00	-	3.000.000,00	121.200.000,00	17.256,24
185	185. SDN LERAN I KALITIDU	KALITIDU	6.703,94		6.703,94	62.979.600,00	56.729.500,00	3.200.000,00	3.050.500,00	62.980.000,00	6.303,94

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
186	186. SDN LERAN II KALITIDU	KALITIDU	20.450,16		20.450,16	63.920.000,00	52.929.100,00	7.300.000,00	3.690.900,00	63.920.000,00	20.450,16
187	187. SDN LERAN IV KALITIDU	KALITIDU	57.878,82		57.878,82	58.258.750,00	54.383.000,00	-	3.816.200,00	58.199.200,00	117.428,82
188	188. SDN MAYANGREJO I KALITIDU	KALITIDU	5.910,79		5.910,79	42.300.000,00	21.148.800,00	-	-	21.148.800,00	21.157.110,79
189	189. SDN MAYANGREJO II KALITIDU	KALITIDU	18.275,78		18.275,78	65.800.000,00	54.300.000,00	9.500.000,00	2.000.000,00	65.800.000,00	18.275,78
190	190. SDN MLATEN I KALITIDU	KALITIDU	32.925,63		32.925,63	60.153.500,00	52.438.200,00	3.636.400,00	4.078.900,00	60.153.500,00	32.925,63
191	191. SDN MLATEN II KALITIDU	KALITIDU	48.687,06		48.687,06	57.340.000,00	42.518.600,00	11.800.000,00	3.021.400,00	57.340.000,00	48.687,06
192	192. SDN MOJO KALITIDU	KALITIDU	43.446,06		43.446,06	82.720.000,00	62.909.400,00	14.500.000,00	5.310.600,00	82.720.000,00	43.446,06
193	193. SDN MOJOSARI KALITIDU	KALITIDU	0,42		0,42	75.200.000,00	60.452.500,00	11.000.000,00	3.747.500,00	75.200.000,00	0,42
194	194. SDN NGRINGINREJO II KALITIDU	KALITIDU	8.997,49		8.997,49	62.031.600,00	46.931.600,00	12.100.000,00	3.000.000,00	62.031.600,00	8.997,49
195	195. SDN NGUJO I KALITIDU	KALITIDU	36.262,59		36.262,59	96.820.000,00	87.775.000,00	5.545.000,00	3.500.000,00	96.820.000,00	36.262,59
196	196. SDN PANJUNAN II KALITIDU	KALITIDU	2.751.846,10		2.751.846,10	223.370.000,00	158.121.500,00	54.200.000,00	11.048.500,00	223.370.000,00	2.751.846,10
197	197. SDN PILANGSARI I KALITIDU	KALITIDU	10.586,84		10.586,84	77.080.000,00	55.080.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	77.080.000,00	10.586,84
198	198. SDN PILANGSARI II KALITIDU	KALITIDU	13.940,23		13.940,23	63.920.000,00	48.920.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	63.920.000,00	13.940,23
199	199. SDN PUNGPUNGAN I KALITIDU	KALITIDU	161.735,70	0,03	161.735,73	56.399.100,00	40.400.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	56.400.000,00	160.835,73
200	200. SDN PUNGPUNGAN II KALITIDU	KALITIDU	37.353,77		37.353,77	189.980.000,00	127.720.000,00	53.000.000,00	9.260.000,00	189.980.000,00	37.353,77
201	201. SDN SUKOHARJO KALITIDU	KALITIDU	15.170,64		15.170,64	56.400.000,00	43.600.000,00	11.500.000,00	1.300.000,00	56.400.000,00	15.170,64
202	202. SDN SUMENGKO I KALITIDU	KALITIDU	12.002,55		12.002,55	94.000.000,00	80.004.400,00	9.600.000,00	4.395.600,00	94.000.000,00	12.002,55
203	203. SDN SUMENGKO II KALITIDU	KALITIDU	85.267,28		85.267,28	93.933.900,00	83.933.900,00	7.000.000,00	3.000.000,00	93.933.900,00	85.267,28
204	204. SDN TALOK KALITIDU	KALITIDU	20.197,56		20.197,56	95.880.000,00	86.626.000,00	3.000.000,00	6.254.000,00	95.880.000,00	20.197,56
205	205. SDN WOTANNGARE I KALITIDU	KALITIDU	23.037,20		23.037,20	62.980.000,00	53.630.000,00	5.850.000,00	3.500.000,00	62.980.000,00	23.037,20
206	206. SDN WOTANNGARE II KALITIDU	KALITIDU	24.203,05		24.203,05	122.200.000,00	92.200.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	122.200.000,00	24.203,05
207	207. SDN BAKUNG KANOR	KANOR	5.606,49		5.606,49	89.300.000,00	68.370.600,00	12.950.000,00	7.979.400,00	89.300.000,00	5.606,49
208	208. SDN BUNGUR I KANOR	KANOR	0,92		0,92	66.740.000,00	39.224.000,00	18.000.000,00	9.516.000,00	66.740.000,00	0,92
209	209. SDN BUNGUR II KANOR	KANOR	5.523,55		5.523,55	97.760.000,00	53.148.000,00	32.520.000,00	12.092.000,00	97.760.000,00	5.523,55
210	210. SDN CANGAKAN KANOR	KANOR	23.643,25		23.643,25	45.060.000,00	40.737.200,00	3.330.000,00	992.800,00	45.060.000,00	23.643,25
211	211. SDN CARUBAN KANOR	KANOR	35.188,62		35.188,62	80.840.000,00	59.750.000,00	11.550.000,00	9.540.000,00	80.840.000,00	35.188,62
212	212. SDN GEDONGARUM KANOR	KANOR	13,00		13,00	100.580.000,00	67.456.000,00	21.450.000,00	11.674.000,00	100.580.000,00	13,00
213	213. SDN KABALAN KANOR	KANOR	3.733,42		3.733,42	58.220.000,00	47.896.600,00	8.325.000,00	1.998.400,00	58.220.000,00	3.733,42
214	214. SDN KANOR I KANOR	KANOR	269.437,61		269.437,61	87.420.000,00	60.184.600,00	14.927.500,00	12.307.900,00	87.420.000,00	269.437,61
215	215. SDN KANOR II KANOR	KANOR	111.723,34		111.723,34	62.980.000,00	32.935.400,00	24.740.000,00	5.304.600,00	62.980.000,00	111.723,34
216	216. SDN KEDUNGPRIMPEN KANOR	KANOR	46.661,18		46.661,18	78.960.000,00	71.799.600,00	2.223.000,00	4.937.400,00	78.960.000,00	46.661,18

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
217	217. SDN NGLARANGAN I KANOR	KANOR	65.536,94		65.536,94	58.220.000,00	17.860.000,00	-	-	17.860.000,00	40.425.536,94
218	218. SDN NGLARANGAN II KANOR	KANOR	11.304,75		11.304,75	74.260.000,00	59.003.100,00	7.200.000,00	8.056.900,00	74.260.000,00	11.304,75
219	219. SDN PALEMBON KANOR	KANOR	40,79		40,79	64.860.000,00	39.484.500,00	19.044.000,00	6.331.500,00	64.860.000,00	40,79
220	220. SDN PESEN KANOR	KANOR	286.308,48		286.308,48	45.120.000,00	25.946.000,00	15.104.000,00	4.070.000,00	45.120.000,00	286.308,48
221	221. SDN PILANG KANOR	KANOR	3.411,55		3.411,55	65.800.000,00	38.059.300,00	21.650.000,00	6.090.700,00	65.800.000,00	3.411,55
222	222. SDN PIYAK KANOR	KANOR	8,84		8,84	10.340.000,00	10.340.000,00	-	-	10.340.000,00	8,84
223	223. SDN PRIGI I KANOR	KANOR	53.537,28		53.537,28	101.520.000,00	60.099.000,00	24.962.000,00	16.459.000,00	101.520.000,00	53.537,28
224	224. SDN PRIGI II KANOR	KANOR	128.505,60		128.505,60	95.820.000,00	61.371.900,00	21.970.000,00	12.478.100,00	95.820.000,00	128.505,60
225	225. SDN SAMBERAN KANOR	KANOR	234.276,33		234.276,33	72.380.000,00	50.413.800,00	16.975.000,00	4.991.200,00	72.380.000,00	234.276,33
226	226. SDN SEDENG I KANOR	KANOR	15.877,42		15.877,42	74.260.000,00	54.291.400,00	9.200.000,00	10.768.600,00	74.260.000,00	15.877,42
227	227. SDN SEDENG II KANOR	KANOR	193,88		193,88	53.580.000,00	31.312.300,00	17.081.000,00	5.186.700,00	53.580.000,00	193,88
228	228. SDN SEMAMBUNG I KANOR	KANOR	359,98		359,98	85.540.000,00	50.952.000,00	23.370.000,00	11.218.000,00	85.540.000,00	359,98
229	229. SDN SIMBATAN KANOR	KANOR	63.764,99		63.764,99	59.220.000,00	42.303.200,00	12.700.000,00	4.216.800,00	59.220.000,00	63.764,99
230	230. SDN SIMOREJO KANOR	KANOR	10.427,90		10.427,90	122.200.000,00	78.029.700,00	29.820.000,00	14.350.300,00	122.200.000,00	10.427,90
231	231. SDN SROYO KANOR	KANOR	248,19		248,19	172.020.000,00	92.857.400,00	55.789.500,00	23.373.100,00	172.020.000,00	248,19
232	232. SDN SUMBERWANGI I KANOR	KANOR	232.770,20		232.770,20	47.000.000,00	35.990.800,00	8.047.500,00	2.961.700,00	47.000.000,00	232.770,20
233	233. SDN SUMBERWANGI II KANOR	KANOR	14.130,95		14.130,95	44.180.000,00	12.890.000,00	9.200.000,00	-	22.090.000,00	22.104.130,95
234	234. SDN TAMBAHREJO I KANOR	KANOR	35.446,31		35.446,31	109.980.000,00	60.855.400,00	37.751.500,00	11.373.100,00	109.980.000,00	35.446,31
235	235. SDN TAMBAHREJO II KANOR	KANOR	3.957,93		3.957,93	51.700.000,00	44.851.500,00	-	6.848.500,00	51.700.000,00	3.957,93
236	236. SDN TEJO KANOR	KANOR	113.001,53		113.001,53	59.220.000,00	42.655.900,00	7.500.000,00	9.064.100,00	59.220.000,00	113.001,53
237	237. SDN TEMU I KANOR	KANOR	732,89		732,89	47.940.000,00	36.044.400,00	7.548.000,00	4.347.600,00	47.940.000,00	732,89
238	238. SDN TEMU II KANOR	KANOR	171,33		171,33	69.560.000,00	45.970.000,00	13.500.000,00	10.090.000,00	69.560.000,00	171,33
239	239. SDN BAKALAN I KAPAS	KAPAS	6.895,84		6.895,84	77.073.170,00	66.392.270,00	8.000.000,00	2.686.900,00	77.079.170,00	895,84
240	240. SDN BAKALAN II KAPAS	KAPAS	4.736,62		4.736,62	72.380.000,00	56.777.300,00	11.600.000,00	3.729.700,00	72.107.000,00	277.736,62
241	241. SDN BANGILAN KAPAS	KAPAS	55.236,18		55.236,18	61.985.975,00	47.078.275,00	12.066.000,00	2.834.000,00	61.978.275,00	62.936,18
242	242. SDN BENDO KAPAS	KAPAS	151.487,30		151.487,30	107.008.664,00	79.507.800,00	20.750.000,00	6.737.200,00	106.995.000,00	165.151,30
243	243. SDN BOGO KAPAS	KAPAS	664,94		664,94	154.160.000,00	124.759.600,00	21.900.000,00	7.500.400,00	154.160.000,00	664,94
244	244. SDN KALIANYAR KAPAS	KAPAS	167.904,78		167.904,78	80.672.096,00	61.976.526,00	13.500.000,00	5.363.474,00	80.840.000,00	0,78
245	245. SDN KAPAS I KAPAS	KAPAS	1.358.839,74		1.358.839,74	182.041.462,00	160.047.500,00	16.082.000,00	7.270.500,00	183.400.000,00	301,74
246	246. SDN KAPAS II KAPAS	KAPAS	274.366,79		274.366,79	76.806.080,00	67.096.400,00	4.200.000,00	5.768.600,00	77.065.000,00	15.446,79
247	247. SDN KEDATON II KAPAS	KAPAS	3.533,05		3.533,05	125.900.000,00	90.274.000,00	30.600.000,00	5.026.000,00	125.900.000,00	3.533,05

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
248	248. SDN KUMPULREJO KAPAS	KAPAS	4.703,76		4.703,76	55.460.000,00	46.780.000,00	7.000.000,00	1.680.000,00	55.460.000,00	4.703,76
249	249. SDN MODEL TERPADU BOJONEGORO	KAPAS	141.448,66		141.448,66	248.963.717,00	201.679.500,00	32.924.000,00	14.488.500,00	249.092.000,00	13.165,66
250	250. SDN MOJODESO II KAPAS	KAPAS	6.467,94		6.467,94	129.720.000,00	111.798.600,00	6.800.000,00	11.121.400,00	129.720.000,00	6.467,94
251	251. SDN NGAMPEL KAPAS	KAPAS	3.827,89		3.827,89	104.340.000,00	74.571.500,00	23.700.000,00	6.068.500,00	104.340.000,00	3.827,89
252	252. SDN PADANGMENTOYO KAPAS	KAPAS	5.348,89		5.348,89	66.737.084,00	50.290.700,00	14.257.300,00	2.152.700,00	66.700.700,00	41.732,89
253	253. SDN PLESUNGAN KAPAS	KAPAS	114.706,27		114.706,27	75.092.870,00	59.360.560,00	13.469.000,00	2.368.100,00	75.197.660,00	9.916,27
254	254. SDN SAMBIROTO I KAPAS	KAPAS	0,76		0,76	78.960.000,00	67.486.500,00	7.345.000,00	4.128.500,00	78.960.000,00	0,76
255	255. SDN SAMBIROTO II KAPAS	KAPAS	202.564,60		202.564,60	61.041.093,00	13.865.830,00	16.600.000,00	-	30.465.830,00	30.777.827,60
256	256. SDN SEMBUNG KAPAS	KAPAS	1.191,48		1.191,48	61.098.950,00	41.877.600,00	13.500.000,00	5.682.400,00	61.060.000,00	40.141,48
257	257. SDN SEMENPINGGIR KAPAS	KAPAS	291.710,23		291.710,23	149.268.290,00	142.570.240,00	3.800.000,00	2.894.200,00	149.264.440,00	295.560,23
258	258. SDN SUKOWATI KAPAS	KAPAS	805.950,00		805.950,00	143.014.050,00	115.950.550,00	14.071.400,00	13.710.400,00	143.732.350,00	87.650,00
259	259. SDN TANJUNGHARJO I KAPAS	KAPAS	230.420,12		230.420,12	128.725.500,00	96.408.400,00	25.600.000,00	6.771.600,00	128.780.000,00	175.920,12
260	260. SDN TANJUNGHARJO IV KAPAS	KAPAS	392.650,54		392.650,54	92.120.000,00	78.457.725,00	7.986.450,00	5.583.825,00	92.028.000,00	484.650,54
261	261. SDN TAPELAN KAPAS	KAPAS	138.000,84		138.000,84	80.731.850,00	55.856.650,00	20.600.000,00	4.131.500,00	80.588.150,00	281.700,84
262	262. SDN TIKUSAN KAPAS	KAPAS	160.999,28		160.999,28	73.160.646,00	58.267.100,00	8.629.000,00	6.423.900,00	73.320.000,00	1.645,28
263	263. SDN WEDI KAPAS	KAPAS	213.040,63		213.040,63	195.310.348,00	156.915.700,00	27.456.000,00	10.774.500,00	195.146.200,00	377.188,63
264	264. SDN BATOKAN I KASIMAN	KASIMAN	1.893,68		1.893,68	119.379.270,00	95.697.560,00	16.500.000,00	6.814.600,00	119.012.160,00	369.003,68
265	265. SDN BATOKAN V KASIMAN	KASIMAN	572.276,00		572.276,00	100.891.113,00	70.690.140,00	21.950.000,00	8.755.600,00	101.395.740,00	67.649,00
266	266. SDN BESAH I KASIMAN	KASIMAN	68.704,37		68.704,37	89.172.460,00	78.845.900,00	6.800.000,00	3.586.600,00	89.232.500,00	8.664,37
267	267. SDN BESAH II KASIMAN	KASIMAN	35.435,11		35.435,11	78.019.860,00	56.770.000,00	11.250.000,00	10.000.000,00	78.020.000,00	35.295,11
268	268. SDN BETET KASIMAN	KASIMAN	2.291,96		2.291,96	138.180.000,00	101.497.900,00	30.100.000,00	6.582.100,00	138.180.000,00	2.291,96
269	269. SDN KASIMAN I KASIMAN	KASIMAN	354.340,17		354.340,17	115.364.400,00	71.903.000,00	36.000.000,00	7.717.000,00	115.620.000,00	98.740,17
270	270. SDN KASIMAN II KASIMAN	KASIMAN	301.523,00		301.523,00	59.915.790,00	48.410.000,00	6.750.000,00	4.750.000,00	59.910.000,00	307.313,00
271	271. SDN KASIMAN III KASIMAN	KASIMAN	310.326,20		310.326,20	102.090.000,00	80.879.700,00	15.380.000,00	6.140.300,00	102.400.000,00	326,20
272	272. SDN NGAGLIK I KASIMAN	KASIMAN	425.760,47		425.760,47	190.395.450,00	132.721.600,00	45.556.000,00	11.528.000,00	189.805.600,00	1.015.610,47
273	273. SDN SAMBENG I KASIMAN	KASIMAN	1.049.430,58		1.049.430,58	305.490.570,00	187.545.900,00	107.400.000,00	11.594.100,00	306.540.000,00	0,58
274	274. SDN SEKARAN I KASIMAN	KASIMAN	61.589,00		61.589,00	70.378.411,00	56.544.600,00	10.613.200,00	3.278.000,00	70.435.800,00	4.200,00
275	275. SDN SEKARAN II KASIMAN	KASIMAN	63.595,00		63.595,00	115.556.498,00	93.237.320,00	14.500.000,00	7.340.000,00	115.077.320,00	542.773,00
276	276. SDN SEKARAN III KASIMAN	KASIMAN	21.429,53		21.429,53	90.235.480,00	70.661.180,00	12.790.000,00	6.784.300,00	90.235.480,00	21.429,53
277	277. SDN SIDOMUKTI I KASIMAN	KASIMAN	45.646,64		45.646,64	55.416.880,00	39.697.100,00	12.500.000,00	3.248.600,00	55.445.700,00	16.826,64
278	278. SDN SIDOMUKTI II KASIMAN	KASIMAN	15.110,04		15.110,04	60.095.500,00	52.116.400,00	5.800.000,00	2.183.600,00	60.100.000,00	10.610,04

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
279	279. SDN TAMBAKMERAK II KASIMAN	KASIMAN	14.141,29		14.141,29	58.278.987,00	40.420.310,00	13.800.000,00	4.053.900,00	58.274.210,00	18.918,29
280	280. SDN TAMBAKMERAK III KASIMAN	KASIMAN	11.050,28		11.050,28	109.968.950,00	72.056.900,00	31.000.000,00	6.923.100,00	109.980.000,00	0,28
281	281. SDN TEMBELING I KASIMAN	KASIMAN	37.147,20		37.147,20	159.707.700,00	123.220.000,00	30.300.000,00	6.219.900,00	159.739.900,00	4.947,20
282	282. SDN BEJI II KEDEWAN	KEDEWAN	36.152,55		36.152,55	109.040.000,00	82.923.000,00	23.000.000,00	3.117.000,00	109.040.000,00	36.152,55
283	283. SDN BEJI IV KEDEWAN	KEDEWAN	90.929,76		90.929,76	51.700.000,00	37.539.466,00	12.450.000,00	1.710.534,00	51.700.000,00	90.929,76
284	284. SDN HARGO MULYO I KEDEWAN	KEDEWAN	0,12		0,12	160.740.000,00	118.719.900,00	32.500.000,00	9.520.000,00	160.739.900,00	100,12
285	285. SDN HARGOMULYO II KEDEWAN	KEDEWAN	2.720,40		2.720,40	126.900.000,00	91.316.846,00	26.756.000,00	8.825.400,00	126.898.246,00	4.474,40
286	286. SDN HARGOMULYO IV KEDEWAN	KEDEWAN	0,51		0,51	67.680.000,00	45.305.000,00	13.575.000,00	8.800.000,00	67.680.000,00	0,51
287	287. SDN KAWENGAN KEDEWAN	KEDEWAN	0,06		0,06	52.580.000,00	52.580.000,00	-	-	52.580.000,00	0,06
288	288. SDN KEDEWAN I KEDEWAN	KEDEWAN	587.884,47		587.884,47	195.933.500,00	142.902.500,00	42.647.800,00	10.904.200,00	196.454.500,00	66.884,47
289	289. SDN KEDEWAN III KEDEWAN	KEDEWAN	7.511,21		7.511,21	94.000.000,00	71.955.700,00	16.650.000,00	5.394.000,00	93.999.700,00	7.811,21
290	290. SDN WONOCOLO I KEDEWAN	KEDEWAN	22.773,85		22.773,85	118.440.000,00	92.538.000,00	20.000.000,00	5.902.000,00	118.440.000,00	22.773,85
291	291. SDN WONOCOLO II KEDEWAN	KEDEWAN	3.198,54		3.198,54	69.560.000,00	57.564.900,00	8.214.000,00	3.781.100,00	69.560.000,00	3.198,54
292	292. SDN BEJI 03 KEDEWAN	KEDEWAN	31.565,35		31.565,35	61.100.000,00	46.841.550,00	9.209.750,00	5.005.250,00	61.056.550,00	75.015,35
293	293. SDN BABAD II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	83.660.000,00	79.514.000,00	-	4.146.000,00	83.660.000,00	-
294	294. SDN BABAD III KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	110.562,00		110.562,00	84.536.719,00	76.047.281,00	-	8.600.000,00	84.647.281,00	-
295	295. SDN BABAD IV KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,40		0,40	24.340.000,00	23.668.000,00	-	672.000,00	24.340.000,00	0,40
296	296. SDN BALONGCABE KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,28		0,28	82.720.000,00	59.820.100,00	17.199.900,00	5.700.000,00	82.720.000,00	0,28
297	297. SDN DAYUKIDUL I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	68.620.000,00	64.063.000,00	-	4.557.000,00	68.620.000,00	-
298	298. SDN DAYUKIDUL II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	628,02		628,02	38.540.000,00	36.040.000,00	-	2.500.000,00	38.540.000,00	628,02
299	299. SDN DROKILO I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	110.920.000,00	104.480.000,00	3.500.000,00	2.940.000,00	110.920.000,00	-
300	300. SDN DROKILO II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,12		0,12	63.920.000,00	56.920.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	63.920.000,00	0,12
301	301. SDN DUWEL KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,28		0,28	69.560.000,00	66.600.100,00	-	2.959.900,00	69.560.000,00	0,28
302	302. SDN GEGER KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	12.000,99		12.000,99	35.708.000,00	32.720.000,00	3.000.000,00	-	35.720.000,00	0,99
303	303. SDN JAMBEREJO I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,82		0,82	100.580.000,00	91.631.200,00	-	8.948.800,00	100.580.000,00	0,82
304	304. SDN JAMBEREJO II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,02		0,02	47.940.000,00	42.340.000,00	1.900.000,00	3.700.000,00	47.940.000,00	0,02
305	305. SDN JAMBEREJO III KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,21		0,21	99.640.000,00	89.640.000,00	6.400.000,00	3.600.000,00	99.640.000,00	0,21
306	306. SDN KEDUNGADEM 1 KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	9.910,13		9.910,13	207.740.000,00	181.140.000,00	16.500.000,00	10.100.000,00	207.740.000,00	9.910,13
307	307. SDN KEDUNGADEM III KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	600.296,49		600.296,49	95.280.000,00	62.343.000,00	27.850.000,00	5.687.000,00	95.880.000,00	296,49
308	308. SDN KEDUNGREJO I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,65		0,65	101.520.000,00	91.936.800,00	7.500.000,00	2.083.200,00	101.520.000,00	0,65
309	309. SDN KEDUNGREJO II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	23.500.000,00	21.860.000,00	-	1.640.000,00	23.500.000,00	-

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
310	310. SDN KENDUNG I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	6.070,47		6.070,47	86.420.000,00	82.776.200,00	2.118.500,00	1.525.300,00	86.420.000,00	6.070,47
311	311. SDN KENDUNG II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	791,91		791,91	126.840.000,00	119.460.000,00	700.000,00	6.680.000,00	126.840.000,00	791,91
312	312. SDN KENDUNG III KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,12		0,12	66.740.000,00	60.158.300,00	1.377.700,00	5.204.000,00	66.740.000,00	0,12
313	313. SDN KEPOHKIDUL II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	7.606,12		7.606,12	114.680.000,00	103.722.400,00	6.000.000,00	4.957.600,00	114.680.000,00	7.606,12
314	314. SDN KESONGO I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	3.213,16		3.213,16	194.680.000,00	119.090.000,00	69.757.800,00	5.832.200,00	194.680.000,00	3.213,16
315	315. SDN KESONGO II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	332,10		332,10	58.280.000,00	47.952.000,00	4.500.000,00	5.828.000,00	58.280.000,00	332,10
316	316. SDN MEGALE I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,75		0,75	40.420.000,00	20.210.000,00	-	-	20.210.000,00	20.210.000,75
317	317. SDN MEGALE II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	59.220.000,00	47.590.400,00	5.050.500,00	6.579.100,00	59.220.000,00	-
318	318. SDN MEGALE III KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	200,46		200,46	77.019.800,00	73.020.000,00	-	4.000.000,00	77.020.000,00	0,46
319	319. SDN MLIDEG KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	296,26		296,26	71.440.000,00	61.882.000,00	5.000.000,00	4.558.000,00	71.440.000,00	296,26
320	320. SDN MOJOREJO KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	113.680.000,00	96.280.000,00	12.500.000,00	4.900.000,00	113.680.000,00	-
321	321. SDN NGRANDU I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,73		0,73	80.840.000,00	61.340.000,00	15.500.000,00	4.000.000,00	80.840.000,00	0,73
322	322. SDN NGRANDU II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	753,92		753,92	39.480.000,00	29.804.230,00	7.950.000,00	1.700.000,00	39.454.230,00	26.523,92
323	323. SDN PANJANG I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	86.480.000,00	79.744.000,00	-	6.736.000,00	86.480.000,00	-
324	324. SDN PANJANG II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,31		0,31	34.720.000,00	34.720.000,00	-	-	34.720.000,00	0,31
325	325. SDN PANJANG III KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,82		0,82	100.520.000,00	71.001.500,00	16.597.000,00	12.921.500,00	100.520.000,00	0,82
326	326. SDN PEJOK I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	87.360.000,00	84.596.900,00	750.000,00	2.013.100,00	87.360.000,00	-
327	327. SDN PEJOK II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	89.300.000,00	83.700.000,00	4.400.000,00	1.200.000,00	89.300.000,00	-
328	328. SDN SIDOMULYO I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	19,76		19,76	57.340.000,00	44.840.000,00	12.500.000,00	-	57.340.000,00	19,76
329	329. SDN SIDOMULYO II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,77		0,77	78.020.000,00	64.960.000,00	12.500.000,00	560.000,00	78.020.000,00	0,77
330	330. SDN SIDOREJO I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,53		0,53	125.020.000,00	95.507.500,00	17.350.000,00	12.162.500,00	125.020.000,00	0,53
331	331. SDN SIDOREJO II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	85.540.000,00	63.268.500,00	16.742.800,00	5.528.700,00	85.540.000,00	-
332	332. SDN TLOGOAGUNG I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	0,35		0,35	119.380.000,00	103.411.508,00	13.148.000,00	2.820.492,00	119.380.000,00	0,35
333	333. SDN TONDOMULO I KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	131.600.000,00	108.485.500,00	13.059.000,00	10.055.500,00	131.600.000,00	-
334	334. SDN TONDOMULO II KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	84,36		84,36	106.220.000,00	73.919.800,00	25.000.000,00	7.300.200,00	106.220.000,00	84,36
335	335. SDN TONDOMULO III KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	38.480.000,00	37.584.000,00	896.000,00	-	38.480.000,00	-
336	336. SDN TONDOMULO IV KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	-		-	80.780.000,00	76.780.000,00	-	4.000.000,00	80.780.000,00	-
337	337. SDN TUMBRASANOM KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	216,30		216,30	72.380.000,00	67.605.966,30	-	4.774.000,00	72.379.966,30	250,00
338	338. SDN BALONGDOWO KEPOHBARU	KEPOHBARU	-		-	41.300.000,00	41.166.650,00	-	133.350,00	41.300.000,00	-
339	339. SDN BAYEMGEDE II KEPOHBARU	KEPOHBARU	988,36		988,36	142.880.000,00	120.267.000,00	16.312.400,00	6.300.600,00	142.880.000,00	988,36
340	340. SDN BETET KEPOHBARU	KEPOHBARU	7.822,24		7.822,24	77.020.000,00	70.931.400,00	-	6.088.600,00	77.020.000,00	7.822,24

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
341	341. SDN BRANGKAL I KEPOHBARU	KEPOHBARU	1.201,00		1.201,00	90.240.000,00	73.247.000,00	12.359.000,00	4.634.000,00	90.240.000,00	1.201,00
342	342. SDN BRANGKAL II KEPOHBARU	KEPOHBARU	0,52		0,52	45.120.000,00	40.667.700,00	2.500.000,00	1.952.300,00	45.120.000,00	0,52
343	343. SDN BUMIREJO KEPOHBARU	KEPOHBARU	81.153,93		81.153,93	33.840.000,00	31.792.000,00	-	2.048.000,00	33.840.000,00	81.153,93
344	344. SDN CENGKIR I KEPOHBARU	KEPOHBARU	530,29		530,29	109.040.000,00	103.040.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	109.040.000,00	530,29
345	345. SDN JIPO I KEPOHBARU	KEPOHBARU	285,55		285,55	61.100.000,00	52.000.200,00	2.500.000,00	6.599.800,00	61.100.000,00	285,55
346	346. SDN KARANGAN KEPOHBARU	KEPOHBARU	304,68		304,68	111.860.000,00	100.979.500,00	4.000.000,00	6.880.500,00	111.860.000,00	304,68
347	347. SDN KEPOH I KEPOHBARU	KEPOHBARU	20,77		20,77	64.860.000,00	57.189.200,00	5.510.800,00	2.160.000,00	64.860.000,00	20,77
348	348. SDN KEPOH II KEPOHBARU	KEPOHBARU	0,20		0,20	84.540.000,00	77.784.000,00	5.510.800,00	1.245.200,00	84.540.000,00	0,20
349	349. SDN KRANGKONG II KEPOHBARU	KEPOHBARU	371,44		371,44	120.320.000,00	96.236.500,00	9.059.000,00	15.024.500,00	120.320.000,00	371,44
350	350. SDN MOJOSARI KEPOHBARU	KEPOHBARU	566,39		566,39	77.080.000,00	68.730.000,00	4.000.000,00	4.350.000,00	77.080.000,00	566,39
351	351. SDN NGLUMBER I KEPOHBARU	KEPOHBARU	-		-	63.920.000,00	54.920.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	63.920.000,00	-
352	352. SDN NGLUMBER II KEPOHBARU	KEPOHBARU	85,09		85,09	61.100.000,00	48.514.700,00	5.000.000,00	7.585.300,00	61.100.000,00	85,09
353	353. SDN PEJOK I KEPOHBARU	KEPOHBARU	-		-	89.240.000,00	83.754.500,00	3.500.000,00	1.985.500,00	89.240.000,00	-
354	354. SDN PEJOK II KEPOHBARU	KEPOHBARU	-		-	115.560.000,00	101.561.000,00	-	13.999.000,00	115.560.000,00	-
355	355. SDN PEJOK III KEPOHBARU	KEPOHBARU	0,93		0,93	136.300.000,00	121.808.000,00	4.692.000,00	9.800.000,00	136.300.000,00	0,93
356	356. SDN POHWATES I KEPOHBARU	KEPOHBARU	355.799,04		355.799,04	54.520.000,00	42.294.200,00	9.500.000,00	2.725.800,00	54.520.000,00	355.799,04
357	357. SDN SIDOMUKTI I KEPOHBARU	KEPOHBARU	0,70		0,70	111.800.000,00	91.548.600,00	16.650.000,00	3.601.400,00	111.800.000,00	0,70
358	358. SDN SIDOMUKTI III KEPOHBARU	KEPOHBARU	888,06		888,06	77.080.000,00	58.793.000,00	14.184.000,00	4.103.000,00	77.080.000,00	888,06
359	359. SDN SIMOREJO I KEPOHBARU	KEPOHBARU	0,64		0,64	109.980.000,00	86.361.600,00	12.500.000,00	11.118.400,00	109.980.000,00	0,64
360	360. SDN SUGIHWARAS I KEPOHBARU	KEPOHBARU	-		-	203.040.000,00	159.142.400,00	19.000.000,00	24.897.600,00	203.040.000,00	-
361	361. SDN SUMBERAGUNG KEPOHBARU	KEPOHBARU	-		-	93.000.000,00	89.613.500,00	1.250.000,00	2.136.500,00	93.000.000,00	-
362	362. SDN SUMBERGEDE KEPOHBARU	KEPOHBARU	372,37		372,37	135.360.000,00	96.397.100,00	26.500.000,00	12.462.900,00	135.360.000,00	372,37
363	363. SDN SUMBEROTO KEPOHBARU	KEPOHBARU	-		-	96.820.000,00	77.103.500,00	14.000.000,00	5.716.500,00	96.820.000,00	-
364	364. SDN TLOGOREJO KEPOHBARU	KEPOHBARU	81,65		81,65	99.580.000,00	82.280.400,00	4.100.000,00	13.199.600,00	99.580.000,00	81,65
365	365. SDN TURIGEDE I KEPOHBARU	KEPOHBARU	95,39		95,39	87.420.000,00	70.874.700,00	5.600.000,00	10.945.300,00	87.420.000,00	95,39
366	366. SDN WORO KEPOHBARU	KEPOHBARU	860,15		860,15	85.480.000,00	71.780.000,00	6.000.000,00	7.700.000,00	85.480.000,00	860,15
367	367. SDN BANARAN MALO	MALO	-		-	41.360.000,00	37.089.800,00	-	4.270.200,00	41.360.000,00	-
368	368. SDN DUKOHLOR MALO	MALO	-		-	71.440.000,00	66.345.000,00	3.500.000,00	1.595.000,00	71.440.000,00	-
369	369. SDN KACANGAN I MALO	MALO	-		-	97.760.000,00	83.463.000,00	13.118.000,00	1.179.000,00	97.760.000,00	-
370	370. SDN KACANGAN II MALO	MALO	-		-	56.400.000,00	50.788.000,00	3.500.000,00	2.112.000,00	56.400.000,00	-
371	371. SDN KEDUNGREJO MALO	MALO	-		-	66.680.000,00	64.741.800,00	-	1.938.200,00	66.680.000,00	-

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
372	372. SDN KEMIRI I MALO	MALO	-		-	122.200.000,00	96.230.000,00	21.400.000,00	4.570.000,00	122.200.000,00	-
373	373. SDN KETILENG I MALO	MALO	51.000,00		51.000,00	107.109.000,00	82.610.000,00	19.500.000,00	5.050.000,00	107.160.000,00	-
374	374. SDN KLITEH MALO	MALO	-		-	65.800.000,00	51.054.000,00	14.746.000,00	-	65.800.000,00	-
375	375. SDN MALO II MALO	MALO	-		-	101.520.000,00	94.327.000,00	-	7.193.000,00	101.520.000,00	-
376	376. SDN NGUJUNG I MALO	MALO	-		-	69.560.000,00	29.766.000,00	36.493.000,00	3.301.000,00	69.560.000,00	-
377	377. SDN NGUJUNG II MALO	MALO	-		-	72.320.000,00	70.094.900,00	-	2.225.100,00	72.320.000,00	-
378	378. SDN PETAK MALO	MALO	-		-	66.740.000,00	55.354.500,00	5.000.000,00	6.385.500,00	66.740.000,00	-
379	379. SDN RENDENG MALO	MALO	-		-	45.120.000,00	43.853.500,00	-	1.266.500,00	45.120.000,00	-
380	380. SDN SEMLARAN MALO	MALO	-		-	47.940.000,00	46.577.100,00	-	1.362.900,00	47.940.000,00	-
381	381. SDN SUDAH MALO	MALO	-		-	63.860.000,00	63.151.600,00	-	708.400,00	63.860.000,00	-
382	382. SDN SUKOREJO MALO	MALO	-		-	75.200.000,00	71.327.000,00	2.850.000,00	1.023.000,00	75.200.000,00	-
383	383. SDN SUMBERJO II MALO	MALO	-		-	52.640.000,00	50.909.200,00	-	1.730.800,00	52.640.000,00	-
384	384. SDN SUMBERJO III MALO	MALO	-		-	38.540.000,00	35.540.000,00	-	3.000.000,00	38.540.000,00	-
385	385. SDN TAMBAKROMO II MALO	MALO	-		-	76.140.000,00	72.140.000,00	-	4.000.000,00	76.140.000,00	-
386	386. SDN TAMBAKROMO III MALO	MALO	-		-	61.100.000,00	57.588.000,00	-	3.512.000,00	61.100.000,00	-
387	387. SDN TANGGIR I MALO	MALO	-		-	62.980.000,00	52.776.000,00	7.400.000,00	2.804.000,00	62.980.000,00	-
388	388. SDN TINAWUN I MALO	MALO	-		-	122.140.000,00	94.125.000,00	21.602.000,00	6.413.000,00	122.140.000,00	-
389	389. SDN TREMBES MALO	MALO	-		-	63.920.000,00	58.971.600,00	1.600.000,00	3.348.400,00	63.920.000,00	-
390	390. SDN TULUNGAGUNG MALO	MALO	54.000,00		54.000,00	104.286.000,00	83.464.000,00	17.780.000,00	3.096.000,00	104.340.000,00	-
391	391. SDN GENENG I MARGOMULYO	MARGOMULYO	806,35		806,35	65.800.000,00	52.164.700,00	10.300.000,00	3.335.300,00	65.800.000,00	806,35
392	392. SDN GENENG II MARGOMULYO	MARGOMULYO	933,99		933,99	75.200.000,00	54.296.000,00	17.000.000,00	3.904.000,00	75.200.000,00	933,99
393	393. SDN KALANGAN I MARGOMULYO	MARGOMULYO	8.505,65		8.505,65	71.440.000,00	61.788.000,00	7.000.000,00	2.652.000,00	71.440.000,00	8.505,65
394	394. SDN KALANGAN II MARGOMULYO	MARGOMULYO	3.829,76		3.829,76	38.540.000,00	35.016.400,00	-	3.523.600,00	38.540.000,00	3.829,76
395	395. SDN KALANGAN III MARGOMULYO	MARGOMULYO	3.388,56		3.388,56	55.400.000,00	46.934.000,00	6.750.000,00	1.716.000,00	55.400.000,00	3.388,56
396	396. SDN MARGOMULYO I MARGOMULYO	MARGOMULYO	1.067.892,63		1.067.892,63	197.400.000,00	153.232.100,00	34.400.000,00	9.767.900,00	197.400.000,00	1.067.892,63
397	397. SDN MARGOMULYO II MARGOMULYO	MARGOMULYO	6.243,52		6.243,52	138.280.000,00	63.890.600,00	65.750.000,00	8.639.400,00	138.280.000,00	6.243,52
398	398. SDN MARGOMULYO IV MARGOMULYO	MARGOMULYO	126.292,01		126.292,01	62.040.000,00	47.690.000,00	14.350.000,00	-	62.040.000,00	126.292,01
399	399. SDN MEDURI I MARGOMULYO	MARGOMULYO	9.508,76		9.508,76	69.560.000,00	56.493.000,00	9.850.000,00	3.217.000,00	69.560.000,00	9.508,76
400	400. SDN MEDURI II MARGOMULYO	MARGOMULYO	8.655,19		8.655,19	90.240.000,00	71.257.600,00	15.228.000,00	3.754.400,00	90.240.000,00	8.655,19
401	401. SDN MEDURI III MARGOMULYO	MARGOMULYO	4.355,91		4.355,91	98.700.000,00	74.170.000,00	23.100.000,00	1.430.000,00	98.700.000,00	4.355,91
402	402. SDN MEDURI IV MARGOMULYO	MARGOMULYO	10.147,94		10.147,94	55.460.000,00	49.615.000,00	4.995.000,00	850.000,00	55.460.000,00	10.147,94

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
403	403. SDN MEDURI V MARGOMULYO	MARGOMULYO	111,92		111,92	50.760.000,00	42.885.400,00	5.300.000,00	2.574.600,00	50.760.000,00	111,92
404	404. SDN NGELO I MARGOMULYO	MARGOMULYO	276.095,10		276.095,10	28.200.000,00	26.550.900,00	-	1.649.100,00	28.200.000,00	276.095,10
405	405. SDN NGELO II MARGOMULYO	MARGOMULYO	5.092,23		5.092,23	58.220.000,00	48.654.700,00	7.750.000,00	1.815.300,00	58.220.000,00	5.092,23
406	406. SDN SUMBERJO I MARGOMULYO	MARGOMULYO	17.900,16		17.900,16	129.720.000,00	117.020.000,00	8.950.000,00	3.750.000,00	129.720.000,00	17.900,16
407	407. SDN SUMBERJO II MARGOMULYO	MARGOMULYO	8.661,79		8.661,79	86.480.000,00	68.480.000,00	18.000.000,00	-	86.480.000,00	8.661,79
408	408. SDN SUMBERJO III MARGOMULYO	MARGOMULYO	9.844,75		9.844,75	123.140.000,00	88.311.200,00	30.600.000,00	4.228.800,00	123.140.000,00	9.844,75
409	409. SDN SUMBERJO IV MARGOMULYO	MARGOMULYO	4.209,57		4.209,57	64.800.000,00	61.470.000,00	3.330.000,00	-	64.800.000,00	4.209,57
410	410. SDN BONDOL I NGAMBON	NGAMBON	260.487,39		260.487,39	75.200.000,00	70.882.000,00	1.950.000,00	2.368.000,00	75.200.000,00	260.487,39
411	411. SDN BONDOL II NGAMBON	NGAMBON	69.940,68		69.940,68	55.460.000,00	51.360.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	55.460.000,00	69.940,68
412	412. SDN KARANGMANGU I NGAMBON	NGAMBON	106.147,64		106.147,64	69.556.121,00	56.552.242,00	9.500.000,00	3.500.000,00	69.552.242,00	110.026,64
413	413. SDN KARANGMANGU II NGAMBON	NGAMBON	1.615,74		1.615,74	23.500.000,00	22.280.000,00	-	1.220.000,00	23.500.000,00	1.615,74
414	414. SDN NGAMBON I NGAMBON	NGAMBON	310,62		310,62	196.459.690,00	155.110.000,00	29.050.000,00	12.300.000,00	196.460.000,00	0,62
415	415. SDN NGLAMPIN I NGAMBON	NGAMBON	81.050,25		81.050,25	70.418.950,00	64.755.861,00	3.500.000,00	2.125.500,00	70.381.361,00	118.639,25
416	416. SDN NGLAMPIN II NGAMBON	NGAMBON	82.484,63		82.484,63	29.140.000,00	27.036.700,00	-	2.103.300,00	29.140.000,00	82.484,63
417	417. SDN NGLAMPIN III NGAMBON	NGAMBON	126.552,76		126.552,76	27.260.000,00	26.006.500,00	-	1.253.500,00	27.260.000,00	126.552,76
418	418. SDN NGLAMPIN V NGAMBON	NGAMBON	227.070,32		227.070,32	37.540.000,00	36.740.000,00	800.000,00	-	37.540.000,00	227.070,32
419	419. SDN SENGON I NGAMBON	NGAMBON	20.946,15		20.946,15	109.040.000,00	90.603.400,00	6.750.000,00	11.686.600,00	109.040.000,00	20.946,15
420	420. SDN SENGON II NGAMBON	NGAMBON	91.058,90		91.058,90	56.400.000,00	46.326.100,00	8.475.000,00	1.598.900,00	56.400.000,00	91.058,90
421	421. SDN BANDUNGREJO I NGASEM	NGASEM	22,40		22,40	120.320.000,00	97.320.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	120.320.000,00	22,40
422	422. SDN BANDUNGREJO II NGASEM	NGASEM	320,69		320,69	93.060.000,00	79.436.900,00	11.396.000,00	2.227.100,00	93.060.000,00	320,69
423	423. SDN BARENG I NGASEM	NGASEM	624.460,36		624.460,36	124.396.000,00	90.392.500,00	27.500.000,00	7.127.500,00	125.020.000,00	460,36
424	424. SDN BARENG II NGASEM	NGASEM	502.101,04		502.101,04	113.258.880,00	109.369.650,00	1.300.000,00	3.070.000,00	113.739.650,00	21.331,04
425	425. SDN BUTOH I NGASEM	NGASEM	25,50		25,50	84.600.000,00	65.600.000,00	16.500.000,00	2.500.000,00	84.600.000,00	25,50
426	426. SDN BUTOH II NGASEM	NGASEM	0,54		0,54	54.520.000,00	50.548.800,00	-	3.971.200,00	54.520.000,00	0,54
427	427. SDN DUKOHKIDUL NGASEM	NGASEM	1.422,35		1.422,35	52.640.000,00	51.040.000,00	-	1.600.000,00	52.640.000,00	1.422,35
428	428. SDN JAMPET I NGASEM	NGASEM	600,51		600,51	64.860.000,00	60.688.200,00	2.172.200,00	1.999.600,00	64.860.000,00	600,51
429	429. SDN JELU I NGASEM	NGASEM	447,15		447,15	72.380.000,00	60.780.000,00	9.100.000,00	2.500.000,00	72.380.000,00	447,15
430	430. SDN JELU II NGASEM	NGASEM	776,87		776,87	79.900.000,00	59.091.000,00	18.409.000,00	2.400.000,00	79.900.000,00	776,87
431	431. SDN KOLONG I NGASEM	NGASEM	261,49		261,49	108.100.000,00	82.245.200,00	16.450.000,00	9.154.800,00	107.850.000,00	250.261,49
432	432. SDN KOLONG II NGASEM	NGASEM	278,77		278,77	70.500.000,00	57.720.000,00	9.500.000,00	3.280.000,00	70.500.000,00	278,77
433	433. SDN MEDIYUNAN I NGASEM	NGASEM	0,92		0,92	94.000.000,00	82.800.000,00	5.450.000,00	5.750.000,00	94.000.000,00	0,92

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
434	434. SDN MEDIYUNAN II NGASEM	NGASEM	960,33		960,33	65.800.000,00	45.427.500,00	15.500.000,00	4.872.500,00	65.800.000,00	960,33
435	435. SDN NGADILUWIH NGASEM	NGASEM	60,93		60,93	69.560.000,00	58.028.200,00	9.740.000,00	1.700.000,00	69.468.200,00	91.860,93
436	436. SDN NGANTRU NGASEM	NGASEM	313.541,75		313.541,75	135.988.004,00	103.631.855,00	20.000.000,00	12.199.200,00	135.831.055,00	470.490,75
437	437. SDN NGASEM I NGASEM	NGASEM	779,15		779,15	63.920.000,00	46.192.200,00	6.000.000,00	11.727.800,00	63.920.000,00	779,15
438	438. SDN NGASEM III NGASEM	NGASEM	6.614,60		6.614,60	97.700.000,00	91.475.600,00	3.850.000,00	2.374.400,00	97.700.000,00	6.614,60
439	439. SDN SENDANGHARJO NGASEM	NGASEM	231.209,05		231.209,05	97.469.000,00	88.700.300,00	4.500.000,00	4.499.700,00	97.700.000,00	209,05
440	440. SDN SETREN I NGASEM	NGASEM	992,90		992,90	123.140.000,00	86.340.000,00	26.800.000,00	10.000.000,00	123.140.000,00	992,90
441	441. SDN SETREN II NGASEM	NGASEM	40,00		40,00	54.460.000,00	54.460.000,00	-	-	54.460.000,00	40,00
442	442. SDN SETREN IV NGASEM	NGASEM	559,55		559,55	17.860.000,00	17.860.000,00	-	-	17.860.000,00	559,55
443	443. SDN TENGGER NGASEM	NGASEM	8.980,29		8.980,29	46.991.250,00	39.905.000,00	3.750.000,00	3.336.000,00	46.991.000,00	9.230,29
444	444. SDN TRENGGULUNAN I NGASEM	NGASEM	5.172,02		5.172,02	101.515.000,00	83.140.000,00	14.800.000,00	3.580.000,00	101.520.000,00	172,02
445	445. SDN TRENGGULUNAN II NGASEM	NGASEM	100.024,02		100.024,02	98.600.000,00	81.360.500,00	11.850.000,00	5.489.500,00	98.700.000,00	24,02
446	446. SDN WADANG I NGASEM	NGASEM	43.872,16		43.872,16	67.636.200,00	61.930.000,00	4.000.000,00	1.750.000,00	67.680.000,00	72,16
447	447. SDN WADANG II NGASEM	NGASEM	84.426,87		84.426,87	75.995.730,00	72.080.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	76.080.000,00	156,87
448	448. SDN WADANG III NGASEM	NGASEM	466,15		466,15	56.400.000,00	43.800.000,00	11.000.000,00	1.600.000,00	56.400.000,00	466,15
449	449. SDN BANCER I NGRAHO	NGRAHO	49.642,00		49.642,00	108.100.000,00	101.217.000,00	3.700.000,00	3.183.000,00	108.100.000,00	49.642,00
450	450. SDN BLIMBINGGEDE I NGRAHO	NGRAHO	832,61		832,61	100.580.000,00	82.048.500,00	12.500.000,00	6.031.500,00	100.580.000,00	832,61
451	451. SDN JUMOK I NGRAHO	NGRAHO	928,00		928,00	87.420.000,00	71.565.000,00	13.000.000,00	2.855.000,00	87.420.000,00	928,00
452	452. SDN JUMOK II NGRAHO	NGRAHO	377,98		377,98	89.265.150,00	73.333.350,00	11.500.000,00	4.431.800,00	89.265.150,00	377,98
453	453. SDN JUMOK III NGRAHO	NGRAHO	78,90		78,90	63.920.000,00	46.476.800,00	15.300.000,00	2.143.200,00	63.920.000,00	78,90
454	454. SDN KALIREJO I NGRAHO	NGRAHO	2.685.200,00		2.685.200,00	164.634.875,00	142.820.000,00	24.500.000,00	-	167.320.000,00	75,00
455	455. SDN KALIREJO II NGRAHO	NGRAHO	349,18		349,18	68.620.000,00	65.300.000,00	3.320.000,00	-	68.620.000,00	349,18
456	456. SDN KLEMPUN NGRAHO	NGRAHO	25.018,83		25.018,83	110.895.000,00	100.338.500,00	4.800.000,00	5.781.500,00	110.920.000,00	18,83
457	457. SDN LUWIHAJI 2 NGRAHO	NGRAHO	50.198,82		50.198,82	126.900.000,00	97.831.600,00	16.256.000,00	12.812.400,00	126.900.000,00	50.198,82
458	458. SDN LUWIHAJI III NGRAHO	NGRAHO	64,54		64,54	27.260.000,00	25.399.600,00	-	1.860.400,00	27.260.000,00	64,54
459	459. SDN MOJOREJO I NGRAHO	NGRAHO	5.785,91		5.785,91	78.954.500,00	72.824.511,00	4.000.000,00	1.911.674,00	78.736.185,00	224.100,91
460	460. SDN NGANTI I NGRAHO	NGRAHO	0,73		0,73	66.740.000,00	62.075.000,00	3.500.000,00	1.165.000,00	66.740.000,00	0,73
461	461. SDN NGANTI II NGRAHO	NGRAHO	62.600,08		62.600,08	96.760.000,00	82.440.500,00	7.200.000,00	7.179.500,00	96.820.000,00	2.600,08
462	462. SDN NGANTI III NGRAHO	NGRAHO	46,96		46,96	98.700.000,00	90.657.300,00	2.200.000,00	5.842.700,00	98.700.000,00	46,96
463	463. SDN NGANTI IV NGRAHO	NGRAHO	77,07		77,07	73.260.000,00	63.023.600,00	6.500.000,00	3.736.400,00	73.260.000,00	77,07
464	464. SDN NGANTI V NGRAHO	NGRAHO	4.042.502,00		4.042.502,00	65.520.000,00	50.638.999,64	10.200.000,00	8.721.000,00	69.559.999,64	2.502,36

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
465	465. SDN NGRAHO	NGRAHO	394,54		394,54	108.100.000,00	84.401.250,00	13.698.750,00	10.000.000,00	108.100.000,00	394,54
466	466. SDN PANDAN II NGRAHO	NGRAHO	9.894,56		9.894,56	73.320.000,00	45.157.574,00	23.500.000,00	4.662.426,00	73.320.000,00	9.894,56
467	467. SDN PAYAMAN I NGRAHO	NGRAHO	1.654,36		1.654,36	41.360.000,00	39.704.600,00	-	1.655.400,00	41.360.000,00	1.654,36
468	468. SDN PAYAMAN II NGRAHO	NGRAHO	1.197,89		1.197,89	92.060.000,00	86.535.000,00	2.500.000,00	3.025.000,00	92.060.000,00	1.197,89
469	469. SDN SUGIHWARAS I NGRAHO	NGRAHO	9.954,02		9.954,02	82.720.000,00	61.485.000,00	18.200.000,00	3.035.000,00	82.720.000,00	9.954,02
470	470. SDN SUGIHWARAS III NGRAHO	NGRAHO	5.131,24		5.131,24	25.380.000,00	24.211.000,00	-	1.169.000,00	25.380.000,00	5.131,24
471	471. SDN SUMBERAGUNG I NGRAHO	NGRAHO	85,75		85,75	67.680.000,00	49.124.600,00	17.800.000,00	755.400,00	67.680.000,00	85,75
472	472. SDN SUMBERAGUNG II NGRAHO	NGRAHO	63,98		63,98	30.080.000,00	26.080.000,00	4.000.000,00	-	30.080.000,00	63,98
473	473. SDN SUMBERARUM I NGRAHO	NGRAHO	34.366,50		34.366,50	63.920.000,00	52.210.500,00	9.700.000,00	2.009.500,00	63.920.000,00	34.366,50
474	474. SDN SUMBERARUM II NGRAHO	NGRAHO	17.013,79		17.013,79	59.220.000,00	55.477.500,00	2.500.000,00	1.242.500,00	59.220.000,00	17.013,79
475	475. SDN SUMBERARUM III NGRAHO	NGRAHO	956,97		956,97	46.060.000,00	42.859.600,00	2.000.000,00	1.200.400,00	46.060.000,00	956,97
476	476. SDN TANGGUNGAN I NGRAHO	NGRAHO	2.658,12		2.658,12	108.980.000,00	87.717.700,00	17.000.000,00	4.262.300,00	108.980.000,00	2.658,12
477	477. SDN TANGGUNGAN II NGRAHO	NGRAHO	1.096,61		1.096,61	74.260.000,00	46.826.200,00	22.325.000,00	5.108.800,00	74.260.000,00	1.096,61
478	478. SDN TAPELAN I NGRAHO	NGRAHO	82,17		82,17	94.940.000,00	74.240.000,00	15.700.000,00	5.000.000,00	94.940.000,00	82,17
479	479. SDN TAPELAN III NGRAHO	NGRAHO	4.596,76		4.596,76	74.260.000,00	64.906.300,00	4.000.000,00	5.353.700,00	74.260.000,00	4.596,76
480	480. SDN BANJARJO I PADANGAN	PADANGAN	1.300,03		1.300,03	140.058.700,00	110.090.600,00	22.697.000,00	7.272.400,00	140.060.000,00	0,03
481	481. SDN BANJARJO III PADANGAN	PADANGAN	3.500,33		3.500,33	78.958.367,00	59.976.000,00	11.500.000,00	7.479.000,00	78.955.000,00	6.867,33
482	482. SDN CENDONO PADANGAN	PADANGAN	275.257,40		275.257,40	166.988.650,00	142.142.550,00	17.495.500,00	7.618.500,00	167.256.550,00	7.357,40
483	483. SDN DENGOK II PADANGAN	PADANGAN	0,98		0,98	158.860.000,00	137.211.700,00	13.426.100,00	8.222.200,00	158.860.000,00	0,98
484	484. SDN KEBONAGUNG PADANGAN	PADANGAN	16.012,47		16.012,47	29.140.000,00	28.065.000,00	-	1.075.000,00	29.140.000,00	16.012,47
485	485. SDN KENDUNG PADANGAN	PADANGAN	0,82		0,82	96.820.000,00	78.217.000,00	12.750.000,00	5.853.000,00	96.820.000,00	0,82
486	486. SDN KUNCEN II PADANGAN	PADANGAN	16.550,39		16.550,39	91.103.450,00	89.192.850,00	500.000,00	1.411.250,00	91.104.100,00	15.900,39
487	487. SDN NGASINAN PADANGAN	PADANGAN	220.461,08		220.461,08	126.681.320,00	99.930.680,00	20.093.800,00	6.858.100,00	126.882.580,00	19.201,08
488	488. SDN NGEPER I PADANGAN	PADANGAN	0,06		0,06	65.800.000,00	61.941.393,00	-	3.858.400,00	65.799.793,00	207,06
489	489. SDN NGEPER II PADANGAN	PADANGAN	55.766,16		55.766,16	106.220.000,00	89.922.800,00	12.185.000,00	4.112.200,00	106.220.000,00	55.766,16
490	490. SDN NGRADIN I PADANGAN	PADANGAN	1.073,79		1.073,79	68.620.000,00	51.027.850,00	9.300.000,00	8.292.150,00	68.620.000,00	1.073,79
491	491. SDN NGRADIN II PADANGAN	PADANGAN	136.667,89		136.667,89	58.280.000,00	37.532.600,00	16.229.305,00	4.518.095,00	58.280.000,00	136.667,89
492	492. SDN NGUKEN PADANGAN	PADANGAN	336.030,00		336.030,00	127.503.970,00	96.945.710,00	16.650.000,00	14.030.800,00	127.626.510,00	213.490,00
493	493. SDN PADANGAN I PADANGAN	PADANGAN	409.050,68		409.050,68	78.551.978,00	77.485.860,00	-	1.075.000,00	78.560.860,00	400.168,68
494	494. SDN PADANGAN II PADANGAN	PADANGAN	2.655.862,21		2.655.862,21	325.412.790,00	280.809.000,00	34.500.000,00	12.751.000,00	328.060.000,00	8.652,21
495	495. SDN PADANGAN III PADANGAN	PADANGAN	82.438,24		82.438,24	84.526.613,00	75.635.900,00	5.970.000,00	2.269.100,00	83.875.000,00	734.051,24

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
496	496. SDN PRANGI PADANGAN	PADANGAN	381.944,04		381.944,04	95.500.004,00	79.430.272,00	11.134.600,00	5.262.900,00	95.827.772,00	54.176,04
497	497. SDN PURWOREJO I PADANGAN	PADANGAN	784.548,18		784.548,18	68.776.780,00	45.309.960,00	19.500.000,00	3.844.600,00	68.654.560,00	906.768,18
498	498. SDN PURWOREJO II PADANGAN	PADANGAN	150.793,60		150.793,60	124.936.000,00	90.014.900,00	28.000.000,00	6.945.100,00	124.960.000,00	126.793,60
499	499. SDN SIDOREJO I PADANGAN	PADANGAN	100.617,93		100.617,93	86.382.354,00	59.493.660,00	23.313.500,00	3.606.300,00	86.413.460,00	69.511,93
500	500. SDN SIDOREJO II PADANGAN	PADANGAN	30.018,02		30.018,02	62.022.505,00	54.837.815,00	3.500.000,00	3.666.600,00	62.004.415,00	48.108,02
501	501. SDN SONOREJO I PADANGAN	PADANGAN	155.608,42		155.608,42	141.734.900,00	117.626.400,00	11.000.600,00	13.253.000,00	141.880.000,00	10.508,42
502	502. SDN TEBON PADANGAN	PADANGAN	28.120,79		28.120,79	107.160.000,00	97.036.300,00	5.200.000,00	4.863.700,00	107.100.000,00	88.120,79
503	503. SDN DONAN II PURWOSARI	PURWOSARI	13.399,84		13.399,84	92.120.000,00	65.763.000,00	24.860.000,00	1.497.000,00	92.120.000,00	13.399,84
504	504. SDN DONAN III PURWOSARI	PURWOSARI	15.575,30		15.575,30	27.260.000,00	24.068.000,00	2.000.000,00	1.192.000,00	27.260.000,00	15.575,30
505	505. SDN GAPLUK PURWOSARI	PURWOSARI	21.892,81		21.892,81	88.360.000,00	76.163.000,00	8.900.000,00	3.297.000,00	88.360.000,00	21.892,81
506	506. SDN KALIOMBO I PURWOSARI	PURWOSARI	16.878,96		16.878,96	86.420.000,00	79.662.000,00	4.450.000,00	2.308.000,00	86.420.000,00	16.878,96
507	507. SDN KALIOMBO II PURWOSARI	PURWOSARI	12.439,34		12.439,34	100.580.000,00	88.621.100,00	10.750.000,00	1.208.900,00	100.580.000,00	12.439,34
508	508. SDN KALIOMBO IV PURWOSARI	PURWOSARI	11.800,18		11.800,18	67.668.200,00	62.566.500,00	2.500.000,00	2.573.500,00	67.640.000,00	40.000,18
509	509. SDN KUNIRAN I PURWOSARI	PURWOSARI	32.040,98		32.040,98	133.480.000,00	116.467.100,00	6.100.000,00	10.912.900,00	133.480.000,00	32.040,98
510	510. SDN KUNIRAN II PURWOSARI	PURWOSARI	16.117,64		16.117,64	75.200.000,00	67.204.500,00	4.950.000,00	3.045.500,00	75.200.000,00	16.117,64
511	511. SDN NGREJENG PURWOSARI	PURWOSARI	20.212,18		20.212,18	108.100.000,00	89.925.000,00	14.500.000,00	3.675.000,00	108.100.000,00	20.212,18
512	512. SDN PELEM I PURWOSARI	PURWOSARI	31.595,22		31.595,22	100.580.000,00	71.507.500,00	25.200.000,00	3.872.500,00	100.580.000,00	31.595,22
513	513. SDN PELEM II PURWOSARI	PURWOSARI	16.741,79		16.741,79	104.340.000,00	82.717.000,00	17.650.000,00	3.973.000,00	104.340.000,00	16.741,79
514	514. SDN POJOK PURWOSARI	PURWOSARI	75.069,41		75.069,41	79.900.000,00	61.184.000,00	16.178.000,00	2.538.000,00	79.900.000,00	75.069,41
515	515. SDN PUNGGUR PURWOSARI	PURWOSARI	81.408,17		81.408,17	83.660.000,00	58.936.000,00	21.350.000,00	3.374.000,00	83.660.000,00	81.408,17
516	516. SDN PURWOSARI I PURWOSARI	PURWOSARI	123.963,97		123.963,97	352.380.000,00	184.771.000,00	135.265.000,00	32.344.000,00	352.380.000,00	123.963,97
517	517. SDN PURWOSARI III PURWOSARI	PURWOSARI	93.074,91		93.074,91	139.120.000,00	114.449.300,00	18.200.000,00	6.470.700,00	139.120.000,00	93.074,91
518	518. SDN SEDAHKIDUL PURWOSARI	PURWOSARI	124.053,97		124.053,97	58.280.000,00	45.972.000,00	10.000.000,00	2.308.000,00	58.280.000,00	124.053,97
519	519. SDN TINUMPUK PURWOSARI	PURWOSARI	22.321,50		22.321,50	105.280.000,00	82.311.500,00	19.500.000,00	3.468.500,00	105.280.000,00	22.321,50
520	520. SDN TLATAH PURWOSARI	PURWOSARI	16.964,71		16.964,71	127.840.000,00	112.950.500,00	10.920.000,00	3.969.500,00	127.840.000,00	16.964,71
521	521. SDN BARENG I SEKAR	SEKAR	0,58		0,58	143.820.000,00	120.859.800,00	5.250.000,00	17.710.200,00	143.820.000,00	0,58
522	522. SDN BARENG II SEKAR	SEKAR	6.432,41		6.432,41	146.640.000,00	115.571.000,00	21.984.000,00	9.085.000,00	146.640.000,00	6.432,41
523	523. SDN BARENG III SEKAR	SEKAR	211,22		211,22	23.500.000,00	20.955.000,00	-	2.545.000,00	23.500.000,00	211,22
524	524. SDN BOBOL I SEKAR	SEKAR	2,41		2,41	87.420.000,00	71.735.500,00	13.000.000,00	2.684.500,00	87.420.000,00	2,41
525	525. SDN BOBOL II SEKAR	SEKAR	37.832,83		37.832,83	60.160.000,00	56.254.100,00	2.735.900,00	1.170.000,00	60.160.000,00	37.832,83
526	526. SDN BOBOL III SEKAR	SEKAR	0,94		0,94	55.460.000,00	47.707.950,00	4.300.000,00	3.452.050,00	55.460.000,00	0,94

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
527	527. SDN BOBOL IV SEKAR	SEKAR	0,60		0,60	77.080.000,00	71.080.000,00	6.000.000,00	-	77.080.000,00	0,60
528	528. SDN BOBOL V SEKAR	SEKAR	7.541,26		7.541,26	100.580.000,00	88.940.000,00	9.050.000,00	2.590.000,00	100.580.000,00	7.541,26
529	529. SDN BOBOL VI SEKAR	SEKAR	518,84		518,84	46.060.000,00	39.754.000,00	3.250.000,00	3.056.000,00	46.060.000,00	518,84
530	530. SDN DELING I SEKAR	SEKAR	190,36		190,36	168.260.000,00	113.438.000,00	46.170.000,00	8.652.000,00	168.260.000,00	190,36
531	531. SDN DELING II SEKAR	SEKAR	2.467,24		2.467,24	63.920.000,00	61.961.000,00	-	1.959.000,00	63.920.000,00	2.467,24
532	532. SDN DELING IV SEKAR	SEKAR	241,04		241,04	37.600.000,00	35.150.000,00	-	2.450.000,00	37.600.000,00	241,04
533	533. SDN DELING V SEKAR	SEKAR	-		-	20.680.000,00	19.140.000,00	-	1.540.000,00	20.680.000,00	-
534	534. SDN KLINO I SEKAR	SEKAR	85,63		85,63	266.020.000,00	228.883.000,00	32.687.800,00	4.449.200,00	266.020.000,00	85,63
535	535. SDN KLINO III SEKAR	SEKAR	171,33		171,33	95.820.000,00	76.896.000,00	15.462.000,00	3.462.000,00	95.820.000,00	171,33
536	536. SDN KLINO IV SEKAR	SEKAR	4.217,13		4.217,13	23.500.000,00	21.340.000,00	-	2.160.000,00	23.500.000,00	4.217,13
537	537. SDN KLINO V SEKAR	SEKAR	830,99		830,99	22.560.000,00	19.919.000,00	-	2.641.000,00	22.560.000,00	830,99
538	538. SDN MIYONO 03 SEKAR	SEKAR	9,55		9,55	36.660.000,00	28.360.000,00	7.200.000,00	1.100.000,00	36.660.000,00	9,55
539	539. SDN MIYONO I SEKAR	SEKAR	35.359,16		35.359,16	138.180.000,00	104.680.000,00	27.000.000,00	6.500.000,00	138.180.000,00	35.359,16
540	540. SDN MIYONO II SEKAR	SEKAR	77.100,00		77.100,00	64.782.900,00	51.540.000,00	10.950.000,00	2.370.000,00	64.860.000,00	-
541	541. SDN SEKAR I SEKAR	SEKAR	0,92		0,92	74.260.000,00	62.502.000,00	9.000.000,00	2.758.000,00	74.260.000,00	0,92
542	542. SDN SEKAR II SEKAR	SEKAR	73.884,98		73.884,98	82.620.000,00	59.692.940,00	18.500.000,00	4.500.000,00	82.692.940,00	944,98
543	543. SDN SEKAR III SEKAR	SEKAR	47.000,00		47.000,00	100.580.000,00	70.435.500,00	26.723.500,00	3.421.000,00	100.580.000,00	47.000,00
544	544. SDN ALASGUNG I SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	19.381,11		19.381,11	97.700.000,00	86.876.000,00	7.600.000,00	3.224.000,00	97.700.000,00	19.381,11
545	545. SDN ALASGUNG II SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	6.634,51		6.634,51	62.980.000,00	51.735.000,00	7.800.000,00	3.445.000,00	62.980.000,00	6.634,51
546	546. SDN BALONGREJO I SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	3.467,33		3.467,33	168.260.000,00	137.114.500,00	27.600.000,00	3.545.500,00	168.260.000,00	3.467,33
547	547. SDN BALONGREJO II SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	19.402,92		19.402,92	118.440.000,00	90.844.000,00	20.000.000,00	7.596.000,00	118.440.000,00	19.402,92
548	548. SDN BARENG I SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	45.292,81		45.292,81	62.980.000,00	54.618.600,00	5.000.000,00	3.361.400,00	62.980.000,00	45.292,81
549	549. SDN BARENG II SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	43.845,73		43.845,73	134.480.020,00	128.900.000,00	3.240.000,00	2.380.000,00	134.520.000,00	3.865,73
550	550. SDN BARENG III SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	2.800,49		2.800,49	129.820.000,00	61.172.800,00	66.085.200,00	2.562.000,00	129.820.000,00	2.800,49
551	551. SDN BULU SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	28.973,65		28.973,65	98.679.500,00	82.630.000,00	10.167.700,00	5.902.300,00	98.700.000,00	8.473,65
552	552. SDN DRENGES SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	17.635,56		17.635,56	91.120.000,00	80.768.000,00	9.670.000,00	682.000,00	91.120.000,00	17.635,56
553	553. SDN GENJOR SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	65.880,18		65.880,18	123.085.588,00	105.219.400,00	12.000.000,00	5.920.600,00	123.140.000,00	11.468,18
554	554. SDN GLAGAHAN SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	98.652,11		98.652,11	53.487.450,00	46.642.600,00	3.590.000,00	3.347.400,00	53.580.000,00	6.102,11
555	555. SDN GLAGAHWANGI I SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	7.877,97		7.877,97	85.540.000,00	80.625.000,00	3.000.000,00	1.915.000,00	85.540.000,00	7.877,97
556	556. SDN GLAGAHWANGI II SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	6.808,03		6.808,03	109.980.000,00	85.346.400,00	20.000.000,00	4.633.600,00	109.980.000,00	6.808,03
557	557. SDN JATITENGAH SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	350.730,44		350.730,44	110.516.240,00	92.582.000,00	16.385.000,00	1.893.000,00	110.860.000,00	6.970,44

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
558	558. SDN KEDUNGDOWO SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	7.863,83		7.863,83	68.560.000,00	66.390.000,00	-	2.170.000,00	68.560.000,00	7.863,83
559	559. SDN NGLAJANG SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	203.265,30		203.265,30	52.444.690,00	52.043.000,00	-	597.000,00	52.640.000,00	7.955,30
560	560. SDN PANEMON SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	5.733,95		5.733,95	71.440.000,00	59.531.800,00	9.546.200,00	2.362.000,00	71.440.000,00	5.733,95
561	561. SDN PANUNGGALAN I SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	4.210,45		4.210,45	73.260.000,00	61.948.000,00	9.416.800,00	1.895.200,00	73.260.000,00	4.210,45
562	562. SDN PANUNGGALAN II SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	12.506,20		12.506,20	104.340.000,00	91.334.000,00	11.000.000,00	2.006.000,00	104.340.000,00	12.506,20
563	563. SDN SIWALAN I SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	10.067,30		10.067,30	142.820.000,00	137.111.400,00	4.500.000,00	1.208.600,00	142.820.000,00	10.067,30
564	564. SDN SIWALAN II SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	3.436,29		3.436,29	15.040.000,00	14.658.000,00	-	382.000,00	15.040.000,00	3.436,29
565	565. SDN SIWALAN III SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	44.671,01		44.671,01	48.838.706,00	42.953.700,00	3.500.000,00	2.426.300,00	48.880.000,00	3.377,01
566	566. SDN SUGIHWARAS I SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	7.074,18		7.074,18	53.580.000,00	42.130.000,00	11.450.000,00	-	53.580.000,00	7.074,18
567	567. SDN SUGIHWARAS II SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	10.857,95		10.857,95	207.740.000,00	174.826.300,00	24.600.000,00	8.313.700,00	207.740.000,00	10.857,95
568	568. SDN SUGIHWARAS III SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	29.546,73		29.546,73	124.080.000,00	102.239.200,00	16.000.000,00	5.840.800,00	124.080.000,00	29.546,73
569	569. SDN TRATE SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	5.764,67		5.764,67	78.020.000,00	70.988.000,00	4.670.000,00	2.362.000,00	78.020.000,00	5.764,67
570	570. SDN WEDORO I SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	111.674,85		111.674,85	54.414.600,00	49.506.000,00	1.750.000,00	3.264.000,00	54.520.000,00	6.274,85
571	571. SDN WEDORO II SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	7.852,45		7.852,45	109.920.000,00	107.220.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	109.920.000,00	7.852,45
572	572. SDN DUYUNGAN I SUKOSEWU	SUKOSEWU	93,30		93,30	92.120.000,00	69.332.900,00	15.654.800,00	7.132.300,00	92.120.000,00	93,30
573	573. SDN DUYUNGAN II SUKOSEWU	SUKOSEWU	8,12		8,12	62.980.000,00	55.740.000,00	5.800.000,00	1.440.000,00	62.980.000,00	8,12
574	574. SDN JUMPUT SUKOSEWU	SUKOSEWU	33,19		33,19	19.740.000,00	17.990.000,00	1.000.000,00	750.000,00	19.740.000,00	33,19
575	575. SDN KALICILIK SUKOSEWU	SUKOSEWU	48,15		48,15	135.360.000,00	89.260.000,00	43.100.000,00	3.000.000,00	135.360.000,00	48,15
576	576. SDN KLEPEK SUKOSEWU	SUKOSEWU	39,56		39,56	83.660.000,00	72.089.300,00	9.475.000,00	2.095.700,00	83.660.000,00	39,56
577	577. SDN PACING I SUKOSEWU	SUKOSEWU	22,18		22,18	146.740.000,00	128.753.000,00	15.000.000,00	2.987.000,00	146.740.000,00	22,18
578	578. SDN PACING II SUKOSEWU	SUKOSEWU	63,96		63,96	91.180.000,00	77.180.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	91.180.000,00	63,96
579	579. SDN PURWOASRI I SUKOSEWU	SUKOSEWU	37,87		37,87	69.500.000,00	53.419.500,00	12.000.000,00	4.080.500,00	69.500.000,00	37,87
580	580. SDN PURWOASRI II SUKOSEWU	SUKOSEWU	0,24		0,24	114.680.000,00	85.010.000,00	24.000.000,00	5.670.000,00	114.680.000,00	0,24
581	581. SDN SEMAWOT SUKOSEWU	SUKOSEWU	1,11		1,11	72.380.000,00	59.505.700,00	11.250.000,00	1.624.300,00	72.380.000,00	1,11
582	582. SDN SEMENKIDUL SUKOSEWU	SUKOSEWU	27,31		27,31	48.880.000,00	31.880.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	48.880.000,00	27,31
583	583. SDN SIDODADI I SUKOSEWU	SUKOSEWU	49,83		49,83	72.380.000,00	62.609.800,00	5.268.000,00	4.502.200,00	72.380.000,00	49,83
584	584. SDN SIDODADI II SUKOSEWU	SUKOSEWU	18.044,79		18.044,79	161.662.000,00	129.621.400,00	24.800.000,00	7.258.600,00	161.680.000,00	44,79
585	585. SDN SIDOREJO SUKOSEWU	SUKOSEWU	51,17		51,17	115.520.000,00	101.341.000,00	12.154.000,00	2.025.000,00	115.520.000,00	51,17
586	586. SDN SUKOSEWU	SUKOSEWU	0,56		0,56	78.960.000,00	55.010.000,00	22.700.000,00	1.250.000,00	78.960.000,00	0,56
587	587. SDN SUMBERJOKIDUL SUKOSEWU	SUKOSEWU	93,24		93,24	52.640.000,00	40.445.000,00	9.195.000,00	3.000.000,00	52.640.000,00	93,24
588	588. SDN TEGALKODO I SUKOSEWU	SUKOSEWU	93,20		93,20	85.540.000,00	66.290.000,00	16.250.000,00	3.000.000,00	85.540.000,00	93,20

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
589	589. SDN SITIAJI SUKOSEWU	SUKOSEWU	20,45		20,45	103.400.000,00	87.281.000,00	10.500.000,00	5.619.000,00	103.400.000,00	20,45
590	590. SDN BANJARJO SUMBERREJO	SUMBERREJO	230.788,54		230.788,54	50.597.000,00	44.410.800,00	-	6.349.200,00	50.760.000,00	67.788,54
591	591. SDN BOGANGIN SUMBERREJO	SUMBERREJO	46.037,62		46.037,62	75.276.300,00	63.276.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	75.276.000,00	46.337,62
592	592. SDN BUTOH SUMBERREJO	SUMBERREJO	199.455,66		199.455,66	28.072.263,00	25.474.200,00	-	2.725.800,00	28.200.000,00	71.718,66
593	593. SDN DERU SUMBERREJO	SUMBERREJO	360.100,66		360.100,66	79.840.000,00	73.491.600,00	3.000.000,00	3.348.400,00	79.840.000,00	360.100,66
594	594. SDN JATIGEDE SUMBERREJO	SUMBERREJO	19.671,39		19.671,39	76.080.000,00	69.991.400,00	1.110.000,00	4.978.600,00	76.080.000,00	19.671,39
595	595. SDN KARANGDINOYO I SUMBERREJO	SUMBERREJO	8.070,77		8.070,77	48.880.000,00	43.994.500,00	2.900.000,00	1.985.500,00	48.880.000,00	8.070,77
596	596. SDN KARANGDINOYO II SUMBERREJO	SUMBERREJO	125.347,76		125.347,76	76.989.187,00	75.922.409,00	-	1.192.000,00	77.114.409,00	125,76
597	597. SDN KARANGDOWO SUMBERREJO	SUMBERREJO	50.344,45		50.344,45	64.860.000,00	59.860.000,00	-	5.000.000,00	64.860.000,00	50.344,45
598	598. SDN KAYU LEMAH SUMBERREJO	SUMBERREJO	206.119,92		206.119,92	19.736.420,00	17.740.000,00	-	2.000.000,00	19.740.000,00	202.539,92
599	599. SDN KEDUNGREJO SUMBERREJO	SUMBERREJO	0,09		0,09	67.680.000,00	61.343.000,00	3.000.000,00	3.337.000,00	67.680.000,00	0,09
600	600. SDN MARGOAGUNG I SUMBERREJO	SUMBERREJO	109.148,01		109.148,01	59.164.000,00	49.606.100,00	3.000.000,00	6.613.900,00	59.220.000,00	53.148,01
601	601. SDN MARGOAGUNG II SUMBERREJO	SUMBERREJO	127.120,43		127.120,43	83.524.100,00	73.638.940,00	3.915.000,00	5.927.500,00	83.481.440,00	169.780,43
602	602. SDN MEJUWET I SUMBERREJO	SUMBERREJO	45.103,98		45.103,98	47.880.000,00	12.690.000,00	-	-	12.690.000,00	35.235.103,98
603	603. SDN MEJUWET II SUMBERREJO	SUMBERREJO	293.575,26		293.575,26	73.320.000,00	66.320.000,00	-	7.000.000,00	73.320.000,00	293.575,26
604	604. SDN MLINJENG SUMBERREJO	SUMBERREJO	169.676,67		169.676,67	90.076.185,00	80.477.300,00	6.000.000,00	3.762.700,00	90.240.000,00	5.861,67
605	605. SDN NGAMPAL I SUMBERREJO	SUMBERREJO	-		-	77.080.000,00	73.039.400,00	-	4.040.600,00	77.080.000,00	-
606	606. SDN NGAMPAL II SUMBERREJO	SUMBERREJO	248.472,37		248.472,37	32.900.000,00	31.020.000,00	-	1.880.000,00	32.900.000,00	248.472,37
607	607. SDN PEJAMBON I SUMBERREJO	SUMBERREJO	7.025,03		7.025,03	45.120.000,00	42.394.200,00	-	2.725.800,00	45.120.000,00	7.025,03
608	608. SDN PEKUWON I SUMBERREJO	SUMBERREJO	223.303,70		223.303,70	25.380.000,00	23.596.300,00	-	1.783.700,00	25.380.000,00	223.303,70
609	609. SDN PEKUWON II SUMBERREJO	SUMBERREJO	93.760,03		93.760,03	51.700.000,00	51.700.000,00	-	-	51.700.000,00	93.760,03
610	610. SDN PEKUWON III SUMBERREJO	SUMBERREJO	381.659,10		381.659,10	37.599.400,00	36.142.399,98	-	1.457.000,00	37.599.399,98	381.659,12
611	611. SDN PRAYUNGAN I SUMBERREJO	SUMBERREJO	2.341.229,00		2.341.229,00	45.120.000,00	38.273.699,90	-	6.846.300,00	45.119.999,90	2.341.229,10
612	612. SDN PRAYUNGAN II SUMBERREJO	SUMBERREJO	290.771,69		290.771,69	67.389.640,00	55.837.805,00	8.500.000,00	3.300.300,00	67.638.105,00	42.306,69
613	613. SDN SAMBONGREJO I SUMBERREJO	SUMBERREJO	123.111,03		123.111,03	77.020.000,00	77.020.000,00	-	-	77.020.000,00	123.111,03
614	614. SDN SAMBONGREJO II SUMBERREJO	SUMBERREJO	6.983,02		6.983,02	69.560.000,00	63.310.000,00	2.750.000,00	3.500.000,00	69.560.000,00	6.983,02
615	615. SDN SENDANGAGUNG SUMBERREJO	SUMBERREJO	23.720,58		23.720,58	31.020.000,00	25.052.400,00	500.000,00	5.467.600,00	31.020.000,00	23.720,58
616	616. SDN SUMBERHARJO I SUMBERREJO	SUMBERREJO	42.019,26		42.019,26	46.060.000,00	29.676.200,00	9.500.000,00	6.883.800,00	46.060.000,00	42.019,26
617	617. SDN SUMBERHARJO II SUMBERREJO	SUMBERREJO	84.281,98		84.281,98	117.364.072,00	106.492.400,00	5.500.000,00	5.447.600,00	117.440.000,00	8.353,98
618	618. SDN SUMBERREJO I SUMBERREJO	SUMBERREJO	3.357.137,58		3.357.137,58	376.830.000,00	299.637.630,00	29.803.500,00	50.663.600,00	380.104.730,00	82.407,58
619	619. SDN SUMBERREJO II SUMBERREJO	SUMBERREJO	131.024,38		131.024,38	25.248.976,00	23.443.500,00	-	1.936.500,00	25.380.000,00	0,38

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
620	620. SDN SUMBERREJO III SUMBERREJO	SUMBERREJO	88.620,72		88.620,72	26.231.380,00	13.067.470,00	-	-	13.067.470,00	13.252.530,72
621	621. SDN SUMURAGUNG I SUMBERREJO	SUMBERREJO	418.627,51		418.627,51	47.940.000,00	43.948.500,00	-	3.991.500,00	47.940.000,00	418.627,51
622	622. SDN SUMURAGUNG II SUMBERREJO	SUMBERREJO	964.151,74		964.151,74	57.340.000,00	52.114.200,00	2.500.000,00	2.725.800,00	57.340.000,00	964.151,74
623	623. SDN TELENG SUMBERREJO	SUMBERREJO	86.588,39		86.588,39	53.437.500,00	49.516.600,00	-	4.000.000,00	53.516.600,00	7.488,39
624	624. SDN TLOGOHAJI I SUMBERREJO	SUMBERREJO	54.458,00		54.458,00	73.320.000,00	58.535.624,88	9.500.000,00	5.279.000,00	73.314.624,88	59.833,12
625	625. SDN TLOGOHAJI II SUMBERREJO	SUMBERREJO	118.969,12		118.969,12	111.800.000,00	107.380.000,00	-	4.420.000,00	111.800.000,00	118.969,12
626	626. SDN TULUNGREJO SUMBERREJO	SUMBERREJO	0,78		0,78	125.020.000,00	90.020.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	125.020.000,00	0,78
627	627. SDN WOTAN SUMBERREJO	SUMBERREJO	95.121,21		95.121,21	110.860.000,00	98.075.700,00	2.436.300,00	10.348.000,00	110.860.000,00	95.121,21
628	628. SDN BAKALAN I TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	114.364,44		114.364,44	95.765.636,00	86.939.100,00	3.500.000,00	5.440.900,00	95.880.000,00	0,44
629	629. SDN BAKALAN II TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	7.747,57		7.747,57	48.108.000,00	41.649.200,00	2.500.000,00	3.958.800,00	48.108.000,00	7.747,57
630	630. SDN DOLOKGEDE TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	-		-	145.700.000,00	122.948.400,00	17.900.000,00	4.851.600,00	145.700.000,00	-
631	631. SDN GADING I TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	89.278,97		89.278,97	109.040.000,00	82.407.500,00	17.127.000,00	9.505.500,00	109.040.000,00	89.278,97
632	632. SDN GAMONGAN I TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	31.619,26		31.619,26	103.400.000,00	93.247.900,00	3.500.000,00	6.652.100,00	103.400.000,00	31.619,26
633	633. SDN GAMONGAN II TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,06		0,06	119.380.000,00	100.192.700,00	14.000.000,00	5.187.300,00	119.380.000,00	0,06
634	634. SDN JATIMULYO I TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,40		0,40	274.580.000,00	228.079.200,00	39.828.800,00	6.672.000,00	274.580.000,00	0,40
635	635. SDN JATIMULYO III TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	98.737,19		98.737,19	67.620.000,00	64.747.000,00	1.500.000,00	1.373.000,00	67.620.000,00	98.737,19
636	636. SDN JAWIK TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,53		0,53	91.180.000,00	72.299.900,00	14.000.000,00	4.880.100,00	91.180.000,00	0,53
637	637. SDN KALISUMBER I TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	692.508,24		692.508,24	74.260.000,00	68.412.000,00	-	5.848.000,00	74.260.000,00	692.508,24
638	638. SDN KALISUMBER II TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	737,60		737,60	100.580.000,00	65.901.600,00	28.579.000,00	6.099.400,00	100.580.000,00	737,60
639	639. SDN KALISUMBER III TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	-		-	20.680.000,00	18.028.000,00	-	2.651.600,00	20.679.600,00	400,00
640	640. SDN MALINGMATI II TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	342.413,04		342.413,04	213.380.000,00	164.247.813,04	37.278.000,00	10.737.400,00	212.263.213,04	1.459.200,00
641	641. SDN MALINGMATI III TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,29		0,29	12.220.000,00	11.710.900,00	-	509.100,00	12.220.000,00	0,29
642	642. SDN MULYOREJO II TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	-		-	179.540.000,00	155.830.200,00	15.096.000,00	8.613.800,00	179.540.000,00	-
643	643. SDN MULYOREJO III TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	723.898,55		723.898,55	30.080.000,00	28.530.900,00	-	1.549.100,00	30.080.000,00	723.898,55
644	644. SDN NAPIS 4 TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	34.821,60		34.821,60	43.240.000,00	38.176.000,00	2.500.000,00	2.564.000,00	43.240.000,00	34.821,60
645	645. SDN NAPIS I TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	-		-	84.600.000,00	64.100.000,00	17.500.000,00	3.000.000,00	84.600.000,00	-
646	646. SDN NAPIS II TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	100.995,71		100.995,71	161.680.000,00	119.673.750,00	24.200.850,00	17.805.400,00	161.680.000,00	100.995,71
647	647. SDN NAPIS III TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	165,57		165,57	62.920.000,00	60.957.900,00	-	1.962.100,00	62.920.000,00	165,57
648	648. SDN NAPIS V TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,89		0,89	73.320.000,00	62.784.700,00	6.000.000,00	4.535.300,00	73.320.000,00	0,89
649	649. SDN NAPIS VI TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,02		0,02	76.080.000,00	72.800.000,00	-	3.280.000,00	76.080.000,00	0,02
650	650. SDN NGRANCANG I TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,54		0,54	92.120.000,00	88.031.300,00	-	4.088.700,00	92.120.000,00	0,54

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
651	651. SDN NGRANCANG III TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	29.191,36		29.191,36	66.680.000,00	63.900.000,00	-	2.780.000,00	66.680.000,00	29.191,36
652	652. SDN NGRANCANG IV TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	-		-	20.680.000,00	19.570.500,00	-	1.109.500,00	20.680.000,00	-
653	653. SDN PENGKOL TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,21		0,21	50.760.000,00	47.993.300,00	-	2.766.700,00	50.760.000,00	0,21
654	654. SDN SENDANGREJO TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,17		0,17	79.900.000,00	69.501.300,00	5.100.000,00	5.298.700,00	79.900.000,00	0,17
655	655. SDN SUKOREJO I TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	752,55		752,55	209.620.000,00	184.307.600,00	8.716.000,00	16.246.900,00	209.270.500,00	350.252,55
656	656. SDN SUKOREJO II TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,40		0,40	91.180.000,00	79.299.000,00	5.500.000,00	6.381.000,00	91.180.000,00	0,40
657	657. SDN SUKOREJO III TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,22		0,22	61.100.000,00	40.569.800,00	17.628.600,00	2.901.600,00	61.100.000,00	0,22
658	658. SDN TAMBAKREJO I TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	-		-	117.500.000,00	103.845.800,00	6.900.000,00	6.754.200,00	117.500.000,00	-
659	659. SDN TAMBAKREJO II TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,67		0,67	79.900.000,00	69.790.000,00	4.500.000,00	5.610.000,00	79.900.000,00	0,67
660	660. SDN TANJUNG TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	0,22		0,22	42.300.000,00	40.400.100,00	-	1.899.900,00	42.300.000,00	0,22
661	661. SDN TURI I TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	45.705,44		45.705,44	109.040.000,00	93.540.000,00	9.500.000,00	6.000.000,00	109.040.000,00	45.705,44
662	662. SDN TURI II TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	131.755,89		131.755,89	42.300.000,00	40.938.300,00	-	1.361.700,00	42.300.000,00	131.755,89
663	663. SDN TURI III TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	134.445,14		134.445,14	36.660.000,00	35.143.500,00	-	1.516.500,00	36.660.000,00	134.445,14
664	664. SDN TURI IV TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	-		-	35.720.000,00	33.907.050,00	-	1.812.950,00	35.720.000,00	-
665	665. SDN BAKULAN I TEMAYANG	TEMAYANG	176.075,58		176.075,58	70.440.000,00	57.979.700,00	9.559.000,00	2.901.300,00	70.440.000,00	176.075,58
666	666. SDN BAKULAN II TEMAYANG	TEMAYANG	423.945,06		423.945,06	61.944.100,00	49.795.000,00	9.000.000,00	3.245.000,00	62.040.000,00	328.045,06
667	667. SDN BAKULAN III TEMAYANG	TEMAYANG	666,65		666,65	29.140.000,00	26.840.000,00	2.300.000,00	-	29.140.000,00	666,65
668	668. SDN BELUN TEMAYANG	TEMAYANG	230.819,39		230.819,39	176.820.000,00	107.306.500,00	69.513.500,00	-	176.820.000,00	230.819,39
669	669. SDN BUNTALAN I TEMAYANG	TEMAYANG	187,68		187,68	62.040.000,00	53.314.300,00	900.000,00	7.825.700,00	62.040.000,00	187,68
670	670. SDN BUNTALAN II TEMAYANG	TEMAYANG	702.908,85		702.908,85	56.637.500,00	53.290.000,00	-	4.050.000,00	57.340.000,00	408,85
671	671. SDN JONO I TEMAYANG	TEMAYANG	4.820,14		4.820,14	124.079.188,00	106.418.000,00	11.500.000,00	6.161.000,00	124.079.000,00	5.008,14
672	672. SDN JONO II TEMAYANG	TEMAYANG	226.803,84		226.803,84	109.791.770,00	94.253.450,00	14.325.000,00	1.362.900,00	109.941.350,00	77.223,84
673	673. SDN JONO III TEMAYANG	TEMAYANG	17.091,10		17.091,10	44.167.500,00	41.259.700,00	-	2.891.400,00	44.151.100,00	33.491,10
674	674. SDN KEDUNGSARI TEMAYANG	TEMAYANG	79.246,29		79.246,29	118.440.000,00	85.886.300,00	27.775.000,00	4.778.700,00	118.440.000,00	79.246,29
675	675. SDN KEDUNGSUMBER I TEMAYANG	TEMAYANG	57.551,94		57.551,94	105.280.000,00	83.280.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	105.280.000,00	57.551,94
676	676. SDN KEDUNGSUMBER II TEMAYANG	TEMAYANG	625.139,38		625.139,38	50.222.340,00	48.315.092,00	-	1.926.100,00	50.241.192,00	606.287,38
677	677. SDN KEDUNGSUMBER III TEMAYANG	TEMAYANG	160.238,71		160.238,71	24.440.000,00	24.440.000,00	-	-	24.440.000,00	160.238,71
678	678. SDN NGUJUNG TEMAYANG	TEMAYANG	7.242,35		7.242,35	55.460.000,00	53.360.500,00	-	2.099.500,00	55.460.000,00	7.242,35
679	679. SDN PANCUR I TEMAYANG	TEMAYANG	56.485,42		56.485,42	82.720.000,00	79.020.000,00	3.700.000,00	-	82.720.000,00	56.485,42
680	680. SDN PANDANTOYO TEMAYANG	TEMAYANG	942,23		942,23	60.100.000,00	54.948.100,00	-	5.151.900,00	60.100.000,00	942,23
681	681. SDN PAPRINGAN I TEMAYANG	TEMAYANG	474,82		474,82	103.400.000,00	93.040.700,00	1.700.000,00	8.659.300,00	103.400.000,00	474,82

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
682	682. SDN PAPRINGAN II TEMAYANG	TEMAYANG	2.580,05		2.580,05	32.900.000,00	32.900.000,00	-	-	32.900.000,00	2.580,05
683	683. SDN PAPRINGAN III TEMAYANG	TEMAYANG	68.788,62		68.788,62	17.860.000,00	17.075.000,00	-	785.000,00	17.860.000,00	68.788,62
684	684. SDN SOKO I TEMAYANG	TEMAYANG	11.311.015,50		11.311.015,50	102.400.000,00	103.976.300,00	6.900.000,00	2.834.700,00	113.711.000,00	15,50
685	685. SDN SOKO II TEMAYANG	TEMAYANG	80.934,90		80.934,90	45.120.000,00	45.120.000,00	-	-	45.120.000,00	80.934,90
686	686. SDN SOKO III TEMAYANG	TEMAYANG	-		-	-	-	-	-	-	-
687	687. SDN SOKO IV TEMAYANG	TEMAYANG	218.115,82		218.115,82	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	23.500.000,00	218.115,82
688	688. SDN TEMAYANG I TEMAYANG	TEMAYANG	68.718,86		68.718,86	127.840.000,00	111.636.100,00	11.372.200,00	4.831.700,00	127.840.000,00	68.718,86
689	689. SDN TEMAYANG II TEMAYANG	TEMAYANG	144.146,79		144.146,79	39.480.000,00	35.667.300,00	-	3.812.700,00	39.480.000,00	144.146,79
690	690. SDN BANJARSARI I TRUCUK	TRUCUK	53.165,28		53.165,28	312.080.000,00	226.988.700,00	67.431.700,00	17.659.600,00	312.080.000,00	53.165,28
691	691. SDN BANJARSARI III TRUCUK	TRUCUK	320,08		320,08	125.960.000,00	109.235.900,00	10.680.500,00	6.043.600,00	125.960.000,00	320,08
692	692. SDN GUYANGAN TRUCUK	TRUCUK	61,33		61,33	40.420.000,00	33.732.750,00	-	6.687.250,00	40.420.000,00	61,33
693	693. SDN KANDANGAN I TRUCUK	TRUCUK	22.843,22		22.843,22	96.820.000,00	80.288.100,00	11.700.000,00	4.831.900,00	96.820.000,00	22.843,22
694	694. SDN KANTEN I TRUCUK	TRUCUK	40,52		40,52	86.420.000,00	78.950.600,00	2.400.000,00	5.069.400,00	86.420.000,00	40,52
695	695. SDN MORI I TRUCUK	TRUCUK	680,38		680,38	129.720.000,00	106.391.100,00	17.082.400,00	6.246.500,00	129.720.000,00	680,38
696	696. SDN MORI II TRUCUK	TRUCUK	1.748,56		1.748,56	170.140.000,00	121.107.250,00	33.000.000,00	16.032.750,00	170.140.000,00	1.748,56
697	697. SDN PADANG I TRUCUK	TRUCUK	95,56		95,56	140.060.000,00	110.001.900,00	23.500.000,00	6.558.100,00	140.060.000,00	95,56
698	698. SDN PADANG II TRUCUK	TRUCUK	2.427,47		2.427,47	93.060.000,00	74.654.800,00	14.000.000,00	4.405.200,00	93.060.000,00	2.427,47
699	699. SDN PAGERWESI I TRUCUK	TRUCUK	512,63		512,63	62.040.000,00	44.890.500,00	9.454.500,00	7.695.000,00	62.040.000,00	512,63
700	700. SDN SRANAK TRUCUK	TRUCUK	4.058,77		4.058,77	62.040.000,00	57.904.000,00	-	4.136.000,00	62.040.000,00	4.058,77
701	701. SDN SUMBANGTIMUN TRUCUK	TRUCUK	20.679,08		20.679,08	70.480.000,00	62.385.475,00	4.000.000,00	4.114.525,00	70.500.000,00	679,08
702	702. SDN SUMBERJO TRUCUK	TRUCUK	1.939,33		1.939,33	187.160.000,00	153.354.000,00	31.067.000,00	2.739.000,00	187.160.000,00	1.939,33
703	703. SDN TRUCUK I TRUCUK	TRUCUK	449,33		449,33	110.920.000,00	82.778.500,00	21.876.550,00	6.264.950,00	110.920.000,00	449,33
704	704. SDN TRUCUK II TRUCUK	TRUCUK	9.762,60		9.762,60	104.340.000,00	81.030.200,00	17.500.000,00	5.809.800,00	104.340.000,00	9.762,60
705	705. SDN TULUNGREJO I TRUCUK	TRUCUK	2.823,92		2.823,92	129.720.000,00	86.032.325,00	36.600.000,00	7.087.675,00	129.720.000,00	2.823,92
JUMLAH BOS SD NEGERI			**93.899.960,98**	**0,03**	**93.899.961,01**	**65.291.208.589,00**	**52.477.352.575,74**	**8.863.875.920,00**	**3.670.617.922,00**	**65.011.846.417,74**	**373.262.132,27**
1	SMP NEGERI 1 BALEN	BALEN	308.374,70		308.374,70	806.200.000,00	697.294.400,00	45.450.000,00	63.455.600,00	806.200.000,00	308.374,70
2	SMP NEGERI 2 BALEN	BALEN	31.535,15		31.535,15	765.591.000,00	581.724.100,00	138.553.500,00	45.322.400,00	765.600.000,00	22.535,15
3	SMP NEGERI 3 BAURENO	BAURENO	325.096,46		325.096,46	343.235.000,00	268.534.600,00	48.500.900,00	25.892.500,00	342.928.000,00	632.096,46
4	SMP NEGERI 1 BAURENO	BAURENO	7.365.561,00		7.365.561,00	1.085.044.939,00	918.016.555,00	51.167.095,00	78.296.300,00	1.047.479.950,00	44.930.550,00
5	SMP NEGERI 2 BAURENO	BAURENO	983.000,35		983.000,35	190.208.505,00	157.510.650,00	20.000.000,00	12.500.000,00	190.010.650,00	1.180.855,35

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
6	SMP NEGERI 2 BOJONEGORO	BOJONEGORO	269.486,00		269.486,00	884.810.514,00	765.052.026,00	31.250.000,00	63.647.600,00	859.949.626,00	25.130.374,00
7	SMP NEGERI 1 BOJONEGORO	BOJONEGORO	167.599.999,26		167.599.999,26	934.035.075,00	830.451.361,00	200.100.000,00	60.000.000,00	1.090.551.361,00	11.083.713,26
8	SMP NEGERI 4 BOJONEGORO	BOJONEGORO	252.186,12		252.186,12	623.827.814,00	569.678.800,00	3.250.000,00	50.761.300,00	623.690.100,00	389.900,12
9	SMP NEGERI 5 BOJONEGORO	BOJONEGORO	2.707.122,22		2.707.122,22	1.221.612.878,00	922.348.342,00	213.974.000,00	81.810.000,00	1.218.132.342,00	6.187.658,22
10	SMP NEGERI 6 BOJONEGORO	BOJONEGORO	4.673.295,00		4.673.295,00	634.486.705,00	513.745.200,00	72.570.000,00	39.003.100,00	625.318.300,00	13.841.700,00
11	SMP NEGERI 7 BOJONEGORO	BOJONEGORO	858,36		858,36	691.358.914,00	620.416.564,00	15.000.000,00	49.000.000,00	684.416.564,00	6.943.208,36
12	SMP NEGERI 1 BUBULAN	BUBULAN	2.163.970,81		2.163.970,81	417.956.030,00	301.397.330,00	32.778.000,00	30.121.750,00	364.297.080,00	55.822.920,81
13	SMP NEGERI SATU ATAP CLEBUNG BUBULAN	BUBULAN	115.673,41		115.673,41	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	115.673,41
14	SMP NEGERI 1 DANDER	DANDER	280.000,00		280.000,00	909.680.000,00	681.975.400,00	157.600.000,00	70.001.300,00	909.576.700,00	383.300,00
15	SMP NEGERI 3 BOJONEGORO	DANDER	89,68		89,68	878.119.911,00	758.348.363,00	45.793.500,00	51.689.200,00	855.831.063,00	22.288.937,68
16	SMP NEGERI 1 GAYAM	GAYAM	0,91		0,91	413.431.200,00	307.508.000,00	85.384.000,00	20.539.200,00	413.431.200,00	0,91
17	SMP NEGERI 1 GONDANG	GONDANG	3.815.704,26		3.815.704,26	474.122.700,00	381.307.300,00	72.330.000,00	22.000.000,00	475.637.300,00	2.301.104,26
18	SMP NEGERI 2 GONDANG	GONDANG	536.566,63		536.566,63	129.904.816,00	119.893.241,78	5.000.000,00	5.000.000,00	129.893.241,78	548.140,85
19	SMP NEGERI 2 KALITIDU	KALITIDU	2.993.175,40		2.993.175,40	482.113.188,00	404.572.200,00	39.880.000,00	38.916.300,00	483.368.500,00	1.737.863,40
20	SMP NEGERI 1 KALITIDU	KALITIDU	803.721,35		803.721,35	997.956.279,00	818.907.200,00	125.050.000,00	51.336.800,00	995.294.000,00	3.466.000,35
21	SMP NEGERI 1 KANOR	KANOR	50.040,32		50.040,32	894.360.000,00	723.710.000,00	90.100.000,00	80.550.000,00	894.360.000,00	50.040,32
22	SMP NEGERI 1 KAPAS	KAPAS	1.028.823,35		1.028.823,35	513.118.452,00	455.063.000,00	24.003.000,00	34.814.000,00	513.880.000,00	267.275,35
23	SMP NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO	KAPAS	6.137.596,25		6.137.596,25	635.478.323,00	480.198.246,00	114.946.590,00	34.786.800,00	629.931.636,00	11.684.283,25
24	SMP NEGERI 1 KASIMAN	KASIMAN	840,89		840,89	813.159.317,00	688.226.296,00	51.078.000,00	73.604.700,00	812.908.996,00	251.161,89
25	SMP NEGERI 1 KEDEWAN	KEDEWAN	1.725.201,76		1.725.201,76	433.447.670,00	377.108.350,00	33.776.850,00	22.114.800,00	433.000.000,00	2.172.871,76
26	SMP NEGERI 1 KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	230.085,20		230.085,20	1.128.040.000,00	873.676.400,00	149.344.000,00	105.249.600,00	1.128.270.000,00	85,20
27	SMP NEGERI 2 KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	728,14		728,14	304.440.000,00	270.757.600,00	9.000.000,00	24.682.400,00	304.440.000,00	728,14
28	SMP NEGERI 3 KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	62.023,30		62.023,30	160.080.000,00	141.846.800,00	6.650.000,00	11.575.000,00	160.071.800,00	70.223,30
29	SMP NEGERI SATU ATAP KESONGO KEDUNGADEM	KEDUNGADEM	18,88		18,88	20.880.000,00	19.752.300,00	-	1.127.700,00	20.880.000,00	18,88
30	SMP NEGERI 1 KEPOHBARU	KEPOHBARU	2.049.715,35		2.049.715,35	457.023.850,00	389.144.650,00	40.000.000,00	27.879.200,00	457.023.850,00	2.049.715,35
31	SMP NEGERI 2 KEPOHBARU	KEPOHBARU	0,74		0,74	238.960.000,00	217.637.100,00	10.500.000,00	10.000.000,00	238.137.100,00	822.900,74
32	SMP NEGERI 1 MALO	MALO	0,22		0,22	405.470.000,00	349.920.000,00	32.800.000,00	22.750.000,00	405.470.000,00	0,22
33	SMP NEGERI 1 MARGOMULYO	MARGOMULYO	3.978.875,73		3.978.875,73	585.503.600,00	492.995.880,00	68.952.050,00	25.200.000,00	587.147.930,00	2.334.545,73
34	SMP NEGERI 1 NGAMBON	NGAMBON	506,59		506,59	801.759.494,00	596.049.150,00	117.700.000,00	82.812.000,00	796.561.150,00	5.198.850,59
35	SMP NEGERI 1 NGASEM	NGASEM	39.554,29		39.554,29	709.720.672,00	593.213.226,00	69.258.000,00	46.893.100,00	709.364.326,00	395.900,29
36	SMP NEGERI 1 NGRAHO	NGRAHO	972,85		972,85	926.840.000,00	728.615.000,00	118.100.000,00	80.125.000,00	926.840.000,00	972,85

LAMPIRAN 1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	SILPA 2022	KOREKSI SILPA 2022	SILPA 2022 TERKOREKSI	JUMLAH PENDAPATAN	REALISASI BELANJA			JUMLAH BELANJA	SALDO 2023
							BARANG DAN JASA	MODAL MESIN DAN PERALATAN	MODAL ASET TETAP LAINYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12
37	SMP NEGERI SATU ATAP SUGIHWARAS 3 NGRAHO	NGRAHO	8.517,45		8.517,45	13.920.000,00	13.310.000,00	-	610.000,00	13.920.000,00	8.517,45
38	SMP NEGERI 1 PADANGAN	PADANGAN	1.232.167,86		1.232.167,86	1.117.320.137,00	852.349.502,00	153.346.660,00	80.583.500,00	1.086.279.662,00	32.272.642,86
39	SMP NEGERI 2 PADANGAN	PADANGAN	17.455,74		17.455,74	451.222.645,00	391.060.000,00	16.500.000,00	43.680.000,00	451.240.000,00	0,74
40	SMP NEGERI 1 PURWOSARI	PURWOSARI	11.481,00		11.481,00	1.114.108.519,00	845.597.000,00	186.100.000,00	80.856.000,00	1.112.553.000,00	1.567.000,00
41	SMP NEGERI 2 PURWOSARI	PURWOSARI	1.845.648,89		1.845.648,89	387.915.600,00	306.673.700,00	44.400.000,00	38.400.000,00	389.473.700,00	287.548,89
42	SMP NEGERI 1 SEKAR	SEKAR	4.638.140,22		4.638.140,22	775.248.760,00	557.624.800,00	153.520.000,00	61.338.800,00	772.483.600,00	7.403.300,22
43	SMP NEGERI SATU ATAP BOBOL SEKAR	SEKAR	0,64		0,64	62.640.000,00	62.640.000,00	-	-	62.640.000,00	0,64
44	SMP NEGERI 1 SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	0,67		0,67	760.791.736,00	663.110.936,33	48.796.700,00	48.884.100,00	760.791.736,33	0,34
45	SMP NEGERI 2 SUGIHWARAS	SUGIHWARAS	561,41		561,41	408.319.482,00	307.180.000,00	41.690.000,00	55.743.600,00	404.613.600,00	3.706.443,41
46	SMP NEGERI 1 SUKOSEWU	SUKOSEWU	2.171.950,00		2.171.950,00	415.428.050,00	312.219.800,00	72.500.000,00	32.607.500,00	417.327.300,00	272.700,00
47	SMP NEGERI 1 SUMBERREJO	SUMBERREJO	203,33		203,33	954.680.000,00	805.508.000,00	105.250.000,00	43.922.000,00	954.680.000,00	203,33
48	SMP NEGERI 2 SUMBERREJO	SUMBERREJO	135.000,52		135.000,52	351.345.000,00	305.823.650,00	21.213.600,00	24.438.000,00	351.475.250,00	4.750,52
49	SMP NEGERI 3 SUMBERREJO	SUMBERREJO	-		-	93.612.020,00	89.936.030,00	-	3.625.000,00	93.561.030,00	50.990,00
50	SMP NEGERI 1 TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	1.506.500,19		1.506.500,19	845.293.500,00	689.420.044,00	112.700.000,00	44.189.056,00	846.309.100,00	490.900,19
51	SMP NEGERI 2 TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	245.272,46		245.272,46	159.850.640,00	137.562.461,00	14.000.000,00	7.500.000,00	159.062.461,00	1.033.451,46
52	SMP NEGERI SATU ATAP TURI TAMBAKREJO	TAMBAKREJO	132.478,88		132.478,88	104.600.000,00	103.098.800,00	-	1.501.200,00	104.600.000,00	132.478,88
53	SMP NEGERI 1 TEMAYANG	TEMAYANG	9.525.596,95		9.525.596,95	614.800.000,00	505.700.000,00	65.000.000,00	44.100.000,00	614.800.000,00	9.525.596,95
54	SMP NEGERI SATU ATAP SOKO TEMAYANG	TEMAYANG	429.674,96		429.674,96	68.640.000,00	68.640.000,00	-	-	68.640.000,00	429.674,96
55	SMP NEGERI 1 TRUCUK	TRUCUK	3.576.000,00		3.576.000,00	701.904.000,00	619.058.200,00	37.403.400,00	45.435.800,00	701.897.400,00	3.582.600,00
	JUMLAH BOS SMP NEGERI		**236.007.052,10**	**-**	**236.007.052,10**	**31.331.016.835,00**	**25.670.508.554,11**	**3.412.259.845,00**	**2.200.872.206,00**	**31.283.640.605,11**	**283.383.281,99**
	JUMLAH BOS SELURUHNYA (SD DAN SMP NEGERI)		**329.907.013,08**	**0,03**	**329.907.013,11**	**96.622.225.424,00**	**78.147.861.129,85**	**12.276.135.765,00**	**5.871.490.128,00**	**96.295.487.022,85**	**656.645.414,26**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NURUL AZIZAH

Bojonegoro, 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd

ADRIYANTO

LAMPIRAN 2

DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2023

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG SRANAK KEC. TRUCUK/KEC. TRUCUK	termyn	2018	1.336.514.750,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Napis 3 (Taji - Napis) Kec. Tambakrejo (Sesuai dengan SK No. 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. 57) (DBHM)/Kec. Tambakrejo	Perencanaan	2019	87.600.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG SRANAK - 0.65/KEC. TRUCUK	termyn	2019	1.012.895.424,65
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	PERENC. PENINGKATAN JALAN BOBOL-KARANGJATI/KAB. BJN	Perencanaan	2019	89.771.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Jalan Taji - Napis	Perencanaan Peningkatan Jalan Taji - Napis (SILPA)/Taji - Napis	2021	174.769.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Jalan Watujago - Ngelo	Perencanaan Peningkatan Jalan Watujago - Ngelo (untuk fisik 2022) (SILPA)/Watujago - Ngelo	2021	281.591.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Jembatan Napis 3 (Taji - Napis) Kec. Tambakrejo	Perencanaan (Taji - Napis) Kec. Tambakrejo (Sesuai dengan SK No. 188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. 57) (DBHM)/Kec. Tambakrejo	2021	99.000.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Jembatan Bobol-Karangjati 2	Perencanaan Penggantian Jembatan Bobol-Karangjati 2 (Ruas No.45) Kec. Sekar (PAPBD) (SILPA)/Kec. Sekar	2021	79.200.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	REHABILITASI JEMBATAN BUBULAN-JUDEG/KEC. TEMAYANG	uang muka	2021	61.919.999,70
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	REHAB JEMBATAN JONO-SUGIHWARAS/KEC. SUGIHWARAS	uang muka	2021	62.368.650,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	REHAB JEMBATAN KAPAS-SAMPANG 10/KEC. KAPAS	uang muka	2021	86.399.958,20
12	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	REHAB JEMBTAN TAMBAKROMO-MALO 1/KEC. MALO	uang muka	2021	127.349.663,10
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	PENGGANTIAN JEMBATAN GEMBOL /KEC. KEPOHBARU	uang muka	2021	229.707.765,80
14	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Jembatan Gembol Kec. Kedungadem	Pengawasan	2021	36.329.236,02
16	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	pembangunan TPT jalan kedaton tanjungharjo ds, plesungan kec. kapas/kec. kapas	uang muka	2021	47.907.973,30
17	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	JEMBATAN SRANAK/KEC. TRUCUK	uang muka, termyn, honor pokja	2021	1.130.731.056,35
18	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Balen - Sugihwaras (P-APBD)	Fisik tidak ada di tahun 2023	2022	99.000.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Dander - Ngasem (P-APBD)	Fisik tidak ada di tahun 2023	2022	99.000.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Malo - Selogabus (P-APBD)	Fisik tidak ada di tahun 2023	2022	99.000.000,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
21	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Ngumpakdalem - Ngujo (P-APBD)	Fisik tidak ada di tahun 2023	2022	99.200.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Tambakromo - Malo (P-APBD)	Fisik tidak ada di tahun 2023	2022	99.000.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sranak Kec. Trucuk Lanjutan	Belum review	2022	79.500.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Kedungadem - Nglinggo 1 (Kedungadem - Nglinggo) Kec. Kedungadem (Sesuai dengan SK No.188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 23) (Untuk Kegiatan Fisik 2023)	Fisik masih KDP	2022	99.200.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Sumberrejo - Kepohkidul 9 (Sumberrejo - Kepohkidul) Kec. Kedungadem (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 9) Lanjutan (TA 2023)	Fisik masih KDP	2022	99.500.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Bubulan - Judeg 6 (Bubulan - Judeg) Kec. Bubulan (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 32) Lanjutan (TA 2023)	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kapas - Sampang 13 (Kapas - Sampang) Kec. Sukosewu (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 6) Lanjutan(TA 2023)	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00
28	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kapas - Sampang 14 (Kapas - Sampang) Kec.Sukosewu (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 6) Lanjutan (TA 2023)	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00
29	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kapas - Sampang 15 (Kapas - Sampang) Kec. Sukosewu (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 6) Lanjutan (TA 2023)	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00
30	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kapas - Glendeng 8 (Kapas - Glendeng) Kec. Bojonegoro (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 4) (TA 2023)	Fisik masih KDP	2022	99.500.000,00
31	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Simorejo - Semambung 3 (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 18) P-APBD	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00
32	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Kedaton - Tanjungharjo 9 (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 3) P-APBD	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00
33	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Kumpulrejo - Bendo 3 (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 102) P-APBD	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00
34	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Sidodadi - Kumpulrejo 2 (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 101) P-APBD	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
35	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Malo - Selogabus 12 (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 70) P-APBD	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00
36	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Malo - Selogabus 1 (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 70) P-APBD	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00
37	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Malo - Selogabus 30 (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 70) P-APBD	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00
38	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Tambakromo - Malo 1 (Sesuai dengan SK No. 188/224/KEP/412.013/2022; Ruas No. 71) P-APBD	dikerjakan tahun 2024	2022	16.125.000,00
39	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Beton Plaat Kuniran Purwosari - Malingmati 5 (Ruas No. 65) Kec. Purwosari (FISIK 2023) P-APBD	Fisik masih KDP	2022	59.496.000,00
40	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan TPT Jalan Sumberrejo - Kepohkidul Kec. Kedungadem/Kec. Kedungadem	Termyn	2022	107.510.220,45
41	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Reviu Perencanaan Rekonstruksi Jalan Kanor-Simorejo (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
42	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Kapas - Bogo (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
43	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Baureno - Kadungrejo (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
44	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Dander - Sumodikaran (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
45	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Sumberjokidul - Sukosewu (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
46	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Prayungan - Jatigede (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
47	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Trucuk - Padang (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
48	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Sembunglor - Gedongarum (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
49	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Sumberoto - Woro (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
50	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Margomulyo - Bulu (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
51	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Kedungprimpen - Kadungrejo (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
52	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Sukosewu - Klepek (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
53	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Baureno - Karangan (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
54	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Bakalan - Semenpinggir (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
55	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Sidobandung - Duyungan (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
56	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Tegalkodo - Purwoasri (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
57	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Sekaran - Kedungdowo (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
58	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Kejuon - Bangeran (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
59	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Margomulyo - Kaligede (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
60	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Palkerep - Mojosari (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
61	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Sekar - Kedungbrubus (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
62	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Suryo - Biren (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
63	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Turi - Kaliklampok (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
64	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Watujago - Bobol (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
65	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ngasem - Dukohkidul (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.000.000,00
66	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Bobol - Karangjati (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
67	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Mojosari - Mayangrejo (P-APBD)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
68	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Deling - Setren (untuk fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.345.000,00
69	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Margomulyo - Kalangan (untuk fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.345.000,00
70	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Pragelan - Randupitu (untuk fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.123.000,00
71	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Sambeng - Besah (untuk fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.234.000,00
72	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Sumberagung - Ngelo (untuk fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.123.000,00
73	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Jari (Senganten - Pragelan 19 Ruas No. 40) Kec. Gondang (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024/Kec. Gondang	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.750.285,00
74	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Konsolidasi Rehabilitasi Jembatan Kec. Ngasem dan Ngraho (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.476.000,00
75	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Sambeng - Kedewan Kec. Kedewan (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	75.824.100,00
76	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Klino - Sekar 8 (Ruas No. 43) Kec. Sekar (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.234.000,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
77	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Konsolidasi Rehabilitasi Jembatan Kec. kapas, malo dan bojonegoro (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	76.035.000,00
78	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Jatiblimbing - Sumberjokidul 1 (ruas nomor 121) Kec. Dander (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.614.750,00
79	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Ruas Baureno - Kepohbaru 12 (Ruas No. 24) Kec. Kepohbaru (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.607.000,00
80	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Beton Plat Kedungsrunggo 5 (Malo-Selogabus 30 Ruas No. 70) Kec. Malo (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.362.800,00
81	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Kalialit Desa Payaman (Sumberarum - Payaman 18 Ruas No. 87) Kec. Ngraho (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.333.900,00
82	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Temayang - Bakulan 1 (ruas nomor 132) Kec. Temayang (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	49.617.000,00
83	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Komposit Tulung (Malo - Selogabus 20 Ruas No. 70) Kec. Trucuk (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.773.500,00
84	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Bandungrejo - Setren 1 (Ruas No. 46)Kec. Ngasem (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.345.000,00
85	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rekonstruksi Jalan Kanor - Simorejo	Pekerjaan belum selesai	2023	5.368.122.626,00
86	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pengawasan Rekonstruksi Jalan Kanor - Simorejo	Fisik masih KDP	2023	93.700.000,00
87	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Sumberejo - Kanor (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
88	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Bojonegoro - Kunci (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
89	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kepohbaru - Gunungsari (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
90	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Jono - Sugihwaras (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
91	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Dander - Ngasem (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
92	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Baureno - Kepohbaru (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
93	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Ngumpakdalem - Ngujo (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.300.000,00
94	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	PerencanaanRehabilitasi Jalan Malo - Selogabus (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
95	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Sumberejo - Kepohkidul (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
96	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Balen - Sugihwaras (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
97	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kedungadem - Nglinggo (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
98	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kedaton - Tanjungharjo (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
99	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Simorejo - Baureno (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
100	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kalianyar - Ngumpakdalem (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.300.000,00
101	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kapas - Sampang (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
102	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Jl. Tikusan - Sambiroto (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
103	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Sambeng - Tambakromo (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
104	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Tambakromo - Kawengan (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
105	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Glagah - Turi (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
106	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Glagah - Ngambon (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
107	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Ngasem - Trenggulunan (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
108	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Perencanaan Rehabilitasi Jalan Trenggulunan - Ngambon (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
109	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Trenggulunan - Bubulan (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
110	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Betek - Senganten (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
111	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Bubulan - Judeg (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
112	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Bandungrejo - Setren (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
113	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kedungadem - Kesongo (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.500.000,00
114	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Wonocolo - Kawengan (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
115	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kapten Ramli (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
116	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Rajawali (Fisik 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.000.000,00
117	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase III Kec. Kepohbaru (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.567.000,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
118	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase II Kec. Balen (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.365.000,00
119	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase II Kec. Kanor (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.456.000,00
120	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase II Kec. Kapas (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.345.000,00
121	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase II Kec. Kepohbaru (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.567.000,00
122	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase II Kec. Sugihwaras (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.345.000,00
123	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase II Kec. Sumberrejo (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.345.000,00
124	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase I Kec. Balen (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.345.000,00
125	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase I Kec. Kanor (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.698.000,00
126	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase I Kec. Kapas (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.496.000,00
127	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase I Kec. Kepohbaru (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.587.000,00
128	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase I Kec. Sugihwaras (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.662.500,00
129	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase I Kec. Sumberrejo (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.345.000,00
130	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Baureno (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.456.000,00
131	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Bubulan (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.790.800,00
132	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Dander (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.456.000,00
133	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Gayam (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.688.000,00
134	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Gondang (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.708.000,00
135	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Kadungadem (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.511.500,00
136	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Kalitidu (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.002.000,00
137	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Kasiman (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.503.700,00
138	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Kedewan (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.577.000,00
139	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Margomulyo (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.687.900,00
140	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Ngambon (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.757.900,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
141	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Ngasem II (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.316.100,00
142	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Ngasem I (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.504.200,00
143	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Ngraho (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.476.500,00
144	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Padangan (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.613.600,00
145	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Purwosari (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.486.500,00
146	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Sekar (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.708.000,00
147	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Sukosewu (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.234.000,00
148	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Tambakrejo (TA.2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.468.200,00
149	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Temayang (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.198.500,00
150	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Trucuk (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.662.500,00
151	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Balen (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	98.790.000,00
152	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Baureno (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.143.000,00
153	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Bubulan (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.218.500,00
154	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Dander (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.218.500,00
155	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Gayam (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.146.300,00
156	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Gondang (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	98.901.000,00
157	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Kadungadem (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.067.500,00
158	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Kalitidu (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.163.000,00
159	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Kanor (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.163.000,00
160	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Kapas (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.143.000,00
161	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Kasiman (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.079.900,00
162	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Kedewan (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.190.700,00
163	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Kepohbaru (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.115.200,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
164	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Malo (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	39.155.200,00
165	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Margomulyo (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.135.200,00
166	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Ngambon (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.179.600,00
167	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Ngasem (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	98.901.000,00
168	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Ngraho (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	98.845.500,00
169	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Padangan (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.024.200,00
170	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Purwosari (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.032.000,00
171	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Sekar (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	98.928.700,00
172	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Sugihwaras (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.059.700,00
173	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Sukosewu (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.024.200,00
174	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Sumberrejo (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.190.700,00
175	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Tambakrejo (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.098.600,00
176	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Temayang (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	39.127.500,00
177	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi TPT Kec. Trucuk (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.274.000,00
178	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pengawasan Rekonstruksi Jalan Sumberagung - Ngelo	Fisik masih KDP	2023	188.925.330,00
179	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Wedi - Sukorejo 4 (ruas nomor 104) Kec. Kapas (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)/Kec. Kapas	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.607.000,00
180	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Ruas Brangkal - Sidomukti (Ruas No. 167) Kec. Kepohbaru (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)/Kec. Kepohbaru	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	26.529.000,00
181	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Beton Plat Malo 10 (Malo - Selogabus 36 Ruas No. 70) Kec. Malo (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)/Kec. Malo	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.607.000,00
182	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Ruas Wotan - Kayulemah 7 dan 9 (Ruas No. 152) Kec. Sumberrejo (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)/Kec. Sumberrejo	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.476.000,00
183	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Sekar - Bobol 28 (Ruas No. 44) Kec. Sekar (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)/Kec. Sekar	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.511.500,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
184	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pekerjaan Perencanaan Konsolidasi Penggantian Jembatan Malo - Selogabus 1 Kec. Trucuk (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)/Kec. Trucuk	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	89.188.500,00
185	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Bulu - Drenges (ruas nomor 129) Kecamatan Sugihwaras (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)/Kec. Sugihwaras	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.322.800,00
186	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Komposit Kanten 2 (Malo - Selogabus 24 Ruas No.70) Kec. Trucuk (P-APBD 2023) (Fisik APBD 2024) (DBHM)/Kec. Trucuk	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.385.000,00
187	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Beton Plat Tanggir (Malo - Selogabus 37) Ruas No. 70 Kec. Malo (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)/Kec. Malo	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.373.900,00
188	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Penggantian Jembatan Kayulemah (Wotan - Kayulemah Ruas No. 152) Kec. Sumberrejo (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)/Kec. Sumberrejo	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	29.526.000,00
189	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Konsolidasi Penggantian Jembatan Ruas Malo - Selogabus 2 kec. malo (P-APBD 2023) Fisik APBD 2024 (DBHM)/Kec. Malo	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	89.565.900,00
190	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Penyusunan DED Jembatan Baureno - Plumpang	Fisik belum dilaksanakan	2023	892.874.010,00
191	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Penyusunan DED Mini Flyover Proliman	Fisik belum dilaksanakan	2023	555.799.755,00
192	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kkec. Balen dan Kec.Sugihwaras (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	72.172.200,00
193	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Temayang dan Kec sukosewu II (untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	60.961.200,00
194	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Gayam (untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024 (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	66.555.600,00
195	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. kedungadem dan kec. kepohbaru (untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	73.004.700,00
196	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Sumberrejo (untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	83.649.600,00
197	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Suryo - Biren (Suryo - Biren) Kec. Margomulyo (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	44.688.600,00
198	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kapas - Sampang 1 (Kapas - Sampang) Kec. Sukosewu (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	59.684.700,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
199	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Margomulyo (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	76.012.800,00
200	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Kedewan, Kec. Tambakrejo dan Kec. Purwosari (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	64.724.100,00
201	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Mojorejo - Tapelan 5 (Mojorejo - Tapelan) Kec. Ngraho (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.689.100,00
202	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. kepohbaru (untuk Perencanaan Kegiatan fisik Tahun Aanggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	55.944.000,00
203	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Dander (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	96.947.400,00
204	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Sukosewu (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	56.049.450,00
205	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Temayang dan Kec. Sukosewu I (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	64.735.200,00
206	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Malo (untuk Perencanaan Kegiatan fisik Tahun anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.587.000,00
207	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan kec. Ngasem dan Kec. Kalitidu (untuk perencanaan kegiatan fisik tahun anggaran 2024)(DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	95.970.600,00
208	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembayaran Langsung Termyn I 100% Pekerjaan Perencanaan Pelebaran Jembatan Tanggungan - Pandan 12 (Tanggungan - Pandan) Kec. Ngraho (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.720.200,00
209	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	perencanaan pelebaran jembatan kec. kasiman dan kec, malo (untuk perencanaan kegiatan fisik tahun anggaran 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	75.890.700,00
210	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Trucuk II (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	76.035.000,00
211	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Ngraho (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	48.507.000,00
212	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan baureno - karangan 5 (baureno-karangan) (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.733.500,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
213	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Malo - Selogabus 24 (Malo - Selogabus) Kec. Trucuk (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	34.781.850,00
214	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Jl. Wotan - Kayulemah 7 (Jl. Wotan - Kayulemah) Kec. Sumberrejo (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	49.805.700,00
215	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Pluntu - Jepang 4 (Pluntu - Jepang) Kec. Margomulyo (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	99.689.100,00
216	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Jatiblimbing - Sumberjokidul 2 (Jatiblimbing - Sumberjokidul) Kec. Dander (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.720.200,00
217	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	perencanaan pelebaran jembatan kec. gondang dan kec. temayang (untuk perencanaan kegiatan fisik tahun anggaran 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	76.057.200,00
218	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. gayam dan Kec. Ngasem (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024)(DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	64.735.200,00
219	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pengawasan Pelebaran Jembatan Gayam dan Kec. Dander (Untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	72.238.800,00
220	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Perencanaan Pelebaran Jembatan Kec. Trucuk I (untuk Perencanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2024) (DBHM)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	89.743.500,00
221	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Penggantian Jembatan Kedungadem - Nglinggo 1 (Kedungadem - Nglinggo) Kec. Kedungade	Fisik masih KDP	2023	4.079.558.535,00
222	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pengawasan Penggantian Jembatan Kedungadem - Nglinggo 1 (Kedungadem - Nglinggo) Kec. Kedungadem	Fisik masih KDP	2023	99.705.000,00
223	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Kapas - Glendeng 8 (Kapas - Glendeng) Kec. Bojonegoro	Fisik masih KDP	2023	1.993.261.265,00
224	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Sumberrejo - Kepohkidul 9 (Sumberrejo - Kepohkidul) Kec. Kedungadem Lanjutan	Fisik masih KDP	2023	2.159.345.276,00
225	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Beton Plaat Kuniran Purwosari - Malingmati 5 (Ruas No. 65) Kec. Purwosari APBD 2023	Fisik masih KDP	2023	488.758.809,00
226	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Trucuk - Padang 3 (Trucuk - Padang) Kec. Trucuk (PAPBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	171.891.977,00
227	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Trucuk - Padang 12 (Trucuk - Padang) Kec. Trucuk (PAPBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	171.552.412,00
228	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Trucuk - Padang 13 (Trucuk - Padang) Kec. Trucuk (PAPBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	171.627.666,00
229	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Brenggolo - Sumengko 2 (Brenggolo Sumengko) Kec. Kalitidu (PAPBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	163.003.077,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
230	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Brenggolo - Sumengko 3 (Brenggolo Sumengko) Kec. Kalitidu (PAPBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	165.923.931,00
231	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Mojosari - Mayangrejo 1 (Mojosari Mayangrejo) Kec. Kalitidu (PAPBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	165.886.968,00
232	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Mojosari - Mayangrejo 5 (Mojosari Mayangrejo) Kec. Kalitidu (PAPBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	165.887.103,00
233	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Mojodelik - Bonorejo 1 (Mojodelik Bonorejo) Kec. Gayam (PAPBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	163.043.248,00
234	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Kedungprimpen - Kadungrejo 2 (Kedungprimpen - Kadungrejo) Kec. Kanor (PAPBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	163.170.026,00
235	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pengawasan Pelebaran Jembatan Kec. Trucuk (PAPBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	56.007.714,00
236	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Penggantian Jembatan Sonorejo - Cendono 2 (Ruas No. 150) Kec. Padangan (P-APBD 2023)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	173.715.859,00
237	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jembatan Mojosari - Mayangrejo 3 (Ruas No. 148) Kec.Kalitidu (P-APBD 2023)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	172.079.156,00
238	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan TPT Jalan Dander Ngasem Kec Ngasem	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	197.065.100,00
239	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ngambon Bobol Ds Nglampin Kec Ngambon (PAPBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	181.839.600,00
240	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan TPT Jalan Sambeng - Kedewan Ds Hargomulyo Kecamatan Kedewan	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	181.903.700,00
241	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mojosari - Mayangrejo Ds. Pilangsari Kec. Kalitidu (P-APBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	183.855.100,00
242	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Bojonegoro - Kunci Ds. Jatiblimbing Kec. Dander (P-APBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	175.962.600,00
243	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Malo - Tambakromo Ds. Tinawun Kec. Malo (P-APBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	182.894.000,00
244	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Banjaranyar - Sembunglor Kec. Baureno (P-APBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	188.723.500,00
245	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan TPT Jalan Tambakromo-Malo Ds. Malo Kecamatan Malo	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	179.684.400,00
246	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan TPT Jalan Kalitidu - Ngasem Ds Ngantru Kecamatan Ngasem	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	197.620.400,00
247	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ngumpakdalem - Ngujo Ds. Ngujo Kec. Kalitidu (P-APBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	183.621.400,00
248	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kepohbaru - Gunungsari Ds. Sidomukti Kec. Kepohbaru (P-APBD)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023 (Fisik sudah 100%)	2023	179.356.800,00
249	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Saluran Drainase Kec. Malo (TA. 2024)	Perencanaan untuk fisik 2024	2023	79.698.000,00
250	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jembatan Bubulan - Judeg 19 (Sesuai dengan SK No.188/246/KEP/412.013/2017; Ruas No. 32) (Untuk Pembayaran Hutang Tahun 2021)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023	2023	23.158.080,00
251	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Sranak Kec. Trucuk Lanjutan (Untuk Pembayaran Hutang 2021)	Pencatatan Hutang Belanja Modal Tahun 2023	2023	60.000.000,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
252	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Tegalkodo - Purwoasri 2 (Tegalkodo Purwoasri) Kec. Sukosewu (PAPBD)	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	131.637.657,13
253	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Tegalkodo - Purwoasri 3 (Tegalkodo Purwoasri) Kec. Sukosewu (PAPBD)	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	110.414.076,90
254	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pengawasan Pelebaran Jembatan Kec. Sukosewu (PAPBD)	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	59.981.480,03
255	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pengawasan Pelebaran Jembatan Kec. Tambakrejo, Kec. Ngambon dan Kec. Purwosari	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	67.403.968,47
256	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pengawasan Pelebaran Jembatan Kapas - Glendeng 8 (Kapas - Glendeng) Kec. Bojonegoro	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	75.842.645,34
257	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pengawasan Pelebaran Jembatan Sumberrejo - Kepohkidul 9 (Sumberrejo - Kepohkidul) Kec. Kedungadem Lanjutan	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	81.830.463,00
258	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jembatan Beji - Singgit 2 (Ruas No. 168) Kec. Kedewan (P-APBD 2023)	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	87.717.319,44
259	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Kapas - Glendeng 8 (Kapas - Glendeng) Kec. Bojonegoro	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	157.288.286,10
260	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Beton Plaat Kuniran Purwosari - Malingmati 5 (Ruas No. 65) Kec. Purwosari APBD 2023	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	682.918.338,57
261	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pelebaran Jembatan Sumberrejo - Kepohkidul 9 (Sumberrejo - Kepohkidul) Kec. Kedungadem Lanjutan	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	121.571.066,10
262	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Penggantian Jembatan Kedungadem - Nglinggo 1 (Kedungadem - Nglinggo) Kec. Kedungadem	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	218.790.010,50
263	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rekonstruksi Jalan Kanor - Simorejo	Pencatatan utang belanja modal sesuai review inspektorat tanggal 1 Maret 2024	2023	312.463.482,35
264	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	TANAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Flyover Jetak (DBHM)/Kelurahan Jetak, Kec. Bojonegoro	Fisik belum dilaksanakan	2023	99.500.000,00
	Jumlah KDP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang					**43.155.659.149,50**
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Irigasi D.I Plumpung Kec. Gondang dan D.I Bilo Kec. Kalitidu	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi D.I Plumpung Kec. Gondang dan D.I Bilo Kec. Kalitidu	2019	32.285.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Irigasi D.I Nolo/Ngasinan Kec. Padangan	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi D.I Nolo/Ngasinan Kec. Padangan	2019	238.028.120,60
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Check Dam wil.dander. Tambakrejo. Ngraho	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Check Dam wil.dander. Tambakrejo. Ngraho	2019	72.550.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Rumah Pompa Banjir Ds. Kalirejo Kec. Bojonegoro	Perencanaan Pembangunan Rumah Pompa Banjir Ds. Kalirejo Kec. Bojonegoro	2020	175.468.700,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Pelimpah Longstorege Ds. Kedungsumber Kec. Temayang	Perencanaan Pembangunan Pelimpah Longstorege Ds. Kedungsumber Kec. Temayang	2020	76.649.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	30%/Pembangunan Pelimpah Long Storage Sudetan Kali Gandong Desa Kedungsumber Kec. Temayang	Pembangunan Pelimpah Long Storage Sudetan Kali Gandong Desa Kedungsumber Kec. Temayang	2021	465.600.300,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Jaringan Irigasi D.I. Dander	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Dander	2021	34.314.000,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngunut	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngunut	2021	34.490.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sambongrejo	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sambongrejo	2021	34.204.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sumberarum	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sumberarum	2021	34.094.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sonorejo	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sonorejo	2021	34.457.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Balong	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Balong	2021	33.220.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	GEDUNG DAN BANGUNAN	Review DED Pembangunan Waduk Pejok	Review DED Pembangunan Waduk Pejok	2021	1.804.880.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Ds. Kalirejo Kec. Bojonegoro	Pembangunan Rumah Pompa Pengendali Banjir Ds. Kalirejo Kec. Bojonegoro	2021	811.424.400,00
15	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pompa dan Pintu Pengendali Banjir kali Inggas Ds. Lebaksari Kec. Baureno	Perencanaan Pembangunan Pompa dan Pintu Pengendali Banjir kali Inggas Ds. Lebaksari Kec. Baureno	2022	621.815.340,00
16	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Penunjang sarana dan prasarana rumah pompa Ds. Kalirejo	Penunjang sarana dan prasarana rumah pompa Ds. Kalirejo	2022	1.076.088.864,46
17	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Rumah Pompa Ds. Kalirejo	Pembangunan Rumah Pompa Ds. Kalirejo	2022	1.015.322.837,00
18	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Irigasi DI Mulyorejo dan DI Sarirejo	Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi DI Mulyorejo dan DI Sarirejo	2023	99.397.170,00
19	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Irigasi DI Mulyoagung dan DI Dander	Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi DI Mulyoagung dan DI Dander	2023	99.283.950,00
20	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Irigasi DI Sonorejo	Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi DI Sonorejo	2023	99.533.700,00
21	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Irigasi DI Sumberarum, DI Temulus dan DI Purwosari	Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi DI Sumberarum, DI Temulus dan DI Purwosari	2023	59.363.466,00
22	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Irigasi DI Panjang	Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi DI Panjang	2023	59.641.144,00
23	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jaringan D.I Rondomori	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan D.I Rondomori	2023	59.530.299,00
24	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jaringan D.I Balong	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan D.I Balong	2023	99.535.920,00
25	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jaringan D.I Sambongrejo	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan D.I Sambongrejo	2023	59.313.516,00
26	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jaringan D.I Ngunut dan DI Plumpung	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan D.I Ngunut dan DI Plumpung	2023	99.169.620,00
27	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Rehabilitasi Jaringan D.I Dander	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan D.I Dander	2023	99.187.380,00
28	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	GEDUNG DAN BANGUNAN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Pompa Desa Kalirejo Kec. Bojonegoro	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Pompa Desa Kalirejo Kec. Bojonegoro Tahap II	2023	10.230.728.300,00
29	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pompa dan Pintu Pengendali Banjir Kali Ingas Desa Lebaksari Kec. Baureno	Pembangunan Pompa dan Pintu Pengendali Banjir Kali Ingas Desa Lebaksari Kec. Baureno	2023	18.784.944.306,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
30	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	GEDUNG DAN BANGUNAN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Pompa Desa Semanding Kec. Bojonegoro	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Pompa Desa Semanding Kec. Bojonegoro Tahap I (pembayaran sisa 2022)	2023	120.030.180,00
	Jumlah KDP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air					**36.564.550.513,06**
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Serma Abdullah RW. 01 Ds. Pacul Kec. Bojonegoro	uang muka (30%), termyn I (59,02), perencanaan	2018	844.557.583,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan sistim penanganan genangan Desa Pacul ke arah Jl. HOS. Cokro Aminoto Kecamatan Bojonegoro	Perencanaan	2019	10.400.000,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Trotoar Jl. AKBPM Soeroko	Perencanaan	2020	49.615.500,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Penanganan Genangan Jl. AKBPM Soeroko	Perencanaan	2020	49.615.500,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Penanganan Genangan Jl. Serma Abdullah	Perencanaan	2020	22.483.500,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	DED (P-APBD)	2020	99.840.000,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	Amdal Lallin (P-APBD)	2020	98.989.000,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	Topografi (P-APBD)	2020	99.840.000,00
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Rumah Sakit Wilayah Selatan (P-APBD) (DBHM)	FS, Amdalalin dan DED	2021	655.462.500,00
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi dan Ruang Terbuka Hijau (DBHM)	DED (P-APBD), Uang Muka 20 %, Termyn I, Termyn II, Termyn III, Pengawasan Termyn I , Pengawasan Termyn II	2021	23.332.186.900,00
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pengadaan Genset Stadion Soedirman (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan	2021	49.944.000,00
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan RTH Jl. Pasar Kel. Ledok Kulon (P-APBD) (DBHM)	FS, Amdalalin dan DED	2021	293.771.000,00
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Bundaran Jl. K.H. Mansur Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan	2021	23.885.000,00
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Bundaran Jl. Diponegoro-Untung Suropati (Adipura) Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan	2021	49.828.000,00
15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Bundaran Pertigaan Jl. Mastrip Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan	2021	23.824.000,00
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Bundaran Jetak Kota Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan	2021	49.920.000,00
17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Bundaran 5 lokasi (P-APBD) (DBHM)	FS	2021	99.055.000,00
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehabilitasi Pendopo Kabupaten Bojonegoro	Perencaaan (P-APBD) (DBHM)	2021	98.741.000,00
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Tahap 2 (P-APBD)	Perencanaan (P-APBD)	2021	59.562.000,00
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Rumah Sakit Wilayah Barat	FS	2022	99.279.000,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Rumah Sakit Wilayah Barat	Master Plan	2022	391.810.020,00
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Rumah Sakit Wilayah Barat	Andalalin (P-APBD)	2022	99.456.000,00
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Rumah Sakit Wilayah Barat	Dokumen Lingkungan (P-APBD)	2022	97.959.000,00
24	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Rumah Sakit Wilayah Barat	DED (P-APBD)	2022	99.553.000,00
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	MK (Termyn I,II,III,IV) ; Amdal; Uang Muka 20%, Review Design Tahap III	2022	290.144.565,00
26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	MK (Termyn II)	2022	145.072.282,50
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	MK (Termyn III)	2022	398.465.202,60
28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	MK (Termyn IV)	2022	133.466.499,00
29	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	Pekerjaan Amdal Wisata Religi dan RTH	2022	381.565.000,00
30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	(Uang Muka 20%)	2022	8.618.504.208,20
31	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	(Termyn I)	2022	8.251.011.188,00
32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	(Termyn II)	2022	5.402.423.178,00
33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	(Termyn III)	2022	13.913.023.714,00
34	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	(Termyn IV)	2022	6.907.558.752,80
35	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Wisata Religi	Review Design Tahap III (P-APBD)	2022	99.442.000,00
36	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Kedewan	Perencanaan (PAPBD) (Termyn I)	2022	99.485.000,00
37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Kedewan	Andalalin (P-APBD) (Termyn I)	2022	99.422.000,00
38	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Kedewan	Dokumen Lingkungan (P-APBD) (Termyn I)	2022	99.214.000,00
39	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Sumberrejo	Perencanaan (PAPBD) (Termyn I)	2022	99.333.000,00
40	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Sumberrejo	Andalalin (PAPBD) (Termyn I)	2022	99.611.000,00
41	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Sumberrejo	Dokumen Lingkungan (P-APBD) (Termyn I)	2022	98.015.000,00
42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Tambakrejo	Andalalin (PAPBD) (Termyn I)	2022	98.237.000,00
43	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Tambakrejo	Dokumen Lingkungan (P-APBD) (Termyn I)	2022	97.848.000,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
44	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Tambakrejo	Perencanaan (PAPBD) (Termyn I)	2022	99.367.000,00
45	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Tambakrejo	FS (P-APBD) (Termyn I)	2022	98.873.000,00
46	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Sumberrejo (P-APBD) (Termyn I)	FS	2022	49.256.000,00
47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pasar Agro	FS (Termyn I)	2022	99.164.000,00
48	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pasar Agro	Andalalin (Termyn I)	2022	245.677.000,00
49	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pasar Agro	DED (Termyn I)	2022	638.366.550,00
50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pasar Agro	Amdal (Termyn I)	2022	367.586.000,00
51	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Panti Karang Werda	DED (P-APBD) (Termyn I)	2022	99.387.000,00
52	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Panti Karang Werda	Dokumen Lingkungan (P-APBD) (Termyn I)	2022	98.984.000,00
53	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Panti Karang Werda	Andalalin (P-APBD) (Termyn I)	2022	99.123.000,00
54	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Panti Karang Werda	FS (P-APBD) (Termyn I)	2022	98.262.000,00
55	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehabilitasi Gedung Kantor BPKAD	Perencanaan (P-APBD) (Termyn I)	2022	59.630.000,00
56	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehabilitasi Pendopo Malowopati Kabupaten Bojonegoro	Review Design (P-APBD) (Termyn I)	2022	99.644.000,00
57	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Bojonegoro	Perencanaan (PAPBD)	2022	99.678.000,00
58	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bojonegoro	Review Desain (P-APBD)	2022	99.542.000,00
59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Ruang Terbuka Hijau Alun Alun Kota Bojonegoro	DED Penataan Ulang Landscape (P-APBD)	2022	99.320.000,00
60	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pekerjaan Pembangunan Wisata Religi dan RTH tahap 3 (DBHM) (98,021%)/Kec. Margomulyo	Termyn (98,021 %)	2023	42.883.542.679,00
61	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Sumberrejo (DBHM) (95,07%) /Kec. Sumberrejo	Termyn (95,07 %)	2023	8.370.108.916,00
62	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Tambakrejo (P-APBD) (DBHM) (98,052%)/Kec. Tambakrejo	Termyn (95,052 %)	2023	23.350.307.653,00
63	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pekerjaan Pembangunan Sarana Olahraga Kecamatan Kedewan (DBHM) (94,2%)/Kec. Kedewan	Termyn (94,2 %)	2023	5.775.144.028,00
64	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pasar Kota (P- APBD)(DBHM)/Kec. Bojonegoro	FS	2023	99.123.000,00
65	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pasar Agro (DBHM)/Kec. Ngambon	Master Plan	2023	197.285.572,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
66	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Penataan Landscape Lahan Selatan Jembatan Terusan Bojonegoro Tuban (P-APBD) (DBHM)	(Dokumen Lingkungan,DED, Andalalin,FS)	2023	338.835.069,00
67	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Rumah Potong Hewan (RPH) Unggas Kec. Baureno (P-APBD) (DBHM)	(Dokumen Lingkungan dan Perencanan)	2023	139.669.635,00
68	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	Reviu Desain	2023	99.678.000,00
69	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Keolahragaan Kab. Bojonegoro (P-	Perencanaan	2023	99.733.500,00
70	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Trucuk Lanjutan (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan	2023	79.649.345,00
71	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Jl. Dr. Wahidin Bojonegoro Tahap II (P-APBD) (DBHM)	Reviu Desain	2023	49.672.500,00
72	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung Pertemuan Auditorium Jl. Mas Tumapel (PAPBD) (DBHM)	Perencanaan	2023	79.698.000,00
73	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung Kantor Satpol PP dan UKPBJ Kab. Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan	2023	79.725.750,00
74	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	Reviu Desain	2023	99.844.500,00
75	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Penataan Gedung Kantor Pemkab Jl. Mas Tumapel Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	DED	2023	99.866.700,00
76	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pariwisata Kab. Bojonegoro (P- APBD)(DBHM)	Perencanaan	2023	99.323.000,00
77	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan	2023	99.573.243,00
78	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan	2023	99.600.000,00
79	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Gayam dan Kec. Kasiman (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan	2023	79.889.012,00
80	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Balen dan Kec. Sugihwaras (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan	2023	79.664.792,00
81	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Rumah Sakit Khusus Onkologi Desa Talok Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro (DBHM)		2023	14.528.800.295,00
82	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung Parkir Vertikal Jl. Panglima Sudirman (P-APBD) (DBHM)	(Perencanaan, Dokumen Lingkungan, Andalalin dan FS)	2023	397.889.720,00
83	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)	2023	99.478.800,00
84	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Rumah Dinas Sekda (DBHM)	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Sekda (DBHM)	2023	16.836.900,00
85	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Penerangan Jalan Umum	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum	2023	724.955.906,27
86	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Padangan - Ngawi Kec. Ngraho (P-APBD)	Perencanaan	2023	8.830.667,00
87	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Padangan - Ngawi Kec. Ngraho (P-APBD)	Pengawasan	2023	6.616.587,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
88	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Mojosari - Mayangrejo (P-APBD)	Perencanaan	2023	8.288.000,00
89	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Mojosari - Mayangrejo (P-APBD)	Pengawasan	2023	6.201.940,00
90	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Trucuk - Padang (P-APBD)	Perencanaan	2023	8.288.000,00
91	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Trucuk - Padang (P-APBD)	Pengawasan	2023	6.201.940,00
92	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Perkotaan Kec. Sekar Ds. Sekar (P-APBD)	Perencanaan	2023	7.958.700,00
93	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Perkotaan Kec. Sekar Ds. Sekar (P-APBD)	Pengawasan	2023	5.946.270,00
94	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Perkotaan Kec. Trucuk Ds. Trucuk (P-APBD)	Perencanaan	2023	8.288.000,00
95	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Perkotaan Kec. Trucuk Ds. Trucuk (P-APBD)	Pengawasan	2023	6.206.565,00
96	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Jalan Maswiji (P-APBD)	Perencanaan	2023	9.041.454,00
97	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Jalan Maswiji (P-APBD)	Pengawasan	2023	6.768.325,00
98	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Tulungrejo - Trucuk (P-APBD)	Perencanaan	2023	8.288.000,00
99	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Tulungrejo - Trucuk (P-APBD)	Pengawasan	2023	6.200.783,00
100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Betek - Pajeng (P-APBD)	Perencanaan	2023	9.916.000,00
101	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Betek - Pajeng (P-APBD)	Pengawasan	2023	7.450.875,00
102	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Dander - Sumodikaran (P-APBD)	Perencanaan	2023	9.916.000,00
103	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Dander - Sumodikaran (P-APBD)	Pengawasan	2023	7.450.875,00
104	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Perkotaan Kec. Padangan Desa Ngasinan (P-APBD)	Perencanaan	2023	7.659.000,00
105	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Perkotaan Kec. Padangan Desa Ngasinan (P-APBD)	Pengawasan	2023	5.724.868,00
106	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Perkotaan Kec. Ngasem Desa Dukuhkidul (P-APBD)	Perencanaan	2023	7.659.000,00
107	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Perkotaan Kec. Ngasem Desa Dukuhkidul (P-APBD)	Pengawasan	2023	5.724.868,00
108	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Perkotaan Kec. Ngasem Desa Ngadiluwih (P-APBD)	Perencanaan	2023	7.659.000,00
109	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Perkotaan Kec. Ngasem Desa Ngadiluwih (P-APBD)	Pengawasan	2023	5.724.868,00
110	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Perak Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro	Perencanaan	2023	99.178.000,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
111	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mayangkoro Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	Perencanaan	2023	29.635.000,00
112	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rajawali Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	Perencanaan	2023	49.497.500,00
113	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pemuda (lanjutan) Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	Perencanaan	2023	49.528.000,00
114	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	aluran Drainase Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	Perencanaan	2023	49.454.000,00
115	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rajekwesi Kecamatan Bojonegoro	Perencanaan	2023	49.644.500,00
116	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Trotoar Jalan Mayangkoro Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	Perencanaan	2023	29.635.000,00
117	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Trotoar Jalan Rajawali Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	Perencanaan	2023	49.497.500,00
118	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Trotoar Jalan Pemuda (lanjutan) Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	Perencanaan	2023	49.528.000,00
119	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Trotoar Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	Perencanaan	2023	49.454.000,00
120	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	Pembangunan Trotoar Jalan Rajekwesi Kecamatan Bojonegoro	Perencanaan	2023	49.644.500,00
	Jumlah KDP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya					**173.383.881.743,37**
1	Sekretariat Dewan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Konstruksi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 oleh CV. AZHAA KONSULTAN/Jl. Veteran No.84 Bojonegoro 62115	Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Konstruksi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023 oleh CV. AZHAA KONSULTAN/Jl. Veteran No.84 Bojonegoro 62115	2023	48.840.000,00
	Jumlah KDP Sekretariat Dewan					**48.840.000,00**
1	Dinas Kesehatan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Puskesmas Tanjungharjo lokasi baru	Pembangunan Fisik	2023	4.510.845.839,45
2	Dinas Kesehatan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Puskesmas Tanjungharjo lokasi baru	Pengawasan	2023	19.954.000,00
	Jumlah KDP Dinas Kesehatan					**4.530.799.839,45**
1	RSUD Kelas C Padangan	GEDUNG DAN BANGUNAN	PERENCANAAN GEDUNG PENUNJANG DAN AREA PARKIR/Jl. Dr. Soetomo No.02, Arjosari, Ngasinan, Kec. Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62162	PERENCANAAN GEDUNG PENUNJANG DAN AREA PARKIR/Jl. Dr. Soetomo No.02, Arjosari, Ngasinan, Kec. Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62162	2023	69.500.000,00
2	RSUD Kelas C Padangan	GEDUNG DAN BANGUNAN	PENGAWASAN GEDUNG PENUNJANG DAN AREA PARKIR/Jl. Dr. Soetomo No.02, Arjosari, Ngasinan, Kec. Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62162	PENGAWASAN GEDUNG PENUNJANG DAN AREA PARKIR/Jl. Dr. Soetomo No.02, Arjosari, Ngasinan, Kec. Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62162	2023	62.327.799,00
3	RSUD Kelas C Padangan	GEDUNG DAN BANGUNAN	PELAKSANAAN GEDUNG PENUNJANG DAN AREA PARKIR/Jl. Dr. Soetomo No.02, Arjosari, Ngasinan, Kec. Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62162	PELAKSANAAN GEDUNG PENUNJANG DAN AREA PARKIR/Jl. Dr. Soetomo No.02, Arjosari, Ngasinan, Kec. Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62162	2023	2.005.129.496,00
	Jumlah KDP RSUD Kelas C Padangan					**2.136.957.295,00**

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
1	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan paket 2 halaman SDN Tanjungharjo IV Kec. Kapas/SDN Tanjungharjo IV Kec. Kapas	Perencanaan paket 2 halaman SDN Tanjungharjo IV Kec. Kapas/SDN Tanjungharjo IV Kec. Kapas	2019	5.039.000,00
2	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Paket 1 Rehabilitasi Ruang Kelas Konstruksi Sekolah SDN Pejok I Kec. Kepohbaru/SDN Pejok I Kec. Kepohbaru	Perencanaan Paket 1 Rehabilitasi Ruang Kelas Konstruksi Sekolah SDN Pejok I Kec. Kepohbaru/SDN Pejok I Kec. Kepohbaru	2019	2.478.500,00
3	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Paket 1 Rehabilitasi Ruang Kelas Konstruksi Sekolah SDN Sumberagung Kec. Kepohbaru/SDN Sumberagung Kec. Kepohbaru	Perencanaan Paket 1 Rehabilitasi Ruang Kelas Konstruksi Sekolah SDN Sumberagung Kec. Kepohbaru/SDN Sumberagung Kec. Kepohbaru	2019	4.469.000,00
4	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Tembeling Kec. Kasiman /SDN Tembeling Kec. Kasiman	Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Tembeling Kec. Kasiman /SDN Tembeling Kec. Kasiman	2019	3.903.000,00
5	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Konstruksi Sekolah SDN Dolokgede Kec. Tambakrejo/SDN Dolokgede Kec. Tambakrejo	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Konstruksi Sekolah SDN Dolokgede Kec. Tambakrejo/SDN Dolokgede Kec. Tambakrejo	2019	3.472.000,00
6	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Konstruksi Sekolah SDN Sumberrejo II Kec. Margomulyo/SDN Sumberrejo II Kec. Margomulyo	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Konstruksi Sekolah SDN Sumberrejo II Kec. Margomulyo/SDN Sumberrejo II Kec. Margomulyo	2019	4.468.000,00
7	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan konstruksi pagar sekolah SDN Kalangan I Kec. Margomulyo/SDN KALANGAN 1 MARGOMULYO	Perencanaan konstruksi pagar sekolah SDN Kalangan I Kec. Margomulyo/SDN KALANGAN 1 MARGOMULYO	2019	4.181.000,00
8	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	perencanaan rehab ruang guru SMPN 1 Kapas/SMPN 1 Kapas	perencanaan rehab ruang guru SMPN 1 Kapas/SMPN 1 Kapas	2020	9.935.000,00
9	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 1 BALEN/SMPN 1 BALEN	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 1 BALEN/SMPN 1 BALEN	2020	5.225.000,00
10	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 1 SUGIHWARAS/SMP NEGERI 1 SUGIHWARAS	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 1 SUGIHWARAS/SMP NEGERI 1 SUGIHWARAS	2020	5.225.000,00
11	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 1 GONDANG (diusulkan masuk di PAPBD 2023)/Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 1 GONDANG	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 1 GONDANG (diusulkan masuk di PAPBD 2023)/Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 1 GONDANG	2020	4.761.100,00
12	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan rehab kamar mandi/WC SMP NEGERI 1 KALITIDU/SMP NEGERI 1 KALITIDU	Perencanaan rehab kamar mandi/WC SMP NEGERI 1 KALITIDU/SMP NEGERI 1 KALITIDU	2020	5.243.333,00
13	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 1 PURWOSARI/SMP NEGERI 1 PURWOSARI	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 1 PURWOSARI/SMP NEGERI 1 PURWOSARI	2020	4.761.200,00
14	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 2 PURWOSARI/SMP NEGERI 2 PURWOSARI	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 2 PURWOSARI/SMP NEGERI 2 PURWOSARI	2020	4.761.100,00
15	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan RKB SMP NEGERI 1 KASIMAN/SMP NEGERI 1 KASIMAN	Perencanaan RKB SMP NEGERI 1 KASIMAN/SMP NEGERI 1 KASIMAN	2020	9.783.850,00
16	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 2 TAMBAKREJO (Akan diusulkan masuk di PAPBD 2023)/SMP NEGERI 2 TAMBAKREJO	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC SMP NEGERI 2 TAMBAKREJO (Akan diusulkan masuk di PAPBD 2023)/SMP NEGERI 2 TAMBAKREJO	2020	4.761.100,00

LAMPIRAN 2

NO	SKPD	JENIS KDP	URAIAN KDP	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)
17	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SDN Ketileng II Kec. Malo (Akan diusulkan masuk di PAPBD 2023)/SDN Ketileng II Kec. Malo	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SDN Ketileng II Kec. Malo (Akan diusulkan masuk di PAPBD 2023)/SDN Ketileng II Kec. Malo	2020	5.506.000,00
18	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Hargomulyo IV Kec. Kedewan (Sedang dikerjakan di tahun 2022 melalui DAK)/SDN Hargomulyo IV Kec. Kedewan	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Hargomulyo IV Kec. Kedewan (Sedang dikerjakan di tahun 2022 melalui DAK)/SDN Hargomulyo IV Kec. Kedewan	2020	5.400.000,00
19	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	PERENCANAAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 2 KEDUNGADEM 2021/SMPN 2 KEDUNGADEM	PERENCANAAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 2 KEDUNGADEM 2021/SMPN 2 KEDUNGADEM	2021	11.516.251,00
20	Dinas Pendidikan	GEDUNG DAN BANGUNAN	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Sumberwangi II Kec. Kanor/SDN Sumberwangi II Kec. Kanor	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Sumberwangi II Kec. Kanor/SDN Sumberwangi II Kec. Kanor	2022	16.240.000,00
	Jumlah KDP Dinas Pendidikan					**121.129.434,00**
1	Inspektorat	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehab Bangunan Gedung Kantor Inspektorat Baru/Jalan P. Mas Tumapel No.1 Bojonegoro	Rehab Bangunan Gedung Kantor Belum 100%	2023	977.207.479,00
	Jumlah KDP Inspektorat					**977.207.479,00**
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	GEDUNG DAN BANGUNAN	belanja jasa konsultansi perencanaan area parkir obyek wisata Kayangan Api/Obyek Wisata Kayangan Api Ds. Sendangharjo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro	Perencanaan	2021	36.650.000,00
	Jumlah KDP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					**36.650.000,00**
	JUMLAH KDP TAHUN 2023					**260.955.675.453,38**

Bojonegoro, 9 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NURUL AZIZAH

Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd

ADRIYANTO

LAMPIRAN 3

DAFTAR ASET TETAP TANAH PROPERTI INVESTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2023

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Tanah Kebun Induk	perkebunan	1.054.315.000,00	desa beji kec. kedewan	56.990	PROSES SERTIFIKAT
2	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	gedung perdagangan dan perindustrian	5.855.450.000,00	Desa Kedungbondo Kec. Balen	10.764	HAK PAKAI NO 01 TGL. 28-11-2016
3	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	gedung perdagaangan dan perindustrian	2.205.204.000,00	desa Karangdinoyo kec. sumberejo	5.334	PROSES SERTIFIKAT
4	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	gedung perdagangan baureno	6.703.600.000,00	desa banjaran kec. baureno	10.516	HAK PAKAI NO.02 TGL 22-11-2017
5	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	Gedung Perdagangan dan Perindustrian	2.475.300.200,00	Desa Purwosari Kec. Purwosari	4.531	-
6	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	gedung perdagangan	2.130.885.000,00	desa karangdinoyo, kec. sumberejo	4.823	PROSES SERTIFIKAT
7	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	Gudang Perdagangan	846.900.000,00	Desa Kedungbondo, Kec. Balen	2.823	HAK PAKAI NO.1 TGL. 28-11-2016
8	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	Perluasan gedung perdagangan	2.771.450.000,00	Desa Banjaran, Kec. Baureno	6.054	HAK PAKAI NO.4 TGL. 24-09-2019
9	Bidang Kesehatan	RSUD Kelas C Padangan	Tanah Bangunan Rumah Sakit	perluasan RSUD Padangan	1.754.000.000,00	Desa Padangan, Kec. Padangan	5.000	-
10	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Rakyat Kedewan	25.000.000,00	Jl. Raya Kedewan Kec. Kedewan	855	Pasar Rakyat Kedewan
11	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Sugihwaras	6.336.247.000,00	Jl. Raya Sugihwaras, Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro	5.631	Sertifikat SHP No. 13
12	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Kalitidu	11.110.463.000,00	Jl. Raya Kalitidu, Panjunan, Kec. Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro	4.138	Sertifikat SHP No. 05
13	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Malo	2.423.255.000,00	Jl. Sukandar, Malo, Kecamatan Malo	3.549	Sertifikat SHP No. 07
14	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Dander	7.895.084.000,00	Jl. Raya Dander No. 681 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro	3.963	TELAH DIAJUKAN PROSES SERTIFIKAT
15	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Kanor	1.037.360.000,00	Jl. Raya Kanor Desa. Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro	2.908	TELAH DIAJUKAN PROSES SERTIFIKAT
16	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Kedungadem Utara	4.659.222.000,00	Desa Ngaglik, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro	3.386	Sertifikat SHP No. 11

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
17	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Kedungadem Selatan	1.663.998.000,00	Desa Ngaglik, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro	1.151	Sertifikat SHP No. 09
18	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Kedungadem Timur	1.807.157.000,00	Desa Ngaglik, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro	1.179	Sertifikat SHP No. 08
19	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Daerah Unit Sroyo	3.657.623.100,00	Desa Mejuwet, Kecamatan Sumberrejo	1.743	Hibah Pemerintah Desa Mejuwet, Kecamatan Sumberrejo
20	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Daerah Unit Sroyo	2.495.073.900,00	Desa Sroyo, Kecamatan Kanor	1.189	Hibah Pemerintah Desa Sroyo, Kecamatan Kanor
21	Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tanah Bangunan Pasar	Kantor Pasar Daerah Maju Raya	18.425.000,00	Jl. Raya Babat - Bojonegoro, Sroyo Kec. Kanor	55	Pindah Pengguna
22	Bidang Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Banjarjo	3.329.900.000,00	Kel.Banjarjo	9.940	Sertifikat SHP No. 09 Berkas 134/Perlengkapan/1990
23	Bidang Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Kota Bojonegoro	7.983.120.000,00	Kel ledok Wetan	17.205	Sertifikat SHP No. 16 Berkas 137/Perlengkapan/1992
24	Bidang Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Buah	899.475.000,00	Kel.KarangPacar	2.685	Sertifikat SHP No. 21 Berkas 165/Perlengkapan/1994
25	Bidang Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Lahan Kosong	22.042.000,00	Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk	214	Nomor Berkas : 65
26	Bidang Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Lahan Kosong	25.132.000,00	Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk	244	Nomor Berkas : 66
27	Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	tanah kampung lainnya (dst)	Tirtawana Dander	1.568.690.000,00	Jl Raya Dander Kec Dander Kab Bojonegoro	15.230	-
28	Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	tanah kampung lainnya (dst)	Tirtawana Dander	257.191.000,00	Desa Dander Kec Dander	2.497	Sebidang tanah untuk kolam renang
29	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tanah Lapangan Sepak Bola	Stadion Letjen H. Soedirman	14.302.440.000,00	Jl. Lisman Bojonegoro	50.184	Stadion, perubahanluas 55.350, no berkas : 38
30	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tanah Lapangan Sepak Bola	stadion	2.956.710.000,00	Jl. Lisman Bojonegoro	8.826	tambah invent, no berkas : 37
31	Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	3.515.200.000,00	SUKOWATI KEC. KAPAS	22.170	bengkok lurah No. Berkas 175

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
32	Bidang Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pasar	Pasar	368.768.000,00	Desa Kuncen Kec. Padangan	2.881	Hasil Inventarisasi Aset di Kec. Padangan no.berkas :296 MUTASI BPKKD REKOM BPK RI 2018
33	Kecamatan Kedewan	Kecamatan Kedewan	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Kedewan	12.008.500,00	Jl. Raya Kedewan Kab. Bojonegoro	1.022	Tanah Milik Pemda
34	Bidang Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Rumah Dinas	2.292.282.000,00	Jl. Diponegoro No. 38 Bojonegoro	1.145	Nama Pemerintah Prop dati I Jatim
35	Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tanah Bangunan Gudang	Gedung Serbaguna	897.600.000,00	Jl. KH. Mansyur No. 9 Ledok Wetan	8.976	
36	Bidang Kesehatan	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Komplek Perkantoran DLH dan Kantor Pertanahan	1.500.000.000,00	JL. DR.WAHIDIN 40 BOJONEGORO	19.622	-
37	Bidang Kesehatan	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Pengembangan Pelayanan RS	2.982.204.000,00	Jl. Veteran No. 36	3.126	-
38	Bidang Kesehatan	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	Tanah Bangunan Rumah Sakit	-	1.997.820.000,00	Jl. Veteran No. 36	2.018	-
39	Bidang Kesehatan	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	Tanah Bangunan Rumah Sakit	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	3.700.875.000,00	KEL NGROWO KEC. BOJONEGORO	6.087	PENYERAHAN PERLENGKAPAN TERDIRI DR 6 BIDANG
40	Bidang Kesehatan	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	Tanah Bangunan Rumah Sakit	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo II	7.766.833.327,88	KEL KADIPATEN KEC. BOJONEGORO	37.928	PENYERAHAN PERLENGK TERDIRI 17 BIDANG & 7 BIDANG PENGGANTI EKS BENGKOK KEL NGROWO
41	Bidang Kesehatan	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	Tanah Bangunan Rumah Sakit	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo III	541.036.672,12	KEL. KADIPATEN KEC. BOJONEGORO	2.420	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo III Tanah lahan parkir dan kantin
42	Bidang Kesehatan	RSUD Kelas C Padangan	Tanah Bangunan Rumah Sakit	perluasan RSUD Padangan	1.754.000.000,00	Desa Padangan, Kec. Padangan	5.000	-
43	Bidang Kesehatan	RSUD Kelas C Padangan	Tanah Bangunan Rumah Sakit	RUMAH SAKIT PADANGAN	350.000.000,00	JL.DR. SOETOMO NO. 02 PADANGAN	9.688	No. berkas 250
44	Bidang Kesehatan	RSUD Kelas D Sumberrejo	Tanah Bangunan Rumah Sakit	RSUD SUMBERREJO	2.445.000.000,00	Jl.Raya Sumberrejo No 231 Desa Sumuragung Kec.Sumberrejo	2.445	0
45	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Tegalan/Sawah	328.960.000,00	Desa Campurjo	4.938	Tanah Sawah (Hasil Tukar guling Lokasi Ds. Campurejo) Utara Pengeboran Luas di SHP : 4938
46	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. Lettu Suyitno RT. 20	7.616.000,00	Kelurahan Banjarejo	119	448/Aset/2019 (Sudah Bersertifikat) DISEWA WARGA RT 20 SUPOMO

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
47	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	11.083.582,87	RT. 06 Jl.Kyai Maszad Kelurahan banjarjo	190	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SUPADI
48	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	8.050.181,25	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	138	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 KRISTIANA INDRAWATI
49	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.100.204,89	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	156	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 ANDIK SUBAGIO
50	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	6.591.815,08	RT. 06 Jl.Kyai Maszad Kelurahan banjarjo	113	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 KUWAT
51	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.158.539,53	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	158	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 PATSRIKAN/ADJIS
52	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.100.204,89	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	156	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga RT. 06 SUHARI
53	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	6.883.488,31	RT. 06 Jl.Kyai Maszad Kelurahan banjarjo	118	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SUPRAYITNO
54	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	1.856.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	29	Persil-33 DII Belakang Ktr Kelurahan DISEWA WARGA RT 11 SRI KUSTINAH
55	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	1.472.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	23	Persil-33 DIIBelakang Ktr Kelurahan sudah bersertifikat disewa warga rt 11 sumintri
56	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	14.933.669,56	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	256	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 DWI ATRIONO
57	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.450.212,77	RT. 06 Jl.Kyai Maszad Kelurahan banjarjo	162	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 CATUR PUJI HARTONO
58	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	8.400.189,13	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	144	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SUKARDI
59	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	6.300.141,84	RT. 06 Jl.Kyai Maszad Kelurahan banjarjo	108	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SELVINA/AHMAD RIDWAN
60	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	1.344.000,00	GG AMAL RT 20 Kelurahan Banjarejo	21	489/Aset/2019 (sudah bersertifikat) DISEWA WARGA RT 20 NURPAKIH
61	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. Lettu Suyitno RT. 20	8.320.000,00	Kelurahan Banjarejo	130	494/Aset/2019 (sudah bersertifikat) DISEWA WARGA RT 20 SUMADI

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
62	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	10.325.232,47	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	177	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 (belum bersertifikat) Luas semula 8050, terkena tanggul 1110) No Persil 8-S1 , NO SHP HALAMAN KEDUA TIDAK SAMA DGN HALAMAN 1
63	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.333.543,47	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	160	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 RONA MARZUKI
64	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	11.025.248,23	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	189	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 WIONO
65	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	8.575.193,07	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	147	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SUNOTO
66	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	11.141.917,52	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	191	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SONY MRABAWANI
67	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	8.808.531,65	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	151	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 MURTININGSIH
68	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.625.216,71	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	165	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SARIDJAN
69	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	5.133.448,91	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	88	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 LULUK WIDODO
70	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.800.220,65	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	168	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 MUNADJI
71	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.216.874,18	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	156	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 MOCH TAUFEK
72	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.100.204,89	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	156	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 IVAN ADI FIRMANSYAH
73	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	8.633.527,71	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	148	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 PATKARYO
74	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	7.175.161,54	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	123	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 MUDJIANTO B
75	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	5.888.000,00	Kelurahan Banjarejo	92	DISEWA WARGA RT 20 SUHARTONO/FERRY SETIAWAN
76	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	5.696.000,00	Kelurahan Banjarejo	89	DISEWAKAN WARGA RT 20 WARDIONO/DANANG W
77	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	11.083.582,87	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	190	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 PUGIARTO

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
78	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	7.232.000,00	Kelurahan Banjarejo	110	DISEWA WARGA RT 20 SUWITO
79	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	5.504.000,00	Kelurahan Banjarejo	86	DISEWAKAN WARGA RT 20 SUKINI/NARDI
80	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	7.233.496,19	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	124	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SRIWIJI
81	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.041.870,24	RT. 06 Jl.Kyai Maszad Kelurahan banjarjo	155	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 ACHMAD ISMAIL
82	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	7.641.838,72	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	131	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 ADITYA RACHMA ARSENDY
83	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.916.889,94	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	170	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SUTOMO
84	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	7.116.826,90	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	122	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SITI NURAINI
85	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.975.224,59	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	171	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SUMIATUN/ FARID
86	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	8.516.858,42	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	146	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N SEGER
87	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.625.216,71	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	165	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N PATSRIKAN / DEDY
88	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	6.358.476,49	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	109	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 SUHARIYATI
89	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	6.416.811,14	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	110	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N IMAM KARUYONO
90	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	11.433.590,75	RT. 06 Jl.Kyai Maszad Kelurahan banjarjo	196	Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N SRI UTAMI
91	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	2.752.000,00	Kelurahan Banjarejo	43	DISEWA WARGA RT 20 A.N SUKIDI
92	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	10.266.897,82	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	176	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 AGUS UTOYO
93	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.275.208,83	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	159	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga A.N SISWANTO
94	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	8.808.531,65	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	151	Ditempati Rumah Warga Rt.06 SUWERLINA PURWANTO
95	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	8.704.000,00	Kelurahan Banjarejo	136	DISEWAKAN WARGA RT 20 A.N SUDIRJO

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
96	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	8.983.535,59	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	154	Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N MUJIONO
97	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. Lettu Suyitno RT. 20	3.264.000,00	Kelurahan Banjarejo	51	DISEWA WARGA RT 20 A.N SRI WAHYUNINGSIH
98	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	3.648.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	57	DISEWA WARGA RT 11 MUSTOPO
99	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	13.708.641,98	RT. 06 Jl.Kyai Maszad Kelurahan banjarjo	235	Persil 8-S1Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N SLAMET/SUNGKONO
100	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. Lettu Suyitno RT. 20	7.296.000,00	Kelurahan Banjarejo	114	DISEWA WARGA RT 20 A.N KASMIRAH/SUTRENGGONO
101	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	1.792.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	28	DISEWA WARGA RT 11 A.N WINDARTI
102	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	3.328.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	52	DISEWA WARGA RT 11 A.N SUMIAH
103	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	9.536.000,00	Kelurahan Banjarejo	149	DISEWA WARGA RT 20 A.N SUKAMTO
104	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	1.152.000,00	Kelurahan Banjarejo	18	DISEWA WARGA RT 20 A.N SUNARSIH
105	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.741.886,00	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	167	Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N EKY YULIANA F
106	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. Lettu Suyitno RT. 20	1.152.000,00	Kelurahan Banjarejo	18	DISEWA WARGA RT 20 SUMIATUN
107	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	1.280.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	20	DISEWA WARGA RT 20 A.N KASTURI
108	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.041.870,24	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	155	Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N AGUS SYOFANDI
109	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	6.358.476,49	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	109	Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N SUNOTO
110	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	10.033.559,23	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	172	Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N MASMID
111	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.333.543,47	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	160	Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N SUHARDJO
112	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	1.664.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	26	disewa warga rt 11 a.n fadil
113	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	1.024.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	16	disewa warga rt 11 a.n fadil
114	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. Lettu Suyitno RT. 20	10.304.000,00	Kelurahan Banjarejo	161	disewa warga rt 20 a. m ilyas rudi
115	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	1.792.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	28	disewa warga rt 11 a.n windarti
116	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	6.272.000,00	Kelurahan Banjarejo	98	Disewa warga RT 20 A.n Amboro Rukmianto

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
117	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. Lettu Suyitno RT. 20	5.184.000,00	Kelurahan Banjarejo	81	Disewa warga RT 20 A.n EKROM
118	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	3.456.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	54	DISEWA WARGA RT 11 A.N MARSUDI
119	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	2.240.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	35	DISEWA WARGA RT 11 A.N WATATIK
120	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	1.216.000,00	Kelurahan Banjarejo	19	DISEWA WARGA RT 11 A.N SULASTRI
121	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.100.204,89	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	157	Ditempati Rumah Warga Rt.06 SRI MEI YULIANA
122	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	2.816.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	44	DISEWA WARGA RT 11 DJASWADI
123	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	6.272.000,00	Kelurahan Banjarejo	98	DISEWA WARGA RT 20 A.N KUSTINI
124	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	4.992.000,00	Kelurahan Banjarejo	78	DISEWA WARGA RT 20 A.N NARDI
125	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	1.920.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	30	DISEWA WARGA RT 11 A.N KAMID
126	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	8.925.200,95	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	153	Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N INTAN
127	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	1.536.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	24	DISEWA WARGA RT 11 A.N SARTUTIK
128	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	1.152.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	18	DISEWA WARGA RT 11 A.N SUMIATUN
129	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	9.275.208,83	RT. 06 Gg. Kamituwo Kelurahan banjarjo	159	Ditempati Rumah Warga Rt.06 A.N WARSIBAN
130	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	3.264.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	51	DISEWA WARGA RT 11 A.N SUWITO
131	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. TGP Gg. Amal RT. 20	5.824.000,00	Kelurahan Banjarejo GG AMAL RT 20	91	DISEWAKAN WARGA RT 20 SITI ROHMAWATI
132	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. Lettu Suyitno RT. 20	2.048.000,00	Kelurahan Banjarejo	32	DISEWA WARGA RT 20 A.N MUKAT ALI IMRON
133	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. Lettu Suyitno RT. 20	8.704.000,00	Kelurahan Banjarejo	136	DISEWA WARGA RT 20 A.N SUDIRJO
134	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Sebidang tanah Perumahan	221.760.000,00	RT. 11 Gg. Baru Kelurahan Banjarjo	3.677	PERKARANGAN BELAKANG KANTOR KELURAHAN BANJAREJO (IDLE)

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
135	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Banjarejo	Tanah Sawah Irigasi	Ditempati Warga Jl. Lettu Suyitno RT. 20	7.040.000,00	Kelurahan Banjarejo	113	DISEWA WARGA RT 20 A.N SUMARTONO
136	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Bagian Tanah Makam	77.076.000,00	JL. MT HARYONO	2.000	(EKS. BENGKOK KEPALA DESA PERSIL NO 10)
137	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Bagian dari Tanah Makam	47.955.050,00	JL. MT HARYONO	5.350	(EKS. BENGKOK KEPALA DESA PERSIL NO 20)
138	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Persawahan Bero	26.533.650,00	JL. MT HARYONO	3.250	(EKS. BENGKOK KEPALA DESA PERSIL NO 63)
139	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Gedung Seni dan Budaya	32.750.000,00	JL. MT HARYONO	5.150	(EKS. BENGKOK KEPALA DESA PERSIL NO 65)
140	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Persawahan Bero	77.591.800,00	JL. MT HARYONO	10.400	(EKS. BENGKOK CARIK PERSIL NO 44)
141	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	73.675.725,00	JL. MT HARYONO	6.550	(EKS. BENGKOK JOGOBOYO PERSIL NO 51)
142	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	118.394.313,00	JL. MT HARYONO	15.950	(EKS. BENGKOK MODIN PERSIL NO 25)
143	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Banjir, Sering Puso	198.375.997,00	JL. MT HARYONO	28.050	(CELENGAN KELURAHAN JETAK PERSIL NO 35)
144	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	77.700.000,00	JL MT HARYONO	4.250	persil no 40 (EKS. BENGKOK kades) SHP No. 09 (12-03-2001)
145	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Banjir, Sering Puso	81.395.000,00	jl. MT Haryono	45.800	(EKS. BENGKOK KADES PERSIL NO 41)
146	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Gedung Seni dan Budaya	80.000.000,00	JL. MT HARYONO	16.000	(EKS. BENGKOK KADES PERSIL NO 42)
147	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	274.202.500,00	JL. MT HARYONO	38.350	(EKS. BENGKOK CARIK PERSIL NO 38)
148	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	85.750.000,00	JL. MT HARYONO	17.150	(EKS. BENGKOK KAMITUWO PERSIL NO 27)
149	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	43.010.000,00	JL. MT HARYONO	8.900	(EKS. BENGKOK KAMITUWO Persil No. NO 52)
150	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	13.835.250,00	JL. MT HARYONO	2.000	(EKS. BENGKOK KAMITUWO PERSIL NO 54)
151	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Persawahan Bero	54.161.250,00	JL. MT HARYONO	7.000	(EKS. BENGKOK KEBAYAN I PERSIL NO 43)
152	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	45.950.484,00	JL. MT HARYONO	16.250	(EKS. BENGKOK KEBAYAN II PERSIL NO 26)
153	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	52.767.000,00	JL. MT HARYONO	7.050	(EKS. BENGKOK KEBAYAN II PERSIL NO 55)
154	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Banjir, Sering Puso	30.387.500,00	JL. MT HARYONO	4.250	(EKS. BENGKOK KEBAYAN II PERSIL NO 57)

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
155	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	25.920.000,00	JL. MT HARYONO	5.250	(EKS. BENGKOK MODIN PERSIL NO 56)
156	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	71.085.300,00	JL. MT HARYONO	9.300	(EKS. BENGKOK MODIN PERSIL NO 58)
157	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	7.905.000,00	JL. MT HARYONO	1.700	(EKS. BENGKOK modin PERSIL NO 59)
158	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Jetak	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	78.700.000,00	NULL	15.000	Pengganti Eks. Bengkok yang kena tanggul di Aset tercatat Luas : 15.000 m di SHP No. 4 Tgl 23-03-1998 Luas : 7.870 m2
159	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	tanah kampung lainnya (dst)	disewakan	52.500.000,00	jl. imam bonjol bojonegoro	105	eks kantor desa kadipaten sesuai sertifikat nomor SHP 00087 dengan luas 62 m2
160	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	EKS BENGKOK CELENGAN	2.040.000,00	Kelurahan Kadipaten	34.000	EKS BENGKOK CELENGAN sesuai dengan sertifikat nomor SHP 00066 dengan luas 33610
161	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	EKS BENGKOK LURAH	2.577.000,00	Kelurahan Kadipaten	42.950	EKS BENGKOK KADES sesuai dengan sertifikat nomor SHP 00062 dengan luas 42930
162	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Pertanian	1.422.000.000,00	Kelurahan Kadipaten	23.700	Eks.Bengkok Carik sesuai dengan sertifikat nomor SHP 00064 dengan luas 21510
163	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Pertanian	452.000.000,00	Kelurahan Kadipaten	7.381	Eks.Bengkok Kamituwo sesuai dengan Sertifikat Nomor SHP 00063 dengan Luas 7381 Dalam buku C Desa No. 3 Persil 21 Kelas - SIII
164	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Pertanian	420.000.000,00	Kelurahan Kadipaten	7.000	Eks.Bengkok Jogoboyo sesuai sertifikat nomor SHP 00065 dengan luas 6344
165	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Pertanian	414.000.000,00	Kelurahan Kadipaten	6.900	Eks Bengkok Kebayan I sesuai dengan sertifikat nomor SHP 00067 dengan luas 6287
166	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Pertanian	426.000.000,00	Kelurahan Kadipaten	7.100	Eks.Tanah Bengkok Kebayan II sesuai dengan sertifikat nomor 00076 dengan luas 7389
167	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	tanah pertanian	426.000.000,00	Kelurahan Kadipaten	7.100	eks bengkok kebayan II sesuai sertifikat nomor SHP 00082 dengan luas 7325
168	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	tanah pertanian	438.000.000,00	Kelurahan Kadipaten	7.300	eks bengkok kebayan III sesuai dengan sertifikat nomor 00080 dengan luas 6961

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
169	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	tanah pertanian	426.000.000,00	Kelurahan Kadipaten	7.100	eks bengkok modin dengan sertifikat nomor SHP 00083 dengan luas 7188
170	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	tanah pertanian	401.400.000,00	Kelurahan Kadipaten	6.690	eks bengkok pensiunan kades sesuai dengan sertifikat nomor SHP 00081 dengan luas 7808
171	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Pertanian	400.000.000,00	Kelurahan Kadipaten	6.819	Eks.Bengkok Kamituwo II sesuai dengan Sertifikat Nomor SHP 89 dengan Luas 6449 m2
172	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kepatihan	Tanah Sawah Irigasi	Tanah kas Kelurahan	3.020.400.000,00	JL.MUNGINSIDI desa sukorejo kec.bojonegoro	43.441	eks bengkok kepala kelurahan no. persil 28 SK I (bersertifikat)
173	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kepatihan	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	1.519.920.000,00	Jl. Munginsidi desa Pacul Kec.Bojonegoro	20.500	Tanah ex Bengkok Kamituwo, no persil 31 sp II (bersertifikat)
174	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kepatihan	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Bengkok Kelurahan	946.800.000,00	Jl. Munginsidi desa pacul kec.Bojonegoro	12.820	Ex Bengkok Djogobojo, no. persil 34 sp III (bersertifikat)
175	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kepatihan	Tanah Sawah Irigasi	Tanah kas Kelurahan	982.800.000,00	Jl. Munginsidi desa pacul kec. Bojonegoro	13.490	Ex Bengkok Djogobojo II, no persil 35 SP II (bersertifikat)
176	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kepatihan	Tanah Sawah Irigasi	Tanah kas Kelurahan	961.200.000,00	Jl. Munginsidi desa pacul kec.Bojonegoro	14.350	Ex Bengkok Kebajan I, no. persil 32 SP II (bersertifikat)
177	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kepatihan	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	982.800.000,00	Jl. Munginsidi desa pacul kec.Bojonegoro	13.000	Ex Bengkok Kebajan II, no. persil 33 SP II (bersertifikat)
178	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kepatihan	Tanah Sawah Irigasi	Tanah kas Kelurahan	504.000.000,00	Jl. Munginsidi desa pacul kec.Bojonegoro	6.646	Ex Bengkok Modin, no. persil 36 SP II(bersertifikat)
179	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Kepatihan	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	1.472.400.000,00	Jl. Munginsidi desa pacul kec.Bojonegoro	21.150	Ex Bengkok Tjarik, no. persil 29 SP III (bersertifikat)
180	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	94.720.000,00	Ds.Sumbertlaseh Kec. Dander	14.800	Eks Bengkok Kepala Desa
181	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	156.480.000,00	Ds. Sumbertlaseh Kec. Dander	24.450	Eks Bengkok Kepala Desa
182	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas kelurahan	69.440.000,00	Ds.Sumbertlaseh Kec. Dander	10.850	Celengan
183	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas kelurahan	6.940.000,00	Ds. Mori Kec. Trucuk	3.470	Eks Bengkok Kepala Desa
184	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas kelurahan	6.000.000,00	Ds. Mori Kec. Trucuk	3.000	EksBengkok Kepala Desa
185	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	116.480.000,00	Ds. Ngumpakdalem Kec. Dander	18.200	Eks Bengkok Carik
186	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	15.680.000,00	Ds. Sumbertlaseh Kec. Dander	2.450	Eks Bengkok Kamituwo
187	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	53.760.000,00	Ds. sumbertlaseh Kec. Dander	8.400	Eks Bengkok Kamituwo
188	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanag Kas Kelurahan	39.360.000,00	Ds. Sumbertlaseh Kec. Dandfer	6.150	Eks Bengkok Kebayan I

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
189	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	60.160.000,00	Ds. Sumbertlaseh Kec. Dander	9.400	Eks Bengkok Kebayan II
190	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	58.560.000,00	Ds. Sumbertlaseh Kec. Dander	9.150	Eks Bengkok Jogoboyo I
191	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	54.400.000,00	Ds. sumbertlaseh Kec. Dander	8.500	Eks Bengkok Jogoboyo II
192	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	77.760.000,00	Ds. Sumbertlaseh Kec. Dander	12.150	Eks Bengkok Mudin
193	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	981.360.000,00	Ds. sukorejo Kec. Bojonegoro	2.115	perubahan dr luas 215 no berkas 198
194	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	712.240.000,00	Ds. Sukorejo Kec. Bojonegoro	1.533	perubahan dr luas 1.535, no berkas 196
195	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	932.640.000,00	Ds. Sukorejo Kec. Bojonegoro	2.010	Eks Bengkok Pepala Desa Berkas 197
196	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	407.856.000,00	Ds. Sukorejo Kec. Bojonegoro	879	Eks Bengkok Kepala desa No. Berkas 200
197	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas Kelurahan	237.792.000,00	Ds. Sukorejo Kec. Bojonegoro	5.103	Eks Bengkok Kepala Desa No. Berkas 199
198	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kas kelurahan	164.163.200,00	Ds. Sukorejo Kec. Bojonegoro	3.538	Eks Bengkok Kepala Desa Berkas 201
199	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Eks Bengkok Kel. Klangon	553.185.000,00	Desa Wedi Kec Kapas	1.941	no berkas 219
200	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Eks Bengkok Kel. Klangon	1.256.280.000,00	Desa Wedi Kec. Kapas	4.408	no berkas 220
201	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Klangon	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Eks Bengkok Klangon	17.625.000,00	Desa Mori Kec. Trucuk	1.500	Ex. Bengkok Kades Persil 42 sII
202	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Pakai	38.100.000,00	Semanding	2.540	Tanah Pertanian
203	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Pakai	38.700.000,00	Semanding	2.580	NULL
204	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak Pakai	85.800.000,00	Semanding	5.720	NULL
205	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak pakai	28.500.000,00	Semanding	1.900	NULL
206	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak Pakai	28.500.000,00	Semanding	1.900	NULL
207	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak Pakai	52.200.000,00	Semanding	3.480	NULL
208	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak Pakai	38.100.000,00	Semanding	2.450	NULL
209	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Pakai	21.900.000,00	Semanding	1.460	NULL
210	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak Pakai	86.700.000,00	Semanding	5.780	NULL
211	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hah Pakai	65.700.000,00	Semanding	4.380	NULL
212	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak Pakai	70.800.000,00	Semanding	4.720	NULL

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
213	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak Pakai	70.800.000,00	Semanding	4.720	NULL
214	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak pakai	37.650.000,00	seanding	2.510	NULL
215	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak Pakai	54.900.000,00	Semanding	3.660	NULL
216	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak Pakai	42.600.000,00	Semanding	2.840	NULL
217	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	Hak Pakai	54.900.000,00	Semanding	3.660	NULL
218	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	3.260.000,00	Ngulanan	3.260	NULL
219	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	24.700.000,00	Ngulanan	2.470	NULL
220	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	30.000.000,00	Ngulanan	3.000	NULL
221	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	29.700.000,00	Ngulanan	2.970	NULL
222	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	18.500.000,00	Ngulanan	1.850	NULL
223	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	17.100.000,00	Ngulanan	1.710	NULL
224	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	62.700.000,00	Ngulanan	6.270	NULL
225	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	15.500.000,00	ngulanan	1.540	NULL
226	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	50.500.000,00	Ngulanan	5.050	NULL
227	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	18.800.000,00	Ngulanan	1.880	NULL
228	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	80.300.000,00	Ngulanan	8.030	NULL
229	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	22.800.000,00	Ngulanan	2.280	NULL
230	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	21.000.000,00	Ngulanan	2.100	NULL
231	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	4.900.000,00	Ngulanan	490	NULL
232	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	21.300.000,00	Ngulanan	2.130	NULL
233	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	16.700.000,00	Ngulanan	1.670	NULL
234	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	9.400.000,00	Ngulanan	940	NULL
235	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	6.100.000,00	Ngulanan	610	NULL
236	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	5.200.000,00	Ngulanan	520	NULL
237	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	8.700.000,00	Ngulanan	870	NULL

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
238	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	5.900.000,00	Nglanan	590	NULL
239	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	6.400.000,00	Ngulanan	640	NULL
240	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Kulon	Tanah Sawah Irigasi	NULL	8.200.000,00	Ngulanan	820	NULL
241	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	tanah kampung lainnya (dst)	ditempati penduduk	604.198.000,00	kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegor	5.866	sudah jadi sertifikat, sertifikat di aset
242	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Kaveling (dst)	RUMAH PENDUDUK	190.950.000,00	JL. HOS. COKROAMINOTO	670	Sisa Bengkok Petinggi Persil 22 D.III luas 2150
243	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	234.000.000,00	LEDOK WETAN	5.200	Ex. Bengkok Carik Persil 29 Si
244	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	531.000.000,00	Kel. Ledokwetan Bojonegoro	11.800	Ex. Bengkok Carik Persil No. 30 Si
245	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	13.000.000,00	Kel. Ledok Wetan Bojonegoro	300	Ex. Bengkok Kamituwo Persil No. 27 Si
246	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	195.750.000,00	Kel. Ledok Wetan Bojonegoro	4.350	Ex. Bengkok Kamituwo Persil 28 Si
247	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	81.000.000,00	Kel. Ledok Wetan Bojonegoro	1.800	Ex. Bengkok Jogoboyo Persil 26 Si
248	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	990.000.000,00	Kel. Ledok Wetan Bojonegoro	6.600	Bondo Desa Persil No. 36 Si
249	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	79.400.000,00	Desa Tikusan Kapas	3.970	Ex. Bengkok Ledok Wetan Persil No. 4 D III
250	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	198.000.000,00	Desa Tikusan Kapas	9.900	Ex. Bengkok Ledokwetan Persil No. 26.3.b.SII
251	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	52.400.000,00	Desa Tikusan Kapas	2.620	Ex. Bengkok Ledokwetan Persil No. 2.a.D.III
252	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	62.600.000,00	Desa Tikusan Kapas	3.130	Ex. Bengkok Ledokwetan Persil No. 3.b.S.II
253	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	57.400.000,00	Desa Tikusan Kapas	2.870	Ex. Bengkok Ledokwetan Persil No. 3.b.S.II
254	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ledok Wetan	Tanah Sawah Irigasi	PERTANIAN	35.000.000,00	Desa Tikusan Kapas	1.750	Ex. Bengkok Ledokwetan Persil No. 3.d.S.II
255	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ngrowo	Tanah Sawah Irigasi	tanah kas kelurahan	1.189.250.000,00	kel.ngrowo kec. bojonegoro	3.550	eks bengkok kamituwo, persil no. 33 SP III c3
256	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ngrowo	Tanah Sawah Irigasi	tanah kas kelurahan	2.144.000.000,00	kel. ngrowo kec. bojonegoro	6.400	eks. bengkok carik, persil no. 27 SP III c2
257	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ngrowo	Tanah Sawah Irigasi	tanah kas kelurahan	2.680.000.000,00	kel. ngrowo kec. bojonegoro	8.000	eks. bengkok petinggi, pesil no. 35 SK III c1
258	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ngrowo	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Pertanian	151.140.000,00	Desa Padangmentoyo Kec. Kapas	7.557	Eks Bengkok Modin
259	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Ngrowo	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Pertanian	72.080.000,00	Desa Padangmentoyo Kec. Kapas	3.604	Eks Bengkok

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
260	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Mojokampung	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Sawah	290.500.000,00	Ds. Pacul Kec. Bojonegoro	29.050	Tanah Ex. Bengkok Kel. Mojokampung persil no 54 klas S.I
261	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Mojokampung	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Sawah	108.500.000,00	Ds. Pacul Kec. Bojonegoro	10.850	tanah Ex. Bengkok Kamituwo Kel. Mojokampung persil no. 49 dan 50 klas S. I
262	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Mojokampung	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Sawah	53.000.000,00	Ds. Pacul Kec. Bojonegoro	5.300	Tanah Ex. Bengkok Jogoboyo Kel. Mojokampung persil no. 47 dan 48 klas S. I
263	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Mojokampung	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Sawah	58.000.000,00	Ds. Pacul Kec. Bojonegoro	5.800	Tanah Ex. Bengkok Jogoboyo 2 Kel. Mojokampung persil no. 45 dan 46 klas S. I
264	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Mojokampung	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Sawah	58.500.000,00	Ds. Pacul Kec. Bojonegoro	5.738	Tanah Ex. Bengkok Kebayan 1 Kel. Mojokampung persil no. 44 klas S. I
265	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Mojokampung	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Sawah	63.500.000,00	Ds. Pacul Kec. Bojonegoro	6.644	Tanah Ex. bengkok Kebayan 2 Kel. Mojokampung persil no. 43 klas S. I
266	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Mojokampung	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Sawah	37.000.000,00	Ds. Pacul Kec. Bojonegoro	3.700	Tanah Ex. Bengkok Modin Kel. Mojokampung persil no. 56 klas S. I
267	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Mojokampung	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Sawah	27.000.000,00	Ds. Pacul Kec. Bojonegoro	2.700	Tanah Ex. Bengkok Jogotirto Kel. Mojokampung persil no. 61 klas S. I
268	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Mojokampung	Tanah Sawah Irigasi	tanah sawah	182.000.000,00	desa pacul	18.200	tanah eks. bondo desa desa persil no. 41 klas S. I
269	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Kampung		318.500.000,00	Jl. Asoka	1.300	Ditempati Penduduk (Persil 28)
270	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	Kas Kel Sumbang	1.600.000.000,00	Ds. Ngumpakdalem Kec. Dander	25.000	perubahan dr luas 2500 no berkas 215
271	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi		168.000.000,00	Ds. Ngampel Kec. Kapas	1.680	Ex. Bengkok Kel. Sumbang (Persil26 SII)
272	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi		122.900.000,00	Ds. Sukowati Kec. Kapas	12.290	Ex. Bengkok Kel. Sumbang (Persil 21 SII)
273	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel. sumbang	2.653.000.000,00	Kel. Kadipaten	13.265	penambahan invent, no.berkas : 208
274	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel. sumbang	156.096.000,00	Desa Semanding	4.336	penambahan invent, no. berkas : 159
275	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel.sumbang	136.728.000,00	Desa Semanding	3.798	penambahan invent, no. berkas : 161
276	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel. sumbang	66.492.000,00	Desa Semanding	1.847	tambahan invent, no. berkas: 162

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
277	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumbang	88.668.000,00	Desa Semjanding	2.463	tambahan invent, no.berkas : 163
278	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumbang	660.800.000,00	Desa Kalirejo	10.325	tambah invent, no. berkas : 112
279	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumbnang	120.192.000,00	Desa kalirejo	1.878	tambah invent no. berkas ; 204
280	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumbang	133.568.000,00	Desa Kalirejo	2.087	tambah invent, no.berkas : 205
281	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumbang	208.640.000,00	Desa Kalirejo	3.260	tambah invent, no.berkas : 209
282	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumbang	138.560.000,00	Desa kalirejo	2.165	tambah invent, no. berkas : 211
283	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumbang	265.440.000,00	Desa Pacul	1.659	tambah invent, no berkas 206
284	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumbang	541.440.000,00	Desa Pacul	3.384	tambah invent, no berkas : 207
285	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumjbang	258.880.000,00	Desa Pacul	1.618	tabah invent, no. berkas : 210
286	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumbang	690.100.000,00	Desav Ngampel	6.700	tambah invent, no berkas : 176
287	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumbang	220.000.000,00	Desa Sukowati	1.375	tambah invent, no.berkas 212
288	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	kas kel sumjbang	351.200.000,00	Desa Sukowati	2.195	tambah invent, no.berkas : 213
289	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	NULL	298.960.000,00	Kalirejo	8.080	Eks bengkok cari (Persil 20 SII)
290	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	NULL	456.330.000,00	Semanding	22.260	Eks bengkok modin (Persil 33 SIII)
291	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Sumbang	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Sumbang	160.731.000,00	Desa Wedi, Kecamatan Kapas	5.953	Sesuai Copy Buku C Desa Wedi dan Surat Pernyataan Lurah Sumbang No. 032/13/412.51.1.4/2019 tgl. 14 Januari 2019
292	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Karang Pacar	tanah kampung lainnya (dst)	ditempati penduduk	4.402.296.000,00	Jalan J.A Soeprapto Kel. karang pacar Kec. Bojonegoro	4.806	NULL
293	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Karang Pacar	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	16.500.000,00	Ds. Sambiroto Kec. Kapas	1.650	Tanah Ex. Bengkok Kel. Karangpacar Luas SHP N0.11 1544 M2
294	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Karang Pacar	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	85.000.000,00	Ds. Sambiroto Kec. Kapas	8.500	Tanah Ex. Bengkok Kel. Karangpacar Luas SHP No. 12 7551 M2
295	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Karang Pacar	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	38.500.000,00	Ds. Ngampel Kec. Kapas	3.850	Tanah Eks Bengkok Kel Karangpacar No, Sertifikat 00011 Luas Sertifikat 3,750 m2.

LAMPIRAN 3

NO.	BIDANG	UNIT	NAMA ASET	PENGGUNAAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	ALAMAT	LUAS (M2)	KETERANGAN
296	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Karang Pacar	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	48.000.000,00	Ds. Wedi Kec. Kapas	4.800	Tanah Ex. Bengkok Kel. Karangpacar No. Berkas 319 No, Sertifikat 00015 Luas Sertifikat 4.800 m2
297	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Karang Pacar	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	62.230.000,00	Ds. Sukorejo Kec. Bojonegoro	6.223	Tanah Ex. bengkok Kel. Karangpacar Luas SHP No 69 3.480 m2
298	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Karang Pacar	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	17.800.000,00	Ds. sukorejo Kec. Bojonegoro	1.780	Tanah Ex. Bengkok Kel. Karangpacar No, Sertifikat 00068 Luas Sertifikat, 3.890 m2
299	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Karang Pacar	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	31.990.000,00	Ds. Padangmentoyo Kec. Kapas	3.199	Tanah Ex. Bengkok Kel. Karangpacar Luas Sertifikat , 1.631 m2 No. Sertifikat ,00005
300	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Karang Pacar	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	36.360.000,00	Ds. Padangmentoyo Kec. Kapas	3.636	Tanah Ex. Bengkok Kel. Karangpacar Luas Sertifikat, 1.344 m2 No.00004.
301	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Karang Pacar	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	44.500.000,00	Ds. Ngampel Kec. Kapas	4.450	Tanah Ex. Bengkok Kel. Karangpacar Luas Sertifikat, 2.741 m2 No. Sertifikat 00012
302	Kecamatan Bojonegoro	Kelurahan Karang Pacar	Tanah Sawah Irigasi	Pertanian	35.300.000,00	Ds. Ngampel Kec.Kapas	3.530	Tanah Ex. Bengkok Kel. Karangpacar No Sertifikat, 00013 Luas Sertifikat, 6.035 m2
		Jumlah Properti Investasi - Tanah			**181.353.990.719,01**			

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO SEKRETARIAT DAERAH

NURUL AZIZAH

Bojonegoro, 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd

ADRIYANTO

LAMPIRAN 4

DAFTAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN PROPERTI INVESTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2023

NO.	UNIT	NAMA ASET	LUAS_M2	HARGA PEROLEHAN (Rp)	LOKASI	KETERANGAN LAINNYA
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	679,54	210.257.196,00	NULL	Pekerjaan Pembangunan Kios Pasar Burung Buana Lestari Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	162,71	210.434.535,00	NULL	Pekerjaan Rehabilitasi Prasarana Pasar Wisata Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	447,32	210.270.765,00	NULL	Pekerjaan Pembangunan Penunjang Pasar Burung Buana Lestari Bojonegoro (P-APBD) (DBHM)
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2.283,00	915.650.000,00	Jl. lettu suwolo	PASAR HEWAN BOJONEGORO
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	530,00	2.005.741.500,00	Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem	Pasar Daerah Unit Kedungadem Sebelah Selatan
6	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	3.963,00	7.703.411.261,00	Desa Dander Kecamatan Dander	Pasar Daerah Unit Dander
7	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2.881,00	3.404.906.177,00	Desa Padangan Kecamatan Padangan	Pasar Daerah Unit Padangan
8	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	3.216,00	7.534.479.513,00	Jalan Raya Kedung adem kecamatan Kedung adem	Pasar kedungadem sebelah Utara
9	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	3.549,00	8.505.925.296,00	Jalan Raya Malo Kecamatan Malo	Pasar milik Daerah di Kecamatan Malo
10	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	5.631,00	13.977.701.947,00	jalan Raya Sugihwaras kecamatan Sugihwaras	Pasar Milik Daerah di Kecamatan Sugihwaras
11	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	735,00	2.007.433.428,00	Kecamatan Margomulyo	Bangunan Pasar Kerajinan Rakyat Margomulyo
12	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2.908,00	3.682.087.050,00	bangunan pasar unit kanor	Pembangunan pasar unit kanor
13	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.959,75	12.747.166.583,00	Pasar Kalitidu	Gedung Pasar Kalitidu (Dari Dinas PKP dan Cipta Karya)
14	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.297,93	8.963.091.452,00	Desa Banjarejo	Gedung Pasar Banjarejo Palawija (Dari Dinas PKP dan Cipta Karya)
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	279,00	954.621.836,32	Desa Kedungadem	Gedung Pasar Kedungadem Sebelah Timur (Dari Dinas PKP dan Cipta Karya)

LAMPIRAN 4

NO.	UNIT	NAMA ASET	LUAS_M2	HARGA PEROLEHAN (Rp)	LOKASI	KETERANGAN LAINNYA
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	324,00	1.303.756.174,75	Kecamatan Ngasem Bojonegoro	Pasar Kerajinan Rakyat Ngasem Kecamatan Ngasem
17	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	231,00	49.420.054.310,00	Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro	Los loak pasar daerah unit banjarejo
18	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	67,50	37.239.000,00	Pasar Unit Malo Kecamatan Malo	Garasi Pasar Unit Malo
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	154,00	92.579.000,00	Pasar Unit Kanor Kecamatan Kanor	Bidak dan Los basah Pasar Unit Kanor
20	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2.127,50	2.512.355.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Toko Timur (Penilaian Kembali)
21	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	302,40	355.977.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Toko Utara Timur (Penilaian Kembali)
22	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	230,40	271.221.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Toko Utara Tengah (Penilaian Kembali)
23	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	302,40	355.977.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Toko Utara Barat (Penilaian Kembali)
24	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	265,20	312.186.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Toko Barat Utara (Penilaian Kembali)
25	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	204,00	240.143.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kel. Ledok Wetan, Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Toko Barat Selatan (Penilaian Kembali)
26	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	90,72	51.189.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los A1 (Penilaian Kembali)
27	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	90,72	51.189.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los A2 (Penilaian Kembali)
28	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	171,20	96.600.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los B1 (Penilaian Kembali)
29	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	171,20	96.600.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los B2 (Penilaian Kembali)
30	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	97,20	54.845.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los C1 (Penilaian Kembali)
31	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	97,20	54.845.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los C2 (Penilaian Kembali)
32	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	48,60	27.423.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los D1 (Penilaian Kembali)

LAMPIRAN 4

NO.	UNIT	NAMA ASET	LUAS_M2	HARGA PEROLEHAN (Rp)	LOKASI	KETERANGAN LAINNYA
33	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	48,60	27.423.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los D2 (Penilaian Kembali)
34	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	166,86	94.151.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los E (Penilaian Kembali)
35	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	386,25	217.943.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los F (Penilaian Kembali)
36	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	386,25	217.943.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los G (Penilaian Kembali)
37	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	386,25	217.943.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los H (Penilaian Kembali)
38	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	386,25	217.943.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los I (Penilaian Kembali)
39	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	90,00	50.783.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los antara I-W 1 (Penilaian Kembali)
40	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	102,60	57.892.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los antara I-W 2 (Penilaian Kembali)
41	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	419,76	236.851.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los J (Penilaian Kembali)
42	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	360,00	203.131.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los K (Penilaian Kembali)
43	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	447,00	252.221.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los L (Penilaian Kembali)
44	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	424,16	239.334.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los M (Penilaian Kembali)
45	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	181,00	102.130.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los N (Penilaian Kembali)
46	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	475,76	268.449.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los OP (Penilaian Kembali)
47	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	187,50	105.798.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los Q (Penilaian Kembali)
48	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	217,35	122.641.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los R (Penilaian Kembali)
49	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	217,35	122.641.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los S (Penilaian Kembali)

LAMPIRAN 4

NO.	UNIT	NAMA ASET	LUAS_M2	HARGA PEROLEHAN (Rp)	LOKASI	KETERANGAN LAINNYA
50	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	292,95	165.298.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los TU (Penilaian Kembali)
51	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	12,00	6.771.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los V (Penilaian Kembali)
52	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	198,00	111.722.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Los W (Penilaian Kembali)
53	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	22,50	33.738.000,00	Jalan Pasar No. 1, Kelurahan Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	Gedung Pasar Kota Bangunan Kamar Mandi (Penilaian Kembali)
54	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	450,00	824.912.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Toko Depan Sisi Barat (Penilaian Kembali)
55	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	600,00	764.964.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Toko Depan Sisi Timur (Penilaian Kembali)
56	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	210,00	101.926.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Toko Depan Barat Daya (Penilaian Kembali)
57	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	135,00	65.524.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Toko Sisi Barat (Penilaian Kembali)
58	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los A (Penilaian Kembali)
59	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los B (Penilaian Kembali)
60	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los C (Penilaian Kembali)
61	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los D (Penilaian Kembali)
62	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los E (Penilaian Kembali)
63	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los F (Penilaian Kembali)
64	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los G (Penilaian Kembali)
65	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los H (Penilaian Kembali)
66	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los I (Penilaian Kembali)

LAMPIRAN 4

NO.	UNIT	NAMA ASET	LUAS_M2	HARGA PEROLEHAN (Rp)	LOKASI	KETERANGAN LAINNYA
67	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los J (Penilaian Kembali)
68	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los K (Penilaian Kembali)
69	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los L (Penilaian Kembali)
70	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los M (Penilaian Kembali)
71	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	108,00	32.216.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los N (Penilaian Kembali)
72	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	84,00	25.834.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los O (Penilaian Kembali)
73	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	84,00	25.834.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los P (Penilaian Kembali)
74	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	84,00	25.834.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los Q (Penilaian Kembali)
75	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	84,00	25.834.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los R (Penilaian Kembali)
76	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	84,00	25.834.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los S (Penilaian Kembali)
77	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	84,00	25.834.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los T (Penilaian Kembali)
78	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	84,00	25.834.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los U (Penilaian Kembali)
79	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	84,00	25.834.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los V (Penilaian Kembali)
80	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	84,00	25.834.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los W (Penilaian Kembali)
81	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	84,00	25.834.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Los X (Penilaian Kembali)
82	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	12,00	8.077.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Toilet Barat (Penilaian Kembali)
83	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	12,00	8.077.000,00	Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kel. Banjarejo	Gedung Pasar Buah Banjarejo Bangunan Toilet Timur (Penilaian Kembali)

LAMPIRAN 4

NO.	UNIT	NAMA ASET	LUAS_M2	HARGA PEROLEHAN (Rp)	LOKASI	KETERANGAN LAINNYA
84	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2.932,00	11.429.159.407,00	Jl. Bojonegoro - Babat Ds. Sroyo Kec. Kanor	Pasar Sroyo
85	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.387,00	7.686.583.647,00	Jl. Raya Bojonegoro - Babat, Ds. Kedung Bondo Kec. Balen	Pasar Hewan Bojonegoro
86	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1.068,00	5.571.085.151,00	Jl. Raya Kedewan RT. 005 RW. 002 Kecamatan Kedewan	Gedung Pasar Rakyat Kedewan (Hibah dari Kemendag) ta 2022
87	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	15.335,60	59.283.724.963,82	Jl. Kopral Kasan Bojonegoro	Gedung Pasar Wisata Bojonegoro (Mutasi Cipta Karya Tahun 2023)
88	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Gedung Garasi/Pool Permanen	74,00	3.806.000.000,00	Jl. Diponegoro No. 38	Garase
89	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	200,00	10.900.500.000,00	Jl. Diponegoro No. 38	Rumah Dinas Kepala Dinas
90	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	580,00	2.472.240.847,86	Jl. K.H. Mansyur No. 72 Bojonegoro	Gedung Serba Guna
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI - GEDUNG DAN BANGUNAN			**235.072.241.040,75**		

Bojonegoro, 9 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd

ADRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO SEKRETARIAT DAERAH

NURUL AZIZAH

LAMPIRAN 5

RINCIAN PERHITUNGAN BEBAN PERSEDIAAN – LO TAHUN 2023

No	Nama SKPD	Persediaan 2022	Belanja Barang Habis Pakai (LRA)	Belanja Barang Tak Habis Pakai (LRA)	BHP dan BTHP BLUD	Persediaan 2023	Koreksi	Beban Persediaan 2023 Audited
1	Dinas Pendidikan	266.035.892,00	3.145.430.100,00	62.112.800,00		237.540.600,00		3.236.038.192,00
2	Dinas Kesehatan	28.849.962.367,26	63.876.919.246,38	937.831.635,00		31.646.626.481,42		62.018.086.767,22
3	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	17.546.830.110,22			117.045.494.826,00	18.047.725.754,68		116.544.599.181,54
4	RSUD Sumberrejo	5.386.866.610,88			15.133.910.852,00	7.437.133.089,64		13.083.644.373,24
5	RSUD Padangan	8.350.491.356,08			15.698.451.410,00	5.367.381.646,18		18.681.561.119,90
6	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	68.594.300,00	6.257.552.924,00	30.682.840,00		150.153.230,00		6.206.676.834,00
7	Dinas PU Sumber Daya Air	1.545.989.913,84	6.140.856.191,00	243.107.000,00		1.726.908.975,00		6.203.044.129,84
8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	321.842.350,00	9.269.052.423,00	63.764.050,00		2.150.568.250,00		7.504.090.573,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.038.700,00	592.507.800,00	3.590.000,00		3.041.000,00		595.095.500,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	1.241.100,00	1.844.763.103,00	1.299.000,00		1.623.600,00		1.845.679.603,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	439.206.143,60	1.732.272.743,00	164.656.550,00		1.637.797.808,75	977.986.164,00	1.676.323.791,85
12	Dinas Pemadam Kebakaran	157.550,00	1.158.043.888,00	1.220.000,00		883.800,00		1.158.537.638,00
13	Dinas Sosial	232.148.804,00	4.216.881.548,00	13.552.400,00		174.978.356,00		4.287.604.396,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	32.052.500,00	6.158.224.155,00	711.000,00		76.166.600,00		6.114.821.055,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	361.994.312,50	3.343.900.592,00	2.341.500,00		308.108.882,00		3.400.127.522,50
16	Dinas Lingkungan Hidup	2.191.300.450,00	5.122.094.420,00	82.605.500,00		200.690.800,00		7.195.309.570,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.965.073.843,20	2.015.140.696,00	1.033.000,00		1.029.570.965,38		2.951.676.573,82
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.287.850,00	1.293.696.700,00	-		2.634.500,00		1.296.350.050,00
19	Dinas Perhubungan	377.729.191,00	927.819.536,00	2.268.000,00		448.956.439,00		858.860.288,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.991.450,00	1.610.299.810,00	3.023.700,00		7.333.100,00		1.613.981.860,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.409.600,00	468.080.950,00	1.589.000,00		1.506.000,00		469.573.550,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	918.000,00	3.891.266.255,00	39.709.500,00		966.200,00		3.930.927.555,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	171.456.900,00	2.292.959.241,00	27.043.300,00		91.529.720,00		2.399.929.721,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.174.150,00	441.732.774,00	7.895.350,00		556.100,00		458.246.174,00

LAMPIRAN 5

No	Nama SKPD	Persediaan 2022	Belanja Barang Habis Pakai (LRA)	Belanja Barang Tak Habis Pakai (LRA)	BHP dan BTHP BLUD	Persediaan 2023	Koreksi	Beban Persediaan 2023 Audited
25	Dinas Peternakan dan Perikanan	215.329.605,00	3.789.408.790,00	13.267.350,00		789.387.219,00		3.228.618.526,00
26	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	624.500,00	1.087.725.456,00	3.142.000,00		2.063.200,00		1.089.428.756,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	493.780.319,00	20.813.400,00		434.300,00		514.159.419,00
28	Sekretariat Daerah	36.346.800,00	16.168.875.905,00	201.982.700,00	-	26.806.200,00		16.380.399.205,00
29	Sekretariat DPRD	550.760,00	4.091.391.795,00	81.361.000,00		4.653.850,00		4.168.649.705,00
30	Kecamatan Bojonegoro	546.000,00	5.394.755.584,00	295.854.000,00		546.000,00		5.690.609.584,00
31	Kecamatan Kapas	715.600,00	720.633.501,00	600.000,00		759.600,00		721.189.501,00
32	Kecamatan Balen	148.300,00	756.653.472,00	300.000,00		148.300,00		756.953.472,00
33	Kecamatan Sumberrejo	148.750,00	809.895.183,00	240.000,00		562.200,00		809.721.733,00
34	Kecamatan Kanor	461.000,00	828.029.900,00	-		229.000,00		828.261.900,00
35	Kecamatan Baureno	1.072.860,00	811.557.235,00	-		675.540,00		811.954.555,00
36	Kecamatan Sugihwaras	434.300,00	588.640.884,00	-		274.500,00		588.800.684,00
37	Kecamatan Kepohbaru	279.050,00	842.771.439,00	-		1.872.520,00		841.177.969,00
38	Kecamatan Kedungadem	54.900,00	800.479.200,00	-		54.900,00		800.479.200,00
39	Kecamatan Sukosewu	414.800,00	299.683.600,00	-		270.200,00		299.828.200,00
40	Kecamatan Trucuk	350.000,00	271.272.600,00	-		-		271.622.600,00
41	Kecamatan Malo	963.060,00	660.922.860,00	-		215.000,00		661.670.920,00
42	Kecamatan Kalitidu	65.000,00	630.680.600,00	-		160.000,00		630.585.600,00
43	Kecamatan Dander	340.500,00	546.816.031,00	-		340.500,00		546.816.031,00
44	Kecamatan Padangan	423.300,00	362.641.045,00	-		572.800,00		362.491.545,00
45	Kecamatan Purwosari	-	308.445.700,00	-		193.000,00		308.252.700,00
46	Kecamatan Kasiman	593.400,00	221.621.813,00	-		327.600,00		221.887.613,00
47	Kecamatan Kedewan	687.300,00	189.437.400,00	-		435.600,00		189.689.100,00
48	Kecamatan Ngasem	473.200,00	612.125.660,00	-		307.000,00		612.291.860,00
49	Kecamatan Ngambon	489.300,00	170.109.300,00	-		424.100,00		170.174.500,00
50	Kecamatan Tambakrejo	452.000,00	619.177.300,00	-		404.000,00		619.225.300,00
51	Kecamatan Ngraho	229.800,00	536.200.700,00	-		333.900,00		536.096.600,00
52	Kecamatan Margomulyo	274.500,00	250.230.562,00	-		1.020.400,00		249.484.662,00
53	Kecamatan Temayang	306.800,00	272.882.089,00	-		337.900,00		272.850.989,00

LAMPIRAN 5

No	Nama SKPD	Persediaan 2022	Belanja Barang Habis Pakai (LRA)	Belanja Barang Tak Habis Pakai (LRA)	BHP dan BTHP BLUD	Persediaan 2023	Koreksi	Beban Persediaan 2023 Audited
54	Kecamatan Bubulan	339.500,00	169.187.640,00	-		365.400,00		169.161.740,00
55	Kecamatan Gondang	234.800,00	177.255.541,00	-		1.174.000,00		176.316.341,00
56	Kecamatan Sekar	432.700,00	182.408.550,00	2.669.200,00		366.000,00		185.144.450,00
57	Kecamatan Gayam	319.000,00	367.638.500,00	-		372.800,00		367.584.700,00
58	Inspektorat	9.888.500,00	613.877.646,00	2.020.000,00		20.246.400,00		605.539.746,00
59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.331.000,00	1.139.599.960,00	-		1.575.400,00		1.140.355.560,00
60	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.432.000,00	1.528.035.815,00	11.388.000,00		20.154.250,00		1.522.701.565,00
61	Badan Pendapatan Daerah	138.466.193,00	1.228.445.646,00	18.208.300,00		151.381.850,00		1.233.738.289,00
62	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.117.000,00	1.715.093.946,00	4.522.000,00		2.324.500,00		1.723.408.446,00
TOTAL		**68.560.129.522,58**	**176.057.884.262,38**	**2.346.404.075,00**	**147.877.857.088,00**	**71.782.151.827,05**	**977.986.164,00**	**324.038.109.284,91**

Bojonegoro, 9 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NURUL AZIZAH

Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd

ADRIYANTO

LAMPIRAN 6

RINCIAN PERHITUNGAN BEBAN JASA – LO TAHUN 2023

NO	SKPD	UTANG JASPEL 2022	UTANG USAHA 2022	BELANJA JASA 2023	UTANG JASPEL 2023	UTANG USAHA 2023	KOREKSI	Belanja dibayar di muka 2023 - belanja dibayar dimuka 2022	Persediaan yang blm diserahkan pihak ketiga (tahun 2023)	BEBAN JASA 2023 (AUDITED)
1	Dinas Pendidikan	-	52.496.889,00	140.723.510.204,85	-	41.744.192,00				140.712.757.507,85
2	Dinas Kesehatan	2.418.559.290,00	431.785.384,00	283.721.166.779,00	4.021.450.496,63	537.684.347,00				285.429.956.948,63
3	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	-	2.783.497.581,00	39.099.516.574,00	-	8.243.349.541,00				44.559.368.534,00
4	RSUD Sumberrejo	-	187.268.070,00	8.919.408.860,00	-	240.338.081,00				8.972.478.871,00
5	RSUD Padangan	-	240.872.155,00	8.976.449.790,00	-	1.783.262.212,00				10.518.839.847,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	-	26.133.050,00	16.821.550.122,00	-	28.570.353,00	(85.789.200,00)			16.738.198.225,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	-	12.692.344,00	11.203.493.912,00	-	16.469.733,00				11.207.271.301,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	-	2.340.542.653,00	37.681.428.218,00	-	6.687.442.003,41	892.707.000,00			42.921.034.568,41
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	1.027.940.420,00	-	-				1.027.940.420,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	5.702.596.572,00	-	-				5.702.596.572,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	6.711.355,00	2.129.072.860,00	-	8.324.066,00				2.130.685.571,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	5.839.147.292,00	-	-				5.839.147.292,00
13	Dinas Sosial	-	513.700,00	25.413.848.310,00	-	20.959.667,00		100.052.083,67		25.334.242.193,33
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	-	12.365.819.061,00	-	11.924.734,00				12.377.743.795,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	21.639.158,00	4.045.618.423,00	-	13.567.778,00				4.037.547.043,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	-	373.400,00	12.248.055.029,00	-	49.129.902,00				12.296.811.531,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	9.349.804,00	1.777.081.506,00	-	11.028.972,00				1.778.760.674,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	490.200,00	26.923.322.430,00	-	9.298.100,00				26.932.130.330,00
19	Dinas Perhubungan	-	-	13.463.331.786,00	-	-				13.463.331.786,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	32.182.341,00	7.851.129.940,00	-	31.966.540,00				7.850.914.139,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	96.000,00	2.474.935.026,00	-	34.922.988,00				2.509.762.014,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	427.140,00	18.851.172.559,00	-	-				18.850.745.419,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	2.398.200,00	7.530.862.321,00	-	29.313.971,00				7.557.778.092,00

LAMPIRAN 6

NO	SKPD	UTANG JASPEL 2022	UTANG USAHA 2022	BELANJA JASA 2023	UTANG JASPEL 2023	UTANG USAHA 2023	KOREKSI	Belanja dibayar di muka 2023 - belanja dibayar dimuka 2022	Persediaan yang blm diserahkan pihak ketiga (tahun 2023)	BEBAN JASA 2023 (AUDITED)
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	621.749.737,00	-	-				621.749.737,00
25	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	14.907.306,00	3.043.466.476,00	-	11.878.758,00				3.040.437.928,00
26	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	-	25.242.886,00	6.018.929.333,00	-	32.260.854,00				6.025.947.301,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	14.243.965,00	3.481.236.955,00	-	14.332.550,00				3.481.325.540,00
28	Sekretariat Daerah	-	-	38.107.869.890,00	-	196.567.311,00				38.304.437.201,00
29	Sekretariat DPRD	-	-	4.015.770.164,00	-	-				4.015.770.164,00
30	Kecamatan Bojonegoro	-	-	4.686.852.782,00	-	-				4.686.852.782,00
31	Kecamatan Kapas	-	1.306.700,00	198.609.138,00	-	1.164.300,00				198.466.738,00
32	Kecamatan Balen	-	1.942.690,00	223.182.613,00	-	2.061.765,00				223.301.688,00
33	Kecamatan Sumberrejo	-	-	151.277.278,00	-	-				151.277.278,00
34	Kecamatan Kanor	-	-	132.816.050,00	-	-				132.816.050,00
35	Kecamatan Baureno	-	-	195.352.636,00	-	-				195.352.636,00
36	Kecamatan Sugihwaras	-	418.637,00	134.564.204,00	-	200.536,00				134.346.103,00
37	Kecamatan Kepohbaru	-	-	163.385.419,00	-	-				163.385.419,00
38	Kecamatan Kedungadem	-	-	255.318.876,00	-	-				255.318.876,00
39	Kecamatan Sukosewu	-	1.948.505,00	189.093.014,00	-	1.913.990,00				189.058.499,00
40	Kecamatan Trucuk	-	-	158.944.655,00	-	-				158.944.655,00
41	Kecamatan Malo	-	5.660.582,00	198.588.861,00	-	3.432.397,00				196.360.676,00
42	Kecamatan Kalitidu	-	-	205.441.127,00	-	-				205.441.127,00
43	Kecamatan Dander	-	200.000,00	182.681.712,00	-	-				182.481.712,00
44	Kecamatan Padangan	-	-	119.584.778,00	-	-				119.584.778,00
45	Kecamatan Purwosari	-	-	131.594.564,00	-	-				131.594.564,00
46	Kecamatan Kasiman	-	713.784,00	218.703.377,00	-	719.176,00				218.708.769,00
47	Kecamatan Kedewan	-	-	189.073.691,00	-	-				189.073.691,00
48	Kecamatan Ngasem	-	-	232.259.727,00	-	-				232.259.727,00
49	Kecamatan Ngambon	-	-	141.916.930,00	-	-				141.916.930,00
50	Kecamatan Tambakrejo	-	-	86.400.639,00	-	-				86.400.639,00

LAMPIRAN 6

NO	SKPD	UTANG JASPEL 2022	UTANG USAHA 2022	BELANJA JASA 2023	UTANG JASPEL 2023	UTANG USAHA 2023	KOREKSI	Belanja dibayar di muka 2023 - belanja dibayar dimuka 2022	Persediaan yang blm diserahkan pihak ketiga (tahun 2023)	BEBAN JASA 2023 (AUDITED)
51	Kecamatan Ngraho	-	-	180.232.541,00	-	-				180.232.541,00
52	Kecamatan Margomulyo	-	3.032.044,00	173.733.052,00	-	2.992.955,00				173.693.963,00
53	Kecamatan Temayang	-	1.671.938,00	141.490.450,00	-	4.604.928,00				144.423.440,00
54	Kecamatan Bubulan	-	-	182.457.648,00	-	-				182.457.648,00
55	Kecamatan Gondang	-	-	143.768.520,00	-	-				143.768.520,00
56	Kecamatan Sekar	-	-	126.222.925,00	-	-				126.222.925,00
57	Kecamatan Gayam	-	-	223.332.600,00	-	-				223.332.600,00
58	Inspektorat	-	10.414.339,00	1.439.076.632,00	-	16.392.380,00				1.445.054.673,00
59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	3.841.847.660,00	-	-				3.841.847.660,00
60	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	66.200,00	2.944.054.575,00	-	105.550,00				2.944.093.925,00
61	Badan Pendapatan Daerah	-	11.152.520,00	1.900.755.032,00	-	11.375.658,00				1.900.978.170,00
62	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	64.216.618,00	4.493.991.513,00	-	22.787.050,00				4.452.561.945,00
TOTAL		**2.418.559.290,00**	**6.306.608.138,00**	**774.066.085.768,85**	**4.021.450.496,63**	**18.122.087.338,41**	**806.917.800,00**	**100.052.083,67**	**-**	**788.191.321.892,22**

Bojonegoro, 9 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO SEKRETARIAT DAERAH

NURUL AZIZAH

Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd

ADRIYANTO

LAMPIRAN 7

RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2023

NO	NAMA SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022 (AUDITED_ PEMERIKSAAN)	PENGURANGAN KARENA PENGHAPUSAN	KOREKSI EKUITAS		SALDO 2022 TERKOREKSI (PEMERIKSAAN)	BEBAN PENYUSUTAN 2023_AUDITED	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023_AUDITED
				Penambahan	Pengurangan			
1	Dinas Pendidikan	400.292.155.037,29	-	163.170.844,00	-	400.455.325.881,29	45.593.060.323,63	446.048.386.204,92
2	Dinas Kesehatan	158.196.630.199,33	(5.000.000,00)	19.354.408,97	(3.733.937.437,50)	154.477.047.170,80	38.742.950.176,70	193.219.997.347,50
3	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	305.793.443.565,00	-	-	(924.802.300,00)	307.623.306.420,00	43.420.051.212,00	351.043.357.632,00
4	RSUD Sumberrejo	105.211.099.778,86	-	-	(6.006.757.331,00)	99.204.342.447,86	15.731.637.140,00	114.935.979.587,86
5	RSUD Padangan	124.011.994.505,43	-	-	-	124.011.994.505,43	18.390.556.963,09	142.402.551.468,52
6	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	1.696.668.205.321,71	-	112.514.256,96	-	1.696.780.719.578,66	326.885.510.994,00	2.023.666.230.572,66
7	Dinas PU Sumber Daya Air	73.970.960.169,00	(85.500.000,00)	349.393,00	-	73.885.809.562,00	15.688.332.235,00	89.574.141.797,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	218.509.138.510,87	(15.179.333,00)	127.737.935,00	(54.110.097.280,87)	164.511.599.832,00	51.711.576.633,00	216.223.176.465,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.907.346.584,00	-	-	-	2.907.346.584,00	186.361.973,00	3.093.708.557,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	4.941.476.901,00	-	-	(11.500.000,00)	4.929.976.901,00	459.822.885,00	5.389.799.786,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.776.016.117,00	-	-	-	7.776.016.117,00	815.562.605,00	8.591.578.722,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	32.360.744.384,00	-	-	-	32.360.744.384,00	4.576.063.811,00	36.936.808.195,00
13	Dinas Sosial	2.781.776.730,00	-	26.045.110,00	-	2.807.821.840,00	731.310.770,00	3.539.132.610,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	12.784.149.738,00	(37.000.000,00)	-	(57.466.508,00)	12.689.683.230,00	1.185.619.383,00	13.875.302.613,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	51.511.340.412,00	(133.876.000,00)	-	(221.824.083,00)	51.155.640.329,00	1.169.852.021,00	52.325.492.350,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	31.346.287.912,00	-	1.309.597.283,00	-	32.655.885.195,00	7.058.423.985,00	39.714.309.180,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.147.998.238,00	-	-	(340.265.778,00)	9.807.732.460,00	1.841.787.599,00	11.649.520.059,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.018.262.042,00	-	-	(492.796.800,00)	2.525.465.242,00	216.409.677,00	2.741.874.919,00
19	Dinas Perhubungan	29.161.862.337,00	-	-	(387.542.828,00)	28.774.319.509,00	4.663.082.141,00	33.437.401.650,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.268.058.282,00	-	-	(1.944.763.190,00)	23.323.295.092,00	4.929.155.916,00	28.252.451.008,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	26.626.712.462,00	(116.000.000,00)	-	-	26.510.712.462,00	8.163.325.038,00	34.674.037.500,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	5.666.809.611,00	-	-	(918.883.625,00)	4.747.925.986,00	1.166.303.725,00	5.914.229.711,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.398.582.928,00	-	6.727.118.365,00	- 457.525,00	17.125.243.768,00	1.962.284.801,00	19.087.528.569,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.864.497.918,00	-	4.199.042,00	(1.318.714.585,00)	17.549.982.375,00	1.449.654.910,00	18.999.637.285,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.789.703.704,00	-	-	(84.138.282,00)	1.705.565.422,00	320.117.391,00	2.025.682.813,00
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	9.839.022.630,00	-	-	-	9.839.022.630,00	943.478.945,00	10.782.501.575,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.117.840.980,00	-	-	(81.235.000,00)	4.036.605.980,00	725.979.932,00	4.762.585.912,00
28	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
29	Bagian Organisasi	802.020.596,00	(35.500.000,00)	-	(56.300.000,00)	710.220.596,00	59.884.731,00	770.105.327,00
30	Bagian Pemerintahan	645.584.222,00	-	-	(136.340.167,00)	509.244.055,00	46.519.329,00	555.763.384,00
31	Bagian Hukum	430.025.130,00	-	-	-	430.025.130,00	25.250.787,00	455.275.917,00
32	Bagian Administrasi Pembangunan	620.851.038,00	(9.000.000,00)	-	(61.244.880,00)	550.606.158,00	34.157.397,00	584.763.555,00
33	Bagian Perekonomian dan SDA	1.918.192.735,00	-	-	-	1.918.192.735,00	202.378.903,00	2.120.571.638,00

LAMPIRAN 7

NO	NAMA SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022 (AUDITED_ PEMERIKSAAN)	PENGURANGAN KARENA PENGHAPUSAN	KOREKSI EKUITAS		SALDO 2022 TERKOREKSI (PEMERIKSAAN)	BEBAN PENYUSUTAN 2023_AUDITED	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023_AUDITED
				Penambahan	Pengurangan			
34	Bagian Umum	60.693.861.050,00	(3.810.048.072,00)	414.136.319,00	- 128.660.000,00	57.169.289.297,00	6.569.851.290,00	63.739.140.587,00
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.449.219.063,00	-	-	-	2.449.219.063,00	168.232.714,00	2.617.451.777,00
36	Bagian Kesejahteraan Rakyat	795.273.032,00	-	-	(75.000.000,00)	720.273.032,00	64.931.210,00	785.204.242,00
37	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.239.006.868,00	-	-	(95.145.017,00)	1.143.861.851,00	368.764.075,00	1.512.625.926,00
38	Sekretariat DPRD	8.750.654.191,00	(27.250.000,00)	299.567.281,00	-	9.022.971.472,00	4.413.959.616,00	13.436.931.088,00
39	Kecamatan Bojonegoro	8.977.818.520,00	(46.000.000,00)	-	(226.963.050,00)	8.704.855.470,00	2.277.327.591,00	10.982.183.061,00
40	Kecamatan Kapas	2.391.256.251,00	-	-	(204.363.050,00)	2.186.893.201,00	159.793.493,00	2.346.686.694,00
41	Kecamatan Balen	2.394.417.915,00	-	-	(367.248.841,00)	2.027.169.074,00	180.518.471,00	2.207.687.545,00
42	Kecamatan Sumberrejo	2.454.662.580,00	-	-	(208.500.000,00)	2.246.162.580,00	180.349.657,00	2.426.512.237,00
43	Kecamatan Kanor	2.355.489.693,00	-	-	(455.214.516,00)	1.900.275.177,00	164.307.417,00	2.064.582.594,00
44	Kecamatan Baureno	2.176.510.410,00	-	-	(314.233.333,00)	1.862.277.077,00	120.316.715,00	1.982.593.792,00
45	Kecamatan Sugihwaras	2.027.122.178,00	-	-	(208.500.000,00)	1.818.622.178,00	178.572.764,00	1.997.194.942,00
46	Kecamatan Kepohbaru	2.210.004.225,00	-	129.674,00	(641.449.767,00)	1.568.684.132,00	151.950.248,00	1.720.634.380,00
47	Kecamatan Kedungadem	2.585.551.692,00	(12.000.000,00)	-	(617.378.694,00)	1.956.172.998,00	238.107.326,00	2.194.280.324,00
48	Kecamatan Sukosewu	2.123.587.736,00	-	-	(306.426.948,00)	1.817.160.788,00	179.506.911,00	1.996.667.699,00
49	Kecamatan Trucuk	1.578.255.060,00	-	2.270.633,00	(204.363.050,00)	1.376.162.643,00	137.627.306,00	1.513.789.949,00
50	Kecamatan Malo	2.058.207.706,00	-	-	(252.888.050,00)	1.805.319.656,00	130.736.136,00	1.936.055.792,00
51	Kecamatan Kalitidu	2.218.110.035,00	-	-	(219.200.000,00)	1.998.910.035,00	150.729.800,00	2.149.639.835,00
52	Kecamatan Dander	2.074.367.498,00	-	-	(208.500.000,00)	1.865.867.498,00	180.534.360,00	2.046.401.858,00
53	Kecamatan Padangan	1.804.918.531,00	-	-	(389.352.877,00)	1.415.565.654,00	91.178.777,00	1.506.744.431,00
54	Kecamatan Purwosari	1.848.274.371,00	-	-	(437.516.950,00)	1.410.757.421,00	124.183.881,00	1.534.941.302,00
55	Kecamatan Kasiman	1.647.051.099,00	-	-	(208.500.000,00)	1.438.551.099,00	154.226.851,00	1.592.777.950,00
56	Kecamatan Kedewan	1.487.272.485,00	-	-	(423.563.050,00)	1.063.709.435,00	122.211.911,00	1.185.921.346,00
57	Kecamatan Ngasem	2.162.397.260,00	-	-	(208.500.000,00)	1.953.897.260,00	168.272.061,00	2.122.169.321,00
58	Kecamatan Ngambon	1.238.417.371,00	-	-	(204.363.050,00)	1.034.054.321,00	179.044.105,00	1.213.098.426,00
59	Kecamatan Tambakrejo	1.613.980.661,00	-	-	(210.294.383,00)	1.403.686.278,00	159.551.124,00	1.563.237.402,00
60	Kecamatan Ngraho	2.037.406.229,00	-	-	(98.614.000,00)	1.938.792.229,00	157.637.922,00	2.096.430.151,00
61	Kecamatan Margomulyo	1.478.253.774,00	(10.500.000,00)	-	(539.736.039,00)	928.017.735,00	159.003.544,00	1.087.021.279,00
62	Kecamatan Temayang	1.395.451.426,00	-	-	(204.363.050,00)	1.191.088.376,00	176.230.845,00	1.367.319.221,00
63	Kecamatan Bubulan	1.328.584.285,00	-	-	(373.095.817,00)	955.488.468,00	148.579.159,00	1.104.067.627,00
64	Kecamatan Gondang	1.526.340.160,00	-	-	(204.363.050,00)	1.321.977.110,00	171.081.072,00	1.493.058.182,00
65	Kecamatan Sekar	1.370.069.335,00	-	-	(617.671.407,00)	752.397.928,00	156.240.193,00	908.638.121,00
66	Kecamatan Gayam	2.848.223.430,00	-	-	(387.144.577,00)	2.461.078.853,00	315.058.461,00	2.776.137.314,00
67	Inspektorat	3.506.379.052,00	(21.000.000,00)	-	(60.978.300,00)	3.424.400.752,00	514.834.233,00	3.939.234.985,00
68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.841.918.616,00	-	-	(808.750.700,00)	2.033.167.916,00	220.821.039,00	2.253.988.955,00

LAMPIRAN 7

NO	NAMA SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022 (AUDITED_ PEMERIKSAAN)	PENGURANGAN KARENA PENGHAPUSAN	KOREKSI EKUITAS		SALDO 2022 TERKOREKSI (PEMERIKSAAN)	BEBAN PENYUSUTAN 2023_AUDITED	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023_AUDITED
				Penambahan	Pengurangan			
69	Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah	16.278.923.326,00	(95.041.248,00)	443.357.416,00	(1.589.034.828,00)	15.038.204.666,00	7.633.482.368,00	22.671.687.034,00
70	Badan Pendapatan Daerah	7.534.919.903,00	(13.290.000,00)	-	-	7.521.629.903,00	732.498.497,00	8.254.128.400,00
71	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	11.906.022.523,00	-	136.474.118,00	-	12.042.496.641,00	2.753.605.519,00	14.796.102.160,00
	JUMLAH TOTAL	**3.555.786.970.258,49**	**(4.472.184.653,00)**	**9.786.022.078,93**	**(82.588.943.994,37)**	**3.481.266.528.845,04**	**629.250.322.994,42**	**4.110.516.851.839,46**

Bojonegoro, 9 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd

ADRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO SEKRETARIAT DAERAH

NURUL AZIZAH

LAMPIRAN 8

REKAPITULASI IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BOJONEGORO

NO	KECAMATAN/ DESA		Pendapatan (Rp)			Jumlah APBDesa (Rp)	Belanja (Rp)					Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Surplus/ Defisit (Rp)
			PADesa	Dana Transfer	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga				
1	2		3	4	5	6= 3+4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14	15=(6+13)-(12+14)
1	**NGRAHO**														
	1	Luwihaji	107.750.000	2.854.542.821	1.389.000	**2.963.681.821**	1.233.185.547	1.176.667.895	378.833.662	55.500.000	128.800.000	**2.972.987.104**	408.949.010	0	**399.643.727**
	2	Sugihwaras	105.000.000	4.213.736.717	0	**4.318.736.717**	1.064.105.100	2.998.206.401	146.026.250	10.000.000	126.113.000	**4.344.450.751**	409.044.060	5.000.000	**378.330.026**
	3	Sumberagung	130.715.000	2.454.694.917	0	**2.585.409.917**	1.149.583.425	1.123.766.964	119.716.392	109.000.000	133.000.000	**2.635.066.781**	400.216.964	0	**350.560.100**
	4	Mojorejo	260.000.000	2.746.069.028	0	**3.006.069.028**	1.062.168.100	2.000.964.826	214.809.400	10.464.000	123.400.000	**3.411.806.326**	504.954.526	5.000.000	**94.217.228**
	5	Ngraho	92.174.000	2.261.165.070	4.773.821	**2.358.112.891**	761.101.273	1.064.132.170	132.184.000	144.035.400	113.036.000	**2.214.488.843**	728.569.643	5.000.000	**867.193.691**
	6	Blimbinggede	198.600.000	2.379.177.369	9.433.500	**2.587.210.869**	984.563.400	1.546.044.430	115.713.000	170.125.500	68.400.000	**2.884.846.330**	672.447.198	0	**374.811.737**
	7	Jumok	150.000.000	3.938.372.254	0	**4.088.372.254**	1.074.323.120	2.869.020.784	293.645.700	19.755.000	129.600.000	**4.386.344.604**	420.261.664	5.000.000	**117.289.314**
	8	Nganti	128.000.000	5.243.993.800	0	**5.371.993.800**	1.228.308.372	3.754.400.600	283.015.000	5.000.000	225.000.000	**5.495.723.972**	720.433.900	0	**596.703.728**
	9	Pandan	95.500.000	3.187.124.770	0	**3.282.624.770**	1.215.528.526	2.286.539.353	153.783.500	222.511.000	108.000.000	**3.986.362.379**	732.153.806	0	**28.416.197**
	10	Tanggungan	252.630.000	2.661.645.917	0	**2.914.275.917**	967.187.858	1.457.538.360	226.125.680	35.425.000	118.800.000	**2.805.076.898**	402.007.318	0	**511.206.337**
	11	Kalirejo	168.000.000	2.593.622.365	0	**2.761.622.365**	951.369.000	1.415.814.670	136.950.000	69.400.000	108.000.000	**2.681.533.670**	425.954.180	0	**506.042.875**
	12	Tapelan	131.000.000	3.641.269.865	0	**3.772.269.865**	1.002.509.126	2.486.515.127	205.848.420	55.000.000	161.800.000	**3.911.672.673**	778.948.712	0	**639.545.904**
	13	Sumberarum	343.037.000	2.722.848.065	0	**3.065.885.065**	1.164.967.142	2.246.655.385	216.879.500	0	118.800.000	**3.747.302.027**	1.084.907.657	5.000.000	**398.490.695**
	14	Payaman	153.400.000	2.701.024.817	0	**2.854.424.817**	1.187.098.300	1.346.106.450	115.473.200	224.838.000	104.400.000	**2.977.915.950**	572.948.460	0	**449.457.327**
	15	Bancer	76.400.000	2.559.256.014	0	**2.635.656.014**	1.123.761.824	1.448.355.290	433.884.960	6.000.000	118.800.000	**3.130.802.074**	562.776.860	5.000.000	**62.630.800**
	16	Klempun	84.115.200	3.993.514.065	13.026.140	**4.090.655.405**	1.620.130.518	2.450.621.281	107.399.025	43.875.000	129.000.000	**4.351.025.824**	521.427.006	5.000.000	**256.056.587**
2	**TAMBAKREJO**														
	1	Ngrancang	87.200.000	6.997.544.317	3.956.614	**7.088.700.931**	1.354.760.635	4.461.668.400	147.980.000	352.471.000	322.400.000	**6.639.280.035**	140.240.508	363.720.000	**225.941.404**
	2	Jawik	107.900.000	2.727.931.400	0	**2.835.831.400**	1.361.784.451	1.212.033.400	115.925.300	289.178.100	138.000.000	**3.116.921.251**	296.653.565	10.000.000	**5.563.714**
	3	Gamongan	87.851.250	2.818.440.800	0	**2.906.292.050**	1.513.643.725	1.166.402.320	90.850.000	59.640.000	129.600.000	**2.960.136.045**	55.126.400	0	**1.282.405**
	4	Bakalan	81.400.000	6.532.210.417	7.321.021	**6.620.931.438**	1.724.704.223	5.228.278.450	101.920.000	33.935.400	105.800.000	**7.194.638.073**	798.768.329	0	**225.061.693**
	5	Dolokgede	134.000.000	4.512.154.000	10.625.000	**4.656.779.000**	901.923.451	3.075.269.265	204.877.784	219.180.000	251.528.500	**4.652.779.000**	6.000.000	10.000.000	**0**
	6	Turi	89.805.000	5.766.049.500	4.348.057	**5.860.202.557**	1.179.554.174	4.256.559.600	218.542.600	367.291.000	115.200.000	**6.137.147.374**	409.755.580	10.000.000	**122.810.763**
	7	Gading	90.735.000	4.043.444.600	0	**4.134.179.600**	950.940.372	2.836.540.660	131.228.424	115.693.000	245.156.340	**4.279.558.796**	160.379.196	10.000.000	**5.000.000**
	8	Pengkol	87.891.000	3.320.541.580	0	**3.408.432.580**	1.150.078.376	1.699.983.580	304.709.900	111.105.724	113.000.000	**3.378.877.580**	16.653.562	10.000.000	**36.208.562**
	9	Sendangrejo	66.500.000	2.222.985.614	0	**2.289.485.614**	940.049.900	879.953.830	328.151.750	63.542.000	97.350.325	**2.309.047.805**	75.633.668	10.000.000	**46.071.477**
	10	Tanjung	88.000.000	2.212.929.100	0	**2.300.929.100**	920.013.752	1.091.947.948	174.167.400	32.000.000	82.800.000	**2.300.929.100**	0	0	**0**
	11	Kalisumber	87.600.000	4.207.061.800	1.988.000	**4.296.649.800**	1.074.128.280	2.830.741.740	138.370.000	110.000.000	181.200.000	**4.334.440.020**	52.219.520	10.000.000	**4.429.300**
	12	Sukorejo	180.900.000	2.802.996.400	7.100.500	**2.990.996.900**	1.127.199.600	1.159.388.600	217.641.000	246.167.400	125.600.760	**2.875.997.360**	760	115.000.000	**300**
	13	Napis	83.000.000	7.167.692.300	5.000.000	**7.255.692.300**	2.077.176.300	4.462.636.000	326.100.000	54.780.000	216.000.000	**7.136.692.300**	0	19.000.000	**100.000.000**
	14	Mulyorejo	125.005.500	5.433.511.800	0	**5.558.517.300**	1.589.309.900	3.447.734.600	204.453.400	151.199.100	131.700.000	**5.524.397.000**	52.320.580	10.000.000	**76.440.880**
	15	Kacangan	55.920.000	2.224.861.100	0	**2.280.781.100**	742.425.900	1.159.694.500	369.386.850	169.621.200	79.200.000	**2.520.328.450**	257.847.250	10.000.000	**8.299.900**
	16	Jatimulyo	87.000.000	2.712.937.200	0	**2.799.937.200**	923.040.743	1.141.183.870	397.707.200	275.000.000	271.000.000	**3.007.931.813**	233.372.466	0	**25.377.853**
	17	Malingmati	63.000.000	5.746.620.000	0	**5.809.620.000**	1.397.187.428	4.085.121.400	113.992.000	30.445.000	212.400.000	**5.839.145.828**	80.903.800	10.000.000	**41.377.972**
	18	Tambakrejo	76.475.000	3.826.378.500	0	**3.902.853.500**	1.350.335.300	1.974.509.500	230.165.300	249.336.000	120.050.000	**3.924.396.100**	33.500.000	0	**11.957.400**
3	**NGAMBON**														
	1.	Bondol	83.881.000	2.443.061.800	1.729.703	**2.528.672.503**	1.208.228.989	642.689.000	154.535.000	112.580.000	124.685.000	**2.242.717.989**	54.266.700	5.000.000	**335.221.214**
	2.	Sengon	42.924.000	2.798.319.165	4.568.822	**2.845.811.987**	990.540.100	1.677.173.100	90.991.300	40.000.000	146.078.772	**2.944.783.272**	658.729.092	0	**559.757.808**
	3.	Karangmangu	25.125.800	4.208.247.800	7.764.152	**4.241.137.752**	805.082.140	2.679.630.120	260.982.300	59.491.600	127.800.000	**3.932.986.160**	150.844.290	5.000.000	**453.995.882**
	4.	Nglampin	45.770.000	2.795.928.100	0	**2.841.698.100**	1.019.211.347	1.833.207.138	66.300.000	37.787.000	136.936.650	**3.093.442.135**	705.669.531	25.000.000	**428.925.496**
	5.	Ngambon	83.326.000	2.162.105.665	14.937.172	**2.260.368.837**	1.051.850.550	1.426.650.383	86.423.300	50.269.200	84.200.000	**2.699.393.433**	530.909.133	5.000.000	**86.884.537**
4	**NGASEM**														
	1	Butoh	42.852.000	2.908.604.900	54.616.500	**3.006.073.400**	957.490.600	1.452.734.400	149.223.600	194.324.800	218.400.000	**2.972.173.400**	20.000.000	0	**53.900.000**
	2	Trenggulunan	68.280.000	2.596.390.200	32.245.766	**2.696.915.966**	1.153.757.195	1.161.838.920	88.150.000	158.123.894	108.000.000	**2.669.870.009**	0	0	**27.045.957**
	3	Setren	76.000.000	4.597.311.500	0	**4.673.311.500**	1.125.336.445	2.573.492.730	180.273.900	122.875.000	217.800.000	**4.219.778.075**	3.739.642	0	**457.273.067**

LAMPIRAN 8

NO	KECAMATAN/ DESA		Pendapatan (Rp)			Jumlah APBDesa (Rp)	Belanja (Rp)					Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Surplus/ Defisit (Rp)
			PADesa	Dana Transfer	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga				
1	2		3	4	5	6= 3+4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14	15=(6+13)-(12+14)
	4	Mediyunan	63.900.000	4.191.089.900	14.258.450	**4.269.248.350**	923.266.940	2.991.217.284	144.167.000	44.250.000	151.200.000	**4.254.101.224**	567.216	0	**15.714.342**
	5	Kolong	55.000.000	2.641.831.845	2.500.000	**2.699.331.845**	1.488.478.995	623.622.700	135.448.100	349.882.200	100.800.000	**2.698.231.995**	484.032	0	**1.583.882**
	6	Sendangharjo	101.400.000	2.824.527.900	79.325.000	**3.005.252.900**	1.437.911.900	1.199.171.200	167.000.800	75.169.000	126.000.000	**3.005.252.900**	0	0	**0**
	7	Ngadiluwih	68.000.000	2.443.285.565	181.402.150	**2.692.687.715**	1.263.794.980	701.280.650	127.522.320	261.994.200	244.800.000	**2.599.392.150**	0	60.000.000	**33.295.565**
	8	Ngasem	248.966.000	2.453.066.000	0	**2.702.032.000**	1.199.923.880	482.504.000	464.789.000	252.822.700	297.084.460	**2.697.124.040**	465.684	0	**5.373.644**
	9	Bandungrejo	97.500.000	4.693.475.600	203.547.500	**4.994.523.100**	1.570.698.050	2.929.679.350	151.007.200	184.820.000	155.918.500	**4.992.123.100**	0	0	**2.400.000**
	10	Tengger	35.000.000	3.710.218.900	30.665.819	**3.775.884.719**	846.318.520	2.163.696.453	103.591.687	87.812.500	148.000.000	**3.349.419.160**	32.224.097	32.224.097	**426.465.559**
	11	Ngantru	52.000.000	3.241.036.200	928.000	**3.293.964.200**	1.146.489.386	1.441.492.050	178.233.100	245.349.650	269.600.000	**3.281.164.186**	442.440	10.000.000	**3.242.454**
	12	Sambong	36.000.000	2.401.247.430	0	**2.437.247.430**	949.005.888	772.649.342	192.010.100	47.000.000	249.590.080	**2.210.255.410**	16.989.004	0	**243.981.024**
	13	Dukohkidul	100.750.000	3.739.623.600	2.988.000	**3.843.361.600**	889.675.481	2.336.527.903	100.580.000	291.311.000	208.600.000	**3.826.694.384**	12.613.136	12.613.136	**16.667.216**
	14	Wadang	217.000.000	4.030.679.800	15.308.621	**4.262.988.421**	1.064.267.960	2.220.053.680	89.975.000	294.964.800	230.400.000	**3.899.661.440**	4.656.603	0	**367.983.584**
	15	Jampet	148.000.000	2.814.735.714	20.929.796	**2.983.665.510**	862.514.050	1.200.628.831	103.320.000	0	204.475.000	**2.370.937.881**	6.676.980	0	**619.404.609**
	16	Bareng	43.650.000	3.435.241.100	4.000.000	**3.482.891.100**	1.618.422.400	1.312.149.600	215.394.300	193.500.000	147.158.500	**3.486.624.800**	5.878.928	0	**2.145.228**
	17	Jelu	129.540.000	3.816.442.480	0	**3.945.982.480**	1.126.009.430	2.171.226.000	265.019.900	71.479.850	179.700.000	**3.813.435.180**	30.500.000	30.500.000	**132.547.300**
5	**BUBULAN**														
	1	Bubulan	86.636.800	4.625.021.917	9.644.616	**4.721.303.333**	1.032.679.890	3.262.545.870	244.119.600	5.488.928	118.800.000	**4.663.634.288**	275.553.378	15.000.000	**318.222.423**
	2	Cancung	35.799.500	2.631.229.707	0	**2.667.029.207**	1.142.746.241	1.782.212.985	192.688.750	78.238.135	111.121.790	**3.307.007.901**	827.552.618	0	**187.573.924**
	3	Clebung	66.364.000	2.486.247.791	0	**2.552.611.791**	1.153.567.651	977.758.057	193.128.677	193.105.000	151.400.000	**2.668.959.385**	353.229.350	0	**236.881.757**
	4	Sumberbendo	32.000.000	2.379.024.445	0	**2.411.024.445**	1.250.707.761	1.027.269.400	196.850.000	0	135.505.516	**2.610.332.677**	677.329.700	25.000.000	**453.021.468**
	5	Ngorogunung	60.000.000	3.287.801.446	0	**3.347.801.446**	1.006.952.200	2.092.672.366	200.442.303	36.225.000	195.800.000	**3.532.091.869**	614.050.428	0	**429.760.005**
6	**DANDER**														
	1	Ngunut	257.914.650	2.869.275.975	2.146.611	**3.129.337.236**	1.210.743.692	1.595.966.500	149.975.500	108.512.500	288.682.000	**3.353.880.192**	405.866.035	5.000.000	**176.323.079**
	2	Dander	207.992.000	2.850.087.486	3.092.077	**3.061.171.563**	1.377.092.718	1.312.908.350	196.060.000	69.290.000	109.800.000	**3.065.151.068**	318.039.855	5.000.000	**309.060.351**
	3	Growok	126.350.000	2.618.178.600	6.900.000	**2.751.428.600**	982.876.598	1.113.539.500	288.678.700	30.000.000	135.650.638	**2.550.745.436**	53.294.466	205.000.000	**48.977.630**
	4	Sumberarum	213.000.000	2.833.563.200	5.438.355	**3.052.001.555**	1.328.441.565	1.351.518.530	113.176.000	69.394.000	127.800.000	**2.990.330.095**	390.588.968	5.000.000	**447.260.428**
	5	Kunci	58.232.000	3.087.939.214	2.212.121	**3.148.383.335**	1.337.644.689	1.023.907.000	149.016.000	559.632.000	134.359.800	**3.204.559.489**	168.930.337	0	**112.754.183**
	6	Jatiblimbing	285.000.000	3.864.103.700	0	**4.149.103.700**	1.171.659.645	1.985.039.808	241.360.000	83.100.000	120.568.938	**3.601.728.391**	178.429.149	50.000.000	**675.804.458**
	7	Ngraseh	203.640.000	2.607.787.414	1.482.424	**2.812.909.838**	1.263.337.542	894.225.429	222.584.950	249.402.700	103.192.500	**2.732.743.121**	374.021.976	5.000.000	**449.188.693**
	8	Mojoranu	352.823.500	2.503.492.414	2.420.814	**2.858.736.728**	1.219.000.455	930.016.007	235.496.953	226.710.500	96.248.951	**2.707.472.866**	55.131.047	5.000.000	**201.394.909**
	9	Sendangrejo	101.281.000	4.107.099.317	3.844.579	**4.212.224.896**	1.114.270.430	2.622.271.500	408.911.000	54.082.500	118.350.000	**4.317.885.430**	180.236.650	5.000.000	**69.576.116**
	10	Karangsono	100.000.000	3.037.008.014	18.673.163	**3.155.681.177**	1.317.970.142	1.354.332.784	94.031.000	39.450.000	128.245.000	**2.934.028.926**	384.012.691	110.000.000	**495.664.942**
	11	Sumberagung	142.529.800	4.982.597.817	2.427.157	**5.127.554.774**	1.156.948.933	3.731.246.776	135.095.000	42.000.000	142.200.000	**5.207.490.709**	331.980.229	5.000.000	**247.044.294**
	12	Sumodikaran	197.962.000	2.525.026.795	2.839.199	**2.725.827.994**	1.217.901.199	782.002.550	404.799.000	167.411.500	100.520.000	**2.672.634.249**	98.450.153	5.000.000	**146.643.898**
	13	Ngumpakdalem	354.500.000	4.421.070.755	6.525.584	**4.782.096.339**	1.897.003.640	2.461.712.100	146.620.000	144.666.250	131.449.288	**4.781.451.278**	80.328.990	5.000.000	**75.974.051**
	14	Sumbertlaseh	333.650.000	2.767.063.665	5.063.511	**3.105.777.176**	1.725.019.894	1.026.102.400	251.146.500	117.835.000	235.727.860	**3.355.831.654**	418.713.136	30.000.000	**138.658.658**
	15	Ngulanan	164.526.850	2.617.447.798	2.414.345	**2.784.388.993**	1.008.453.175	1.038.364.700	274.649.200	36.000.000	87.800.000	**2.445.267.075**	126.076.716	93.035.550	**372.163.084**
	16	Ngablak	120.200.000	2.620.969.723	2.791.680	**2.743.961.403**	1.446.284.112	865.172.320	246.274.260	296.171.000	108.109.181	**2.962.010.873**	379.323.228	5.000.000	**156.273.759**
7	**SUGIHWARAS**														
	1	Glagahan	91.835.000	2.728.284.600	10.625.000	**2.830.744.600**	857.723.913	1.255.619.315	523.838.343	32.211.825	115.200.000	**2.784.593.396**	10.629.952	5.000.000	**51.781.156**
	2	Alasgung	245.670.000	2.645.462.100	1.250.000	**2.892.382.100**	1.009.458.868	1.377.091.400	162.952.540	174.304.500	137.492.600	**2.861.299.908**	14.532.368	41.000.000	**4.614.560**
	3	Nglajang	78.000.000	2.001.661.462	0	**2.079.661.462**	730.377.037	1.169.727.040	149.953.500	72.608.500	77.400.000	**2.200.066.077**	154.970.596	5.000.000	**29.565.981**
	4	Bulu	640.981.000	2.793.633.500	316.527	**3.434.931.027**	1.803.940.213	988.926.872	441.905.500	115.300.000	129.907.200	**3.479.979.785**	306.201.672	5.000.000	**256.152.914**
	5	Trate	194.542.000	2.389.532.100	0	**2.584.074.100**	1.161.980.508	1.185.400.000	123.806.500	26.184.000	91.800.000	**2.589.171.008**	10.096.908	5.000.000	**0**
	6	Bareng	229.300.000	2.720.805.700	7.546.361	**2.957.652.061**	1.547.325.402	980.081.188	245.467.500	49.000.000	146.600.000	**2.968.474.090**	21.768.000	5.000.000	**5.945.971**
	7	Siwalan	550.920.000	2.651.599.321	3.389.441	**3.205.908.762**	1.432.157.126	1.188.165.800	143.306.040	100.752.000	126.582.000	**2.990.962.966**	133.087.069	5.000.000	**343.032.865**
	8	Genjor	130.078.720	2.730.756.900	2.700.000	**2.863.535.620**	875.116.299	1.756.068.405	225.405.750	8.383.850	129.900.000	**2.994.874.304**	237.211.587	60.000.000	**45.872.903**
	9	Kedungdowo	111.000.000	2.186.211.300	3.000.000	**2.300.211.300**	990.820.600	1.226.124.560	125.822.100	90.040.000	108.400.000	**2.541.207.260**	259.269.512	10.000.000	**8.273.552**
	10	Wedoro	137.100.000	3.764.397.230	0	**3.901.497.230**	775.536.856	2.943.356.459	96.780.000	16600000	116.273.298	**3.948.546.613**	151.391.883	5.000.000	**99.342.500**
	11	Panunggalan	133.050.000	2.625.465.700	121.565.800	**2.880.081.500**	1.089.368.450	1.373.944.300	125.918.750	191.933.300	130.200.000	**2.911.364.800**	41.283.300	10.000.000	**0**

LAMPIRAN 8

NO	KECAMATAN/ DESA		Pendapatan (Rp)			Jumlah APBDesa (Rp)	Belanja (Rp)					Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Surplus/ Defisit (Rp)
			PADesa	Dana Transfer	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga				
1	2		3	4	5	6= 3+4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14	15=(6+13)-(12+14)
	12	Balongrejo	329.169.200	2.721.337.100	1.921.330	**3.052.427.630**	1.321.320.337	1.281.822.600	267.398.000	58.000.000	118.800.000	**3.047.340.937**	0	5.000.000	**86.693**
	13	Drenges	144.450.000	2.259.794.600	6.753.091	**2.410.997.691**	970.679.378	977.467.612	163.417.622	201.510.300	88.150.000	**2.401.224.912**	27.866.178	5.000.000	**32.638.957**
	14	Sugihwaras	380.800.000	2.715.579.030	6.349.234	**3.102.728.264**	1.229.646.551	850.830.038	279.388.000	350.363.500	109.320.987	**2.819.549.076**	129.019.325	5.000.000	**407.198.513**
	15	Panemon	141.000.000	2.560.134.900	4.500.000	**2.705.634.900**	1.011.944.230	1.102.842.198	225.850.000	119.047.300	174.024.442	**2.633.708.170**	231.156.920	5.000.000	**298.083.650**
	16	Glagahwangi	781.200.000	2.772.800.130	1.196.960	**3.555.197.090**	1.251.924.873	1.907.493.217	257.279.000	10.500.000	119.126.000	**3.546.323.090**	11.126.000	20.000.000	**0**
	17	Jatitengah	120.600.000	2.177.311.300	971.737	**2.298.883.037**	788.998.745	787.605.000	154.328.000	40.176.000	95.400.000	**1.866.507.745**	11.500.000	10.000.000	**433.875.292**
8	**KEDUNGADEM**														
	1	Babad	136.600.000	4.121.526.700	0	**4.258.126.700**	1.861.164.158	2.574.301.500	116.800.000	36.283.400	145.800.000	**4.734.349.058**	477.664.278	0	**1.441.920**
	2	Pejok	104.250.000	2.556.051.400	7.290.124	**2.667.591.524**	1.203.150.660	1.272.528.000	287.276.000	34.350.000	123.023.409	**2.920.328.069**	252.736.545	0	**0**
	3	Dayukidul	130.000.000	5.011.305.100	3.600.000	**5.144.905.100**	1.048.475.780	2.535.459.800	174.154.300	9.360.000	105.880.000	**3.873.329.880**	250.764.172	0	**1.522.339.392**
	4	Panjang	171.200.000	7.996.155.800	3.439.500	**8.170.795.300**	1.138.338.954	6.739.394.160	280.044.390	50.330.400	129.443.100	**8.337.551.004**	250.865.704	0	**84.110.000**
	5	Tondomulo	160.153.500	8.759.686.300	11.783.146	**8.931.622.946**	1.399.750.353	6.976.457.312	101.992.000	0	233.236.000	**8.711.435.665**	436.137.054	0	**656.324.335**
	6	Kesongo	103.000.000	3.800.003.700	0	**3.903.003.700**	1.069.150.788	2.699.654.121	110.444.000	5.466.250	274.930.463	**4.159.645.622**	270.453.749	0	**13.811.827**
	7	Kendung	75.000.000	3.085.562.100	0	**3.160.562.100**	1.008.112.500	1.626.860.900	227.805.300	18.883.400	140.400.000	**3.022.062.100**	0	0	**138.500.000**
	8	Mlideg	134.500.000	2.433.369.900	2.229.000	**2.570.098.900**	1.332.449.085	920.250.100	301.652.000	20.000.000	92.000.000	**2.666.351.185**	281.000.436	0	**184.748.151**
	9	Tumbrasanom	111.540.000	2.221.058.300	954.278	**2.333.552.578**	1.060.172.700	878.005.840	483.032.000	108.996.000	86.400.000	**2.616.606.540**	332.525.490	0	**49.471.528**
	10	Kedungadem	132.471.000	4.372.041.900	0	**4.504.512.900**	1.212.948.419	3.124.195.375	154.120.000	143.100.000	102.600.000	**4.736.963.794**	254.581.248	0	**22.130.354**
	11	Duwel	44.000.000	4.359.115.000	0	**4.403.115.000**	1.057.570.060	3.564.972.160	96.626.000	6.000.000	123.200.000	**4.848.368.220**	448.053.220	0	**2.800.000**
	12	Kepohkidul	197.000.000	2.576.186.300	0	**2.773.186.300**	1.154.229.716	1.410.012.625	103.400.000	10.000.000	100.800.000	**2.778.442.341**	337.264.328	5.000.000	**327.008.287**
	13	Geger	166.770.500	2.274.480.000	155.500	**2.441.406.000**	1.149.664.582	1.269.231.930	151.030.200	160.727.528	87.800.000	**2.818.454.240**	390.131.616	10.000.000	**3.083.376**
	14	Kedungrejo	151.350.000	2.894.148.200	0	**3.045.498.200**	1.007.601.200	1.545.162.000	223.875.000	150.060.000	118.800.000	**3.045.498.200**	0	0	**0**
	15	Megale	364.460.000	3.175.603.400	0	**3.540.063.400**	1.740.246.100	1.246.509.200	196.176.500	258.280.000	118.000.000	**3.559.211.800**	568.228.200	5.000.000	**544.079.800**
	16	Sidorejo	136.940.000	2.762.804.700	0	**2.899.744.700**	1.029.433.990	1.967.114.284	627.723.000	0	140.200.000	**3.764.471.274**	865.250.884	0	**524.310**
	17	Drokilo	113.570.250	2.633.181.400	0	**2.746.751.650**	1.565.781.050	922.385.000	189.060.000	0	124.010.000	**2.801.236.050**	254.484.400	200.000.000	**0**
	18	Mojorejo	64.750.000	2.284.415.600	0	**2.349.165.600**	1.077.048.624	1.304.500.000	221.185.000	27.462.500	116.400.000	**2.746.596.124**	512.680.440	0	**115.249.916**
	19	Jamberejo	192.020.000	2.942.000.300	0	**3.134.020.300**	1.405.894.600	1.555.071.221	89.462.000	121.913.400	139.400.000	**3.311.741.221**	625.006.616	0	**447.285.695**
	20	Sidomulyo	197.040.000	3.632.435.500	0	**3.829.475.500**	1.349.463.100	1.949.461.352	131.080.000	304.240.000	129.600.000	**3.863.844.452**	261.299.350	0	**226.930.398**
	21	Tlogoagung	155.500.000	3.183.549.000	3.949.500	**3.342.998.500**	1.040.376.726	2.009.748.814	279.814.500	58.652.800	174.741.683	**3.563.334.523**	289.186.023	0	**68.850.000**
	22	Ngrandu	90.526.140	4.235.498.500	0	**4.326.024.640**	992.092.695	4.573.930.846	149.878.300	57.654.653	186.000.000	**5.959.556.494**	1.674.976.010	0	**41.444.156**
	23	Balongcabe	55.000.000	2.235.862.300	0	**2.290.862.300**	1.342.010.039	1.014.148.937	105.650.000	118.400.000	111.160.600	**2.691.369.576**	400.507.276	0	**0**
9	**KEPOHBARU**														
	1	Nglumber	610.730.000	2.682.817.300	500.000	**3.294.047.300**	1.580.786.120	1.318.318.780	210.084.000	56.158.400	88.200.000	**3.253.547.300**	1.600.000	40.000.000	**2.100.000**
	2	Krangkong	581.160.000	3.589.786.187	2.039.502	**4.172.985.689**	1.677.388.021	2.153.675.000	224.531.000	250.750.000	125.052.000	**4.431.396.021**	275.000.000	15.000.000	**1.589.668**
	3	Balongdowo	444.000.000	2.293.114.100	500.000	**2.737.614.100**	1.437.215.845	928.585.437	483.572.668	25.053.950	116.572.241	**2.991.000.141**	258.386.041	5.000.000	**0**
	4	Simorejo	452.255.000	2.192.632.900	3.711.179	**2.648.599.079**	1.369.632.988	773.758.300	180.565.000	154.231.600	179.800.000	**2.657.987.888**	31.888.821	5.000.000	**17.500.012**
	5	Sidomukti	762.866.000	2.491.998.378	1.041.961	**3.255.906.339**	1.811.504.416	1.136.714.588	283.100.000	27.516.900	245.304.920	**3.504.140.824**	253.314.987	0	**5.080.502**
	6	Pejok	266.800.000	3.176.531.906	0	**3.443.331.906**	1.578.589.710	1.725.319.850	143.077.000	212.390.500	290.925.296	**3.950.302.356**	756.403.900	30.000.000	**219.433.450**
	7	Cengkir	307.800.000	2.447.978.000	1.200.000	**2.756.978.000**	1.540.530.808	1.032.500.000	221.400.000	93.356.000	119.800.000	**3.007.586.808**	255.608.808	5.000.000	**0**
	8	Jipo	355.800.000	3.659.446.500	1.503.500	**4.016.750.000**	1.192.419.783	2.462.676.817	200.459.200	40.894.200	120.300.000	**4.016.750.000**	255.000.000	255.000.000	**0**
	9	Mojosari	356.800.000	2.313.032.000	2.034.721	**2.671.866.721**	1.344.466.653	1.050.138.991	366.781.573	183.421.743	103.600.000	**3.048.408.960**	592.987.182	10.000.000	**206.444.942**
	10	Betet	420.000.000	2.180.363.868	2.487.103	**2.602.850.971**	1.270.150.064	1.292.568.600	159.668.000	77.002.800	186.000.000	**2.985.389.464**	558.193.418	5.000.000	**170.654.925**
	11	Sumberoto	587.250.000	2.234.196.100	770.746	**2.822.216.846**	1.410.937.182	1.288.333.900	136.251.000	28.983.000	87.600.000	**2.952.105.082**	449.090.133	45.000.000	**274.201.897**
	12	Bumirejo	591.006.900	3.411.587.617	2.281.002	**4.004.875.519**	1.678.229.467	2.190.253.300	189.555.000	33.845.000	107.054.600	**4.198.937.367**	341.457.500	5.000.000	**142.395.652**
	13	Kepoh	437.000.000	2.300.797.900	7.624.370	**2.745.422.270**	1.748.541.630	968.675.380	328.240.000	31.500.000	94.341.370	**3.171.298.380**	433.500.480	0	**7.624.370**
	14	Turigede	360.000.000	2.294.137.423	1.782.404	**2.655.919.827**	1.185.299.082	1.414.704.980	89.645.500	81.122.800	99.522.520	**2.870.294.882**	671.539.978	5.000.000	**452.164.923**
	15	Woro	708.019.740	2.351.689.253	918.186	**3.060.627.179**	1.824.258.601	843.537.500	302.500.000	282.150.700	84.600.000	**3.337.046.801**	455.944.721	5.000.000	**174.525.100**
	16	Sumbergede	219.907.500	2.240.218.523	1.200.000	**2.461.326.023**	1.224.764.464	731.270.909	176.400.000	355.104.400	117.306.800	**2.604.846.573**	427.670.320	25.000.000	**259.149.770**
	17	Mudung	295.200.000	2.192.677.900	0	**2.487.877.900**	1.037.122.649	1.345.615.060	97.325.600	118.976.800	83.500.000	**2.682.540.109**	321.116.740	5.000.000	**121.454.531**
	18	Brangkal	407.681.100	2.712.029.665	0	**3.119.710.765**	1.362.110.032	948.595.800	291.065.000	224.863.064	177.121.700	**3.003.755.596**	15.610.764	5.000.000	**126.565.933**
	19	Pohwates	520.050.000	2.358.453.400	9.162.345	**2.887.665.745**	1.781.540.625	1.016.497.050	351.239.000	136.150.000	110.200.000	**3.395.626.675**	579.151.510	5.000.000	**66.190.579**

LAMPIRAN 8

NO	KECAMATAN/ DESA		Pendapatan (Rp)			Jumlah APBDesa (Rp)	Belanja (Rp)					Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Surplus/ Defisit (Rp)
			PADesa	Dana Transfer	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga				
1	2		3	4	5	6= 3+4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14	15=(6+13)-(12+14)
	20	Ngranggonanyar	295.200.000	2.070.953.900	1.000.000	**2.367.153.900**	1.015.165.779	1.417.639.410	179.825.000	138.606.003	75.600.000	**2.826.836.192**	459.682.292	0	**0**
	21	Tlogorejo	672.850.000	3.083.211.700	1.500.000	**3.757.561.700**	1.964.837.256	1.663.637.900	339.097.500	92.704.400	79.157.500	**4.139.434.556**	532.872.856	151.000.000	**0**
	22	Bayemgede	588.500.000	3.874.935.900	1.759.500	**4.465.195.400**	1.623.959.500	2.745.285.980	237.100.000	34.000.000	120.400.000	**4.760.745.480**	295.550.080	0	**0**
	23	Karangan	566.600.000	2.648.282.300	2.919.000	**3.217.801.300**	1.908.645.132	1.329.856.660	147.415.600	217.466.800	128.600.000	**3.731.984.192**	519.684.406	5.000.000	**501.514**
	24	Sugihwaras	531.053.520	2.867.796.765	6.049.317	**3.404.899.602**	2.089.074.096	622.056.000	471.513.000	316.831.000	120.952.600	**3.620.426.696**	633.176.756	30.000.000	**387.649.662**
	25	Sumberagung	592.876.850	3.863.764.222	4.028.850	**4.460.669.922**	1.684.687.522	2.576.895.800	243.279.400	89.310.500	89.252.000	**4.683.425.222**	450.797.920	5.000.000	**223.042.620**
10	**BAURENO**														
	1	Drajat	483.220.000	2.348.526.600	3.643.785	**2.835.390.385**	1.247.645.595	1.415.475.100	119.141.500	179.950.500	115.200.000	**3.077.412.695**	251.905.783	0	**9.883.473**
	2	Banjaranyar	388.203.200	3.380.657.009	4.305.389	**3.773.165.598**	1.677.799.418	3.100.103.930	62.958.400	44.000.000	100.800.000	**4.985.661.748**	1.444.197.932		**231.701.782**
	3	Ngemplak	640.000.000	3.386.961.918	1.422.619	**4.028.384.537**	1.423.672.912	2.270.612.414	368.752.125	48.378.000	177.925.000	**4.289.340.451**	280.911.813	0	**19.955.899**
	4	Sraturejo	398.400.000	2.417.435.164	3.033.107	**2.818.868.271**	1.546.921.126	1.456.183.679	77.395.200	35.370.000	86.400.000	**3.202.270.005**	474.817.725		**91.415.991**
	5	Blongsong	190.250.000	2.322.536.822	2.810.285	**2.515.597.107**	1.137.824.131	774.311.477	151.574.000	200.157.525	98.400.000	**2.362.267.133**	320.709.701		**474.039.675**
	6	Baureno	186.040.000	2.528.047.273	4.435.642	**2.718.522.915**	939.987.550	792.424.187	270.682.984	386.296.450	113.000.000	**2.502.391.171**	651.304.898	40.000.000	**827.436.642**
	7	Trojalu	141.275.495	2.309.911.143	1.450.009	**2.452.636.647**	945.427.685	1.191.714.764	225.116.900	83.801.000	108.893.726	**2.554.954.075**	343.382.568	0	**241.065.140**
	8	Tulungagung	199.200.000	2.348.068.292	2.960.941	**2.550.229.233**	873.567.588	1.756.140.128	150.556.100	55.314.300	123.680.322	**2.959.258.438**	530.828.688		**121.799.483**
	9	Selorejo	172.500.000	2.538.431.000	9.491.616	**2.720.422.616**	874.750.886	1.180.101.450	101.567.000	85.271.000	82.800.000	**2.324.490.336**	0	0	**395.932.280**
	10	Tlogoagung	251.509.050	2.492.620.557	3.114.529	**2.747.244.136**	1.100.284.304	1.566.978.014	195.001.920	0	130.807.668	**2.993.071.906**	253.499.788	0	**7.672.018**
	11	Sumuragung	159.500.000	2.316.861.600	8.953.083	**2.485.314.683**	888.058.608	1.691.582.636	194.565.000	26.570.000	90.078.215	**2.890.854.459**	780.823.172	0	**375.283.396**
	12	Gajah	64.000.000	2.391.028.518	2.457.662	**2.457.486.180**	964.728.514	967.446.475	263.943.000	51.250.000	108.600.000	**2.355.967.989**	16.181.035		**117.699.226**
	13	Kalisari	87.500.000	3.763.446.309	2.718.051	**3.853.664.360**	1.488.674.849	1.930.696.905	307.836.150	3.000.000	90.000.000	**3.820.207.904**	115.491.656	0	**148.948.112**
	14	Tanggungan	80.000.000	2.340.047.943	5.733.192	**2.425.781.135**	852.603.699	816.350.600	69.837.550	168.852.000	93.600.000	**2.001.243.849**	490.458.443	40.000.000	**874.995.729**
	15	Gunungsari	222.600.000	2.470.051.743	2.784.512	**2.695.436.255**	1.083.579.467	1.590.935.760	177.922.808	190.650.000	97.200.000	**3.140.288.035**	650.107.447	0	**205.255.667**
	16	Bumiayu	192.819.000	3.721.945.557	6.854.498	**3.921.619.055**	910.726.011	2.343.988.660	88.911.400	239.659.000	79.200.000	**3.662.485.071**	410.382.553	0	**669.516.537**
	17	Kauman	485.000.000	2.382.191.545	4.461.425	**2.871.652.970**	1.689.506.826	1.244.125.795	217.705.350	8.010.000	206.474.029	**3.365.821.999**	740.203.985	0	**246.034.956**
	18	Karangdayu	349.220.000	3.036.781.065	20.256.777	**3.406.257.842**	1.032.826.407	1.649.497.566	241.346.000	250.102.000	129.074.350	**3.302.846.323**	328.395.376		**431.806.895**
	19	Pasinan	391.751.646	2.198.951.639	6.105.149	**2.596.808.434**	1.583.198.673	978.825.349	166.400.900	114.145.000	91.600.000	**2.934.169.922**	987.360.400	50.000.000	**599.998.912**
	20	Banjaran	395.000.000	3.645.183.744	5.400.493	**4.045.584.237**	1.339.257.948	2.295.161.301	323.371.284	73.150.000	127.310.200	**4.158.250.733**	630.959.331		**518.292.835**
	21	Sembunglor	75.000.000	2.333.790.710	1.773.064	**2.410.563.774**	715.741.088	1.271.987.540	159.962.000	66.591.000	79.200.000	**2.293.481.628**	568.310.897		**685.393.043**
	22	Pomahan	202.732.000	4.141.194.121	4.302.602	**4.348.228.723**	1.276.992.759	3.286.399.040	144.167.200	63.200.000	116.206.000	**4.886.964.999**	548.646.378		**9.910.102**
	23	Pucangarum	558.451.000	2.567.786.312	3.578.075	**3.129.815.387**	1.485.961.468	1.322.448.011	201.434.600	275.024.000	94.103.200	**3.378.971.279**	256.628.675		**7.472.782**
	24	Kadungrejo	272.400.000	4.089.872.800	17.590.882	**4.379.863.682**	2.196.650.629	2.584.647.379	221.701.126	52.950.000	115.200.000	**5.171.149.134**	804.839.863	0	**13.554.412**
	25	Lebaksari	167.124.000	2.288.003.100	2.567.451	**2.457.694.551**	1.008.234.658	933.479.150	63.995.850	3.000.000	128.728.399	**2.137.438.058**	174.212.764		**494.469.257**
11	**KANOR**														
	1	Caruban	391.324.000	2.152.517.965	60.570.259	**2.604.412.224**	1.066.856.200	1.040.821.875	159.769.000	232.063.400	196.200.000	**2.695.710.475**	254.933.221	0	**163.634.970**
	2	Gedongarum	1.096.992.000	2.275.386.740	12.479.524	**3.384.858.264**	1.629.146.105	1.088.414.300	349.030.000	169.694.400	112.165.016	**3.348.449.820**	426.628.038	0	**463.036.482**
	3	Sedeng	533.334.000	2.267.950.317	31.568.268	**2.832.852.585**	1.475.749.210	1.247.727.220	135.637.200	75.940.500	115.200.000	**3.050.254.130**	425.541.020	0	**208.139.475**
	4	Nglarangan	579.400.000	3.727.406.122	11.284.752	**4.318.090.874**	1.375.628.160	2.249.381.300	244.979.100	259.714.000	124.200.000	**4.253.902.560**	275.382.484	15.000.000	**324.570.798**
	5	Palembon	632.912.000	2.270.139.567	13.936.157	**2.916.987.724**	1.487.392.376	861.085.298	184.294.850	311.555.600	106.178.622	**2.950.506.746**	670.775.763	0	**637.256.740**
	6	Pesen	255.126.000	2.056.427.173	14.359.682	**2.325.912.855**	1.058.127.200	1.012.754.300	162.481.000	274.127.500	85.155.000	**2.592.645.000**	273.941.328	0	**7.209.183**
	7	Piyak	170.742.000	1.974.815.314	15.599.724	**2.161.157.038**	930.975.729	1.167.462.127	68.792.500	148.608.000	116.197.699	**2.432.036.055**	604.792.879	0	**333.913.862**
	8	Prigi	393.322.000	2.313.605.070	50.346.231	**2.757.273.301**	1.019.162.415	785.491.700	183.173.000	259.687.500	91.800.000	**2.339.314.615**	20.563.543	20.000.000	**418.522.230**
	9	Simbatan	305.300.000	2.153.744.970	9.604.811	**2.468.649.781**	1.094.439.820	685.546.496	208.650.000	261.323.000	110.280.500	**2.360.239.816**	32.292.667	0	**140.702.633**
	10	Simorejo	487.150.000	2.656.851.721	13.508.699	**3.157.510.420**	1.347.236.101	1.132.611.100	214.872.500	280.610.700	124.200.000	**3.099.530.401**	211.274.428	0	**269.254.446**
	11	Sumberwangi	535.680.000	2.294.064.718	15.991.123	**2.845.735.841**	1.192.551.934	914.966.400	259.210.000	191.550.800	95.400.000	**2.653.679.134**	161.565.243	25.000.000	**328.621.950**
	12	Tambahrejo	709.700.000	2.238.265.300	27.625.528	**2.975.590.828**	1.535.910.109	751.020.625	243.736.600	157.571.500	98.103.634	**2.786.342.468**	173.233.827	0	**362.482.187**
	13	Cangaan	196.100.000	3.533.473.300	13.400.000	**3.742.973.300**	1.023.039.744	2.548.422.537	120.340.000	233.996.766	112.590.751	**4.038.389.798**	295.416.498	0	**0**
	14	Bakung	488.866.950	2.473.106.070	36.001.522	**2.997.974.542**	1.177.945.942	891.804.500	297.323.500	255.057.000	232.350.000	**2.854.480.942**	601.364.846	0	**744.858.446**
	15	Bungur	362.300.000	2.330.796.251	11.533.327	**2.704.629.578**	1.344.701.414	1.160.216.015	208.716.700	198.582.657	86.400.000	**2.998.616.786**	342.469.907	0	**48.482.698**
	16	Tejo	453.200.000	2.149.364.130	10.177.185	**2.612.741.315**	1.193.035.974	888.556.000	99.160.000	180.114.000	72.000.000	**2.432.865.974**	158.836.824	0	**338.712.166**
	17	Kanor	423.394.800	2.377.565.800	9.712.027	**2.810.672.627**	1.459.857.287	1.228.900.100	160.275.900	36.500.000	160.014.227	**3.045.547.513**	234.874.886	0	**0**

LAMPIRAN 8

NO	KECAMATAN/ DESA		Pendapatan (Rp)			Jumlah APBDesa (Rp)	Belanja (Rp)					Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Surplus/ Defisit (Rp)
			PADesa	Dana Transfer	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga				
1	2		3	4	5	6= 3+4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14	15=(6+13)-(12+14)
	18	Kedungprimpen	900.289.000	3.911.977.417	14.535.493	**4.826.801.910**	1.350.045.700	2.665.344.500	264.090.000	538.773.300	216.324.711	**5.034.578.211**	329.588.356	0	**121.812.055**
	19	Samberan	519.252.500	2.197.596.600	13.918.656	**2.730.767.756**	1.407.794.080	699.053.514	111.813.094	140.551.500	95.389.339	**2.454.601.527**	377.934.820	10.000.000	**644.101.048**
	20	Sarangan	213.000.000	2.078.079.217	20.351.628	**2.311.430.845**	863.181.789	998.031.000	110.541.750	225.720.400	186.734.400	**2.384.209.339**	516.179.478	0	**443.400.984**
	21	Semambung	406.224.000	2.197.316.735	12.040.836	**2.615.581.571**	893.795.997	950.023.050	434.312.250	213.900.000	110.276.846	**2.602.308.143**	33.954.503	0	**47.227.931**
	22	Sroyo	279.210.000	2.080.354.013	13.837.505	**2.373.401.518**	1.098.584.101	686.310.100	144.640.000	123.419.000	81.000.000	**2.133.953.201**	511.210.901	0	**750.659.218**
	23	Temu	827.602.500	3.559.861.265	13.131.673	**4.400.595.438**	1.884.581.699	2.317.330.954	308.937.000	172.179.500	119.100.000	**4.802.129.153**	613.988.772	0	**212.455.058**
	24	Kabalan	385.840.000	2.315.488.465	9.849.916	**2.711.178.381**	1.280.386.343	754.884.500	332.783.300	278.352.300	104.000.000	**2.750.406.443**	280.089.621	172.115.300	**68.746.259**
	25	Pilang	292.126.800	2.321.513.270	14.219.233	**2.627.859.303**	1.041.474.523	977.184.150	224.550.000	35.000.000	195.077.651	**2.473.286.323**	580.086.087	70.000.000	**664.659.067**
12	**SUMBERREJO**														
	1	Margoagung	625.700.000	3.914.894.500	2.040.867	**4.542.635.367**	1.465.020.638	2.677.228.700	189.597.800	31.545.000	148.192.000	**4.511.584.138**	256.845.000	0	**287.896.229**
	2	Banjarejo	250.325.000	2.549.799.482	4.317.500	**2.804.441.982**	1.195.234.336	1.802.042.582	399.942.634	0	119.505.300	**3.516.724.852**	712.282.870	0	**0**
	3	Bogangin	200.605.000	2.282.467.000	0	**2.483.072.000**	1.092.921.800	1.250.664.700	136.140.000	146.693.500	106.652.000	**2.733.072.000**	250.000.000	0	**0**
	4	Butoh	504.008.400	3.019.566.728	2.092.936	**3.525.668.064**	1.603.801.929	1.538.343.500	257.233.000	226.835.400	146.433.458	**3.772.647.287**	249.984.000	0	**3.004.777**
	5	Deru	336.505.000	2.975.449.100	979.611	**3.312.933.711**	1.279.968.391	1.643.887.400	234.887.000	166.536.900	75.400.000	**3.400.679.691**	255.804.826	5.000.000	**163.058.846**
	6	Jatigede	472.614.000	4.641.430.100	500.000	**5.114.544.100**	1.692.305.530	3.146.029.900	394.504.100	26.282.100	98.600.000	**5.357.721.630**	250.442.440	0	**7.264.910**
	7	Karangdowo	554.856.650	3.702.663.839	3.628.302	**4.261.148.791**	1.364.564.650	2.368.190.200	192.220.000	33.500.000	108.000.000	**4.066.474.850**	250.000.000	105.000.000	**339.673.941**
	8	Kayulemah	356.101.050	2.251.162.300	1.020.837	**2.608.284.187**	1.394.916.874	743.014.800	256.553.000	226.000.000	81.291.532	**2.701.776.206**	250.000.000	5.000.000	**151.507.981**
	9	Kedungrejo	328.210.000	2.323.774.400	1.048.044	**2.653.032.444**	1.013.732.330	1.050.326.000	362.133.500	58.850.000	116.400.000	**2.601.441.830**	251.675.476	5.000.000	**298.266.089**
	10	Mejuwet	262.213.500	2.902.926.300	3.332.322	**3.168.472.122**	1.046.961.140	1.534.524.325	188.175.000	266.526.812	126.560.840	**3.162.748.117**	506.050.783	0	**511.774.787**
	11	Mlinjeng	286.740.000	2.570.603.200	602.465	**2.857.945.665**	1.602.775.890	1.200.183.255	129.760.000	32.376.520	123.600.000	**3.088.695.665**	253.750.000	0	**23.000.000**
	12	Ngampal	690.000.000	2.353.401.100	140.080.000	**3.183.481.100**	1.478.663.808	1.522.905.271	188.596.000	408.362.550	90.728.000	**3.689.255.629**	518.774.529	5.000.000	**8.000.000**
	13	Pejambon	482.415.000	2.268.049.826	1.443.110	**2.751.907.936**	1.469.553.723	931.211.000	489.344.000	25.400.000	86.703.116	**3.002.211.839**	261.181.550	8.800.000	**2.077.648**
	14	Pekuwon	821.608.860	2.266.653.100	57.609.000	**3.145.870.960**	1.823.530.299	995.311.680	319.879.000	67.563.000	145.225.440	**3.351.509.419**	254.250.271	0	**48.611.812**
	15	Prayungan	620.100.000	2.258.639.700	5.582.694	**2.884.322.394**	1.795.614.241	580.456.298	378.040.577	185.219.600	77.262.000	**3.016.592.716**	254.645.798	0	**122.375.476**
	16	Sambongrejo	609.955.000	3.991.288.300	36.552.800	**4.637.796.100**	1.492.968.000	3.402.284.450	153.600.000	71.800.000	93.600.000	**5.214.252.450**	576.456.350	0	**0**
	17	Sendangagung	401.000.000	2.099.512.900	6.880.760	**2.507.393.660**	1.456.039.434	1.211.035.084	181.941.800	175.269.079	78.000.000	**3.102.285.397**	639.684.571	5.000.000	**39.792.834**
	18	Sumberharjo	256.832.000	4.225.032.400	16.196.680	**4.498.061.080**	1.295.289.089	2.632.095.500	247.018.597	294.515.500	259.057.635	**4.727.976.321**	268.774.214	28.000.000	**10.858.973**
	19	Sumuragung	592.182.800	3.495.273.800	1.320.569	**4.088.777.169**	2.106.875.380	1.582.550.983	491.797.437	206.802.800	100.175.000	**4.488.201.600**	400.000.000	0	**575.569**
	20	Talun	319.400.000	2.329.572.900	0	**2.648.972.900**	1.186.894.178	667.715.262	229.417.200	280.824.900	108.000.000	**2.472.851.540**	9.438.640	5.000.000	**180.560.000**
	21	Teleng	341.250.000	2.184.490.500	21.711.000	**2.547.451.500**	1.275.733.900	623.235.000	160.870.600	334.817.000	82.200.000	**2.476.856.500**	103.081.000	0	**173.676.000**
	22	Tulungrejo	371.280.000	2.513.822.500	0	**2.885.102.500**	1.132.038.461	1.533.510.760	263.027.900	89.900.000	116.600.000	**3.135.077.121**	250.327.500	0	**352.879**
	23	Wotan	258.300.000	3.565.745.900	1.000.000	**3.825.045.900**	1.021.875.252	2.284.721.964	297.633.800	401.459.948	79.200.000	**4.084.890.964**	259.845.064	0	**0**
	24	Tlogohaji	122.500.000	4.586.821.500	3.425.148	**4.712.746.648**	1.261.714.802	3.220.216.982	168.087.940	68.722.360	148.400.000	**4.867.142.084**	256.164.179	100.000.000	**1.768.743**
	25	Sumberrejo	1.788.952.450	2.406.061.500	15.058.305	**4.210.072.255**	2.028.080.702	1.095.941.180	603.793.790	297.655.000	194.200.000	**4.219.670.672**	311.651.876	5.000.000	**297.053.459**
	26	Karangdinoyo	504.000.000	5.105.929.528	0	**5.609.929.528**	1.962.562.934	3.352.992.000	146.789.880	244.552.350	165.829.007	**5.872.726.171**	263.546.691	0	**750.048**
13	**BALEN**														
	1	Balenrejo	553.825.000	2.380.963.500	0	**2.934.788.500**	1.304.280.616	738.335.200	583.127.068	179.934.200	129.600.000	**2.935.277.084**	29.621.000	5.000.000	**24.132.416**
	2	Bulu	887.520.340	2.413.262.300	30.595.470	**3.331.378.110**	1.536.236.428	468.553.233	290.208.216	522.878.200	158.400.000	**2.976.276.077**	466.007.277	5.000.000	**816.109.310**
	3	Bulaklo	460.120.000	2.176.432.818	2.500.000	**2.639.052.818**	1.596.676.574	1.006.230.000	323.315.960	14.150.000	134.800.000	**3.075.172.534**	532.864.540	5.000.000	**91.744.824**
	4	Kabunan	243.206.000	3.182.341.900	1.430.600	**3.426.978.500**	992.521.500	2.029.433.000	318.124.000	15.500.000	86.400.000	**3.441.978.500**	15.000.000	0	**0**
	5	Kedungbondo	307.108.000	2.553.356.018	3.825.329	**2.864.289.347**	1.267.146.863	1.392.431.145	225.912.000	128.596.000	104.400.000	**3.118.486.008**	308.936.314	5.000.000	**49.739.653**
	6	Kedungdowo	523.000.000	3.261.461.100	1.153.500	**3.785.614.600**	1.294.436.600	2.162.793.000	205.700.000	240.485.000	119.800.000	**4.023.214.600**	242.600.000	5.000.000	**0**
	7	Kemamang	189.145.000	2.153.669.148	0	**2.342.814.148**	1.217.419.530	847.910.600	136.410.000	233.052.000	180.000.000	**2.614.792.130**	718.558.700	5.000.000	**441.580.718**
	8	Kenep	560.609.500	2.208.596.200	5.753.694	**2.774.959.394**	1.532.301.959	777.289.425	364.080.450	187.623.696	76.600.000	**2.937.895.530**	373.774.948	5.000.000	**205.838.812**
	9	Lengkong	245.200.000	2.304.046.500	0	**2.549.246.500**	1.329.479.600	579.911.500	67.422.000	268.730.000	100.000.000	**2.345.543.100**	0	0	**203.703.400**
	10	Margomulyo	711.950.000	2.607.571.333	9.935.960	**3.329.457.293**	1.568.985.891	1.171.653.500	290.610.500	127.348.000	117.000.000	**3.275.597.891**	587.217.334	5.000.000	**636.076.736**
	11	Mayangkawis	353.350.000	2.397.664.930	0	**2.751.014.930**	1.179.135.130	1.050.471.800	207.047.000	222.961.000	91.400.000	**2.751.014.930**	138.675	0	**138.675**
	12	Mulyoagung	597.984.000	2.498.223.514	10.963.840	**3.107.171.354**	1.374.359.025	1.248.371.000	135.153.500	225.430.000	104.400.000	**3.087.713.525**	262.063.448	5.000.000	**276.521.277**
	13	Mulyorejo	395.467.100	2.235.411.036	100.000.000	**2.730.878.136**	1.772.538.686	691.212.950	204.007.600	403.625.300	84.300.000	**3.155.684.536**	723.404.800	0	**298.598.400**
	14	Ngadiluhur	343.380.000	2.568.518.300	0	**2.911.898.300**	1.078.874.600	1.039.068.236	223.250.000	178.326.400	125.600.000	**2.645.119.236**	339.072.535	100.000.000	**505.851.599**

LAMPIRAN 8

NO	KECAMATAN/ DESA		Pendapatan (Rp)			Jumlah APBDesa (Rp)	Belanja (Rp)					Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Surplus/ Defisit (Rp)
			PADesa	Dana Transfer	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga				
1	2		3	4	5	6= 3+4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14	15=(6+13)-(12+14)
	15	Penganten	841.812.400	2.578.471.700	3.804.000	**3.424.088.100**	1.795.177.924	1.298.355.684	157.610.000	65.318.908	226.800.000	**3.543.262.516**	498.619.593	105.000.000	**274.445.177**
	16	Pilanggede	450.768.000	2.191.388.900	12.125.000	**2.654.281.900**	1.126.660.104	963.486.500	524.433.524	193.625.000	89.800.000	**2.898.005.128**	299.149.000	30.000.000	**25.425.772**
	17	Pohbogo	300.240.000	2.239.068.914	13.409.335	**2.552.718.249**	1.183.857.086	899.407.100	323.491.000	118.730.000	100.800.000	**2.626.285.186**	703.371.696	5.000.000	**624.804.759**
	18	Prambatan	294.725.000	3.656.782.400	0	**3.951.507.400**	1.355.828.340	2.493.600.000	153.442.000	286.307.900	126.000.000	**4.415.178.240**	468.670.840	5.000.000	**0**
	19	Sarirejo	780.200.000	1.871.450.565	50.000.000	**2.701.650.565**	1.473.573.835	1.455.026.730	164.680.000	28.500.000	172.903.600	**3.294.684.165**	603.033.600	10.000.000	**0**
	20	Sekaran	285.620.000	2.266.755.936	44.000.000	**2.596.375.936**	1.629.336.286	1.132.842.620	103.850.000	99.673.680	112.223.380	**3.077.925.966**	751.369.488	42.333.500	**227.485.958**
	21	Sidobandung	727.322.000	2.441.032.900	0	**3.168.354.900**	1.535.685.671	1.399.725.068	205.520.000	235.892.200	89.988.707	**3.466.811.646**	409.053.375	41.000.000	**69.596.629**
	22	Sobontoro	551.716.000	2.402.228.688	1.618.874	**2.955.563.562**	1.317.461.950	946.946.800	234.555.250	187.110.000	213.448.777	**2.899.522.777**	8.624.777	0	**64.665.562**
	23	Suwaloh	342.000.000	2.622.710.118	0	**2.964.710.118**	995.248.014	1.270.208.650	193.847.900	301.407.200	100.800.000	**2.861.511.764**	119.738.250	5.000.000	**217.936.604**
14	**KAPAS**														
	1	Bakalan	395.810.000	2.307.872.414	3.338.734	**2.707.021.148**	1.241.171.251	832.329.982	686.144.450	184.839.000	79.200.000	**3.023.684.683**	397.118.267	0	**80.454.732**
	2	Bangilan	282.600.000	2.264.809.417	3.349.168	**2.550.758.585**	1.125.721.333	1.321.096.790	218.102.000	52.475.800	83.800.000	**2.801.195.923**	440.877.060	0	**190.439.722**
	3	Bendo	277.650.000	3.777.735.114	25.062.790	**4.080.447.904**	1.235.310.983	2.653.791.050	283.900.400	26.830.000	125.073.333	**4.324.905.766**	631.173.198	25.000.000	**361.715.336**
	4	Bogo	183.000.000	2.605.333.865	2.913.045	**2.791.246.910**	1.166.756.647	1.429.649.835	326.557.200	14.455.000	104.400.000	**3.041.818.682**	381.038.205	0	**130.466.433**
	5	Kalianyar	227.092.000	2.129.270.950	3.328.551	**2.359.691.501**	1.218.434.749	794.011.200	179.871.000	208.760.000	208.000.000	**2.609.076.949**	318.702.560	0	**69.317.111**
	6	Kapas	449.822.703	2.283.870.870	16.012.058	**2.749.705.631**	1.350.365.641	869.928.988	426.548.610	273.837.034	144.000.000	**3.064.680.273**	1.479.311.668	128.331.500	**1.036.005.526**
	7	Kedaton	259.250.000	2.240.447.100	10.810.642	**2.510.507.742**	962.638.820	852.174.000	203.001.000	177.170.000	114.939.750	**2.309.923.570**	697.526.643	10.000.000	**888.110.815**
	8	Klampok	183.240.000	2.194.374.300	2.108.082	**2.379.722.382**	1.168.577.152	629.259.972	342.982.947	287.500.000	93.086.300	**2.521.406.371**	290.385.572	0	**148.701.583**
	9	Kumpulrejo	152.000.000	2.084.706.300	1.999.000	**2.238.705.300**	923.141.029	974.849.500	250.692.000	210.000.000	137.747.000	**2.496.429.529**	257.724.229	0	**0**
	10	Mojodeso	357.066.000	2.963.307.800	1.500.000	**3.321.873.800**	1.208.228.408	1.876.401.500	311.430.000	75.920.000	99.600.000	**3.571.579.908**	250.401.950	0	**695.842**
	11	Ngampel	157.002.000	2.319.083.700	17.393.228	**2.493.478.928**	1.031.265.858	935.371.895	330.970.500	262.700.000	86.400.000	**2.646.708.253**	591.873.805	0	**438.644.480**
	12	Padangmentoyo	138.523.000	2.024.206.000	904.903	**2.163.633.903**	1.259.894.286	746.188.300	208.875.000	150.360.000	68.400.000	**2.433.717.586**	291.031.902	20.000.000	**948.219**
	13	Plesungan	549.547.280	2.408.089.194	16.006.392	**2.973.642.866**	1.209.483.135	1.073.553.355	640.548.000	211.058.480	79.200.000	**3.213.842.970**	255.475.213	0	**15.275.109**
	14	Sambiroto	344.703.400	3.236.567.614	20.014.000	**3.601.285.014**	1.158.965.879	1.872.197.600	362.042.800	370.355.000	110.980.000	**3.874.541.279**	348.957.600	30.000.000	**45.701.335**
	15	Sembung	215.240.000	2.117.061.862	2.949.556	**2.335.251.418**	852.463.000	1.445.667.080	230.440.695	65.545.000	117.148.437	**2.711.264.212**	508.137.312	0	**132.124.518**
	16	Semenpinggir	361.500.000	2.419.065.653	12.021.741	**2.792.587.394**	1.343.395.389	1.266.870.972	195.996.540	66.831.000	207.163.448	**3.080.257.349**	448.360.253	0	**160.690.297**
	17	Sukowati	480.068.784	3.056.198.570	2.871.053	**3.539.138.407**	1.431.385.829	1.967.858.505	387.515.400	50.500.000	106.011.000	**3.943.270.734**	675.867.479	30.000.000	**241.735.152**
	18	Tanjungharjo	414.970.000	3.257.608.365	18.312.773	**3.690.891.138**	1.633.863.175	1.511.904.299	280.357.176	15.000.000	194.990.476	**3.636.115.127**	30.761.816	10.000.000	**75.537.827**
	19	Tapelan	293.700.000	2.547.728.464	9.257.825	**2.850.686.289**	1.049.596.126	994.183.951	124.966.000	0	295.200.000	**2.463.946.077**	43.794.318	30.000.000	**400.534.530**
	20	Tikusan	106.410.700	2.288.457.500	3.517.071	**2.398.385.271**	1.217.803.529	788.289.375	299.431.516	194.106.750	94.618.400	**2.594.249.570**	325.949.680	0	**130.085.381**
	21	Wedi	358.500.000	3.368.339.669	8.687.656	**3.735.527.325**	1.574.852.667	1.938.482.000	379.234.000	197.540.000	237.918.111	**4.328.026.778**	721.262.500	0	**128.763.047**
15	**BOJONEGORO**														
	1	Kalirejo	333.558.500	2.431.925.775	0	**2.765.484.275**	1.327.958.250	1.188.448.100	152.075.000	206.740.000	217.800.000	**3.093.021.350**	670.227.527	30.000.000	**312.690.452**
	2	Mulyoagung	308.574.700	2.445.605.700	2.900.000	**2.757.080.400**	1.126.857.839	1.232.929.100	128.551.250	218.129.000	174.600.000	**2.881.067.189**	618.188.302	0	**494.201.513**
	3	Kauman	217.955.500	2.761.382.600	0	**2.979.338.100**	1.254.208.487	900.732.150	146.390.000	208.550.300	199.354.750	**2.709.235.687**	442.332.850	100.000.000	**612.435.263**
	4	Pacul	342.014.174	3.163.158.739	7.531.466	**3.512.704.379**	1.407.182.912	738.921.775	93.963.972	312.272.221	288.000.000	**2.840.340.880**	436.644.585	205.000.000	**904.008.084**
	5	Semanding	214.050.000	3.393.400.165	11.324.200	**3.618.774.365**	1.113.399.270	1.969.450.400	343.275.000	187.365.000	236.765.500	**3.850.255.170**	594.420.152	0	**362.939.347**
	6	Sukorejo	366.339.750	3.117.096.420	0	**3.483.436.170**	1.467.779.950	1.102.249.100	180.175.000	87.000.000	241.200.000	**3.078.404.050**	246.332.100	0	**651.364.220**
	7	Campurejo	514.665.688	2.897.565.865	0	**3.412.231.553**	1.512.304.758	570.450.050	230.483.817	187.087.950	238.713.100	**2.739.039.675**	412.320.782	0	**1.085.512.660**
16	**KALITIDU**														
	1	Pungpungan	247.329.500	4.722.946.400	0	**4.970.275.900**	1.521.380.895	2.897.443.896	169.293.700	263.357.400	118.800.000	**4.970.275.891**	0	0	**9**
	2	Wotanngare	71.104.832	2.542.151.769	1.444.758	**2.614.701.359**	1.159.145.099	995.935.700	148.585.800	173.226.300	123.200.000	**2.600.092.899**	14.664.471	5.000.000	**24.272.930**
	3	Mayanggeneng	99.787.500	2.026.177.000	969.642	**2.126.934.142**	1.045.815.634	820.294.800	141.112.124	40.000.000	78.400.000	**2.125.622.558**	10.890.994	9.930.732	**2.271.846**
	4	Ngujo	135.000.000	4.217.132.576	0	**4.352.132.576**	931.612.140	2.258.411.528	93.797.985	452.515.195	204.890.000	**3.941.226.848**	136.343.587	127.332.625	**419.916.690**
	5	Panjunan	146.410.000	2.196.120.800	0	**2.342.530.800**	1.451.493.764	478.992.750	84.883.344	339.643.250	84.075.384	**2.439.088.492**	96.557.692		**0**
	6	Brenggolo	91.500.000	2.464.932.000	0	**2.556.432.000**	1.215.416.075	932.567.300	146.226.700	138.902.500	117.707.200	**2.550.819.775**	9.387.775	15.000.000	**0**
	7	Sukoharjo	204.714.613	2.236.099.800	3.512.239	**2.444.326.652**	813.264.333	1.350.424.724	113.481.372	47.900.000	103.643.948	**2.428.714.377**	84.450.459	96.410.266	**3.652.468**
	8	Grebegan	65.000.000	2.366.933.900	0	**2.431.933.900**	1.013.360.847	1.025.832.379	217.493.452	154.250.000	186.424.750	**2.597.361.428**	170.626.408	5.000.000	**198.880**
	9	Mojosari	170.399.600	3.711.327.900	0	**3.881.727.500**	1.506.240.320	2.083.621.080	124.301.100	36.250.000	117.000.000	**3.867.412.500**	189.671.196	30.000.000	**173.986.196**

LAMPIRAN 8

NO	KECAMATAN/ DESA		Pendapatan (Rp)			Jumlah APBDesa (Rp)	Belanja (Rp)					Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Surplus/ Defisit (Rp)
			PADesa	Dana Transfer	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga				
1	2		3	4	5	6= 3+4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14	15=(6+13)-(12+14)
	10	Mlaten	203.816.000	2.338.863.026	0	**2.542.679.026**	1.161.986.396	1.145.886.226	63.258.100	30.000.000	108.000.000	**2.509.130.722**	75.038.926	70.038.926	**38.548.304**
	11	Kalitidu	104.200.000	2.221.424.923	1.758.354	**2.327.383.277**	877.025.348	1.131.115.000	102.609.100	25.260.700	212.929.406	**2.348.939.554**	30.815.509	5.000.000	**4.259.231**
	12	Mojo	23.450.000	2.101.915.600	0	**2.125.365.600**	715.941.000	965.499.800	120.968.800	183.656.000	176.300.000	**2.162.365.600**	37.000.000	0	**0**
	13	Pilangsari	165.850.000	3.241.035.800	25.605.799	**3.432.491.599**	1.019.432.580	1.347.845.581	334.938.200	332.300.000	91.975.237	**3.126.491.598**	4.013.331	10.000.000	**300.013.332**
	14	Mayangrejo	193.787.500	2.549.791.500	0	**2.743.579.000**	1.259.817.200	1.095.413.800	320.108.000	45.000.000	82.800.000	**2.803.139.000**	59.560.000	0	**0**
	15	Sumengko	184.900.000	3.121.221.400	16.409.320	**3.322.530.720**	1.124.262.808	977.059.891	248.782.700	209.500.000	154.183.230	**2.713.788.629**	0	5.000.000	**603.742.091**
	16	Leran	325.900.000	6.443.715.868	10.131.958	**6.779.747.826**	1.240.258.990	4.589.935.300	92.223.300	32.000.000	144.195.979	**6.098.613.569**	66.258.886	0	**747.393.143**
	17	Ngringinrejo	184.300.000	3.434.315.714	3.031.055	**3.621.646.769**	909.613.128	2.116.541.180	336.037.605	71.830.500	151.050.000	**3.585.072.413**	14.966.533	30.000.000	**21.540.890**
	18	Talok	0	1.043.599.015	0	**1.043.599.015**	697.997.622	428.000.000	31.800.000	10.000.000	110.000.000	**1.277.797.622**	1.025.320.422	0	**791.121.815**
17	**MALO**														
	1	Dukohlor	140.000.000	2.347.867.700	1.721.297	**2.489.588.997**	902.867.970	734.777.400	279.803.700	539.953.960	95.400.000	**2.552.803.030**	479.480.766	0	**416.266.734**
	2	Kacangan	107.214.600	4.051.670.200	4.466.690	**4.163.351.490**	1.069.223.121	2.573.548.666	136.326.200	105.700.000	151.628.440	**4.036.426.427**	542.837.093	0	**669.762.156**
	3	Kemiri	105.275.500	3.523.800.965	1.708.557	**3.630.785.022**	1.363.439.656	2.606.762.260	274.443.563	45.000.000	138.600.000	**4.428.245.479**	829.034.179	0	**31.573.721**
	4	Petak	22.777.800	2.130.137.900	0	**2.152.915.700**	1.109.394.379	1.016.488.600	160.935.300	69.270.000	75.600.000	**2.431.688.279**	313.652.779	0	**34.880.200**
	5	Kliteh	43.605.000	2.360.336.800	0	**2.403.941.800**	886.564.825	1.447.375.715	597.714.084	53.000.000	100.800.000	**3.085.454.624**	720.006.440	9.000.000	**29.493.616**
	6	Sudah	154.474.000	4.051.898.100	0	**4.206.372.100**	1.098.445.169	2.704.359.320	47.886.600	34.000.000	89.200.000	**3.973.891.089**	204.455.894	5.000.000	**431.936.905**
	7	Ngujung	96.000.000	4.351.578.500	3.131.195	**4.450.709.695**	827.233.130	3.458.794.203	221.541.600	0	118.030.429	**4.625.599.362**	229.659.685	0	**54.770.019**
	8	Tambakromo	25.000.000	2.613.944.039	793.252	**2.639.737.291**	861.262.877	1.573.530.243	316.067.619	0	120.706.700	**2.871.567.439**	282.348.654	0	**50.518.506**
	9	Sumberjo	96.691.440	4.300.364.122	0	**4.397.055.562**	812.571.140	3.270.318.400	205.413.941	0	114.399.468	**4.402.702.949**	112.136.553	0	**106.489.166**
	10	Tinawun	145.500.000	2.345.629.600	11.319.868	**2.502.449.468**	996.877.707	724.151.400	401.958.779	285.018.410	93.600.000	**2.501.606.296**	18.628.377	0	**19.471.549**
	11	Banaran	48.000.000	1.984.179.700	41.987	**2.032.221.687**	847.850.929	963.656.973	69.500.000	69.000.000	92.301.400	**2.042.309.302**	14.139.584	0	**4.051.970**
	12	Kedungrejo	91.278.400	3.201.908.400	3.131.195	**3.296.317.995**	970.295.045	2.254.066.350	156.600.000	90.380.000	78.000.000	**3.549.341.395**	257.371.743	0	**4.348.344**
	13	Ketileng	55.500.000	2.407.569.314	1.192.050	**2.464.261.364**	921.319.564	1.105.197.590	210.330.965	153.645.000	227.295.600	**2.617.788.719**	177.351.184	0	**23.823.829**
	14	Rendeng	62.500.000	2.286.542.663	1.845.608	**2.350.888.271**	1.375.256.602	1.073.188.462	284.535.016	28.445.000	85.993.700	**2.847.418.780**	543.677.241	0	**47.146.731**
	15	Malo	33.270.000	2.165.529.400	786.699	**2.199.586.099**	892.414.720	738.591.233	124.801.833	569.142.273	76.983.710	**2.401.933.769**	407.996.221	100.000.000	**105.648.551**
	16	Sukorejo	21.000.000	2.164.895.395	3.370.635	**2.189.266.030**	800.147.955	1.122.124.000	96.949.400	0	130.010.999	**2.149.232.354**	518.549.975	0	**558.583.651**
	17	Trembes	108.000.000	2.054.683.375	0	**2.162.683.375**	909.046.639	853.356.030	148.984.100	123.273.800	128.000.000	**2.162.660.569**	0	0	**22.806**
	18	Semlaran	103.044.000	2.064.612.359	147.603	**2.167.803.962**	1.164.573.109	660.012.500	243.106.500	20.610.000	85.345.396	**2.173.647.505**	14.266.756	5.000.000	**3.423.214**
	19	Tanggir	113.030.400	2.504.593.697	2.249.459	**2.619.873.556**	1.549.915.855	919.896.830	76.540.128	113.611.815	139.600.000	**2.799.564.628**	241.412.806	0	**61.721.734**
	20	Tulungagung	127.737.000	3.248.454.001	4.894.958	**3.381.085.959**	942.575.832	2.086.705.902	73.024.724	35.680.800	108.000.000	**3.245.987.258**	171.766.614		**306.865.316**
18	**PURWOSARI**														
	1	Pelem	74.133.070	2.545.299.893	4.859.619	**2.624.292.582**	1.077.715.295	1.067.435.375	354.803.528	204.048.600	113.400.000	**2.817.402.798**	505.867.093	7.500.000	**305.256.877**
	2	Ngrejeng	83.300.000	3.088.325.598	3.218.730	**3.174.844.328**	1.263.825.854	1.327.863.742	240.659.500	162.377.000	120.152.627	**3.114.878.723**	772.863.173	5.000.000	**827.828.778**
	3	Tlatah	117.691.000	2.851.425.330	1.784.965	**2.970.901.295**	1.022.670.547	1.764.503.640	503.859.192	38.994.900	86.400.000	**3.416.428.279**	469.269.283	5.000.000	**18.742.299**
	4	Kaliombo	81.066.500	3.903.795.911	5.195.268	**3.990.057.679**	1.377.642.070	1.535.303.464	464.366.600	107.550.000	139.252.102	**3.624.114.236**	519.004.752	0	**884.948.194**
	5	Tinumpuk	32.000.000	2.177.429.100	8.566.326	**2.217.995.426**	841.996.931	1.313.876.106	248.014.000	235.699.501	80.700.000	**2.720.286.538**	548.134.662	0	**45.843.550**
	6	Punggur	71.800.000	2.641.912.100	0	**2.713.712.100**	822.005.562	1.104.573.250	216.241.700	131.115.900	75.545.000	**2.349.481.412**	558.175.408	10.000.000	**912.406.096**
	7	Sedahkidul	58.500.000	2.620.154.770	4.257.331	**2.682.912.101**	2.025.655.879	937.077.975	141.248.000	38.600.000	75.600.000	**3.218.181.854**	602.601.527	10.000.000	**57.331.774**
	8	Pojok	60.760.000	2.652.723.100	0	**2.713.483.100**	1.287.805.489	1.244.194.658	216.680.000	215.364.285	75.600.000	**3.039.644.432**	1.137.986.037	0	**811.824.706**
	9	Purwosari	244.398.200	2.538.806.400	2.508.000	**2.785.712.600**	1.170.953.582	831.040.541	882.584.017	275.231.900	91.400.000	**3.251.210.040**	538.648.940	23.151.500	**50.000.000**
	10	Gapluk	94.384.290	4.012.140.600	0	**4.106.524.890**	1.637.269.246	3.050.323.012	64.794.650	284.021.800	141.563.600	**5.177.972.308**	1.096.447.418	25.000.000	**0**
	11	Kuniran	81.958.050	3.200.197.714	3.982.293	**3.286.138.057**	1.480.886.317	1.066.843.650	589.025.300	131.807.600	129.500.000	**3.398.062.867**	218.334.974	0	**106.410.164**
	12	Donan	25.000.000	2.436.417.100	0	**2.461.417.100**	1.211.795.445	1.324.430.641	172.057.200	100.698.600	102.600.000	**2.911.581.885**	751.605.343	5.000.000	**296.440.558**
19	**PADANGAN**														
	1	Tebon	111.600.000	2.328.398.800	7.000.000	**2.446.998.800**	1.008.706.578	1.860.547.580	140.046.500	51.545.000	90.000.000	**3.150.845.658**	1.066.833.940	40.921.760	**322.065.322**
	2	Prangi	117.000.000	2.126.671.939	21.957.658	**2.265.629.597**	1.085.382.452	1.855.557.818	166.429.650	1.100.000	117.000.000	**3.225.469.920**	1.454.197.740	20.000.000	**474.357.418**
	3	Purworejo	95.000.000	2.295.844.591	12.003.883	**2.402.848.474**	935.051.458	1.299.863.584	120.705.000	39.000.000	115.200.000	**2.509.820.042**	697.849.495	5.000.000	**585.877.927**
	4	Ngeper	92.000.000	2.482.453.800	11.640.000	**2.586.093.800**	1.178.851.100	1.292.281.100	93.837.500	178.516.900	128.937.956	**2.872.424.556**	339.177.952	50.000.000	**2.847.196**
	5	Sonorejo	121.188.500	2.294.637.100	0	**2.415.825.600**	985.764.064	1.527.878.000	131.656.200	26.000.000	116.405.500	**2.787.703.764**	400.044.000	5.000.000	**23.165.836**

LAMPIRAN 8

NO	KECAMATAN/ DESA		Pendapatan (Rp)			Jumlah APBDesa (Rp)	Belanja (Rp)					Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Surplus/ Defisit (Rp)
			PADesa	Dana Transfer	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga				
1	2		3	4	5	6= 3+4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14	15=(6+13)-(12+14)
	6	Ngradin	189.000.000	2.401.845.552	4.952.409	**2.595.797.961**	1.147.561.620	1.164.126.732	150.505.000	20.960.000	112.548.000	**2.595.701.352**	446.381.500	110.000.000	**336.478.109**
	7	Kendung	157.083.500	2.263.571.122	2.000.000	**2.422.654.622**	1.239.319.034	1.516.752.982	130.985.838	6.851.600	86.400.000	**2.980.309.454**	562.654.832	5.000.000	**0**
	8	Kebonagung	329.999.920	2.306.690.628	1.400.000	**2.638.090.548**	1.231.244.690	1.323.366.355	155.681.460	115.188.000	93.600.000	**2.919.080.505**	372.696.605	0	**91.706.648**
	9	Banjarejo	585.746.000	4.003.993.030	6.271.213	**4.596.010.243**	1.563.592.382	2.789.056.999	369.950.000	171.309.200	106.224.000	**5.000.132.581**	585.227.122	10.000.000	**171.104.784**
	10	Kuncen	110.210.000	2.425.121.080	0	**2.535.331.080**	1.218.101.912	1.344.563.475	94.304.041	27.220.000	110.540.000	**2.794.729.428**	284.824.952	5.000.000	**20.426.604**
	11	Ngasinan	149.380.000	2.474.829.100	0	**2.624.209.100**	1.091.947.389	1.312.889.800	157.269.700	13.900.000	91.940.000	**2.667.946.889**	348.986.300	10.000.000	**295.248.511**
	12	Cendono	129.628.000	2.184.251.466	4.189.787	**2.318.069.253**	743.763.128	1.114.893.454	394.713.600	45.482.300	94.383.954	**2.393.236.436**	531.572.736	5.000.000	**451.405.553**
	13	Sidorejo	210.000.000	2.302.728.400	3.250.000	**2.515.978.400**	1.460.677.396	1.877.571.596	141.001.296	183.258.800	95.962.500	**3.758.471.588**	1.587.177.993	5.000.000	**339.684.805**
	14	Nguken	280.000.000	2.334.444.362	0	**2.614.444.362**	1.082.627.452	1.468.947.100	247.073.950	1.400.000	136.800.000	**2.936.848.502**	441.042.952	5.000.000	**113.638.812**
	15	Padangan	373.610.000	4.762.427.794	1.200.000	**5.137.237.794**	1.278.182.360	3.134.156.018	141.930.000	414.528.380	91.220.000	**5.060.016.758**	118.479.000	0	**195.700.036**
	16	Dengok	177.600.000	2.367.410.000	0	**2.545.010.000**	1.084.491.399	1.485.762.844	92.878.900	38.281.502	100.309.997	**2.801.724.642**	496.584.642	120.000.000	**119.870.000**
20	**KASIMAN**														
	1	Batokan	270.000.000	2.471.072.610	2.713.341	**2.743.785.951**	1.190.139.315	1.442.793.300	119.270.000	298.920.000	93.600.000	**3.144.722.615**	411.354.681	0	**10.418.018**
	2	Betet	97.825.200	3.812.508.213	16.742.749	**3.927.076.162**	1.026.357.668	2.544.352.987	234.855.700	225.427.800	90.000.000	**4.120.994.155**	353.059.051	10.000.000	**149.141.058**
	3	Besah	447.400.000	2.428.411.867	6.349.899	**2.882.161.766**	1.318.442.979	1.041.023.600	199.555.600	265.440.700	161.974.600	**2.986.437.479**	884.499.302	5.000.000	**775.223.589**
	4	Kasiman	79.727.600	4.337.184.661	10.229.640	**4.427.141.901**	1.261.588.881	2.651.186.153	273.868.800	348.394.000	239.994.550	**4.775.032.384**	583.747.534	5.000.000	**230.857.051**
	5	Ngaglik	173.589.800	2.405.019.694	5.387.051	**2.583.996.545**	1.071.995.279	1.644.838.693	260.093.700	295.946.500	203.900.000	**3.476.774.172**	1.045.331.022	0	**152.553.395**
	6	Sambeng	162.352.000	2.468.839.500	0	**2.631.191.500**	1.347.430.435	915.825.245	157.634.800	170.918.100	205.044.980	**2.796.853.560**	646.389.400	0	**480.727.340**
	7	Sekaran	139.550.000	4.993.774.700	0	**5.133.324.700**	1.095.070.278	4.442.576.510	316.488.600	89.800.000	144.000.000	**6.087.935.388**	1.345.817.055	0	**391.206.367**
	8	Sidomukti	173.343.300	3.131.692.063	3.112.043	**3.308.147.406**	814.162.976	1.028.134.888	374.715.387	30.318.000	90.000.000	**2.337.331.251**	1.099.642.728	5.000.000	**2.065.458.883**
	9	Tambakmerak	70.000.000	2.612.649.726	0	**2.682.649.726**	909.953.440	1.841.763.255	244.577.860	132.840.000	116.600.000	**3.245.734.555**	946.751.155	5.000.000	**378.666.326**
	10	Tembeling	335.780.000	4.028.936.146	33.793.989	**4.398.510.135**	1.132.649.347	2.605.526.480	392.180.000	438.440.000	92.500.000	**4.661.295.827**	326.213.614	5.000.000	**58.427.922**
21	**TEMAYANG**														
	1	Temayang	167.739.000	2.500.072.017	0	**2.667.811.017**	1.511.472.100	1.205.165.400	165.445.930	54.250.717	95.788.400	**3.032.122.547**	602.168.200	96.000.000	**141.856.670**
	2	Bakulan	0	2.515.263.050	0	**2.515.263.050**	719.136.300	1.448.533.000	55.000.000	25.875.000	89.100.000	**2.337.644.300**	350.304.850	0	**527.923.600**
	3	Belun	115.500.000	2.459.666.214	0	**2.575.166.214**	1.031.805.240	1.881.721.248	116.130.000	77.958.250	106.741.221	**3.214.355.959**	1.035.579.926	0	**396.390.181**
	4	Jono	159.100.000	2.697.711.500	4.000.000	**2.860.811.500**	1.083.271.773	1.512.266.000	196.304.200	117.657.000	164.100.000	**3.073.598.973**	527.680.990	0	**314.893.517**
	5	Papringan	68.000.000	5.585.965.927	8.422.388	**5.662.388.315**	1.021.539.163	4.162.503.116	153.881.414	161.601.581	149.700.000	**5.649.225.274**	332.949.710	105.000.000	**241.112.752**
	6	Kedungsari	41.454.000	2.671.696.300	4.651.278	**2.717.801.578**	884.282.088	1.599.501.949	234.301.774	287.154.700	141.220.658	**3.146.461.169**	684.054.081	255.394.490	**0**
	7	Kedungsumber	93.876.500	2.698.057.900	4.141.148	**2.796.075.548**	1.245.333.383	1.730.607.388	126.526.000	68.787.000	168.750.000	**3.340.003.771**	641.400.688	96.000.000	**1.472.466**
	8	Ngujung	77.500.000	2.400.290.400	400.000	**2.478.190.400**	1.156.754.500	1.227.157.100	196.749.300	156.358.000	105.100.000	**2.842.118.900**	398.840.720	0	**34.912.220**
	9	Soko	109.922.000	5.320.648.600	0	**5.430.570.600**	1.452.452.380	3.534.672.920	175.118.300	156.727.000	111.600.000	**5.430.570.600**	25.000.000	5.000.000	**20.000.000**
	10	Pandantoyo	85.750.000	2.393.860.900	0	**2.479.610.900**	1.192.762.185	1.474.554.208	371.157.500	155.300.000	97.200.000	**3.290.973.893**	846.759.598	2.028.862	**33.367.743**
	11	Buntalan	74.732.000	2.363.812.414	6.984.351	**2.445.528.765**	800.709.389	885.808.000	148.666.000	540.921.000	115.200.000	**2.491.304.389**	705.484.082	0	**659.708.458**
	12	Pancur	68.500.000	2.213.610.500	0	**2.282.110.500**	849.543.769	1.596.558.300	124.567.500	61.700.000	82.800.000	**2.715.169.569**	474.509.069	5.000.000	**36.450.000**
22	**MARGOMULYO**														
	1.	Kalangan	45.000.000	4.478.693.206	14.987.914	**4.538.681.120**	939.356.231	2.714.278.384	170.884.000	147.379.000	109.800.000	**4.081.697.615**	220.815.873	70.000.000	**607.799.378**
	2.	Ngelo	0	2.578.200.559	0	**2.578.200.559**	1.318.529.170	811.860.050	279.415.000	301.240.000	127.514.525	**2.838.558.745**	347.330.363	0	**86.972.177**
	3.	Margomulyo	50.000.000	5.451.821.200	10.921.791	**5.512.742.991**	1.268.811.310	3.344.574.184	430.200.000	76.417.200	167.200.000	**5.287.202.694**	695.584.248	0	**921.124.545**
	4.	Sumberjo	61.250.000	3.911.100.000	18.905.881	**3.991.255.881**	1.937.746.664	1.670.605.500	271.347.500	479.905.500	225.534.000	**4.585.139.164**	1.001.343.920	25.000.000	**382.460.637**
	5.	Meduri	8.020.000	7.289.923.125	15.046.069	**7.312.989.194**	1.546.833.812	5.605.120.314	100.652.000	21.185.000	211.575.022	**7.485.366.148**	429.148.186	0	**256.771.233**
	6.	Geneng	50.200.000	4.489.205.823	0	**4.539.405.823**	881.476.677	2.853.672.377	161.217.658	50.992.060	138.843.617	**4.086.202.389**	725.705.072	0	**1.178.908.506**
23	**TRUCUK**														
	1	Banjarsari	193.237.500	2.797.788.165	13.279.149	**3.004.304.814**	1.530.048.680	1.059.153.500	154.515.000	304.074.500	142.200.000	**3.189.991.680**	283.608.589	35.000.000	**62.921.723**
	2	Guyangan	177.912.304	2.139.022.362	2.169.246	**2.319.103.912**	1.023.762.719	1.342.284.155	181.378.500	37.900.000	124.350.000	**2.709.675.374**	482.047.551	0	**91.476.089**
	3	Kandangan	441.654.500	2.680.284.814	7.275.283	**3.129.214.597**	1.543.003.739	1.164.256.813	177.271.981	234.164.600	275.800.000	**3.394.497.133**	484.556.704	5.000.000	**214.274.167**
	4	Kanten	289.525.000	2.570.068.117	2.643.041	**2.862.236.158**	1.483.602.062	1.128.151.826	107.181.800	67.258.700	246.863.940	**3.033.058.328**	436.527.032	5.000.000	**260.704.862**
	5	Mori	177.500.000	2.459.596.865	37.786.202	**2.674.883.067**	1.210.900.051	1.386.534.000	300.232.310	132.800.000	153.000.000	**3.183.466.361**	595.804.913	5.000.000	**82.221.619**

LAMPIRAN 8

NO	KECAMATAN/ DESA		Pendapatan (Rp)			Jumlah APBDesa (Rp)	Belanja (Rp)					Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Surplus/ Defisit (Rp)
			PADesa	Dana Transfer	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga				
1	2		3	4	5	6= 3+4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14	15=(6+13)-(12+14)
	6	Padang	284.717.000	3.339.984.017	10.429.952	**3.635.130.969**	1.309.836.638	2.067.163.350	197.870.000	11.800.000	172.536.750	**3.759.206.738**	407.174.234	80.000.000	**203.098.466**
	7	Pagerwesi	180.455.500	2.553.874.362	3.266.642	**2.737.596.504**	1.485.697.012	763.314.100	261.553.700	98.337.500	134.800.000	**2.743.702.312**	273.604.616	5.000.000	**262.498.808**
	8	Sranak	249.875.000	3.428.432.469	6.094.575	**3.684.402.044**	1.160.228.432	2.181.608.035	311.544.000	134.370.000	148.697.500	**3.936.447.967**	263.202.660	5.000.000	**6.156.736**
	9	Sumbangtimun	125.000.000	2.330.950.214	3.252.040	**2.459.202.254**	1.456.697.346	981.141.100	221.204.906	73.110.000	144.729.149	**2.876.882.501**	483.060.270	5.000.000	**60.380.023**
	10	Sumberejo	178.977.720	2.093.090.362	28.237.700	**2.300.305.782**	970.523.772	1.138.717.849	278.277.500	56.195.000	84.600.000	**2.528.314.121**	323.811.145	10.000.000	**85.802.806**
	11	Trucuk	213.274.000	3.197.240.640	4.517.147	**3.415.031.787**	1.236.904.991	2.157.839.494	102.410.000	179.240.000	255.766.806	**3.932.161.291**	647.044.233	5.000.000	**124.914.729**
	12	Tulungrejo	183.550.000	2.579.573.447	6.256.288	**2.769.379.735**	1.283.241.358	1.041.463.800	210.955.300	178.112.900	149.400.000	**2.863.173.358**	402.502.335	5.000.000	**303.708.713**
24	**SUKOSEWU**														
	1	Semawot	106.900.000	3.214.244.700	1.583.853	**3.322.728.553**	980.563.239	1.835.891.800	181.902.288	218.942.900	100.800.000	**3.318.100.227**	8.851.719	5.000.000	**8.480.045**
	2	Kalicilik	114.933.000	2.645.158.802	1.056.737	**2.761.148.539**	1.319.625.471	709.717.300	349.232.500	133.035.000	248.400.000	**2.760.010.271**	5.136.395	0	**6.274.663**
	3	Sukosewu	345.940.000	3.278.128.548	1.559.819	**3.625.628.367**	1.584.930.639	1.534.704.919	156.649.500	279.523.580	100.800.000	**3.656.608.638**	91.840.620	0	**60.860.349**
	4	Klepek	251.500.000	2.479.743.800	1.207.000	**2.732.450.800**	1.512.984.266	705.890.300	160.037.100	64.000.000	116.400.000	**2.559.311.666**	956.884	5.000.000	**169.096.018**
	5	Tegalkodo	263.110.000	2.164.883.695	609.992	**2.428.603.687**	1.099.950.415	705.477.398	449.195.600	86.021.130	82.600.000	**2.423.244.543**	916.586	5.000.000	**1.275.730**
	6	Sitiaji	205.800.000	2.808.297.700	4.267.414	**3.018.365.114**	1.278.782.183	1.201.851.000	152.119.600	86.582.000	188.482.000	**2.907.816.783**	56.340.162	0	**166.888.493**
	7	Purwoasri	243.560.000	6.085.593.925	5.219.023	**6.334.372.948**	1.167.399.505	2.497.191.816	340.182.500	2.140.808.562	305.382.880	**6.450.965.263**	135.622.614	0	**19.030.298**
	8	Pacing	273.820.000	2.481.665.122	1.019.411	**2.756.504.533**	1.455.590.561	636.870.000	416.210.000	0	244.000.000	**2.752.670.561**	169.754.869	0	**173.588.840**
	9	Jumput	169.100.000	2.265.301.200	4.182.563	**2.438.583.763**	959.720.075	668.550.964	359.554.033	49.840.760	113.310.000	**2.150.975.832**	47.181.270	5.000.000	**329.789.200**
	10	Duyungan	433.150.000	5.094.943.500	5.561.071	**5.533.654.571**	1.238.136.101	3.529.652.280	309.231.532	228.586.400	121.362.640	**5.426.968.953**	128.117.424	0	**234.803.042**
	11	Semenkidul	201.000.000	2.179.855.475	3.099.340	**2.383.954.815**	947.222.502	719.119.400	190.350.000	148.079.300	151.200.000	**2.155.971.202**	15.042.645	0	**243.026.258**
	12	Sidodadi	395.500.250	4.547.160.127	5.181.568	**4.947.841.945**	1.429.396.608	2.383.893.600	169.930.985	409.393.350	251.200.000	**4.643.814.543**	100.985	0	**304.128.387**
	13	Sidorejo	139.500.000	2.238.107.317	783.448	**2.378.390.765**	941.538.036	725.200.000	239.732.000	107.000.000	172.800.000	**2.186.270.036**	3.004.715	111.000.000	**84.125.444**
	14	Sumberjokidul	77.000.000	3.962.170.400	34.806.053	**4.073.976.453**	1.085.733.969	2.682.899.817	90.128.000	31.676.000	97.453.500	**3.987.891.286**	253.500	5.000.000	**81.338.667**
25	**KEDEWAN**														
	1	Kawengan	40.000.000	2.214.018.130	0	**2.254.018.130**	1.086.319.552	384.933.400	214.194.600	224.363.500	114.223.300	**2.024.034.352**	10.043.152	5.000.000	**235.026.930**
	2	Wonocolo	7.080.000	2.589.107.600	0	**2.596.187.600**	1.079.278.730	1.219.968.440	349.035.000	120.422.150	301.000.000	**3.069.704.320**	666.915.604	105.000.000	**88.398.884**
	3	Hargomulyo	63.100.000	4.345.717.500	0	**4.408.817.500**	1.166.482.830	2.118.751.931	178.040.000	234.100.000	200.122.070	**3.897.496.831**	207.167.820	0	**718.488.489**
	4	Kedewan	14.700.000	5.212.725.600	0	**5.227.425.600**	927.798.691	3.625.753.407	214.206.300	17.525.000	254.800.000	**5.040.083.398**	348.361.040	0	**535.703.242**
	5	Beji	71.000.000	2.423.122.817	0	**2.494.122.817**	959.572.430	275.282.200	232.594.200	135.637.500	182.562.500	**1.785.648.830**	20.717.684	0	**729.191.671**
26	**GONDANG**														
	1	Pajeng	102.478.400	2.575.299.190	0	**2.677.777.590**	1.276.122.911	1.188.420.500	295.290.000	83.582.050	90.000.000	**2.933.415.461**	356.735.471	5.000.000	**96.097.600**
	2	Jari	31.000.000	3.472.259.869	0	**3.503.259.869**	1.222.075.169	1.663.422.730	494.060.900	17.900.000	100.800.000	**3.498.258.799**	0	5.000.000	**1.070**
	3	Pragelan	30.000.000	4.216.265.000	0	**4.246.265.000**	1.318.814.050	2.387.874.420	254.200.225	45.106.400	203.882.000	**4.209.877.095**	37.339.725	5.000.000	**68.727.630**
	4	Senganten	38.000.000	4.759.964.981	0	**4.797.964.981**	989.304.750	3.251.191.700	207.948.150	145.695.000	180.176.500	**4.774.316.100**	216.384.145	5.000.000	**235.033.026**
	5	Gondang	83.360.000	4.150.243.388	0	**4.233.603.388**	1.014.111.380	2.761.374.569	171.170.000	299.870.000	118.600.000	**4.365.125.949**	381.526.069	5.000.000	**245.003.508**
	6	Krondonan	50.000.000	4.762.168.800	0	**4.812.168.800**	1.046.204.523	3.607.622.212	221.162.000	3.400.000	247.503.000	**5.125.891.735**	330.167.165	0	**16.444.230**
	7	Sambongrejo	79.500.000	5.296.522.981	0	**5.376.022.981**	1.146.434.969	3.439.922.333	432.832.200	64.230.000	154.084.000	**5.237.503.502**	185.210.839	5.000.000	**318.730.318**
27	**SEKAR**														
	1	Deling	0	4.577.242.300	985.000	**4.578.227.300**	1.189.991.126	2.732.170.131	211.983.500	56.445.000	187.183.659	**4.377.773.416**	67.269.248	50.000.000	**217.723.132**
	2	Klino	67.928.400	4.150.166.000	0	**4.218.094.400**	1.144.779.540	2.425.086.800	221.964.831	172.920.000	115.200.000	**4.079.951.171**	4.776.588	130.000.000	**12.919.817**
	3	Sekar	36.000.000	2.990.819.200	0	**3.026.819.200**	1.544.808.931	1.137.449.232	157.745.837	25.000.000	161.726.140	**3.026.730.140**	5.940	0	**95.000**
	4	Miyono	48.756.750	4.930.471.322	2.750.000	**4.981.978.072**	1.372.204.731	3.186.475.987	155.174.625	97.190.500	175.755.310	**4.986.801.153**	35.452.838	0	**30.629.757**
	5	Bareng	13.786.750	6.052.791.968	15.110.992	**6.081.689.710**	1.131.425.040	4.216.335.949	406.154.850	0	207.849.250	**5.961.765.089**	3.563.882	100.000.000	**23.488.503**
	6	Bobol	46.017.500	5.918.785.572	10.502.000	**5.975.305.072**	1.423.434.260	3.956.155.460	171.720.000	25.000.000	293.302.500	**5.869.612.220**	17.843.220	5.000.000	**118.536.072**
28	**GAYAM**														
	1	Gayam	138.845.675	6.866.953.400	13.968.361	**7.019.767.436**	1.953.121.584	5.189.565.180	459.151.915	67.705.000	351.543.100	**8.021.086.779**	1.497.632.543	0	**496.313.200**
	2	Begadon	149.100.000	2.975.548.214	10.039.348	**3.134.687.562**	1.483.050.936	1.722.579.900	199.933.824	52.000.000	89.239.348	**3.546.804.008**	580.684.400	25.000.000	**143.567.954**
	3	Ringintunggal	111.822.000	2.859.889.500	2.500.000	**2.974.211.500**	927.073.780	1.339.624.700	224.305.470	245.096.500	110.402.250	**2.846.502.700**	413.711.200	50.000.000	**491.420.000**

LAMPIRAN 8

NO	KECAMATAN/ DESA	Pendapatan (Rp)			Jumlah APBDesa (Rp)	Belanja (Rp)					Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Surplus/ Defisit (Rp)
		PADesa	Dana Transfer	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga				
1	2	3	4	5	6= 3+4+5	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14	15=(6+13)-(12+14)
4	Mojodelik	150.270.000	6.720.295.800	11.036.299	**6.881.602.099**	1.506.839.508	3.451.631.738	262.310.832	326.418.308	198.738.100	**5.745.938.486**	255.259.386	25.000.000	**1.365.922.999**
5	Brabowan	96.840.000	2.910.200.914	0	**3.007.040.914**	1.088.188.134	1.807.149.438	253.720.190	148.528.300	77.000.000	**3.374.586.062**	367.545.140	-	**-8**
6	Bonorejo	134.581.000	3.035.358.414	16.707.813	**3.186.647.227**	1.323.069.617	1.602.835.706	208.734.733	172.598.113	82.800.000	**3.390.038.169**	734.463.980	50.000.000	**481.073.038**
7	Beged	87.076.200	3.085.791.600	0	**3.172.867.800**	1.298.663.964	1.319.660.341	308.023.915	93.671.700	121.661.280	**3.141.681.200**	0	0	**31.186.600**
8	Katur	379.609.000	3.694.322.260	5.455.827	**4.079.387.087**	1.498.284.497	2.405.222.100	174.426.400	46.324.000	137.040.000	**4.261.296.997**	728.726.461	0	**546.814.551**
9	Ngraho	392.000.000	3.224.681.600	6.375.000	**3.623.056.600**	1.937.105.400	1.151.969.500	292.200.000	91.781.700	140.000.000	**3.613.056.600**	5.000.000	5.000.000	**10.000.000**
10	Sudu	389.472.000	2.965.793.600	0	**3.355.265.600**	1.510.247.265	1.440.112.413	258.470.350	126.568.400	233.808.512	**3.569.206.940**	763.581.440	0	**549.640.100**
11	Cengungklung	142.740.000	2.721.669.514	0	**2.864.409.514**	1.007.092.042	1.880.894.263	239.594.720	117.212.500	128.800.000	**3.373.593.525**	617.423.903	40.000.000	**68.239.892**
12	Manukan	89.475.000	3.060.305.022	2.092.586	**3.151.872.608**	1.212.799.220	1.879.344.700	239.340.000	85.000.000	139.355.500	**3.555.839.420**	762.635.540	5.000.000	**353.668.728**
	Jumlah	**100.259.902.504**	**1.277.636.008.437**	**3.177.093.609**	**1.381.073.004.550**	**517.660.269.945**	**700.918.120.246**	**93.873.559.442**	**60.100.302.415**	**57.022.798.847**	**1.429.575.050.894**	**150.402.219.147**	**6.843.382.244**	**95.056.790.559**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NURUL AZIZAH

Bojonegoro, 9 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd

ADRIYANTO